



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Adapun tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui pelaksanaan dan kegiatan tahun 2021;
3. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

Informasi yang disediakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyangkut entitas dalam hal: Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan dan Arus Kas.

Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah serta penjelasan atas pos-pos Laporan Keuangan yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasi Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2021.



25. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- a. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional;
- b. Kebijakan Keuangan;
- c. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target.

BAB III Kebijakan Akuntansi

- a. Entitas Pelaporan;
- b. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- d. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

BAB IV Penjelasan Akun-Akun Laporan Keuangan

- a. Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 1) Pendapatan– LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Pembiayaan;
- b. Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)
 - 1) Pendapatan–LO;
 - 2) Beban;
- d. Penjelasan Akun-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- e. Penjelasan Akun-Akun Neraca;
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;

BAB V Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Gambaran Umum Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, visi Bupati dan Wakil Bupati periode masa bakti 2021-2026 adalah: “KABUPATEN LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”.

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh;
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas;
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas;
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik;
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat;
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya;

2.1.1 Kondisi Geografis

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur berada di sebelah Selatan garis khatulistiwa, tepatnya terletak diantara 2003'00'' – 3003'25'' Lintang Selatan dan 119028'56''- 121047'27' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² atau 11,14 % dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan secara administratif terdiri dari 11 Kecamatan, 124 Desa, dan 3 Kelurahan dengan ketinggian antara 3 sampai dengan 68 meter diatas permukaan laut. Kecamatan Towuti merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah terluas mencapai 1.820,48 km² atau sekitar 26,21 % dari luas wilayah Kabupaten Luwu Timur disusul Kecamatan Mangkutana seluas 1.300,96 km² atau sekitar 18,73 %. Adapun Luas Wilayah tiap Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa
dan Luas Wilayah Setiap Kecamatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase terhadap luas Kabupaten
1	Burau	18	-	256,23	3,69
2	Wotu	16	-	130,52	1,88
3	Tomoni	12	1	230,09	3,31
4	Tomoni Timur	8	-	43,91	0,63
5	Angkona	10	-	147,24	2,12
6	Malili	14	1	921,20	13,26
7	Towuti	18	-	1.820,48	26,21
8	Nuha	4	1	808,27	11,64
9	Wasuponda	6	-	1.244,00	17,91
10	Mangkutana	11	-	1.300,96	18,73
11	Kalaena	7	-	41,98	0,60
	Jumlah	124	3	6.944,88	100

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur

2.1.2 Kondisi Administrasi Pemerintahan

2.1.2.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah



Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 19 Dinas, 7 Badan, 2 Kantor, 11 Kecamatan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2021

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah
1	Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan
12	Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16	Dinas Perhubungan
17	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Dinas Pertanian
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26	Sekretariat Daerah
27	Sekretariat DPRD
28	Kecamatan Burau
29	Kecamatan Wotu
30	Kecamatan Tomoni
31	Kecamatan Mangkutana
32	Kecamatan Tomoni Timur
33	Kecamatan Kalaena
34	Kecamatan Angkona
35	Kecamatan Malili
36	Kecamatan Wasuponda
37	Kecamatan Towuti
38	Kecamatan Nuha
39	Inspektorat

Sumber: Profil Kabupaten Luwu Timur

2.1.2.2 Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 sebanyak 3.992 orang, sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021

Pangkat/Golongan/Ruang	Tahun 2021		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	0	0	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	2	1	3
3. I/C (Juru)	2	0	2
4. I/D (Juru Tingkat I)	4	1	5
Golongan I	8	2	10
5. II/A (Pengatur Muda)	31	4	35
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	63	32	95
7. II/C (Pengatur)	101	97	198
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	99	109	208
Golongan II	294	242	536
9. III/A (Penata Muda)	210	435	645
10. III/B (Penata Muda Tingkat I)	190	573	763
11. III/C (Penata)	218	471	689
12. III/D (Penata Tingkat I)	210	341	551
Golongan III	828	1820	2648
13. IV/A (Pembina)	178	220	398
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	179	188	367
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	25	7	32
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	1	0	1
17. IV/E (Pembina Utama)	0	0	0
Golongan IV	383	415	798
Jumlah	1.513	2.479	3.992

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur

2.1.3 Gambaran Umum Demografis

Penduduk Kabupaten Luwu Timur bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai jenis agama, suku dan ras. Jenis suku yang ada di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari suku Bugis, Jawa, Bali, Lombok, Pamona, Padoe, Makassar dan Toraja. Semua suku tersebut terdiri dari penganut agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu dan Budha. Walaupun struktur masyarakat cukup heterogen dan multi etnis dengan wilayah yang relatif luas dan berbatasan dengan dua wilayah provinsi yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat Kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yaitu 43 jiwa/km². Dimana Kecamatan yang paling padat adalah Tomoni Timur dengan kepadatan 308 jiwa/Km². Sedangkan Kecamatan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Wasuponda dan Kecamatan Mangkutana dengan kepadatan 17 jiwa/Km².

Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terlihat dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Luwu Timur sebesar 106,00 yang artinya bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Luwu Timur terdapat 106 laki-laki.

Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin terhadap rasio berdasarkan kepadatan penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin,
Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk
Tahun 2021

No	Kecamatan	Jenis Kelamin (Jiwa)		Jumlah	Sex Ratio (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	Burau	20.146	19.598	39.744	103,70	134
2	Wotu	16.057	15.932	31.989	100,70	255
3	Tomoni	14.791	14.153	28.944	103,40	115
4	Mangkutana	6.471	6.240	12.711	103,00	17
5	Tomoni Timur	12.764	12.084	24.848	104,40	308
6	Kalaena	20.042	18.699	38.741	100,30	287
7	Angkona	15.948	14.311	30.259	104,10	170
8	Malili	14.602	13.345	27.947	105,70	46
9	Wasuponda	14.895	13.450	28.345	112,30	17
10	Towuti	12.447	12.078	24.525	111,50	23
11	Nuha	5.843	5.777	11.620	114,30	29
Total		154.006	145.667	299.673	106,00	43

Sumber: BPS Kab. Luwu Timur

2.2 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2021 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:

- Tingkat Kemiskinan sebesar 6,94%
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,96%.
- Gini Ratio sebesar 0,405.
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,34
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 1,17%
- Tingkat Inflasi sebesar 0,65%
- Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp21.529.809.640.000,00;

2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis



kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Kab. Luwu Timur (%)	6,94	6,85	1,13
2	Kab. Luwu Timur (Ribu Orang)	20,99	20,82	0,81
3	Provinsi Sulawesi Selatan (%)	8,78	8,99	(2,33)
4	Nasional (%)	9,71	9,78	(0,71)
5	Peringkat Provinsi	5	4	(1)
6	Peringkat Nasional	180	133	35,33

Sumber: Badan Pusat Statistik

Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2021 sebesar 6,94% mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2020 persentase penduduk miskin sebesar 6,85%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur masih berada di bawah provinsi dan nasional namun dalam upaya untuk terus menekan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur, dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Pada Tahun 2020 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat keempat menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan dalam persentase jumlah penduduk miskin dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, dan Kota Pare-Pare. Pada Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan ke peringkat kelima dibawah Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Wajo. Pada tingkat Nasional, Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 berada pada peringkat 133 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan ke peringkat 180 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Tabel 2.6
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab. Luwu Timur	1.09	1.05	3,80
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	1.49	1.53	(2,61)
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1.67	1.61	3,72
4	Peringkat Provinsi	7	9	22,22
5	Peringkat Nasional	165	186	11,29

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebesar 1.61 mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 1.09 atau naik sebesar 3,80%. Tingkat kedalaman kemiskinan Kabupaten Luwu Timur berada diatas provinsi dan nasional. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-9 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 ke peringkat 7 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-186 dan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 ke peringkat 165 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.



Tabel 2.7
Tingkat Kearifan Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Tingkat Kearifan Kemiskinan Kab. Luwu Timur	0.26	0.24	8,33
2	Tingkat Kearifan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan	0.37	0.16	131,25
3	Tingkat Kearifan Kemiskinan Nasional	0.42	0.25	68,00
4	Peringkat Provinsi	8	9	11,11
5	Peringkat Nasional	193	210	8,10

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2020 sebesar 0.24 mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 0.26 atau naik sebesar 8,33%. Tingkat keparahan kemiskinan Kabupaten Luwu Timur masih diatas nasional dan provinsi. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-9 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 ke peringkat 8 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat ke-210 dan mengalami kenaikan pada Tahun 2021 ke peringkat 193 dari 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

2.2.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebesar 4,46%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/Turun (%)
		2021	2020	
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu Timur (%)	4,96	4,46	11,21
2	Tingkat Pengangguran Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5,72	6,31	(9,35)
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	7,07	(8,20)
4	Peringkat Provinsi	n.a	n.a	n.a
5	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,96%, sedangkan TPT pada Tahun 2020 adalah sebesar 4,46% atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Dengan demikian TPT Kabupaten Luwu Timur masih lebih rendah dibandingkan



TPT Provinsi Sulawesi Selatan dimana pada Tahun 2020 sebesar 6,31% dan Tahun 2021 sebesar 5,72% dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 7,07% pada Tahun 2020 dan 6,49% pada Tahun 2021.

2.2.3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi pencapaian Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 adalah sebesar 0,405 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Tingkat Kabupaten Luwu Timur	0,405	0,352	(15,06)
2	Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan	0,377	0,382	1,31
3	Tingkat Nasional	0,382	0,391	2,30
3	Peringkat Provinsi	24	22	(9,09)
4	Peringkat Nasional	n.a	n.a	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Luwu Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,405. Angka ini naik 0 jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2020 yang sebesar 0,352 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi dan Nasional Tahun 2021. Gini Ratio Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sulawesi Selatan dan Gini Ratio Nasional Tahun 2021. Pada Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur berada pada peringkat 24 atau mengalami penurunan peringkat bila dibandingkan pada Tahun 2020 dari 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:



- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebesar 73,34 poin dengan kategori tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur

No.	IPM (Tingkat)	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Kabupaten Luwu Timur	73,34	73,22	0,16
2	Provinsi Sulawesi Selatan	72,24	71,93	0,43
3	Indonesia/Nasional	72,29	71,94	0,49
4	Peringkat Provinsi	4	4	Tetap
5	Peringkat Nasional	125	120	(4,17)

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebesar 73,34 poin, dibandingkan Tahun 2020 sebesar 73,22 poin mengalami kenaikan sebesar 0,16%. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan/atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. AHH mencapai 70,63 tahun pada Tahun 2021 lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan AHH Tahun 2020 sebesar 70,53 tahun. Kemudian, HLS selama 12,84 tahun lebih lama 0,01 tahun dibandingkan dengan HLS tahun 2020 sebesar 12,83 tahun, RLS tahun 2021 selama 8,81 tahun lebih lama 0,01 tahun dibandingkan RLS tahun 2020 selama 8,80 tahun. Sementara, Standar Hidup, PNB per kapita per tahun sebesar Rp12.886.000,00.

IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berada pada urutan 4 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan berada pada urutan 125 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 514 Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia.

2.2.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.



Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur				
Tahun	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Peringkat Provinsi	Peringkat Nasional (Indonesia)
2017	15.318,72 ^{*)}	3,07	24	488
2018	15.837,80 ^{*)}	3,44	22	479
2019	16.022,95 ^{*)}	1,17	24	n.a
2020	16.256,90 ^{*)}	n.a	n.a	n.a
2021	n.a	n.a	n.a	n.a
Provinsi Sulawesi Selatan				
2019	330.506,38 ^{*)}	6,92	-	-
2020	328.192,82 ^{*)}	-1,55	-	-
2021	n.a	n.a	n.a	n.a
Nasional				
2019	10.949.037,80 ^{*)}	5,0	-	-
2020	10.722.442,70 ^{*)}	-3,15	-	-
2021	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

*) Miliar Rupiah

Selama kurun waktu Tahun 2017-2019 perekonomian Kabupaten Luwu Timur mengalami peningkatan rata-rata 2,54%. Pada periode Tahun 2017-2018 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 3,39% dan pada kurun waktu Tahun 2018-2019 pertumbuhan perekonomian Kabupaten Luwu Timur sebesar 1,17%. Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kabupaten Luwu Timur menempati urutan 24 dari laju pertumbuhan kota atau kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

2.2.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten/Kota dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, **(i) inflasi ringan** (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. **(ii) Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, **(iii) Inflasi Berat** (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan **(iv) Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 adalah sebesar 0,65% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.12
Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur

No.	Uraian	Tahun		Naik/(Turun) (%)
		2021	2020	
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Luwu Timur (%)	0,65	-0,01	0,66
2	Tingkat Inflasi Provinsi Sulawesi Selatan (%)	0,92	0,15	0,77
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,56	1,68	1,12
4	Peringkat Provinsi	1	2	1
5	Peringkat Nasional	14	17	3

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik.

Tingkat inflasi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 menunjukkan angka sebesar 0,65%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2020 adalah sebesar -0,01% atau naik 0,66% dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2020. Tingkat inflasi Tahun 2021 Kabupaten Luwu Timur masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 0,92 dan lebih tinggi dari tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,56%.

2.2.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Luwu Timur

Struktur perekonomian Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(juta rupiah)

Kategori PDRB	Tahun		
	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4 941 165,26	5 005 805,79	5 157 679,98
B. Pertambangan dan Penggalan	9 741 532,83	9 502 349,45	9 677 497,80
C. Industri Pengolahan	691 960,30	801 193,69	790 884,91
D. Pengadaan Listrik dan Gas	9 721,23	10 218,18	10 595,38
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1 344,96	1 471,06	1 622,29
F. Konstruksi	1 885 660,92	2 192 080,83	2 269 461,28
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	775 841,05	882 665,06	883 234,36
H. Transportasi dan Pergudangan	146 264,58	164 428,41	147 146,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	41 407,97	46 132,66	41 372,10
J. Informasi dan Komunikasi	288 236,83	325 470,79	362 769,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	189 925,04	210 775,67	221 042,82
L. Real Estate	465 327,84	509 270,08	542 983,75
M,N. Jasa Perusahaan	10 755,23	12 096,34	11 270,16
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	517 747,43	566 441,86	573 813,91
P. Jasa Pendidikan	409 500,42	454 545,46	486 909,10
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	251 514,23	280 438,36	325 953,51
R,S,T,U. Jasa Lainnya	25 987,83	28 836,10	25 571,85
Produk Domestik Regional Bruto	20 393 893,93	20 994 219,79	21 529 809,64

Sumber Dokumen: BPS Luwu Timur



2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Indikator-Indikator yang Digunakan Untuk Mengukur Keberhasilan Pencapaian Program/Kegiatan dan Kinerja APBD.

Perhitungan APBD merupakan dokumen Pertanggungjawaban pemerintah Daerah mengenai Pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran yang telah ditutup, oleh karenanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD mencerminkan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang mendapat perhatian, disamping merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan dan perkembangan suatu daerah.

Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah, ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa APBD Tahun Anggaran 2021 telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, dimana anggaran daerah baik penerimaan maupun belanja daerah yang diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.
3. Disiplin Anggaran beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain :
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi;
 - b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD;
 - c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan yang dicapai Pelaksanaan Program/Kegiatan APBD.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Pelaksanaan APBD Berdasarkan Indikator-Indikator yang telah ditetapkan

Pencapaian kinerja program/kegiatan dalam APBD dapat diukur dengan tercapainya Pertanggungjawaban Keuangan APBD Tahun Anggaran 2021. Indikator-indikator yang dapat dicapai telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan menetapkan



capaian kinerja berdasarkan program/kegiatan dalam pelaksanaan APBD yang dapat dilihat pada Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dimana dalam pelaksanaannya mengalami permasalahan-permasalahan yang dapat diselesaikan sehingga kinerja SKPD dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat diukur.

Dalam menggerakkan fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan pelayanan publik, maka diperlukan adanya upaya untuk meningkatkan sumber - sumber pendapatan daerah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan. Program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur tertuang dalam Renstra BPKD Kabupaten Luwu Timur.

2.3.3 Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3.3.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Untuk mendukung tercapainya arah kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah perlu dilakukan upaya dengan memaksimalkan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui:

1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Mendorong berkembangnya badan-badan usaha milik daerah dalam rangka peningkatan penerimaan daerah;
3. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar perhitungan Pendapatan Daerah;
4. Mendorong pihak swasta untuk melakukan kegiatan usaha dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan SDM Aparatur pengelola pendapatan daerah;
6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan secara berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan instansi pengelola PAD;
7. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah;
8. Melakukan Verifikasi Basis Data PBB-P2.

2.3.3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan APBD dianggarkan sebesar 1.498.407.798.338,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.549.649.873.412,52 atau 103,42%.. Rincian rencana dan realisasi pendapatan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
4	PENDAPATAN	1.498.407.798.338,00	1.549.649.873.412,52	103,42	1.495.670.435.578,65
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	301.854.473.673,00	305.929.495.676,52	101,35	329.220.137.283,45
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	102,43	192.720.735.828,60
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	5.268.982.400,00	4.246.277.325,50	80,59	4.505.935.086,09
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.079.184.191,00	22.896.489.793,00	103,70	23.835.212.109,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	95.729.307.082,00	95.673.630.582,38	99,94	108.158.254.259,76
4.2	PENDAPATAN	1.099.435.740.491,00	1.133.306.677.695,00	103,08	1.051.666.102.557,20



No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
	TRANSFER				
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	855.829.163.491,00	867.649.222.297,00	101,38	766.923.342.007,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	117.539.647.000,00	117.263.644.446,00	99,77	115.448.707.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	126.066.930.000,00	148.393.810.952,00	117,71	169.294.053.550,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.117.584.174,00	110.413.700.041,00	113,69	114.784.195.738,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	79.440.084.174,00	92.833.379.152,00	116,86	114.784.195.738,00
4.3.1	Pendapatan Lainnya	17.677.500.000,00	17.580.320.889,00	99,45	0,00

2.3.3.3 Permasalahan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu;
2. Penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan PAD masih rendah dan sarana pelayanan belum memadai;
3. Belum efektifnya kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam pemungutan PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Pemerintah Provinsi belum tepat waktu dalam melakukan transfer dana bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
5. Capaian realisasi APBN yang rendah berpengaruh langsung pada penerimaan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sehingga capaian realisasinya juga rendah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, maka perlu dilakukan kegiatan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak secara tepat waktu melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi baik secara umum maupun secara individual, penegakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan, serta peningkatan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
3. Meningkatkan efektifitas koordinasi dan rekonsiliasi dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sambil mendorong perbaikan tata cara penetapan target di tingkat Pemerintah Daerah, khusus bagi penerimaan yang bersumber dari Dana Transfer;
4. Meningkatkan pengawasan internal, sambil menyiapkan regulasi dan perangkat yang diperlukan guna pelaksanaan pemungutan PAD secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah;
5. Peningkatan Sumber daya manusia para pengelola pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Efektivitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
7. Mengidentifikasi obyek PAD yang ada dan menindaklanjuti untuk sumber penerimaan;
8. Mendorong percepatan pengelolaan potensi daerah terutama sektor pariwisata sehingga dapat mendatangkan investor, menyerap tenaga kerja, terbukanya lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat;



9. Perlu peningkatan efektifitas pelaksanaannya melalui koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat serta pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah;
10. Perlu melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait Transfer Dana Bagi Hasil pajak dari Pemerintah Provinsi agar penyetoran Dana Bagi Hasil pajak tepat waktu serta dibuatkan Peraturan atau regulasi terkait mekanisme penyaluran Dana Bagi Hasil ke Pemerintah Daerah.

2.3.4 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada Pembangunan dan Pelayanan Pendidikan, Pembangunan dan Pelayanan Kesehatan, Pengembangan Kebudayaan Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Penataan Desa dan Pengembangan Investasi Daerah.

2.3.4.1 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD. Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi dengan permasalahannya yang bersifat mendasar yang meliputi empat bidang prioritas yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pembangunan, untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, agar belanja daerah lebih efektif dan memberikan dampak positif pada masyarakat, maka dalam pengelolaan belanja daerah berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Transparansi**
APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat karena ada tolok ukur kinerja yang harus diselesaikan/dilakukan dalam setiap program kegiatan pekerjaan;
2. **Akuntabilitas**
Syarat utama untuk menciptakan pemerintahan yang Good Governance (pemerintahan yang baik), bersih dan bertanggungjawab;
3. **Disiplin Anggaran**
Dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan publik, olehnya itu anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu dan adil;
4. **Keadilan Anggaran**
Yakni norma yang menunjukkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
5. **Efisiensi dan Efektifitas Anggaran**
Yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan atau memanfaatkan dana seefisien mungkin.

2.3.4.2 Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran belanja dalam APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp1.366.652.780.892,00 dan terealisasi sebesar Rp1.304.323.791.910,40 atau 95,44% sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
5	BELANJA	1.366.652.780.892,00	1.304.324.041.910,40	95,44	1.224.717.801.721,05
5.1	BELANJA OPERASI	1.069.471.694.897,00	1.020.460.843.809,88	95,42	986.043.221.454,00
5.1.1	Belanja Pegawai	463.377.393.476,00	450.113.688.581,00	97,14	407.693.545.053,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.663.079.397,00	490.019.941.161,62	94,66	494.662.638.352,00
5.1.4	Belanja Subsidi	200.000.000,00	199.095.000,00	99,55	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	86.703.504.524,00	78.663.751.067,26	90,73	69.606.738.049,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.527.717.500,00	1.464.368.000,00	95,85	14.080.300.000,00
5.2	BELANJA MODAL	294.681.085.995,00	282.411.798.100,52	95,84	236.966.048.167,05
5.2.1	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	571.282.000,00	95,21	486.845.575,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.911.314.561,00	52.160.400.224,13	93,29	48.052.975.854,43
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.647.671.037,00	97.920.824.771,06	98,27	60.909.470.044,15
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.270.770.397,00	131.513.051.105,33	95,11	127.319.574.693,47
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	251.330.000,00	246.240.000,00	97,97	197.182.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	58,06	1.708.532.100,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	58,06	1.708.532.100,00

2.3.4.3 Permasalahan dan Solusi Belanja Daerah

Permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yaitu:

1. Banyaknya program kegiatan yang dibuat atau dianggarkan oleh setiap SKPD tanpa memperhitungkan kemampuan SDM aparatur SKPD;
2. Masih kurangnya kualitas SDM pengelolaan Keuangan pada setiap SKPD, yang mengakibatkan tata kelola pengelolaan keuangan SKPD belum maksimal.

Solusi untuk mengatasi permasalahan yang timbul, maka perlu dilakukan:

1. Pelaksanaan APBD diupayakan dilaksanakan secara konsisten sesuai perencanaan yang telah ditetapkan oleh masing-masing SKPD;
2. Pengendalian dan pengalokasian jumlah program dan kegiatan perlu memperhitungkan jumlah aparatur pada SKPD masing-masing;
3. Perlu dilakukan sosialisasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di setiap SKPD, sehingga kualitas pengelolaan keuangan SKPD kian meningkat.

2.3.5 Pengelolaan Transfer

Transfer merupakan pengeluaran uang melalui APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 kepada pemerintahan desa. Total Anggaran Transfer pada Tahun 2021 adalah sebesar Rp198.662.314.090,00 dengan realisasi sebesar Rp198.386.274.819,00 atau 99,86%, terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan.

Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Transfer Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
6	TRANSFER	198.662.314.090,00	198.386.274.819,00	99,86	212.247.177.067,00
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	19.722.667.090,00	19.722.629.773,00	100,00	17.262.101.969,00
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	19.272.073.582,00	19.272.063.361,00	100,00	16.843.320.838,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	450.593.508,00	450.566.412,00	99,99	418.781.131,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	99,85	194.985.075.098,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	99,85	194.388.707.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	596.368.098,00

2.3.6 Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	100,00	26.201.839.853,65
7.1.1	Penggunaan SiLPA	72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	100,00	26.201.839.853,65
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	100,00	12.000.000.000,00
7.2.8	Pembayaran Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	66.907.296.644,00	66.907.296.644,25	100,00	14.201.839.853,65

2.4 Anggaran dan Realisasi APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 berdasarkan urusan, program dan kegiatan dialokasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan dalam Tahun Anggaran 2021 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	40.163.511.580,00
2.	Dinas Kesehatan	21.207.500.000,00	22.458.821.534,20	105,90	21.908.906.789,58
3.	RSUD I La Galigo	82.000.000.000,00	80.333.938.433,00	114,29	80.755.795.785,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	129.500.000,00	166.895.599,00	77,61	73.725.000,00
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	364.750.000,00	104.295.000,00	63,38	190.150.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Dinas Perhubungan	447.080.000,00	289.968.500,00	86,87	288.485.000,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	602.000.000,00	602.450.000,00	100,02	602.130.000,00
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60.000.000,00	63.533.594,00	105,89	0,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.300.000.000,00	1.904.415.131,00	114,89	1.953.062.070,00
20.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Dinas Pertanian	200.000.000,00	276.623.000,00	351,81	404.576.000,00
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.389.961.315.938,00	1.442.627.224.026,82	103,79	1.348.361.081.337,98
25.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Sekretariat Daerah	107.107.900,00	111.229.000,00	168,15	114.129.000,00
27.	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kecamatan Burau	75.000.000,00	46.310.137,00	123,52	61.759.705,00
29.	Kecamatan Wotu	87.600.000,00	54.622.820,00	123,73	77.456.407,00
30.	Kecamatan Tomoni	166.000.000,00	70.721.075,00	71,23	81.913.430,00
31.	Kecamatan Mangkutana	60.000.000,00	72.604.953,00	103,54	82.833.335,00
32.	Kecamatan Tomoni Timur	100.000.000,00	45.313.018,00	81,07	81.074.949,05
33.	Kecamatan Kalaena	50.000.000,00	39.070.095,00	104,58	36.601.440,00
34.	Kecamatan Angkona	50.000.000,00	51.559.691,00	133,54	46.737.279,00
35.	Kecamatan Malili	219.864.500,00	150.532.207,00	95,13	184.283.730,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
36.	Kecamatan Wasuponda	45.000.000,00	30.469.840,00	63,93	22.377.137,00
37.	Kecamatan Towuti	135.080.000,00	115.660.033,50	112,33	146.122.653,04
38.	Kecamatan Nuha	40.000.000,00	33.615.725,00	84,31	33.722.951,00
39.	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00

Sedangkan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021 masing-masing SKPD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Dinas Pendidikan	324.036.818.532,00	325.886.160.077,00	100,579	317.428.693.396,00
2.	Dinas Kesehatan	240.068.640.010,00	228.717.112.289,39	95,27	213.150.283.098,55
3.	RSUD I La Galigo	185.599.891.778,00	181.221.027.691,92	97,64	125.528.007.852,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	169.881.608.670,00	158.381.875.011,91	93,23	167.600.513.262,97
5.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	41.119.518.770,00	39.039.429.548,38	94,94	24.029.184.580,34
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	17.304.754.022,00	16.945.145.344,00	97,92	15.317.509.245,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.915.970.761,00	4.309.265.708,20	87,66	4.196.365.178,33
8.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.747.538.839,00	3.348.083.314,00	89,34	2.039.992.753,00
9.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.535.158.231,00	10.209.507.318,00	96,90	7.044.064.014,00
10.	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	5.929.349.740,00	5.680.208.517,00	95,80	5.050.311.758,00
11.	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	14.636.444.442,00	14.452.549.525,42	98,74	10.510.542.758,39
12.	Dinas Lingkungan Hidup	7.542.685.624,00	7.275.724.384,00	96,46	7.494.175.471,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.864.252.911,00	5.626.994.939,00	95,95	4.565.157.236,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.915.948.589,00	9.471.621.706,00	95,52	4.520.170.679,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.630.845.805,00	8.254.686.783,00	95,64	8.278.206.195,00
16.	Dinas Perhubungan	11.622.541.986,00	11.392.054.925,01	98,02	6.906.052.998,14
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.953.467.939,00	8.299.135.319,00	92,69	6.831.145.360,00
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.810.707.405,00	6.648.669.027,00	97,62	6.191.057.306,40
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.613.963.206,00	4.245.453.340,00	92,01	3.364.089.732,00
20.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	19.609.070.615,00	18.071.297.765,16	92,16	17.204.927.744,82
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	14.256.503.784,00	14.205.535.906,00	99,64	3.167.060.094,00
22.	Dinas Pertanian	54.783.463.412,00	48.563.194.531,00	88,65	37.678.996.845,00
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.492.167.580,00	7.729.437.180,00	81,43	6.306.109.452,00
24.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	39.647.680.983,00	32.997.513.863,03	83,23	326.255.250.261,00
25.	PPKD	201.162.314.090,00	199.837.674.819,00	99,34	0,00
26.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.215.272.305,00	11.655.050.271,00	95,41	9.344.985.000,00
27.	Sekretariat Daerah	49.980.520.748,00	43.921.549.714,00	87,88	27.685.036.503,40



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
28.	Sekretariat DPRD	34.800.925.390,00	33.136.807.586,00	95,22	29.491.626.380,00
29.	Kecamatan Burau	3.119.381.489,00	3.018.540.330,00	96,77	2.706.188.718,00
30.	Kecamatan Wotu	3.123.813.255,00	2.834.536.140,00	90,74	2.713.788.193,00
31.	Kecamatan Tomoni	4.340.526.537,00	4.314.989.497,00	99,41	4.184.991.950,00
32.	Kecamatan Mangkutana	3.012.396.820,00	2.946.110.507,00	97,80	2.358.202.197,00
33.	Kecamatan Tomoni Timur	2.340.020.270,00	2.175.369.035,00	92,96	1.949.833.324,00
34.	Kecamatan Kalaena	2.479.196.707,00	2.374.863.964,00	95,79	2.201.083.077,00
35.	Kecamatan Angkona	2.766.473.523,00	2.561.747.784,00	92,60	2.209.164.742,00
36.	Kecamatan Malili	4.319.696.654,00	3.879.650.946,00	89,81	3.854.801.852,24
37.	Kecamatan Wasuponda	2.560.633.575,00	2.457.138.150,00	95,96	2.142.970.542,00
38.	Kecamatan Towuti	3.756.646.906,00	3.644.119.884,00	97,00	3.108.289.368,00
39.	Kecamatan Nuha	4.081.873.098,00	3.918.596.594,00	96,00	3.707.450.550,80
40.	Inspektorat	11.736.409.981,00	9.380.629.965,00	79,92	8.653.030.185,00



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan PPKD selaku entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Dalam catatan atas laporan keuangan ini dijelaskan penyusunan APBD tahun 2021 yang terkait dengan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah. Prinsip utama yang digunakan dalam penetapan arah kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah adalah optimasi penerimaan dan efektifitas belanja daerah ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya over estimasi yang dapat memicu keinginan membelanjakan dalam ukuran yang lebih dari kemampuan fiskal daerah.

3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah yaitu basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Tujuan dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, disusunlah laporan keuangan untuk menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (LPSAL);
3. Neraca;



4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
7. Catatan atas laporan keuangan (CaLK);

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan.

3.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 adalah basis akrual. Dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan saldo Akun-akun tahun 2021 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah.

Standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Diawali dengan penetapan tujuan pelaporan keuangan. Diikuti dengan penjelasan karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang membuat informasi itu bermanfaat. Selanjutnya unsur-unsur laporan keuangan didefinisikan. Berikutnya dijelaskan pedoman operasi yang lebih rinci yaitu asumsi-asumsi dan prinsip-prinsip. Kerangka konseptual juga mengakui adanya kendala dalam lingkungan pelaporan keuangan.

1. Tujuan kebijakan akuntansi pemerintah daerah adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
2. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
3. Dalam hal terjadi pertentangan antara Kerangka Konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini;



4. Kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap Kerangka Konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan;
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode;
7. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh yaitu:

1. Telah dilaksanakannya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Nomor 43 tahun 2015;
2. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 43 tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
3. Pengakuan belanja ke dalam aset sudah meliputi nilai belanja modal dan mencakup belanja lain yang dapat dikapitalisasi ke dalam belanja modal sampai dengan dapat berfungsinya aset yang bersangkutan. Dalam satu kegiatan yang terdiri dari beberapa pos pengadaan barang dan jasa, maka biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dibagi secara proporsional ke dalam masing-masing aset;
4. Penyusunan laporan keuangan dilakukan dengan konsolidasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk penyusunan laporan keuangan sampai dengan Tahun 2021 dilakukan oleh Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai entitas pelaporan dengan melakukan rekonsiliasi data dengan SKPD yang pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran dilakukan rekonsiliasi dengan masing-masing SKPD, sedangkan penambahan aset selama Tahun 2021 direkonsiliasi dengan laporan penambahan aset yang disampaikan oleh masing-masing SKPD;
2. Untuk pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2021 dilakukan penyesuaian oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas hasil koordinasi dengan masing-masing SKPD sebagai pengguna Anggaran/Barang ditambah dengan nilai perolehan Tahun 2019 yang berasal dari pengadaan Aset (Belanja Modal) dan hasil pendataan baru oleh Bidang Aset terhadap masing-masing SKPD.

3.5 Penjelasan Kebijakan Akuntansi

3.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan dan entitas akuntansi secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang lingkup kebijakan akuntansi Laporan Realisasi Anggaran menetapkan

1. Kebijakan akuntansi ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang



disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.

2. Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan dan entitas akuntansi terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode berkenaan. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan sumber daya ekonomi:

1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA adalah sebagai berikut: Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi Pendapatan-LRA.

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam kriteria pengakuan Pendapatan-LRA, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos Pendapatan-LRA tersebut akan mengalir ke Pemerintah Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah daerah. Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan secara langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, diakui sebagai pendapatan-LRA dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada Bendahara Umum Daerah.

Pendapatan kas yang diterima dan digunakan secara langsung oleh SKPD adalah hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas. Penggunaan secara langsung tersebut diatur dalam ketentuan Antara pemberi hibah dengan SKPD penerima hibah. Untuk dapat diakui sebagai pendapatan-LRA, hibah dalam bentuk kas yang diterima oleh SKPD dilaporkan kepada Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LRA yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan-LRA daerah;



4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Akuntansi Pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen Pemerintah Daerah.

3.5.1.2 Belanja

Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja memiliki beberapa karakteristik yaitu: terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, pengeluaran tersebut mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan pembayaran yang dilakukan tidak akan dikembalikan kepada pemerintah daerah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Pada paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis belanja.

3.5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri dari:

3.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam belanja pegawai adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai serta pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pengadaan/penambahan aset tetap.



3.5.1.2.1.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja Barang dapat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu:

- a. Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian;
- b. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan;
- c. Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan aset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat di kategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

3.5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

3.5.1.2.1.4 Subsidi

Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta.

3.5.1.2.1.5 Hibah

Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.



3.5.1.2.1.6 Bantuan sosial

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain belanja bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial juga diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai yang manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan penyusunan laporan akhir tahun belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap lainnya.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization threshold*) yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:

1. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
2. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
3. Bertambah volume, dan/atau;
4. Bertambah kapasitas produksi.

Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai bruto perolehan dan hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

3.5.1.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

3.5.2 Neraca



Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

3.5.2.1 Aset

3.5.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki, untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar terdiri dari Kas di kas daerah, kas di bendahara pengeluaran, kas di bendahara penerimaan, kas di BLUD, setara kas (deposito), Kas di bendahara FKTP, Kas di bendahara BOS, Piutang, Belanja dibayar di muka, dan Persediaan.

3.5.2.1.1.1 Piutang

Kebijakan Akuntansi Piutang ini adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk piutang dan informasi lainnya yang dianggap perlu disajikan dalam laporan keuangan.

Karakteristik utama piutang adalah pemerintah daerah akan menerima pembayaran dimasa akan datang sebagai akibat transaksi masa saat ini dan/atau dimasa lalu atau akibat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

1. Piutang pendapatan daerah merupakan piutang yang timbul dari tunggakan pungutan pendapatan. Pendapatan Pemerintah Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah adalah:
 - a. Piutang Pajak;
 - b. Piutang Retribusi Daerah;
 - c. Piutang Pendapatan Daerah Lainnya;
2. Perikatan Piutang merupakan piutang yang timbul dari berbagai perikatan antara instansi Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, seperti pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa, dan kemitraan. Piutang perikatan timbul karena :
 - a. Pemberian Pinjaman;
 - b. Jual beli;
 - c. Kemitraan;
 - d. Pemberian Fasilitas/Jasa;
 - e. Transaksi Dibayar Dimuka.
3. Piutang transfer antar pemerintahan merupakan piutang yang timbul dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ini dapat berupa transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun antar pemerintah kabupaten/kota. Piutang transfer antar pemerintah terdiri dari:
 - a. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak;
 - b. Piutang Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;
 - c. Piutang Dana Alokasi Umum;
 - d. Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - e. Piutang Dana Otonomi Khusus;
 - f. Piutang Dana Penyesuaian;
 - g. Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi;



- h. Piutang Bagi Hasil Lainnya Provinsi;
 - i. Piutang transfer lainnya;
 - j. Piutang Transfer antar Daerah;
 - k. Piutang Kelebihan Transfer;
4. Piutang atas kerugian daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh atasan langsung kepada orang, pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.

Setiap entitas mengungkapkan setiap pos piutang yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima pembayarannya dalam waktu 12 bulan dan lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo piutang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan kolektifibilitas suatu entitas. Informasi tentang tanggal penerimaan piutang seperti piutang yang timbul dari pemberian pinjaman dan piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi juga bermanfaat untuk mengetahui piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar atau piutang jangka panjang.

Suatu piutang diklasifikasikan sebagai piutang lancar jika diharapkan tertagih dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai piutang jangka panjang yang disajikan pada aset lainnya.

Piutang lancar dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa piutang lancar, seperti piutang pajak daerah piutang transfer pemerintah atau utang piutang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi merupakan suatu bagian yang diharapkan akan menambah kas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan piutang jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; dan
2. Kreditur bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) piutang tersebut atas dasar jangka panjang; dan
3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap piutang yang dikeluarkan dari piutang lancar sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa piutang yang berasal dari pungutan pendapatan daerah, secara garis besar terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi, piutang pendapatan daerah lainnya.

Untuk dapat diakui sebagai piutang yang berasal dari pungutan pendapatan harus dipenuhi kriteria:

1. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
2. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:



1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. Jumlah piutang dapat diukur;
3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
4. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran yang ditandai dengan penerbitan peraturan mengenai kurang salur, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAU.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur DAK.

Piutang Dana Otonomi Khusus (OTSUS) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur Dana Otonomi Khusus.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi Pemerintah Daerah jika Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu atau peraturan yang menyatakan kurang salur dana transfer lainnya.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian Pemerintah Daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan penggolongan piutang berdasarkan kualitas piutang. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

1. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
2. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
3. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
4. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

Kualitas untuk tiap jenis piutang ditentukan berdasarkan jenis piutang berikut ini:



1. Piutang Pajak Daerah;
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 tahun sampai dengan 2 tahun;
 - c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun; dan
 - d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 5 tahun dan/atau kurang dari 5 tahun apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
2. Piutang Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila umur piutang kurang dari 1 bulan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan;
 - c. Kualitas diragukan apabila umur piutang lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan; dan
 - d. Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 bulan dan/atau kurang dari 12 bulan apabila memenuhi salah satu syarat berikut ini :
 - 1) Wajib retribusi tidak diketahui keberadaannya;
 - 2) Wajib retribusi bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - 3) Wajib retribusi mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak memiliki mata pencaharian.
3. Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - a. Kualitas lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
 - b. Kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama diterbitkan;
 - 1) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua diterbitkan; dan
 - 2) Piutang selain Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan kualitas kurang lancar apabila piutang belum dilunasi sampai dengan 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga diterbitkan dan/atau memenuhi salah satu syarat berikut ini:
 - a) Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara;
 - b) Debitur tidak diketahui keberadaannya;
 - c) Debitur bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) Debitur mengalami musibah (*force majeure*) sehingga usahanya tidak beroperasi lagi dan/atau tidak dapat mencari nafkah.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi Ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.



Penghapusan tagihan piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapusan tagihan mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Aset adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Apabila pemerintah menerbitkan suatu keputusan penghapusan atau pembebasan bayar bagi debitur, tetapi tidak melakukan hapus-buku piutang, berarti akan menyajikan neraca yang lebih saji (*overstated*), sehingga tidak menyajikan informasi secara andal.

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

3.5.2.1.1.2 Persediaan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tentang Akuntansi Persediaan ini diterapkan dalam penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum oleh seluruh entitas Pemerintah Daerah tidak termasuk perusahaan daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:

1. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu akun konstruksi dalam pengerjaan; dan
2. Instrumen keuangan. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi persediaan pada entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang meliputi:
 - a. Definisi,
 - b. Pengakuan
 - c. Pengukuran, dan
 - d. Pengungkapan.

Pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

3.5.2.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari Investasi permanen dan Investasi non permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, artinya investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali Investasi permanen meliputi (1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan (2) Investasi



permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

3.5.2.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat yang lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Masalah utama akuntansi untuk aset tetap adalah saat pengakuan aset, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap.

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan untuk seluruh unit Pemerintah Daerah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Kebijakan Akuntansi lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Kebijakan Akuntansi ini tidak diterapkan untuk:

1. Hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*regenerative natural resources*); dan
2. Kuasa pertambangan, eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, dan sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui (*non-regenerative natural resources*).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:

1. Tanah;
2. Peralatan dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
5. Aset Tetap Lainnya; dan
6. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
6. Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Nilai satuan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau aset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya.



Tabel 3.1
Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap/Aset Lainnya

No.	Jenis Aset Tetap	Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Aset Lainnya
2	Peralatan dan Mesin, yang terdiri atas :	
2.1	Alat Besar	10.000.000,00
2.2	Alat Angkutan	5.000.000,00
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	300.000,00
2.4	Alat Pertanian	5.000.000,00
2.5	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	300.000,00
2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	300.000,00
2.7	Alat Kedokteran dan kesehatan	300.000,00
2.8	Alat Laboratorium	300.000,00
2.9	Alat Persenjataan	300.000,00
2.10	Komputer	300.000,00
2.11	Alat Eksplorasi	300.000,00
2.12	Alat Pengeboran	300.000,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	300.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	300.000,00
2.15	Alat Keselamatan Kerja	300.000,00
2.16	Alat Peraga	300.000,00
2.17	Peralatan Proses / Produksi	300.000,00
2.18	Rambu-rambu	300.000,00
2.19	Peralatan olah raga	300.000,00
3	Bangunan dan Gedung, yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000,00
3.2	Monumen	20.000.000,00
3.3	Bangunan Menara	20.000.000,00
3.4	Tugu Titik Kontrol / Pasti	20.000.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
4.1	Jalan	50.000.000,00
4.2	Jembatan	50.000.000,00
4.3	Bangunan Air	10.000.000,00
4.4	Instalasi	1.000.000,00
4.5	Jaringan	1.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000,00
5.2	Barang bercorak Kesenian / Kebudayaan/ Olahraga	300.000,00
5.3	Hewan	500.000,00
5.4	Biota Perairan	500.000,00
5.5	Tanaman	500.000,00
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000,00
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	15.000.000,00
6	Aset tetap selain yang disebutkan diatas	300.000,00

Batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) yang ditetapkan di atas untuk aset tetap atau aset lainnya atau khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*).

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya yaitu Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki;
2. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset



lainnya.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m². Contoh: OPD merencanakan untuk menganggarkan untuk perbaikan kantor dengan memperbaiki atapnya yang sering bocor, pengecatan, penggantian ban mobil dinas A, ganti oli dan servis mobil A, serta *overhaul* mobil B. Rencananya, atap kantor yang terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp 20.000.000,00. Pengecatan dengan cat kualitas nomor 1 Dulux Rp15.000.000,00-. Ganti empat ban Rp2.000.000,00 servis dan ganti oli Rp750.000,00 dan *overhaul* Rp6.500.000,00. Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian atap kantor perlu dilakukan analisis apakah pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai Belanja Modal atau Belanja Operasional. Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru dapat menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki. Demikian juga kriteria kedua, pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 pengecatan tidak akan menambah masa manfaat, umur, dan kapasitas, berapa pun nilai pengecatan. Ganti ban sama sehingga masuk klasifikasi Belanja Barang. Sedangkan *overhaul* akan menambah umur mesin mobil, masuk klasifikasi Belanja Modal.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomis masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.



Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima Pemerintah Daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 2, bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara



lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam penyelesaian, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi mengenai Aset Tetap ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada Kebijakan Akuntansi mengenai Konstruksi dalam Pengerjaan.

Konstruksi dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke dalam aset tetap.

3.5.2.1.3.1 Pertukaran Aset (*Exchanges of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.



Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit Pemerintah Daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemerintah Daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan-LO Pemerintah Daerah dalam laporan operasional.

3.5.2.1.3.2 Penyusutan

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

1. Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

2. Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap dan aset tidak berwujud. Periode perhitungan penyusutan aset tetap dan aset tidak berwujud adalah setiap tahun.
3. Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.



4. Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya

Pedoman penetapan Masa Manfaat tertuang pada tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tabel Masa Manfaat

No	Akun	Kelompok	Jenis	Obyek	Rincian Obyek	Sub Rincian Obyek	Uraian	Masa Manfaat
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
1	1	3	2				Peralatan Dan Mesin	
2	1	3	2	1			Alat Besar	
3	1	3	2	1	1		Alat Besar Darat	
4	1	3	2	1	1	1	Tractor	10
5	1	3	2	1	1	2	Grader	10
6	1	3	2	1	1	3	Excavator	10
7	1	3	2	1	1	4	Pile Driver	10
8	1	3	2	1	1	5	Hauler	10
9	1	3	2	1	1	6	Asphalt Equipment	10
10	1	3	2	1	1	7	Compacting Equipment	10
11	1	3	2	1	1	8	Aggregate And Concrete Equipment	10
12	1	3	2	1	1	9	Loader	10
13	1	3	2	1	1	10	Alat Pengangkat	10
14	1	3	2	1	1	11	Mesin Proses	10
15	1	3	2	1	1	12	Alat Besar Darat Lainnya	10
16	1	3	2	1	2		Alat Besar Apung	
17	1	3	2	1	2	1	Dredger	8
18	1	3	2	1	2	2	Floating Excavator	8
19	1	3	2	1	2	3	Amphibi Dredger	8
20	1	3	2	1	2	4	Kapal Tarik	8
21	1	3	2	1	2	5	Mesin Proses Apung	8
22	1	3	2	1	2	6	Alat Besar Apung Lainnya	8
23	1	3	2	1	3		Alat Bantu	
24	1	3	2	1	3	1	Alat Penarik	7
25	1	3	2	1	3	2	Feeder	7
26	1	3	2	1	3	3	Compressor	7
27	1	3	2	1	3	4	Electric Generating Set	7
28	1	3	2	1	3	5	Pompa	7
29	1	3	2	1	3	6	Mesin Bor	7
30	1	3	2	1	3	7	Unit Pemeliharaan Lapangan	7
31	1	3	2	1	3	8	Alat Pengolahan Air Kotor	7
32	1	3	2	1	3	9	Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	7
33	1	3	2	1	3	10	Air Port Maintenance Equipment/Alat Bantu Penerbangan	7
34	1	3	2	1	3	11	Mesin Tato	7
35	1	3	2	1	3	12	Perlengkapan Kebakaran Hutan	7
36	1	3	2	1	3	13	Peralatan Selam	7
37	1	3	2	1	3	14	Peralatan Sar Mountenering	7
38	1	3	2	1	3	15	Peralatan Intelejen	7
39	1	3	2	1	3	16	Alat Bantu Lainnya	7
40	1	3	2	2			Alat Angkutan	
41	1	3	2	2	1		Alat Angkutan Darat Bermotor	
42	1	3	2	2	1	1	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7
43	1	3	2	2	1	2	Kendaraan Bermotor Penumpang	7



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
44	1	3	2	2	1	3	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7
45	1	3	2	2	1	4	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7
46	1	3	2	2	1	5	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	7
47	1	3	2	2	1	6	Kendaraan Bermotor Khusus	7
48	1	3	2	2	1	7	Kendaraan Tempur	7
49	1	3	2	2	1	8	Alat Angkutan Kereta Rel	7
50	1	3	2	2	1	9	Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	7
51	1	3	2	2	2		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
52	1	3	2	2	2	1	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2
53	1	3	2	2	2	2	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	2
54	1	3	2	2	2	3	Alat Angkutan Kereta Rel Tak Bermotor	2
55	1	3	2	2	2	4	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	2
56	1	3	2	2	3		Alat Angkutan Apung Bermotor	
57	1	3	2	2	3	1	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Barang	10
58	1	3	2	2	3	2	Alat Angkutan Apung Bermotor Untuk Penumpang	10
59	1	3	2	2	3	3	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	10
60	1	3	2	2	3	4	Alat Angkutan Apung Bermotor Militer	10
61	1	3	2	2	3	5	Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	10
62	1	3	2	2	4		Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	
63	1	3	2	2	4	1	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Barang	3
64	1	3	2	2	4	2	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Untuk Penumpang	3
65	1	3	2	2	4	3	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus	3
66	1	3	2	2	4	4	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	3
67	1	3	2	2	5		Alat Angkutan Bermotor Udara	
68	1	3	2	2	5	1	Kapal Terbang	20
69	1	3	2	2	5	2	Alat Angkutan Tak Bermotor Udara Lainnya	20
70	1	3	2	3			Alat Bengkel Dan Alat Ukur	
71	1	3	2	3	1		Alat Bengkel Bermesin	
72	1	3	2	3	1	1	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi	10
73	1	3	2	3	1	2	Perkakas Konstruksi Logam Yang Transportable (Berpindah)	10
74	1	3	2	3	1	3	Perkakas Bengkel Listrik	10
75	1	3	2	3	1	4	Perkakas Bengkel Service	10
76	1	3	2	3	1	5	Perkakas Pengangkat Bermesin	10
77	1	3	2	3	1	6	Perkakas Bengkel Kayu	10
78	1	3	2	3	1	7	Perkakas Bengkel Khusus	10
79	1	3	2	3	1	8	Peralatan Las	10
80	1	3	2	3	1	9	Perkakas Pabrik Es	10
81	1	3	2	3	1	10	Alat Bengkel Bermesin Lainnya	10
82	1	3	2	3	2		Alat Bengkel Tak Bermesin	
83	1	3	2	3	2	1	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	5
84	1	3	2	3	2	2	Perkakas Bengkel Listrik	5
85	1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel Service	5
86	1	3	2	3	2	3	Perkakas Bengkel Service	5
87	1	3	2	3	2	4	Perkakas Pengangkat	5
88	1	3	2	3	2	5	Perkakas Standard (Standard Tools)	5
89	1	3	2	3	2	6	Perkakas Khusus (Special Tools)	5
90	1	3	2	3	2	7	Perkakas Bengkel Kerja	5
91	1	3	2	3	2	8	Peralatan Tukang Besi	5
92	1	3	2	3	2	9	Peralatan Tukang Kayu	5
93	1	3	2	3	2	10	Peralatan Tukang Kayu	5
94	1	3	2	3	2	11	Peralatan Ukur, Gip Dan Feeting	5
95	1	3	2	3	2	12	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	5
96	1	3	2	3	2	13	Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya	5
97	1	3	2	3	3		Alat Ukur	
98	1	3	2	3	3	1	Alat Ukur Universal	5
99	1	3	2	3	3	2	Alat Ukur/Test Intelegensia	5
100	1	3	2	3	3	3	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	5
101	1	3	2	3	3	4	Alat Ukur/Test Klinis Lain	5
102	1	3	2	3	3	5	Alat Kalibrasi	5
103	1	3	2	3	3	6	Oscilloscope	5
104	1	3	2	3	3	7	Universal Tester	5
105	1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding	5
106	1	3	2	3	3	8	Alat Ukur/Pembanding	5



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
107	1	3	2	3	3	9	Alat Ukur Lain-Lain	5
108	1	3	2	3	3	10	Alat Timbangan/Biara	5
109	1	3	2	3	3	11	Anak Timbangan/Biara	5
110	1	3	2	3	3	12	Takaran Kering	5
111	1	3	2	3	3	13	Takaran Bahan Bangunan	5
112	1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	5
113	1	3	2	3	3	14	Takaran Lainnya	5
114	1	3	2	3	3	15	Alat Penguji Kendaraan Bermotor	5
115	1	3	2	3	3	16	Specific Set	5
116	1	3	2	3	3	17	Alat Pengukur Keadaan Alam	5
117	1	3	2	3	3	18	Alat Pengukur Penglihatan	5
118	1	3	2	3	3	19	Alat Pengukur Ketepatan Dan Koreksi Waktu	5
119	1	3	2	3	3	20	Alat Ukur Instrument Workshop	5
120	1	3	2	3	3	21	Alat Ukur Lainnya	5
121	1	3	2	4			Alat Pertanian	
122	1	3	2	4	1		Alat Pengolahan	
123	1	3	2	4	1	1	Alat Pengolahan Tanah Dan Tanaman	5
124	1	3	2	4	1	2	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	5
125	1	3	2	4	1	3	Alat Panen	5
126	1	3	2	4	1	4	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	5
127	1	3	2	4	1	5	Alat Laboratorium Pertanian	5
128	1	3	2	4	1	6	Alat Prosesing	5
129	1	3	2	4	1	7	Alat Pasca Panen	5
130	1	3	2	4	1	8	Alat Produksi Perikanan	5
131	1	3	2	4	1	9	Alat-Alat Peternakan	5
132	1	3	2	4	1	10	Alat Pengolahan Lainnya	5
133	1	3	2	5			Alat Kantor Dan Rumah Tangga	
134	1	3	2	5	1		Alat Kantor	
135	1	3	2	5	1	1	Mesin Ketik	5
136	1	3	2	5	1	2	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	5
137	1	3	2	5	1	3	Alat Reproduksi (Penggandaan)	5
138	1	3	2	5	1	4	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	5
139	1	3	2	5	1	5	Alat Kantor Lainnya	4
140	1	3	2	5	2	1	Meubelair	5
141	1	3	2	5	2	2	Alat Pengukur Waktu	5
142	1	3	2	5	2	3	Alat Pembersih	5
143	1	3	2	5	2	4	Alat Pendingin	5
144	1	3	2	5	2	5	Alat Dapur	5
145	1	3	2	5	2	6	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	5
146	1	3	2	5	2	7	Alat Pemadam Kebakaran	5
147	1	3	2	5	3		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	
148	1	3	2	5	3	1	Meja Kerja Pejabat	5
149	1	3	2	5	3	2	Meja Rapat Pejabat	5
150	1	3	2	5	3	3	Kursi Kerja Pejabat	5
151	1	3	2	5	3	4	Kursi Rapat Pejabat	5
152	1	3	2	5	3	5	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	5
153	1	3	2	5	3	6	Kursi Tamu Di Ruangan Pejabat	5
154	1	3	2	5	3	7	Lemari Dan Arsip Pejabat	5
155	1	3	2	6			Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	
156	1	3	2	6	1		Alat Studio	
157	1	3	2	6	1	1	Peralatan Studio Audio	5
158	1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video Dan Film	5
159	1	3	2	6	1	2	Peralatan Studio Video Dan Film	5
160	1	3	2	6	1	3	Peralatan Studio Gambar	5
161	1	3	2	6	1	4	Peralatan Cetak	5
162	1	3	2	6	1	5	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	5
163	1	3	2	6	1	6	Alat Studio Lainnya	5
164	1	3	2	6	2		Alat Komunikasi	
165	1	3	2	6	2	1	Alat Komunikasi Telephone	5
166	1	3	2	6	2	2	Alat Komunikasi Radio Ssb	5
167	1	3	2	6	2	3	Alat Komunikasi Radio Hf/Fm	5
168	1	3	2	6	2	4	Alat Komunikasi Radio Vhf	5
169	1	3	2	6	2	5	Alat Komunikasi Radio Uhf	5



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
170	1	3	2	6	2	6	Alat Komunikasi Sosial	5
171	1	3	2	6	2	7	Alat-Alat Sandi	5
172	1	3	2	6	2	8	Alat Komunikasi Khusus	5
173	1	3	2	6	2	9	Alat Komunikasi Digital Dan Konvensional	5
174	1	3	2	6	2	10	Alat Komunikasi Satelit	5
175	1	3	2	6	2	11	Alat Komunikasi Lainnya	5
176	1	3	2	6	3		Alat Pemancar	
177	1	3	2	6	3	1	Peralatan Pemancar Mf/Mw	10
178	1	3	2	6	3	2	Peralatan Pemancar Hf/Sw	10
179	1	3	2	6	3	3	Peralatan Pemancar Vhf/Fm	10
180	1	3	2	6	3	4	Peralatan Pemancar Uhf	10
181	1	3	2	6	3	5	Peralatan Pemancar Shf	10
182	1	3	2	6	3	6	Peralatan Antena Mf/Mw	10
183	1	3	2	6	3	7	Peralatan Antena Hf/Sw	10
184	1	3	2	6	3	8	Peralatan Antena Vhf/Fm	10
185	1	3	2	6	3	9	Peralatan Antena Uhf	10
186	1	3	2	6	3	10	Peralatan Antena Shf/Parabola	10
187	1	3	2	6	3	11	Peralatan Translator Vhf/Vhf	10
188	1	3	2	6	3	12	Peralatan Translator Uhf/Uhf	10
189	1	3	2	6	3	13	Peralatan Translator Vhf/Uhf	10
190	1	3	2	6	3	14	Peralatan Translator Uhf/Vhf	10
191	1	3	2	6	3	15	Peralatan Microwave F P U	10
192	1	3	2	6	3	16	Peralatan Microwave Terrestrial	10
193	1	3	2	6	3	17	Peralatan Microwave Tvro	10
194	1	3	2	6	3	18	Peralatan Dummy Load	10
195	1	3	2	6	3	19	Switcher Antena	10
196	1	3	2	6	3	20	Switcher/Menara Antena	10
197	1	3	2	6	3	21	Feeder	10
198	1	3	2	6	3	22	Humidity Control	10
199	1	3	2	6	3	23	Program Input Equipment	10
200	1	3	2	6	3	24	Peralatan Antena Penerima Vhf	10
201	1	3	2	6	3	25	Peralatan Pemancar Lf	10
202	1	3	2	6	3	26	Unit Pemancar Mf+Hf	10
203	1	3	2	6	3	27	Peralatan Antena Pemancar Mf+Hf	10
204	1	3	2	6	3	28	Peralatan Penerima	10
205	1	3	2	6	3	29	Peralatan Pemancar Dan Penerima Lf	10
206	1	3	2	6	3	30	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf	10
207	1	3	2	6	3	31	Peralatan Pemancar Dan Penerima Hf	10
208	1	3	2	6	3	32	Peralatan Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
209	1	3	2	6	3	33	Peralatan Pemancar Dan Penerima Vhf	10
210	1	3	2	6	3	34	Peralatan Pemancar Dan Penerima Uhf	10
211	1	3	2	6	3	35	Peralatan Pemancar Dan Penerima Shf	10
212	1	3	2	6	3	36	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Lf	10
213	1	3	2	6	3	37	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf	10
214	1	3	2	6	3	38	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Hf	10
215	1	3	2	6	3	39	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Mf+Hf	10
216	1	3	2	6	3	40	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Vhf	10
217	1	3	2	6	3	41	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Uhf	10
218	1	3	2	6	3	42	Peralatan Antena Pemancar Dan Penerima Shf	10
219	1	3	2	6	3	43	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Rendah	10
220	1	3	2	6	3	44	Peralatan Penerima Cuaca Citra Satellite Resolusi Tinggi	10
221	1	3	2	6	3	45	Peralatan Penerima Dan Pengirim Gambar Ke Permukaan	10
222	1	3	2	6	3	46	Peralatan Perlengkapan Radio	10
223	1	3	2	6	3	47	Sumber Tenaga	10
224	1	3	2	6	3	48	Peralatan Pemancar Lainnya	10
225	1	3	2	6	4		Peralatan Komunikasi Navigasi	
226	1	3	2	6	4	1	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System	10
227	1	3	2	6	4	2	Very High Frequency Omni Range (Vor)	10
228	1	3	2	6	4	3	Distance Measuring Equipment (Dme)	10
229	1	3	2	6	4	4	Radar	10
230	1	3	2	6	4	5	Alat Pangatur Telekomunikasi	10
231	1	3	2	6	4	6	Peralatan Komunikasi Untuk Dokumentasi	10
232	1	3	2	6	4	7	Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	10



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
233	1	3	2	7			Alat Kedokteran Dan Kesehatan	
234	1	3	2	7	1		Alat Kedokteran	
235	1	3	2	7	1	1	Alat Kedokteran Umum	5
236	1	3	2	7	1	2	Alat Kedokteran Gigi	5
237	1	3	2	7	1	3	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	5
238	1	3	2	7	1	4	Alat Kedokteran Bedah	5
239	1	3	2	7	1	5	Alat Kesehatan Kebidanan Dan Penyakit Kandungan	5
240	1	3	2	7	1	6	Alat Kedokteran Tht	5
241	1	3	2	7	1	7	Alat Kedokteran Mata	5
242	1	3	2	7	1	8	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	5
243	1	3	2	7	1	9	Alat Kedokteran Kamar Jenasah/Mortuary	5
244	1	3	2	7	1	10	Alat Kedokteran Anak	5
245	1	3	2	7	1	11	Alat Kedokteran Poliklinik	5
246	1	3	2	7	1	12	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	5
247	1	3	2	7	1	13	Alat Kedokteran Neurologi (Syaraf)	5
248	1	3	2	7	1	14	Alat Kedokteran Jantung	5
249	1	3	2	7	1	15	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5
250	1	3	2	7	1	16	Alat Kedokteran Patologi Anatomy	5
251	1	3	2	7	1	17	Alat Kedokteran Transfusi Darah	5
252	1	3	2	7	1	18	Alat Kedokteran Radioterapy	5
253	1	3	2	7	1	19	Alat Kedokteran Nuklir	5
254	1	3	2	7	1	20	Alat Kedokteran Kulit Dan Kelamin	5
255	1	3	2	7	1	21	Alat Kedokteran Gawat Darurat	5
256	1	3	2	7	1	22	Alat Kedokteran Jiwa	5
257	1	3	2	7	1	23	Alat Kedokteran Bedah Orthopedi	5
258	1	3	2	7	1	24	Alat Kedokteran I C U	5
259	1	3	2	7	1	25	Alat Kedokteran I C C U	5
260	1	3	2	7	1	26	Alat Kedokteran Bedah Jantung	5
261	1	3	2	7	1	27	Alat Kedokteran Traditional Medicine	5
262	1	3	2	7	1	28	Alat Kedokteran Anaesthesi	5
263	1	3	2	7	1	29	Alat Kedokteran Lainnya	5
264							Alat Kesehatan Umum	
265	1	3	2	7	2	1	Alat Kesehatan Matra Laut	5
266	1	3	2	7	2	2	Alat Kesehatan Matra Udara	5
267	1	3	2	7	2	3	Alat Kesehatan Kepolisian	5
268	1	3	2	7	2	4	Alat Kesehatan Olah Raga	5
269	1	3	2	7	2	5	Alat Kesehatan Umum Lainnya	5
270	1	3	2	8			Alat Laboratorium	
271	1	3	2	8	1		Unit Alat Laboratorium	
272	1	3	2	8	1	1	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	8
273	1	3	2	8	1	2	Alat Laboratorium Micro Biologi Teknik Penyehatan	8
274	1	3	2	8	1	3	Alat Laboratorium Hidrokimia	8
275	1	3	2	8	1	4	Alat Laboratorium Model Hidrolika	8
276	1	3	2	8	1	5	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	8
277	1	3	2	8	1	6	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	8
278	1	3	2	8	1	7	Alat Laboratorium Aspal, Cat Dan Kimia	8
279	1	3	2	8	1	8	Alat Laboratorium Mekanika Tanah Dan Batuan	8
280	1	3	2	8	1	9	Alat Laboratorium Cokok Tanam	8
281	1	3	2	8	1	10	Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik	8
282	1	3	2	8	1	11	Alat Laboratorium Umum	8
283	1	3	2	8	1	12	Alat Laboratorium Microbiologi	8
284	1	3	2	8	1	13	Alat Laboratorium Kimia	8
285	1	3	2	8	1	14	Alat Laboratorium Patologi	8
286	1	3	2	8	1	15	Alat Laboratorium Immunologi	8
287	1	3	2	8	1	16	Alat Laboratorium Hematologi	8
288	1	3	2	8	1	17	Alat Laboratorium Film	8
289	1	3	2	8	1	18	Alat Laboratorium Makanan	8
290	1	3	2	8	1	19	Alat Laboratorium Farmasi	8
291	1	3	2	8	1	20	Alat Laboratorium Fisika	8
292	1	3	2	8	1	21	Alat Laboratorium Hidrodinamika	8
293	1	3	2	8	1	22	Alat Laboratorium Klimatologi	8
294	1	3	2	8	1	23	Alat Laboratorium Proses Peleburan	8
295	1	3	2	8	1	24	Alat Laboratorium Pasir	8



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
296	1	3	2	8	1	25	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cekatan	8
297	1	3	2	8	1	26	Alat Laboratorium Pembuatan Pola	8
298	1	3	2	8	1	27	Alat Laboratorium Metalography	8
299	1	3	2	8	1	28	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	8
300	1	3	2	8	1	29	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan	8
301	1	3	2	8	1	30	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam	8
302	1	3	2	8	1	31	Alat Laboratorium Metrologie	8
303	1	3	2	8	1	32	Alat Laboratorium Pelapisan Logam	8
304	1	3	2	8	1	33	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	8
305	1	3	2	8	1	34	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	8
306	1	3	2	8	1	35	Alat Laboratorium Uji Tekstil	8
307	1	3	2	8	1	36	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	8
308	1	3	2	8	1	37	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet Dan Plastik	8
309	1	3	2	8	1	38	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet Dan Plastik	8
310	1	3	2	8	1	39	Alat Laboratorium Uji Keramik	8
311	1	3	2	8	1	40	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa	8
312	1	3	2	8	1	41	Alat Laboratorium Pertanian	8
313	1	3	2	8	1	42	Alat Laboratorium Elektronika Dan Daya	8
314	1	3	2	8	1	43	Alat Laboratorium Energi Surya	8
315	1	3	2	8	1	44	Alat Laboratorium Konversi Batubara Dan Biomas	8
316	1	3	2	8	1	45	Alat Laboratorium Oceanografi	8
317	1	3	2	8	1	46	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	8
318	1	3	2	8	1	47	Alat Laboratorium Biologi Perairan	8
319	1	3	2	8	1	48	Alat Laboratorium Biologi	8
320	1	3	2	8	1	49	Alat Laboratorium Geofisika	8
321	1	3	2	8	1	50	Alat Laboratorium Tambang	8
322	1	3	2	8	1	51	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	8
323	1	3	2	8	1	52	Alat Laboratorium Proses Industri	8
324	1	3	2	8	1	53	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	8
325	1	3	2	8	1	54	Laboratorium Kearsipan	8
326	1	3	2	8	1	55	Laboratorium Hematologi Dan Urinalisis	8
327	1	3	2	8	1	56	Alat Laboratorium Lain	8
328	1	3	2	8	1	57	Alat Laboratorium Hermodinamika Motor Dan Sistem Propulsi	8
329	1	3	2	8	1	58	Alat Laboratorium Pendidikan	8
330	1	3	2	8	1	59	Alat Laboratorium Teknologi Proses Enzym	8
331	1	3	2	8	1	60	Alat Laboratorium Teknik Pantai	8
332	1	3	2	8	1	61	Alat Laboratorium Sumber Daya Dan Energi	8
333	1	3	2	8	1	62	Alat Laboratorium Populasi	8
334	1	3	2	8	1	63	Alat Pengukur Gelombang	8
335	1	3	2	8	1	64	Unit Alat Laboratorium Lainnya	8
336	1	3	2	8	2		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	
337	1	3	2	8	2	1	Analytical Instrument	4
338	1	3	2	8	2	2	Instrument Probe/Sensor	4
339	1	3	2	8	2	3	General Laboratory Tool	4
340	1	3	2	8	2	3	General Laboratory Tool	4
341	1	3	2	8	2	4	Glassware Plastic/Utensils	4
342	1	3	2	8	2	5	Laboratory Safety Equipment	4
343	1	3	2	8	2	6	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir Lainnya	4
344	1	3	2	8	3		Alat Peraga Praktek Sekolah	
345	1	3	2	8	3	1	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Bahasa Indonesia	4
346	1	3	2	8	3	2	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Matematika	4
347	1	3	2	8	3	3	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Dasar	4
348	1	3	2	8	3	4	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Lanjutan	4
349	1	3	2	8	3	5	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Menengah	4
350	1	3	2	8	3	6	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ipa Atas	4
351	1	3	2	8	3	7	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Ips	4
352	1	3	2	8	3	8	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Agama	4
353	1	3	2	8	3	9	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Keterampilan	4
354	1	3	2	8	3	10	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Kesenian	4
355	1	3	2	8	3	11	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Olah Raga	4
356	1	3	2	8	3	12	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi : Pkn	4
357	1	3	2	8	3	13	Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, Tuna	4



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
							Rungu)	
358	1	3	2	8	3	14	Alat Peraga Kejuruan	4
359	1	3	2	8	3	15	Alat Peraga Paud/Tk	4
360	1	3	2	8	3	16	Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	4
361	1	3	2	8	4		Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	
362	1	3	2	8	4	1	Radiation Detector	15
363	1	3	2	8	4	2	Modular Counting And Scientific Electronic	15
364	1	3	2	8	4	3	Assembly/Counting System	15
365	1	3	2	8	4	4	Recorder Display	15
366	1	3	2	8	4	5	System/Power Supply	15
367	1	3	2	8	4	6	Measuring/Testing Device	15
368	1	3	2	8	4	7	Opto Electronics	15
369	1	3	2	8	4	8	Accelerator	15
370	1	3	2	8	4	9	Reactor Experimental System	15
371	1	3	2	8	4	10	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika Lainnya	15
372	1	3	2	8	5		Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	
373	1	3	2	8	5	1	Alat Ukur Fisika Kesehatan	10
374	1	3	2	8	5	2	Alat Kesehatan Kerja	10
375	1	3	2	8	5	3	Proteksi Lingkungan	10
376	1	3	2	8	5	4	Meteorological Equipment	10
377	1	3	2	8	5	5	Sumber Radiasi	10
378	1	3	2	8	5	6	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya	10
379	1	3	2	8	6		Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory	
380	1	3	2	8	6	1	Radiation Application Equipment	10
381	1	3	2	8	6	2	Non Destructive Test (Ndt) Device	10
382	1	3	2	8	6	3	Peralatan Hidrologi	10
383	1	3	2	8	6	4	Radiation Application And Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	10
384	1	3	2	8	7		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	
385	1	3	2	8	7	1	Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah	7
386	1	3	2	8	7	2	Alat Laboratorium Kwalitas Udara	7
387	1	3	2	8	7	3	Alat Laboratorium Kebisingan Dan Getaran	7
388	1	3	2	8	7	4	Laboratorium Lingkungan	7
389	1	3	2	8	7	5	Alat Laboratorium Penunjang	7
390	1	3	2	8	7	6	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	7
391	1	3	2	8	8		Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	
392	1	3	2	8	8	1	Towing Carriage	15
393	1	3	2	8	8	2	Wave Generator And Absorber	15
394	1	3	2	8	8	3	Data Acquisition And Analyzing System	15
395	1	3	2	8	8	4	Cavitation Tunnel	15
396	1	3	2	8	8	5	Overhead Cranes	15
397	1	3	2	8	8	6	Peralatan Umum	15
398	1	3	2	8	8	7	Pemesinan : Model Ship Workshop	15
399	1	3	2	8	8	8	Pemesinan : Propeller Model Workshop	15
400	1	3	2	8	8	9	Pemesinan : Mechanical Workshop	15
401	1	3	2	8	8	10	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop	15
402	1	3	2	8	8	11	Pemesinan : Painting Shop	15
403	1	3	2	8	8	12	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop	15
404	1	3	2	8	8	13	Pemesinan : Electical Workshop	15
405	1	3	2	8	8	14	Mob	15
406	1	3	2	8	8	15	Photo And Film Equipment	15
407	1	3	2	8	8	16	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	15
408	1	3	2	8	9		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	
409	1	3	2	8	9	1	Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik	8
410	1	3	2	8	9	2	Alat Laboratorium Standard Dan Kalibrator	8
411	1	3	2	8	9	3	Alat Laboratorium Cahaya, Optik Dan Akustik	8
412	1	3	2	8	9	4	Alat Laboratorium Listrik Dan Mekanik	8
413	1	3	2	8	9	5	Alat Laboratorium Tekanan Dan Suhu	8
414	1	3	2	8	9	6	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lain	8
415	1	3	2	8	9	7	Alat Laboratorium Natus	8
416	1	3	2	8	9	8	Alat Laboratorium Elektronika Dan Telekomunikasi Pelayaran	8
417	1	3	2	8	9	9	Alat Laboratorium Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	8
418	1	3	2	8	9	10	Alat Laboratorium Uji Perangkat	8



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
419	1	3	2	8	9	11	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi Lainnya	8
420	1	3	2	9			Alat Persenjataan	
421	1	3	2	9	1		Senjata Api	
422	1	3	2	9	1	1	Senjata Genggam	15
423	1	3	2	9	1	2	Senjata Pinggang	15
424	1	3	2	9	1	3	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang	15
425	1	3	2	9	1	4	Senapan Mesin	15
426	1	3	2	9	1	5	Mortir	15
427	1	3	2	9	1	6	Anti Lapis Baja	15
428	1	3	2	9	1	7	Artileri Medan (Armed)	15
429	1	3	2	9	1	8	Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)	15
430	1	3	2	9	1	9	Kavaleri	15
431	1	3	2	9	1	10	Senjata Lain-Lain	15
432	1	3	2	9	2		Persenjataan Non Senjata Api	
433	1	3	2	9	2	1	Alat Keamanan	5
434	1	3	2	9	2	1	Alat Keamanan	5
435	1	3	2	9	2	2	Non Senjata Api	5
436	1	3	2	9	2	3	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	5
437	1	3	2	9	2	4	Alat Nuklir, Biologi Dan Kimia	5
438	1	3	2	9	2	5	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	5
439	1	3	2	9	3		Senjata Sinar	
440	1	3	2	9	3	1	Laser	15
441	1	3	2	9	3	2	Senjata Sinar Lainnya	15
442	1	3	2	9	4		Alat Khusus Kepolisian	
443	1	3	2	9	4	1	Alat Khusus Kepolisian	5
444	1	3	2	9	4	2	Alat Dalmas/Alat Dakhura	5
445	1	3	2	9	4	3	Alat Wanteror (Perlawanan Teror)	5
446	1	3	2	9	4	4	Peralatan Deteksi Intel	5
447	1	3	2	9	4	5	Alsus Lantas	5
448	1	3	2	9	4	6	Alsus Reserse	5
449	1	3	2	9	4	7	Alsus Fotografi Kepolisian	5
450	1	3	2	9	4	8	Alsus Daktiloskopi	5
451	1	3	2	9	4	9	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	5
452	1	3	2	9	4	10	Alat Khusus Kepolisian Lainnya	5
453	1	3	2	10			Komputer	
454	1	3	2	10	1		Komputer Unit	
455	1	3	2	10	1	1	Komputer Jaringan	4
456	1	3	2	10	1	2	Personal Komputer	4
457	1	3	2	10	1	3	Komputer Unit Lainnya	5
458	1	3	2	10	2		Peralatan Komputer	
459	1	3	2	10	2	1	Peralatan Mainframe	4
460	1	3	2	10	2	2	Peralatan Mini Komputer	4
461	1	3	2	10	2	3	Peralatan Personal Komputer	4
462	1	3	2	10	2	4	Peralatan Jaringan	4
463	1	3	2	10	2	5	Peralatan Komputer Lainnya	4
464	1	3	2	11			Alat Eksplorasi	
465	1	3	2	11	1		Alat Eksplorasi Topografi	
466	1	3	2	11	1	1	Optik	5
467	1	3	2	11	1	2	Ukur/Instrument	5
468	1	3	2	11	1	3	Alat Eksplorasi Topografi Lainnya	5
469	1	3	2	11	2		Alat Eksplorasi Geofisika	
470	1	3	2	11	2	1	Mekanik	10
471	1	3	2	11	2	2	Elektronik/Electric	10
472	1	3	2	11	2	3	Manual	10
473	1	3	2	11	2	4	Alat Eksplorasi Geofisika Lainnya	10
474	1	3	2	12			Alat Pengeboran	
475	1	3	2	12	1		Alat Pengeboran Mesin	
476	1	3	2	12	1	1	Bor Mesin Tumbuk	10
477	1	3	2	12	1	2	Bor Mesin Putar	10
478	1	3	2	12	1	3	Alat Pengeboran Mesin Lainnya	10
479	1	3	2	12	2		Alat Pengeboran Non Mesin	
480	1	3	2	12	2	1	Bangka	10
481	1	3	2	12	2	2	Pantek	10



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
482	1	3	2	12	2	3	Putar	10
483	1	3	2	12	2	4	Peralatan Bantu	10
484	1	3	2	12	2	5	Alat Pengeboran Non Mesin Lainnya	10
485	1	3	2	13			Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	
486	1	3	2	13	1		Sumur	
487	1	3	2	13	1	1	Peralatan Sumur Minyak	10
488	1	3	2	13	1	2	Sumur Pemboran	10
489	1	3	2	13	1	3	Sumur Lainnya	10
490	1	3	2	13	2		Produksi	
491	1	3	2	13	2	1	R I G	10
492	1	3	2	13	2	2	Produksi Lainnya	10
493	1	3	2	13	3		Pengolahan Dan Pemurnian	
494	1	3	2	13	3	1	Alat Pengolahan Minyak	15
495	1	3	2	13	3	2	Alat Pengolahan Air	15
496	1	3	2	13	3	3	Alat Pengolahan Steam	15
497	1	3	2	13	3	4	Alat Pengolahan Wax	15
498	1	3	2	13	3	5	Pengolahan Dan Pemurnian Lainnya	15
499	1	3	2	14			Alat Bantu Ekplorasi	
500	1	3	2	14	1		Alat Bantu Ekplorasi	
501	1	3	2	14	1	1	Mekanik	10
502	1	3	2	14	1	2	Eektric	10
503	1	3	2	14	1	3	Alat Bantu Ekplorasi Lainnya	10
504	1	3	2	14	2		Alat Bantu Produksi	
505	1	3	2	14	2	1	Perawatan Sumur	10
506	1	3	2	14	2	2	Test Unit	10
507	1	3	2	14	2	3	Alat Bantu Produksi Lainnya	10
508	1	3	2	15			Alat Keselamatan Kerja	
509	1	3	2	15	1		Alat Deteksi	
510	1	3	2	15	1	1	Radiasi	5
511	1	3	2	15	1	2	Suara	5
512	1	3	2	15	1	3	Alat Deteksi Lainnya	5
513	1	3	2	15	2		Alat Pelindung	
514	1	3	2	15	2	1	Baju Pengaman	5
515	1	3	2	15	2	2	Masker	5
516	1	3	2	15	2	3	Topi Kerja	5
517	1	3	2	15	2	4	Sabuk Pengaman	5
518	1	3	2	15	2	5	Sepatu Lapangan	5
519	1	3	2	15	2	6	Alat Pelindung Lainnya	5
520	1	3	2	15	3		Alat Sar	
521	1	3	2	15	3	1	Alat Penolong	2
522	1	3	2	15	3	2	Alat Pendukung Pencarian	2
523	1	3	2	15	3	3	Alat Kerja Bawah Air	2
524	1	3	2	15	3	4	Alat Sar Lainnya	2
525	1	3	2	15	4		Alat Kerja Penerbangan	
526	1	3	2	15	4	1	Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan	10
527	1	3	2	15	4	2	Peralatan Fasilitas Navigasi Dan Pengamatan Penerbangan	10
528	1	3	2	15	4	3	Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan	10
529	1	3	2	15	4	4	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan Dan Pengamanan Bandar Udara	10
530	1	3	2	15	4	5	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	10
531	1	3	2	15	4	6	Alat Ukur Peralatan Faslektrik	10
532	1	3	2	15	4	7	Alat Kerja Penerbangan Lainnya	10
533	1	3	2	16			Alat Peraga	
534	1	3	2	16	1		Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	
535	1	3	2	16	1	1	Alat Peraga Pelatihan	10
536	1	3	2	16	1	2	Alat Peraga Percontohan	10
537	1	3	2	16	1	3	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan Lainnya	10
538	1	3	2	17			Alat Proses/Produksi	
539	1	3	2	17	1		Unit Alat Proses/Produksi	
540	1	3	2	17	1	1	Liquid-Liquid Contractor Equipment	8
541	1	3	2	17	1	2	Solid-Solid Mixing Equipment	8
542	1	3	2	17	1	3	Solid-Solid Screening Equipment	8
543	1	3	2	17	1	4	Solid-Solid Classifier	8
544	1	3	2	17	1	5	Solid-Liquid Mixing Equipment	8



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
545	1	3	2	17	1	6	Solid Liquid Crystallization Equipment	8
546	1	3	2	17	1	7	Ion Exchange Absortion Equipment	8
547	1	3	2	17	1	8	Leaching Equipment	8
548	1	3	2	17	1	9	Gravity Sedimentation Equipment	8
549	1	3	2	17	1	10	Solid Liquid Filtering Equipment	8
550	1	3	2	17	1	11	Centrifuge For Solid Liquid	8
551	1	3	2	17	1	12	Liquid From Solid Expelling (Expressor)-Equipment	8
552	1	3	2	17	1	13	Gas-Solid Drying Equipment	8
553	1	3	2	17	1	14	Gas - Solid Fluidised Bed Equipment	8
554	1	3	2	17	1	15	Gas - Solid Separation Equipment	8
555	1	3	2	17	1	16	Gas - Liquid Distillation Equipment	8
556	1	3	2	17	1	17	Gas - Liquid Separation Equipment	8
557	1	3	2	17	1	18	Isotope Separation Equipment	8
558	1	3	2	17	1	19	Transport And Storage Equipment For Liquid	8
559	1	3	2	17	1	20	Solid Material Handling Equipment	8
560	1	3	2	17	1	21	Size Reduction Size Balargement Equipment	8
561	1	3	2	17	1	22	Heat Generating Equipment	8
562	1	3	2	17	1	23	Heat Transfer Equipment	8
563	1	3	2	17	1	24	Mechanical Proces	8
564	1	3	2	17	1	25	Chemical Reakction Equipment	8
565	1	3	2	17	1	26	Unit Peralatan Proses/Produksi Lainnya	8
566	1	3	2	18			Rambu-Rambu	
567	1	3	2	18	1		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	
568	1	3	2	18	1	1	Rambu Bersuar	5
569	1	3	2	18	1	2	Rambu Tidak Bersuar	5
570	1	3	2	18	1	3	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5
571	1	3	2	18	2		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	
572	1	3	2	18	2	1	Runway/Threshold Light	5
573	1	3	2	18	2	2	Visual Approach Slope Indicator (Vasi)	5
574	1	3	2	18	2	3	Approach Light	5
575	1	3	2	18	2	4	Runway Identification Light (Reils)	5
576	1	3	2	18	2	5	Signal	5
577	1	3	2	18	2	6	Flood Lights	5
578	1	3	2	18	2	7	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara Lainnya	5
579	1	3	2	18	3		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	
580	1	3	2	18	3	1	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
581	1	3	2	18	3	2	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut Lainnya	5
582	1	3	2	19			Peralatan Olah Raga	
583	1	3	2	19	1		Peralatan Olah Raga	
584	1	3	2	19	1	1	Peralatan Olah Raga Atletik	4
585	1	3	2	19	1	2	Peralatan Permainan	4
586	1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam	5
587	1	3	2	19	1	3	Peralatan Senam	5
588	1	3	2	19	1	4	Paralatan Olah Raga Air	4
589	1	3	2	19	1	5	Peralatan Olah Raga Udara	4
590	1	3	2	19	1	6	Peralatan Olah Raga Lainnya	4
591	1	3	3				Gedung Dan Bangunan	
592	1	3	3	1			Bangunan Gedung	
593	1	3	3	1	1		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
594	1	3	3	1	1	1	Bangunan Gedung Kantor	30
595	1	3	3	1	1	2	Bangunan Gudang	30
596	1	3	3	1	1	3	Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	30
597	1	3	3	1	1	4	Bangunan Gedung Instalasi	30
598	1	3	3	1	1	5	Bangunan Gedung Laboratorium	30
599	1	3	3	1	1	6	Bangunan Kesehatan	30
600	1	3	3	1	1	7	Bangunan Oceanarium/Observatorium	30
601	1	3	3	1	1	8	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	30
602	1	3	3	1	1	9	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	30
603	1	3	3	1	1	10	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	30
604	1	3	3	1	1	11	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	30
605	1	3	3	1	1	12	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	30
606	1	3	3	1	1	13	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga	30
607	1	3	3	1	1	14	Bangunan Gedung Garasi/Pool	30



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
608	1	3	3	1	1	15	Bangunan Gedung Pemotong Hewan	30
609	1	3	3	1	1	16	Bangunan Gedung Perpustakaan	30
610	1	3	3	1	1	17	Bangunan Gedung Musium	30
611	1	3	3	1	1	18	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	30
612	1	3	3	1	1	19	Bangunan Pengujian Kelaikan	30
613	1	3	3	1	1	20	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan	30
614	1	3	3	1	1	21	Bangunan Rumah Tahanan	30
615	1	3	3	1	1	22	Bangunan Gedung Krematorium	30
616	1	3	3	1	1	23	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan	30
617	1	3	3	1	1	24	Bangunan Tempat Persidangan	30
618	1	3	3	1	1	25	Bangunan Terbuka	30
619	1	3	3	1	1	26	Bangunan Penampung Sekam	30
620	1	3	3	1	1	27	Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi)	30
621	1	3	3	1	1	28	Bangunan Industri	30
622	1	3	3	1	1	29	Bangunan Peternakan/Perikanan	30
623	1	3	3	1	1	30	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	25
624	1	3	3	1	1	31	Bangunan Peralatan Geofisika	30
625	1	3	3	1	1	32	Bangunan Fasilitas Umum	30
626	1	3	3	1	1	33	Bangunan Parkir	30
627	1	3	3	1	1	34	Bangunan Gedung Pabrik	30
628	1	3	3	1	1	35	Bangunan Stasiun Bus	30
629	1	3	3	1	1	36	Taman	30
630	1	3	3	1	1	37	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30
631	1	3	3	1	2		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
632	1	3	3	1	2	1	Rumah Negara Golongan I	30
633	1	3	3	1	2	2	Rumah Negara Golongan Ii	30
634	1	3	3	1	2	3	Rumah Negara Golongan Iii	30
635	1	3	3	1	2	4	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	30
636	1	3	3	1	2	5	Asrama	30
637	1	3	3	1	2	6	Hotel	30
638	1	3	3	1	2	7	Motel	30
639	1	3	3	1	2	8	Flat/Rumah Susun	30
640	1	3	3	1	2	9	Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	30
641	1	3	3	1	2	10	Panti Asuhan	30
642	1	3	3	1	2	11	Apartemen	30
643	1	3	3	1	2	12	Rumah Tidak Bersusun	30
644	1	3	3	1	2	13	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	30
645	1	3	3	2			Monumen	
646	1	3	3	2	1		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	
647	1	3	3	2	1	1	Candi	30
648	1	3	3	2	1	2	Tugu	25
649	1	3	3	2	1	3	Bangunan Peninggalan	30
650	1	3	3	2	1	4	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	30
651	1	3	3	3			Bangunan Menara	
652	1	3	3	3	1		Bangunan Menara Perambuan	
653	1	3	3	3	1	1	Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	30
654	1	3	3	3	1	2	Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	30
655	1	3	3	3	1	3	Bangunan Menara Telekomunikasi	30
656	1	3	3	3	1	4	Bangunan Menara Pengawas	30
657	1	3	3	3	1	5	Bangunan Menara Perambuan Lainnya	30
658	1	3	3	4			Tugu Titik Kontrol/Pasti	
659	1	3	3	4	1		Tugu/Tanda Batas	
660	1	3	3	4	1	1	Tugu/Tanda Batas Administrasi	25
661	1	3	3	4	1	2	Tugu/Tanda Jaring Kontrol Geodesi	25
662	1	3	3	4	1	3	Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	25
663	1	3	3	4	1	4	Pagar	25
664	1	3	3	4	1	5	Tugu/Tanda Batas Lainnya	25
665	1	3	4				Jalan, Jaringan Dan Irigasi	
666	1	3	4	1			Jalan Dan Jembatan	
667	1	3	4	1	1		Jalan	
668	1	3	4	1	1	1	Jalan Nasional	10
669	1	3	4	1	1	2	Jalan Propinsi	10
670	1	3	4	1	1	3	Jalan Kabupaten	10



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
671	1	3	4	1	1	4	Jalan Kota	10
672	1	3	4	1	1	5	Jalan Desa	10
673	1	3	4	1	1	6	Jalan Tol	10
674	1	3	4	1	1	7	Jalan Kereta Api	10
675	1	3	4	1	1	8	Landasan Pacu Pesawat Terbang	10
676	1	3	4	1	1	9	Jalan Khusus	10
677	1	3	4	1	1	10	Jalan Lainnya	10
678	1	3	4	1	2		Jembatan	
679	1	3	4	1	2	1	Jembatan Pada Jalan Nasional	25
680	1	3	4	1	2	2	Jembatan Pada Jalan Propinsi	25
681	1	3	4	1	2	3	Jembatan Pada Jalan Kabupaten	25
682	1	3	4	1	2	4	Jembatan Pada Jalan Kota	25
683	1	3	4	1	2	5	Jembatan Pada Jalan Desa	25
684	1	3	4	1	2	6	Jembatan Pada Jalan Tol	25
685	1	3	4	1	2	7	Jembatan Pada Jalan Kereta Api	25
686	1	3	4	1	2	8	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang	25
687	1	3	4	1	2	9	Jembatan Pada Jalan Khusus	25
688	1	3	4	1	2	10	Jembatan Penyeberangan	25
689	1	3	4	1	2	11	Jembatan Labuh/Sandar Pada Terminal	25
690	1	3	4	1	2	12	Jembatan Pengukur	25
691	1	3	4	1	2	13	Jembatan Lainnya	25
692	1	3	4	2			Bangunan Air	
693	1	3	4	2	1		Bangunan Air Irigasi	
694	1	3	4	2	1	1	Bangunan Waduk Irigasi	50
695	1	3	4	2	1	2	Bangunan Pengambilan Irigasi	50
696	1	3	4	2	1	3	Bangunan Pembawa Irigasi	50
697	1	3	4	2	1	4	Bangunan Pembuang Irigasi	50
698	1	3	4	2	1	5	Bangunan Pengaman Irigasi	50
699	1	3	4	2	1	6	Bangunan Pelengkap Irigasi	50
700	1	3	4	2	1	7	Bangunan Sawah Irigasi	50
701	1	3	4	2	1	8	Bangunan Air Irigasi Lainnya	50
702	1	3	4	2	2		Bangunan Pengairan Pasang Surut	
703	1	3	4	2	2	1	Bangunan Waduk Pasang Surut	50
704	1	3	4	2	2	2	Bangunan Pengambilan Pasang Surut	50
705	1	3	4	2	2	3	Bangunan Pembawa Pasang Surut	50
706	1	3	4	2	2	4	Saluran Pembuang Pasang Surut	50
707	1	3	4	2	2	5	Bangunan Pengaman Pasang Surut	50
708	1	3	4	2	2	6	Bangunan Pelengkap Pasang Surut	50
709	1	3	4	2	2	7	Bangunan Sawah Pasang Surut	50
710	1	3	4	2	2	8	Bangunan Pengairan Pasang Surut Lainnya	50
711	1	3	4	2	3		Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	
712	1	3	4	2	3	1	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa	50
713	1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
714	1	3	4	2	3	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa	25
715	1	3	4	2	3	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	25
716	1	3	4	2	3	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Rawa	25
717	1	3	4	2	3	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Rawa	25
718	1	3	4	2	3	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	25
719	1	3	4	2	3	7	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa	25
720	1	3	4	2	3	8	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder Lainnya	25
721	1	3	4	2	4		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	
722	1	3	4	2	4	1	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
723	1	3	4	2	4	2	Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	10
724	1	3	4	2	4	3	Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	10
725	1	3	4	2	4	4	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	10
726	1	3	4	2	4	5	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	10
727	1	3	4	2	4	6	Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	10
728	1	3	4	2	4	7	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	10
729	1	3	4	2	5		Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	
730	1	3	4	2	5	1	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	10
731	1	3	4	2	5	2	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	10
732	1	3	4	2	5	3	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	10



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
733	1	3	4	2	5	4	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air	10
734	1	3	4	2	5	5	Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	10
735	1	3	4	2	5	6	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	10
736	1	3	4	2	5	7	Bangunan Sawah Irigasi Air Tanah	10
737	1	3	4	2	5	8	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah Lainnya	10
738	1	3	4	2	6		Bangunan Air Bersih/Air Baku	
739	1	3	4	2	6	1	Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	40
740	1	3	4	2	6	2	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	40
741	1	3	4	2	6	3	Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	40
742	1	3	4	2	6	4	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku	40
743	1	3	4	2	6	5	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	40
744	1	3	4	2	6	6	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	40
745	1	3	4	2	7		Bangunan Air Kotor	
746	1	3	4	2	7	1	Bangunan Pembawa Air Kotor	40
747	1	3	4	2	7	2	Bangunan Waduk Air Kotor	40
748	1	3	4	2	7	3	Bangunan Pembuang Air Kotor	40
749	1	3	4	2	7	4	Bangunan Pengaman Air Kotor	40
750	1	3	4	2	7	5	Bangunan Pelengkap Air Kotor	40
751	1	3	4	2	7	6	Bangunan Air Kotor Lainnya	40
752	1	3	4	3			Instalasi	
753	1	3	4	3	1		Instalasi Air Bersih / Air Baku	
754	1	3	4	3	1	1	Instalasi Air Permukaan	30
755	1	3	4	3	1	2	Instalasi Air Sumber / Mata Air	30
756	1	3	4	3	1	3	Instalasi Air Tanah Dalam	30
757	1	3	4	3	1	4	Instalasi Air Tanah Dangkal	30
758	1	3	4	3	1	5	Instalasi Air Bersih / Air Baku Lainnya	30
759	1	3	4	3	2		Instalasi Air Kotor	
760	1	3	4	3	2	1	Instalasi Air Buangan Domestik	30
761	1	3	4	3	2	2	Instalasi Air Buangan Industri	30
762	1	3	4	3	2	3	Instalasi Air Buangan Pertanian	30
763	1	3	4	3	2	4	Instalasi Air Kotor Lainnya	30
764	1	3	4	3	3		Instalasi Pengolahan Sampah	
765	1	3	4	3	3	1	Instalasi Pengolahan Sampah Organik	10
766	1	3	4	3	3	2	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	10
767	1	3	4	3	3	3	Bangunan Penampung Sampah	10
768	1	3	4	3	3	4	Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	10
769	1	3	4	3	4		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
770	1	3	4	3	4	1	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan	10
771	1	3	4	3	4	2	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis	10
772	1	3	4	3	4	3	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Terapan	10
773	1	3	4	3	4	4	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lainnya	10
774	1	3	4	3	5		Instalasi Pembangkit Listrik	
775	1	3	4	3	5	1	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta)	40
776	1	3	4	3	5	2	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Pltd)	40
777	1	3	4	3	5	3	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (Pltm)	40
778	1	3	4	3	5	4	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Angin (Pltan)	40
779	1	3	4	3	5	5	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu)	40
780	1	3	4	3	5	6	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (Pltn)	40
781	1	3	4	3	5	7	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (Pltg)	40
782	1	3	4	3	5	8	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Pltp)	40
783	1	3	4	3	5	9	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (Plts)	40
784	1	3	4	3	5	10	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (Pltb)	40
785	1	3	4	3	5	11	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera / Gelombang Samudera	40
786	1	3	4	3	5	12	Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	40
787	1	3	4	3	6		Instalasi Gardu Listrik	
788	1	3	4	3	6	1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40
789	1	3	4	3	6	2	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	40
790	1	3	4	3	6	3	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	40
791	1	3	4	3	6	4	Instalasi Gardu Listrik Lainnya	40
792	1	3	4	3	7		Instalasi Pertahanan	
793	1	3	4	3	7	1	Instalasi Pertahanan Di Darat	30
794	1	3	4	3	7	2	Instalasi Pertahanan Lainnya	30
795	1	3	4	3	8		Instalasi Gas	



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
796	1	3	4	3	8	1	Instalasi Gardu Gas	30
797	1	3	4	3	8	2	Instalasi Jaringan Pipa Gas	30
798	1	3	4	3	8	3	Instalasi Pengolahan Gas	30
799	1	3	4	3	8	4	Instalasi Gas Lainnya	30
800	1	3	4	3	9		Instalasi Pengaman	
801	1	3	4	3	9	1	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	20
802	1	3	4	3	9	2	Instalasi Reaktor Nuklir	20
803	1	3	4	3	9	3	Instalasi Pengolahan Limbah Radio Aktif	20
804	1	3	4	3	9	4	Instalasi Pengaman Lainnya	20
805	1	3	4	3	10		Instalasi Lain	
806	1	3	4	3	10	1	Instalasi Lain	5
807	1	3	4	4			Jaringan	
808	1	3	4	4	1		Jaringan Air Minum	
809	1	3	4	4	1	1	Jaringan Pembawa	30
810	1	3	4	4	1	2	Jaringan Induk Distribusi	30
811	1	3	4	4	1	3	Jaringan Cabang Distribusi	30
812	1	3	4	4	1	4	Jaringan Sambungan Ke Rumah	30
813	1	3	4	4	1	5	Jaringan Air Minum Lainnya	30
814	1	3	4	4	2		Jaringan Listrik	
815	1	3	4	4	2	1	Jaringan Transmisi	40
816	1	3	4	4	2	2	Jaringan Distribusi	40
817	1	3	4	4	2	3	Jaringan Listrik Lainnya	40
818	1	3	4	4	3		Jaringan Telepon	
819	1	3	4	4	3	1	Jaringan Telepon Diatas Tanah	20
820	1	3	4	4	3	2	Jaringan Telepon Dibawah Tanah	20
821	1	3	4	4	3	3	Jaringan Telepon Didalam Air	20
822	1	3	4	4	3	4	Jaringan Dengan Media Udara	20
823	1	3	4	4	3	5	Jaringan Telepon Lainnya	20
824	1	3	4	4	4		Jaringan Gas	
825	1	3	4	4	4	1	Jaringan Pipa Gas Transmisi	30
826	1	3	4	4	4	2	Jaringan Pipa Distribusi	30
827	1	3	4	4	4	3	Jaringan Pipa Dinas	30
828	1	3	4	4	4	4	Jaringan Bbm	30
829	1	3	4	4	4	5	Jaringan Gas Lainnya	30
830	1	3	5				Aset Tetap Lainnya	
831	1	3	5	1			Bahan Perpustakaan	
832	1	3	5	1	1		Bahan Perpustakaan Tercetak	
833	1	3	5	1	1	1	Buku Umum	0
834	1	3	5	1	1	2	Buku Filsafat	0
835	1	3	5	1	1	3	Buku Agama	0
836	1	3	5	1	1	4	Buku Ilmu Sosial	0
837	1	3	5	1	1	5	Buku Ilmu Bahasa	0
838	1	3	5	1	1	6	Buku Matematika Dan Pengetahuan Alam	0
839	1	3	5	1	1	7	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0
840	1	3	5	1	1	8	Buku Arsitektur, Kesenian, Olah Raga	0
841	1	3	5	1	1	9	Buku Geografi, Biografi, Sejarah	0
842	1	3	5	1	1	10	Serial	0
843	1	3	5	1	1	11	Buku Laporan	0
844	1	3	5	1	2		Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	
845	1	3	5	1	2	1	Audio Visual	0
846	1	3	5	1	2	2	Bentuk Mikro (Microform)	0
847	1	3	5	1	3		Kartografi, Naskah Dan Lukisan Lainnya	
848	1	3	5	1	3	1	Bahan Kartografi	0
849	1	3	5	1	3	2	Naskah (Manuskrip) / Asli	0
850	1	3	5	1	3	3	Lukisan Dan Ukiran	0
851	1	3	5	1	3	4	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	0
852	1	3	5	1	4		Musik	
853	1	3	5	1	4	1	Karya Musik	0
854	1	3	5	1	4	2	Musik Lainnya	0
855	1	3	5	1	5		Karya Grafika (Graphic Material)	
856	1	3	5	1	5	1	Karya Grafika (Graphic Material)	0
857	1	3	5	1	5	2	Karya Grafika (Graphic Material) Lainnya	0
858	1	3	5	1	6		Three Dimensional Artefacts And Realita	



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
859	1	3	5	1	6	1	Three Dimensional Artefacts And Realita	0
860	1	3	5	1	6	2	Three Dimensional Artefacts And Realita Lainnya	0
861	1	3	5	1	7		Tarscalt	
862	1	3	5	1	7	1	Tarscalt	0
863	1	3	5	1	7	2	Tarscalt Lainnya	0
864	1	3	5	2	1		Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
865	1	3	5	2	1	1	Alat Musik	4
866	1	3	5	2	1	2	Lukisan	0
867	1	3	5	2	1	3	Alat Peraga Kesenian	0
868	1	3	5	2	1	4	Alat Peraga Kesenian Lainnya	0
869	1	3	5	2	2		Alat Bercorak Kebudayaan	
870	1	3	5	2	2	1	Pahatan	0
871	1	3	5	2	2	2	Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen Dan Benda Bersejarah	0
872	1	3	5	2	2	3	Barang Kerajinan	0
873	1	3	5	2	2	4	Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0
874	1	3	5	2	3		Tanda Penghargaan	
875	1	3	5	2	3	1	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	0
876	1	3	5	2	3	2	Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	0
877	1	3	5	7	1	1	Aset Tetap Dalam Renovasi	4
878	1	5					Aset Lainnya	
879	1	5	3				Aset Tidak berwujud	
880	1	5	3	1	1	1	Goodwill	0
881	1	5	3	1	1	2	Lisensi dan Franchise	0
882	1	5	3	1	1	3	Hak Cipta	0
883	1	5	3	1	1	4	Hak Paten	0
884	1	5	3	1	1	5	Software	5
885	1	5	3	1	1	6	Kajian	0

Aset Tetap Lainnya berupa bahan perpustakaan, hewan, Biota Perairan, tanaman, barang koleksi non budaya tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yang sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual. Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.

Pencatatan penyusutan pertama kali besar kemungkinan akan menghadapi permasalahan penetapan sisa masa manfaat dan masa manfaat yang sudah disusutkan, karena aset-aset tetap sejenis yang akan disusutkan kemungkinan diperoleh pada tahun-tahun yang berbeda satu sama lain. Sebagai contoh, jika penyusutan pertama kali akan dilakukan pada akhir tahun 2014, besar kemungkinan akan dijumpai adanya jenis aset berupa peralatan dan mesin, misalnya mobil, yang diperoleh pada tahun-tahun sebelum tahun anggaran 2014 dan yang diperoleh pada tahun 2014. Perhitungan penyusutan aset tersebut untuk pertama kalinya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

Aset yang diperoleh pada tahun dimulainya penerapan penyusutan maka aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan. Perhitungannya penyusutannya adalah untuk tahun 2014 saja.

Aset yang diperoleh setelah penyusunan neraca awal hingga satu tahun sebelum dimulainya penerapan penyusutan. Aset tersebut sudah disajikan dengan nilai perolehan.



Penyusutannya terdiri dari penyusutan tahun berjalan dan koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya.

Aset yang diperoleh sebelum penyusunan neraca awal. Untuk aset-aset yang diperoleh lebih dari 1 tahun sebelum saat penyusunan neraca awal, maka aset tersebut disajikan dengan nilai wajar pada saat penyusunan neraca awal tersebut. Untuk menghitung penyusutannya, pertama ditetapkan sisa masa manfaat pada saat penyusunan neraca awal. Selanjutnya dihitung masa antara neraca awal dengan saat penerapan penyusutan

3.5.2.3.3 Penambahan Masa Manfaat

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi tertuang pada Tabel dalam Kebijakan ini sebagai berikut:

Tabel 3.3

Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap/Aset Lainnya

Kode Barang					Uraian	Jenis	Persentase Renovasi /Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Di Luar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	3	2	01		Alat Besar			
1	3	2	01	01	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	3
							> 45% S.D 65%	5
1	3	2	01	02	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	2
							> 45% S.D 65%	4
1	3	2	01	03	Alat Besar Bantu	Overhaul	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	2
							> 45% S.D 65%	4
1	3	2	02		Alat Angkutan			
1	3	2	02	01	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	02	02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Renovasi	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	1
							> 75% S.D 100%	1
1	3	2	02	03	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	6
1	3	2	02	04	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	1
							> 75% S.D 100%	2
1	3	2	02	05	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% S.D 25%	3
							> 25% S.D 50%	6
							> 50% S.D 75%	9
							> 75% S.D 100%	12
1	3	2	03		Alat Bengkel Dan Alat Ukur			
1	3	2	03	01	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	03	02	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	0
							> 50% S.D 75%	1
							> 75% S.D 100%	1
1	3	2	03	03	Alat Ukur	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	04		Alat Pertanian			
1	3	2	04	01	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% S.D 20%	1
							> 21% S.D 40%	2
							> 51% S.D 75%	5
1	3	2	05		Alat Kantor Dan Rumah Tangga			
1	3	2	05	01	Alat Kantor	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	05	02	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	05	03	Meja Dan Kurji Kerja/Rapat Pejabat	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	2
1	3	2	06		Alat Studio Dan Alat Komunikasi			
1	3	2	06	01	Alat Studio	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	06	02	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	06	03	Peralatan Pemancar	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	06	04	Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	07		Alat Kedokteran Dan Kesehatan			
1	3	2	07	01	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	07	02	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	08		Alat Laboratorium			
1	3	2	08	01	Alat Unit Laboratorium	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	08	02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	08	03	Alat Peraga/ Praktek Sekolah	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	08	04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/ Elektronika	Overhaul	> 0% S.D 25%	3
							> 25% S.D 50%	5
							> 50% S.D 75%	7
							> 75% S.D 100%	8
1	3	2	08	05	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	08	06	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	08	07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	08	08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	Overhaul	> 0% S.D 25%	3
							> 25% S.D 50%	5
							> 50% S.D 75%	7
							> 75% S.D 100%	8
1	3	2	08	09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	09		Alat Persenjataan			
1	3	2	09	01	Senjata Api	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	09	02	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	09	03	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	09	04	Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	10		Komputer			
1	3	2	10	01	Komputer Unit	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	10	02	Peralatan Komputer	Renovasi	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	11		Alat Eksplorasi			
1	3	2	11	01	Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	11	02	Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	2	12		Alat Pengeboran			
1	3	2	12	01	Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	12	02	Alat Pengeboran Non Mesin	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	13		Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian			



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	3	2	13	01	Sumur	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	13	02	Produksi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	13	03	Pengolahan Dan Pemurnian	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	14		Alat Bantu Eksplorasi			
1	3	2	14	01	Alat Bantu Eksplorasi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	14	02	Alat Bantu Produksi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	15		Alat Keselamatan Kerja			
1	3	2	15	01	Alat Deteksi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	15	02	Alat Pelindung	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	15	03	Alat Sar	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	1
							> 75% S.D 100%	2
1	3	2	15	04	Alat Kerja Penerbangan	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	16		Alat Peraga			
1	3	2	16	01	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	17		Alat Proses/Produksi			
1	3	2		02	Unit Alat Proses/Produksi	Overhaul	> 0% S.D 25%	2
							> 25% S.D 50%	3
							> 50% S.D 75%	4
							> 75% S.D 100%	5
1	3	2	18		Rambu-Rambu			
1	3	2	18	01	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	18	02	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	18	03	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	2	19		Peralatan Olah Raga			
1	3	2	19	01	Peralatan Olah Raga	Overhaul	> 0% S.D 25%	0
							> 25% S.D 50%	1
							> 50% S.D 75%	2
							> 75% S.D 100%	3
1	3	3	01		Bangunan Gedung			



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	3	01	01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	3	02		Monumen			
1	3	3	01	01	Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	3	03		Bangunan Menara			
1	3	3	03	01	Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	3	04		Tugu Titik Kontrol/ Pasti			
1	3	3	04	01	Tugu Tanda/ Tanda Batas	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	01		Jalan Dan Jembatan			
1	3	4	01	01	Jalan	Renovasi	> 0% S.D 30%	2
							> 30% S.D 45%	4
							> 45% S.D 65%	6
							> 65% S.D 100%	8
1	3	4	01	02	Jembatan	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	02		Bangunan Air			
1	3	4	02	01	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	02	02	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	02	03	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	02	04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% S.D 30%	2
							> 30% S.D 45%	4
							> 45% S.D 65%	6
							> 65% S.D 100%	8
1	3	4	02	05	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% S.D 30%	2
							> 30% S.D 45%	4
							> 45% S.D 65%	6
							> 65% S.D 100%	8
1	3	4	02	06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	02	07	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03		Instalasi			
1	3	4	03	01	Instalasi Air Bersih / Air Baku	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

a	b	c	d	e	f	g	h	i
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	02	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	03	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	5
							> 45% S.D 65%	7
							> 65% S.D 100%	10
1	3	4	03	04	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	5
							> 45% S.D 65%	7
							> 65% S.D 100%	10
1	3	4	03	05	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	06	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	07	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	08	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	09	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	03	07	Instalasi Lain	Renovasi	> 0% S.D 30%	1
							> 30% S.D 45%	2
							> 45% S.D 65%	3
							> 65% S.D 100%	5
1	3	4	04		Jaringan			
1	3	4	04	01	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	04	02	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	04	03	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	4	04	04	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% S.D 30%	5
							> 30% S.D 45%	10
							> 45% S.D 65%	15
							> 65% S.D 100%	20
1	3	5	02		Barang Bercorak Kebudayaan			
1	3	5	02	01	Barang Bercorak Kesenian / Alat Musik Modern	Overhaul	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
1	3	5	07		Aset Tetap Dalam Renovasi			
1	3	5	02	01	Aset Tetap Dalam Renovasi – Peralatan Dan Mesin	Overhaul/	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4



a	b	c	d	e	f	g	h	i
					Aset Tetap Dalam Renovasi – Gedung Dan Bangunan	Renovasi	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4
					Aset Tetap Dalam Renovasi – Jalan, Jaringan Dan Irigasi	Overhaul/ Renovasi	> 0% S.D 25%	1
							> 25% S.D 50%	2
							> 50% S.D 75%	3
							> 75% S.D 100%	4

Selain belanja modal untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal yang menambah aset tetap jika memenuhi seluruh kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

- Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
 - Bertambah umur ekonomis; dan/atau
 - Bertambah volume; dan/atau
 - Bertambah kapasitas produktivitas.
- Ada perubahan bentuk fisik semula, kecuali peralatan dan mesin, dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap.

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Contoh kasus overhaul/renovasi:

Badan Arsip dan Perpustakaan mempunyai gedung arsip yang diperoleh pada tahun 2000. Harga perolehan gedung tersebut 30 milyar dengan masa manfaat 30 tahun. Pada tahun ke-10 yaitu 2010 dilakukan renovasi pertama senilai 10 milyar. Pada tahun 2015 dilakukan kembali renovasi ke-2 senilai 15 milyar.

Berapa besarnya akumulasi penyusutan setelah terjadi renovasi pertama dan kedua?

Berapa besarnya Nilai Buku setelah renovasi pertama dan kedua?

Berapa biaya penyusutan yang akan dibebankan pada tahun ke-10 dan ke-15 ini?

Berapa masa manfaat setelah renovasi pertama dan kedua?

➤ Sebelum Renovasi

Harga Perolehan	30.000.000.000
Masa manfaat awal	30 tahun
Masa manfaat yang sudah berjalan	10 tahun
Beban Penyusutan/tahun	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan di tahun ke-10	10.000.000.000
Nilai buku di tahun ke-10	20.000.000.000

➤ Setelah renovasi pertama tahun ke-10

Biaya renovasi ke-1	10.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	40.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	30.000.000.000
Persentase renovasi	33% (lihat tabel)



Penambahan masa manfaat	10 tahun (lihat tabel)
Masa manfaat setelah renovasi	30 tahun
Beban peyusutan tahun ke-11	1.000.000.000
Akumulasi penyusutan setelah renovasi/ tahun ke-11	11.000.000.000

Keterangan :

1. Harga perolehan setelah renovasi = (Harga perolehan awal) + (Biaya renovasi)
2. Nilai buku setelah renovasi = (Harga perolehan setelah renovasi) – (akumulasi penyusutan sebelum renovasi)
3. Persentase renovasi = (Biaya renovasi) : (Harga perolehan awal)
4. Beban Penyusutan setelah renovasi = (Nilai buku setelah renovasi) : (masa manfaat setelah renovasi)
5. Akumulasi penyusutan setelah renovasi = (Akumulasi penyusutan sebelum renovasi) + (beban penyusutan setelah renovasi)
6. Masa manfaat setelah renovasi = (siswa masa manfaat awal) + (penambahan masa manfaat renovasi)

➤ Sebelum renovasi kedua tahun ke-15

Akumulasi penyusutan di tahun ke-15	15.000.000.000
Nilai buku tahun ke-15	25.000.000.000
Masa manfaat yang sudah berjalan	5 tahun
Sisa Masa manfaat	25 tahun

➤ Setelah renovasi kedua

Biaya renovasi ke-2	15.000.000.000
Harga perolehan setelah renovasi	55.000.000.000
Nilai buku setelah renovasi	40.000.000.000
Persentase renovasi	38%
Penambahan masa manfaat	10 tahun
Masa Manfaat setelah renovasi	30 tahun
Masa Manfaat yang dipakai	30 tahun*

Keterangan

*Penambahan masa manfaat karena overhaul/ renovasi/ perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/ berkala /terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

3.5.2.1.3.3 Penghapusan Aset Tetap

1. Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.
2. Aset tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di Neraca.



3.5.2.1.3.4 Pemanfaatan Aset

1. Pemanfaatan aset daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.
2. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan aset daerah kepada suatu instansi Pemerintah atau pihak lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, aset daerah dikembalikan kepada pemiliknya.
3. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah kepada pihak ketiga dalam hubungan sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus atau berkala.
4. Penggunausahaan adalah pendayagunaan aset daerah oleh pihak ketiga yang dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah ditentukan.
5. Aset dalam status pinjam pakai atau disewakan tetap dicatat sebagai aset tetap di Neraca.
6. Aset dalam kerja sama operasional, seperti Bangun Serah Guna atau Bangun Guna Serah dicatat di Neraca dan diklasifikasikan sebagai aset lainnya.
7. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
8. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
9. Ketentuan tentang kerja sama dimaksud diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.2.1.3.5 Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

1. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Kebijakan Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
2. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana pada akun ekuitas.

3.5.2.1.3.6 Akuntansi Aset Tetap Tanah

1. Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
2. Tidak seperti institusi non Pemerintah, Pemerintah Daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, Pemerintah Daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.



3. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah Pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh Pemerintah namun belum disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah, atau pada kasus lain, terdapat tanah milik Pemerintah Daerah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, sebagai berikut:
 - a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - b. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
 - c. Dalam hal tanah dimiliki oleh Pemerintah Daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas Pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas Pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - (1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh Pemerintah Daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
4. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada.
6. SKPD menyajikan semua tanah yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.



3.5.2.1.3.7 Akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

1. Peralatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan.
2. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang dapat diakui sebagai aset tetap Pemerintah Daerah meliputi pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
3. Pengeluaran-pengeluaran sama dengan atau lebih Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah dan rawan hilang diklasifikasikan sebagai Barang Habis Pakai.
4. Peralatan dan Mesin diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.
5. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi peralatan dan mesin apabila ada.
7. Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin, metode penyusutan dan masa manfaat peralatan dan mesin.
8. SKPD menyajikan semua peralatan dan mesin yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.2.1.3.8 Akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain : bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu.
2. Gedung dan Bangunan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan baru yang nilainya sama dengan dan atau lebih dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diakui sebagai aset tetap gedung dan bangunan dalam neraca.
4. Pengeluaran pemeliharaan untuk gedung dan bangunan yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikapitalisasi sebagai aset tetap.
5. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan bangunan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada.
6. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi Gedung dan bangunan, metode penyusutan dan masa manfaat Gedung dan bangunan.
7. SKPD menyajikan semua gedung dan bangunan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.



3.5.2.1.3.9 Akuntansi Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan

1. Jalan, jaringan, dan instalasi mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.
2. Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi dan jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, jaringan, dan instalasi apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat jalan, irigasi dan jaringan.
5. SKPD menyajikan semua jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.2.1.3.10 Akuntansi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya, dan hewan/ternak dan tumbuhan.
2. Aset tetap lain diakui sebesar harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
3. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada.
4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan juga Kebijakan akuntansi mengenai metode penyusutan dan masa manfaat aset tetap lain.
5. SKPD menyajikan semua aset tetap lainnya yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.2.1.3.11 Akuntansi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.
2. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jadan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
3. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.



4. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.
5. Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.
6. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
7. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
8. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
9. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
10. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
 - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
11. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
 - c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
12. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
13. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
14. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
15. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
16. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
17. Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.



18. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
 - e. Retensi.
19. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeluaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi,
20. SKPD menyajikan semua konstruksi dalam pengerjaan yang dimiliki dalam neraca dan mengungkapkannya di Catatan atas Laporan Keuangan.

3.5.2.1.3.12 Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

1. Kebijakan Akuntansi ini tidak mengharuskan Pemerintah Daerah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah :
 - a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.
3. Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.
5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
6. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
7. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada Pemerintah Daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.



8. Untuk aset bersejarah lainnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (*ruins*).

3.5.2.1.3.13 Aset Infrastruktur (*Infrastructure Assets*)

1. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
 - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
 - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
 - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
2. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh Pemerintah Daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset Pemerintah Daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.
3. Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

3.5.2.1.3.14 Aset Militer (*Military Assets*)

Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan Akuntansi ini.

3.5.2.1.3.15 Penghentian dan Pelepasan (*Retirement And Disposal*)

1. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
2. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.5.2.1.3.16 Pengungkapan Aset

1. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal; dan akhir periode.
2. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan



- d. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
3. Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independen;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
 - e. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.
4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

3.5.2.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan yang diukur sebesar nilai nominal. Sedangkan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3.5.2.1.5 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset tak berwujud yang disajikan dalam Laporan Keuangan berupa Software dengan masa manfaat amortisasi 5 (lima) tahun.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat terjadi penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

3.5.2.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Kebijakan Akuntansi ini mengatur:

1. Akuntansi Kewajiban Pemerintah Daerah termasuk kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang yang ditimbulkan dari Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri;
2. Perlakuan akuntansi untuk transaksi pinjaman dalam mata uang asing;
3. Perlakuan akuntansi untuk transaksi yang timbul dari restrukturisasi pinjaman;
4. Perlakuan akuntansi untuk biaya yang timbul dari utang Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi ini tidak mengatur:



1. Akuntansi Kewajiban Diestimasi dan Kewajiban Kontinjensi;
2. Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai;
3. Transaksi dalam mata uang asing yang timbul atas transaksi selain dari transaksi pinjaman yang didenominasi dalam suatu mata uang asing.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya.

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai Pemerintah Daerah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke Pemerintah Daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.



Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali Pemerintah Daerah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Daerah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa Pemerintah Daerah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah.

Kejadian yang diakui Pemerintah Daerah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Daerah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Daerah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan Pemerintah Daerah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya, ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

1. Badan Legislatif (DPRD) telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan;
2. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

3.5.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5.3 Laporan Operasional- LO

Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit operasional dalam suatu periode laporan tertentu tidak termasuk perusahaan daerah.

3.5.3.1 Pendapatan-LO

Kebijakan Akuntansi ini diterapkan dalam penyajian seluruh Pendapatan-LO dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh entitas pelaporan dan entitas akuntansi tidak termasuk perusahaan daerah.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah, secara garis besar terdiri dari pendapatan pajak, pendapatan retribusi, pendapatan daerah lainnya.



Pengakuan Pendapatan-LO yang berasal dari pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan yang memerlukan penetapan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah (*official assessment*), diakui sebagai pendapatan harus memenuhi kriteria:
 - a. Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
 - b. Telah diterbitkan surat penagihan.
2. Pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*), diakui sebagai pendapatan jika:
 - a. Perhitungan yang dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi telah dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan Pajak atau Retribusi ini diakui ketika telah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
 - b. Perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak atau wajib retribusi tanpa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap nilai pajak atau retribusi yang dibayar, maka pendapatan diakui berdasarkan hasil perhitungan atau pembayaran sendiri oleh wajib pajak atau wajib retribusi.
3. Pendapatan yang tidak melalui penetapan tetapi langsung ditagih atau diterima diakui sebagai pendapatan apabila kas telah diterima oleh kolektor dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau telah disetor ke Kas Daerah.
4. Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya Pemerintah Daerah telah menerbitkan dokumen eksekusi yang sah. Pemerintah Daerah akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan oleh pihak ketiga seperti jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan jika pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai yang ditetapkan dalam perikatan atau kontrak.
5. Pendapatan perikatan diakui pada saat timbul hak tagih Pemerintah Daerah. Hak tagih Pemerintah Daerah timbul apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Telah terjadi transaksi yang menimbulkan hak tagih Pemerintah Daerah;
 - c. Jumlah hak tagih Pemerintah Daerah dapat diukur;
 - d. Telah diterbitkan surat penagihan.

Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan tiga kondisi yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas;
2. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas; dan
3. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak atau wajib retribusi yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak daerah atau retribusi daerah yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak atau Surat Tagihan Retribusi atau dokumen yang dipersamakan sebagai dasar penagihan pajak daerah atau retribusi daerah. Besarnya piutang pajak daerah atau retribusi daerah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRKB) atau dokumen yang dipersamakan.

Suatu transaksi yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa



waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) diakui sebesar yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. Jika terjadi perbedaan antara ketetapan dalam Peraturan Presiden dengan realisasi DAU yang diterima maka:

1. Jumlah yang ditetapkan lebih besar daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan peraturan terkait ketetapan kurang salur maka selisih tersebut dicatat sebagai pendapatan di Laporan Operasional dan hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca;
2. Jumlah yang ditetapkan lebih kecil daripada realisasi dana yang diterima yang ditandai dengan terbitnya peraturan terkait keketetapan lebih salur maka selisih tersebut tidak dicatat sebagai pendapatan tetapi diakui sebagai kewajiban Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan DAK telah diterima oleh Pemerintah Daerah. Perhitungan DAK ditetapkan dengan peraturan (misalnya Peraturan Menteri Keuangan tentang alokasi definitif DAK). Apabila jumlah DAK yang diterima oleh Pemerintah Daerah berbeda dengan peraturan penetapan alokasi dan semua persyaratan untuk mendapatkan dana tersebut telah dipenuhi tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran dan peraturan terkait kurang salur DAK telah terbit. Jumlah yang belum diterima diakui sebagai Pendapatan Dana Alokasi Khusus pada Laporan Operasional dan dicatat Piutang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat di Neraca sebesar jumlah klaim atau kurang salur yang ditetapkan dalam peraturan yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pendapatan transfer dari Pemerintah Daerah yang lain dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Pendapatan transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima. Pendapatan dicatat apabila kas telah diterima di rekening kas umum daerah. Jika jumlah/nilai definitif menurut Peraturan atau Surat Keputusan Kepala Daerah telah ditetapkan, berbeda dengan jumlah kas yang telah diterima.

Jumlah yang belum diterima tetap diakui sebagai pendapatan dan menimbulkan piutang atau hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima, sebaliknya kelebihan pembayaran kepada Pemerintah Daerah penerima dicatat sebagai kewajiban atau hutang di Neraca.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Pendapatan yang berkaitan dengan TP/TGR diakui setelah didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) jika penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SKTJM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pendapatan baru dapat diakui setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pendapatan disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan klasifikasi urusan pemerintahan daerah, organisasi, dan kelompok serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran pendapatan.

Hal-hal spesifik yang terkait dengan pendapatan LO sebagai berikut:



1. Pendapatan LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas, jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *Self Assessment* (retribusi, pajak hotel),
 - b. PAD dengan mekanisme *Official Assessment* yang karena ketetapanannya dibuat bersamaan dengan dilakukannya penerimaan kas (Pajak Kendaraan Bermotor),
 - c. Dana Perimbangan.
2. Pendapatan LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas, sebutkan jenis pendapatannya. Contoh:
 - a. PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (pajak air bawah tanah)
 - b. PAD dengan mekanisme *official assessment* yang diakui setelah penerimaan kas (pajak reklame)

Pengakuan pendapatan pajak daerah yang menganut sistem *self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pajak daerah, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak terutang adalah sebesar pajak yang harus dibayar sesuai ketentuan perundang-undangan pajak daerah dan diberitahukan melalui Surat Pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh WP ke instansi terkait.

Setelah adanya pengakuan pendapatan, wajib pajak yang bersangkutan wajib melunasinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak sebagai dasar penagihan pajak. Besarnya piutang pajak ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Suatu pendapatan yang telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, namun ketetapan kurang bayar dan penagihan akan ditentukan beberapa waktu kemudian maka pendapatan tersebut dapat diakui sebagai piutang. Penetapan perhitungan taksiran pendapatan dimaksud harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, dan limit waktu pelunasan tidak melebihi satu periode akuntansi berikutnya.

3.5.3.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban Operasi terdiri dari:

3.5.3.2.1 Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan beban yang timbul dari kewajiban untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai.

Beban pegawai dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayarkan gaji dan/atau tunjangan dan/atau uang lembur dan/atau honorarium dan/atau upah kepada pegawai yang digunakan tidak dalam rangka pengadaan aset tetap dan atau aset lainnya yang memiliki manfaat lebih dari 12 bulan.

Dalam hal beban pegawai seluruhnya dibayarkan dengan pengeluaran kas bersamaan dengan timbulnya kewajiban bagi Pemerintah Daerah, maka jumlah yang pengeluaran kas dicatat sebagai beban pegawai. Namun, jika kewajiban untuk membayarkan beban pegawai tidak disertai dengan pengeluaran kas maka kewajiban tersebut dicatat sebagai beban pada Laporan Operasional dan utang belanja Pemerintah Daerah di Neraca.

3.5.3.2.2 Beban Persediaan

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*) dan penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.



Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

3.5.3.2.3 Beban Jasa

Beban jasa dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul dari pemakaian jasa dan/atau penerimaan jasa yang disediakan oleh pihak lain.

Dalam hal pembayaran jasa dilakukan setelah periode pelaporan dimana jasa telah dikonsumsi dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah, maka beban jasa yang belum dibayar sampai dengan berakhirnya periode pelaporan tetap dicatat sebagai beban jasa di Laporan Operasional dan dicatat sebagai utang beban di Neraca.

3.5.3.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan terjadi ketika aset tetap dan/atau aset lainnya yang dipelihara: (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau (5) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pemeliharaan yang dilakukan terhadap aset tetap tidak dapat diakui sebagai beban pemeliharaan apabila pemeliharaan tersebut memenuhi syarat untuk dikapitalisasi pada aset tetap atau aset lainnya. Contoh kendaraan roda empat mengalami kerusakan sehingga perlu melakukan penggantian salah satu suku cadang mesin. Biaya penggantian suku cadang mesin tersebut sebesar Rp15.000.000,00 dan akan menambah umur ekonomis kendaraan roda empat tersebut. Pemerintah Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi untuk kendaraan roda empat sebesar Rp5.000.000,00 sehingga biaya penggantian suku cadang mesin sebesar Rp15.000.000,00 melewati batas minimal kapitalisasi. Sesuai persyaratan kapitalisasi aset tetap dan/atau lainnya yaitu pengeluaran yang mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki dan pengeluaran tersebut memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap/aset lainnya maka pemeliharaan kendaraan roda empat tersebut harus dikapitalisasi pada aset tetap dan tidak diakui sebagai beban pemeliharaan. Tetapi jika pemeliharaan kendaraan roda empat tidak menambah umur ekonomis atau biaya pemeliharaan tidak melewati batas minimal kapitalisasi maka diakui sebagai beban pemeliharaan.

Beban pemeliharaan dicatat :

- a. Sebesar nilai barang atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya; dan/atau,
- b. Sebesar kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang menyediakan jasa pemeliharaan terhadap aset tetap dan/atau aset lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah bebannya dicatat sebesar harga barang dan atau jasa yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan. Apabila pemeliharaan dilakukan oleh pihak ketiga atau penyedia barang dan jasa, beban pemeliharaan dicatat sebesar tagihan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah yang timbul dari kegiatan pemeliharaan aset tetap dan/atau aset lainnya.



Apabila pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan penagihan kepada Pemerintah Daerah, tetapi belum dilaksanakan pembayaran maka jumlah tagihan tersebut tetap diakui sebagai beban pemeliharaan pada Laporan Operasional sekaligus dicatat menambah utang pihak ketiga di Neraca.

3.5.3.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Biaya perjalanan dinas yang diakui sebagai beban perjalanan dinas adalah biaya perjalanan dinas yang tidak ditujukan untuk pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya. Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan aset tetap dan/atau aset lainnya dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

3.5.3.2.6 Beban Bunga

Bunga pinjaman yang diakui sebagai beban bunga adalah seluruh kewajiban yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk bunga terhadap pinjaman untuk membiayai pembangunan konstruksi selama masa konstruksi.

Bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi diakui sebagai penambahan aset tetap dan/atau aset lainnya. Bunga terhadap pinjaman untuk pembangunan konstruksi setelah masa konstruksi selesai diakui sebagai beban bunga atau tidak menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya.

Apabila bunga pinjaman untuk pembangunan konstruksi selama masa konstruksi dikapitalisasi menambah harga perolehan aset tetap dan/atau aset lainnya. Contoh, Pemerintah Daerah meminjam dana dari Bank untuk pembangunan pasar, dan pinjaman tersebut akan dilunasi selama tiga tahun. Bunga pinjaman jatuh tempo setiap tahun enam bulan. Pembangunan pasar dilaksanakan selama satu tahun. Bunga pinjaman yang jatuh tempo selama setahun (selama pembangunan pasar dilaksanakan) diakui sebagai penambah harga perolehan pasar, sedangkan bunga yang jatuh tempo setelah pembangunan pasar selesai diakui sebagai beban bunga.

Beban bunga dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar seluruh bunga pinjaman Pemerintah Daerah pada periode pelaporan. Beban bunga dari pinjaman untuk pembangunan konstruksi yang muncul masa konstruksi, tidak dicatat sebagai beban bunga tetapi dicatat menambah nilai aset tetap dan/atau aset lainnya yang sementara dibangun.

Bunga pinjaman tetap dicatat sebagai beban bunga yang dikenakan pada periode pelaporan meskipun bunga tersebut jatuh tempo pada periode yang akan datang. Contoh, bunga pinjaman setiap tahun sebesar Rp1.200.000.000,00 atau Rp100.000.000,00 per bulan yang jatuh tempo setiap enam bulan yaitu pada bulan Maret dan bulan September. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember tetap dicatat sebagai beban bunga pada periode pelaporan walaupun bunga pinjaman tersebut jatuh tempo dan dibayar pada bulan Maret periode yang akan datang, sedangkan bunga pinjaman pada bulan Oktober, November, dan Desember periode sebelumnya yang dibayar pada bulan Maret periode pelaporan dicatat sebagai beban bunga periode sebelumnya. Bunga pinjaman untuk bulan Oktober, November, dan Desember pada periode pelaporan yang jatuh tempo dan dibayarkan pada periode yang akan datang selain dicatat menambah beban bunga juga dicatat menambah hutang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

Bunga pinjaman yang telah jatuh tempo pada periode sebelumnya dan periode pelaporan yang belum dibayar ditambah bunga pinjaman pada periode pelaporan yang belum jatuh tempo dicatat sebagai utang bunga (*accrued interest*) di Neraca.

3.5.3.2.7 Beban Subsidi

Beban subsidi diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan subsidi sesuai yang



dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima subsidi.

Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima subsidi maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban subsidi. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima subsidi, maka beban subsidi diakui pada periode pembayaran subsidi akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban subsidi dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar subsidi kepada pihak penerima subsidi sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah meskipun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima subsidi tetap dicatat sebagai beban subsidi pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Subsidi dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban subsidi sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

3.5.3.2.8 Beban Hibah

Beban Hibah adalah beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang/ barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan hibah sesuai yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau;
- b. pembayaran hibah dilaksanakan jika dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan tentang hibah tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran hibah.

Pemberian hibah oleh Pemerintah Daerah biasanya diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah untuk dapat dibayarkan. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima hibah maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban hibah. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, maka beban hibah diakui pada periode pembayaran hibah akan dilaksanakan sesuai perjanjian.

Beban hibah dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar hibah kepada pihak penerima hibah sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan.

Hibah yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima hibah tetap dicatat sebagai beban hibah pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban hibah sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

3.5.3.2.9 Beban Bantuan Sosial

Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Beban bantuan sosial diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- a. Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan bantuan sosial sesuai



yang dipersyaratkan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dipenuhi oleh penerima bantuan sosial dan/atau;

- b. Pembayaran bantuan sosial dilaksanakan, jika tidak terdapat perjanjian atau jika dalam perjanjian/peraturan perundang-undangan tentang bantuan sosial tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran bantuan sosial.

Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah biasanya diberikan kepada masyarakat atau keluarga atau sekelompok masyarakat yang yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial mengalami kerawanan sosial. Resiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemberian bantuan sosial dapat diawali dengan perjanjian yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan untuk dapat dibayarkan dan dapat pula tanpa perjanjian. Meskipun perjanjian telah disepakati tetapi persyaratan dalam perjanjian tersebut belum dapat dipenuhi oleh penerima bantuan maka Pemerintah Daerah belum dapat mengakui sebagai beban bantuan sosial. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak memuat persyaratan yang/ harus dipenuhi oleh penerima bantuan, maka beban bantuan sosial diakui pada periode pembayaran bantuan dilaksanakan sesuai perjanjian, demikian pula dengan pemberian bantuan tanpa perjanjian.

Beban bantuan sosial dicatat sebesar kewajiban Pemerintah Daerah yang timbul untuk membayar bantuan kepada pihak penerima bantuan sesuai yang ditetapkan dalam perjanjian dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan sosial yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah namun persyaratan berdasarkan perjanjian atau ketentuan perundang-undangan telah dipenuhi oleh penerima bantuan tetap dicatat sebagai beban bantuan sosial pada Laporan Operasional dan menambah kewajiban lancar lainnya di Neraca.

Bantuan sosial dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat sebagai beban bantuan sosial sebesar nilai barang dan/atau jasa yang harus diserahkan oleh Pemerintah Daerah.

3.5.3.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan yang dipergunakan dalam penyesuaian nilai aset tetap Pemerintah Daerah adalah metode garis lurus (*straight line method*).

$$\text{Penyusutan Per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Penyusutan per periode adalah nilai yang disesuaikan atau dikurangkan pada nilai buku aset tetap untuk setiap periode pemakaian aset tetap. Periode perhitungan penyusutan aset tetap adalah setiap bulan.

Nilai yang dapat disusutkan (*depreciable cost*) adalah nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap. Penggunaan nilai perolehan atau nilai wajar aset tetap menjadi nilai yang dapat disusutkan karena aset tetap diniatkan untuk digunakan dalam operasi Pemerintah Daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir masa manfaatnya



meskipun suatu aset tetap dapat ditentukan nilai residunya. Dengan demikian secara prinsip tidak dikenal nilai residu.

Masa manfaat merupakan prakiraan umur pemakaian aset tetap yang diharapkan memberikan manfaat ekonomis bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintahan atau pelayanan kepada masyarakat. Masa manfaat setiap jenis aset berbeda tergantung karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Amortisasi merupakan penyusutan terhadap Aset Tidak Berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.

Untuk menerapkan amortisasi, Pemerintah Daerah harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui Pemerintah Daerah memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas bersih bagi Pemerintah Daerah.

Amortisasi Aset Tidak Berwujud hanya dapat diterapkan terhadap Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas. Amortisasi untuk Aset Tidak Berwujud tersebut dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*). Rumusan perhitungan amortisasi dengan metode garis lurus (*straight line method*) untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

$$APP = ATB - NS$$

Dimana:

APP = Amortisasi per Periode

ATB = Aset Tidak Berwujud

NS = Nilai Sisa Masa Manfaat

3.5.3.2.11 Beban Transfer

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer diakui sebagai beban pada periode pelaporan apabila:

- Timbul kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan transfer sesuai yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pembayaran transfer dilaksanakan jika dalam peraturan perundang-undangan tidak mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pembayaran transfer.

3.5.3.2.12 Beban Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga piutang menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih outstanding. Berhubung kolektibilitas piutang harus dipertimbangkan sebagai suatu *loss contingency*, maka metode penyisihan merupakan



suatu hal yang memungkinkan untuk menjaga aset dari kemungkinan kerugian yang dapat diperhitungkan secara rasional.

Metode penyisihan control terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca.

Untuk menentukan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan piutang berdasarkan umur piutang (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

- a. Piutang dengan kualitas lancar disisihkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);
- b. Piutang dengan kualitas kurang lancar disisihkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. Piutang dengan kualitas diragukan disisihkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- d. Piutang dengan kualitas macet disisihkan sebesar 100% (seratus persen).

3.5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

3.5.3.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

3.5.3.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.



BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

4.1.1 Pendapatan - LRA

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, penerimaan surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.498.407.798.338,00 dan terealisasi sebesar Rp1.549.649.873.412,52 atau 103,42% yang terdiri dari:

Tabel 4.1
Perbandingan Realisasi Pendapatan - LRA
Tahun 2021 dan Tahun 2020

No.	Uraian	Tahun 2021		Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	301.854.473.673,00	305.929.495.676,52	329.220.137.283,45
2	Pendapatan Transfer-LRA	1.099.435.740.491,00	1.133.306.677.695,00	1.051.666.102.557,20
3	Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA	97.117.584.174,00	110.413.700.041,00	114.784.195.738,00
Jumlah		1.498.407.798.338,00	1.549.649.873.412,52	1.495.670.435.578,65

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Daerah-LRA	178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	102,43	192.720.735.828,60
2	Retribusi Daerah-LRA	5.268.982.400,00	4.246.277.325,50	80,59	4.505.935.086,09
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	22.079.184.191,00	22.896.489.793,00	103,7	23.835.212.109,00
4	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	95.729.307.082,00	95.673.630.582,38	99,94	108.158.254.259,76
Jumlah		301.854.473.673,00	305.929.495.676,52	101,35	329.220.137.283,45

Rincian PAD pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan untuk seluruh komponen PAD sebesar 101,35% meskipun dalam masa pandemi Covid-19. Realisasi PAD Tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pendapatan Tahun 2020 sebesar Rp23.290.706.606,93 atau turun sebesar 7,07%.

Uraian Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:



4.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LRA

Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp183.113.097.975,64 dari target sebesar Rp178.777.000.000,00 atau sebesar 102,43% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.3
Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pajak Hotel-LRA	800.000.000,00	806.564.464,00	100,82	396.139.445,00
2	Pajak Restoran-LRA	7.632.000.000,00	7.970.609.930,00	104,44	6.156.784.787,60
3	Pajak Hiburan-LRA	25.000.000,00	12.900.000,00	51,60	16.465.000,00
4	Pajak Reklame-LRA	1.000.000.000,00	1.347.670.145,00	134,77	1.092.787.167,00
5	Pajak Penerangan Jalan-LRA	49.300.000.000,00	51.368.340.696,00	104,20	52.985.862.614,00
6	Pajak Air Bawah Tanah-LRA	20.000.000,00	21.062.279,00	105,31	20.024.123,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	112.500.000.000,00	113.792.409.919,00	101,15	125.096.320.427,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	4.500.000.000,00	4.512.686.071,64	100,28	4.469.698.900,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LRA	3.000.000.000,00	3.280.854.471,00	109,36	2.486.653.365,00
Jumlah		178.777.000.000,00	183.113.097.975,64	102,43	192.720.735.828,60

Untuk target Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp178.777.000.000,00 dan tercapai sebesar Rp183.113.097.975,64 atau 102,43%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, Pajak Daerah mengalami penurunan sebesar Rp9.607.637.852,96 atau 4,99%.

Dari sembilan jenis Pajak Daerah, terdapat Pajak Daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak Hiburan, dengan target sebesar Rp25.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp12.900.000,00 atau 51,60%. Tidak tercapainya target Pajak Hiburan merupakan dampak Pandemi Covid -19 sehingga diterapkan pembatasan orang untuk kegiatan yang menimbulkan kerumunan orang banyak. Mengingat pajak ini masih didominasi oleh kegiatan hiburan rakyat, sehingga kegiatan tersebut sangat terbatas/jarang dilakukan di tahun 2021.

4.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan Rp5.268.982.400,00 dan terealisasi sebesar Rp4.246.277.325,50 atau 80,59%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp259.657.760,59 atau 5,76%.

Rincian jumlah retribusi daerah yang dapat dipungut dan telah disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.4
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Retribusi Jasa Umum-LRA	1.139.544.500,00	984.810.600,00	86,42	941.653.750,00
1.1	Pelayanan Kesehatan-LRA	30.000.000,00	22.502.000,00	75,01	24.795.000,00
1.2	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	100.000.000,00	37.813.000,00	37,81	0
1.3	Pelayanan Pasar-LRA	197.544.500,00	179.175.500,00	90,7	163.161.750,00
1.4	Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	150.000.000,00	81.730.000,00	54,49	151.567.000,00
1.5	Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	602.000.000,00	602.450.000,00	100,07	602.130.000,00
1.6	Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	61.140.100,00	101,9	0
2.	Retribusi Jasa Usaha-LRA	1.027.437.900,00	827.467.500,00	80,54	920.578.000,00
2.1	Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	511.357.900,00	360.654.000,00	70,53	372.604.000,00
2.2	Tempat Pelelangan-LRA	31.000.000,00	1.000.000,00	3,23	3.000.000,00
2.3	Terminal-LRA	95.080.000,00	73.393.500,00	77,19	87.663.000,00
2.4	Rumah Potong Hewan-LRA	40.000.000,00	26.780.000,00	66,95	31.440.000,00
2.5	Pelayanan Kepelabuhanan-LRA	100.000.000,00	96.252.000,00	96,25	47.335.000,00
2.6	Penjualan Produksi Usaha Daerah-LRA	250.000.000,00	269.388.000,00	107,76	378.536.000,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu-LRA	3.102.000.000,00	2.433.999.225,50	78,47	2.643.703.336,09
3.1	Izin Mendirikan Bangunan-LRA	3.100.000.000,00	2.433.219.225,50	78,49	2.641.783.336,09
3.3	Izin Trayek-LRA	2.000.000,00	780.000,00	39	1.920.000,00
Jumlah		5.268.982.400,00	4.246.277.325,50	80,59	4.505.935.086,09

Pada Retribusi Jasa Umum terdapat lima jenis pelayanan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Pelayanan TeraUlang. Dari Target Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.139.544.500,00 dan terealisasi sebesar Rp984.810.600,00 atau 86,42%.

Untuk Retribusi Jasa Usaha terdiri dari enam jenis retribusi yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Target Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.027.437.900,00 dan terealisasi sebesar Rp827.467.500,00 atau 80,54%.

Sedangkan untuk Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari empat jenis terdiri dari Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin tertentu lainnya. Target Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp3.102.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.433.999.225,50 atau 78,47%.

Beberapa objek Retribusi Daerah yang tidak mencapai target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan dari target Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp22.502.000,00 atau 75,01%. Hal ini disebabkan dimasa pandemic Covid-19, kurangnya kunjungan pasien ke Puskesmas dan diutamakan pasien sedapat mungkin dirawat di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus sehingga



- mengakibatkan realisasi pendapatan dari jasa layanan kesehatan tidak mencapai target. Untuk Retribusi Pelayanan Kesehatan yang menjadi objek retribusinya adalah masyarakat diluar wilayah Luwu Timur;
2. Retribusi izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari target Rp3.102.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.433.999.225,50 atau 78,49%. Hal ini disebabkan terjadi penghentian penarikan Retribusi IMB sejak keluarnya SE Mendagri No. 011/5976/SJ, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan PBG dan Retribusi Penggunaan Tenaga Asing yang menginstruksikan seluruh Kab/Kota untuk tidak melakukan penarikan Retribusi PBG hingga Pemerintah Kab/Kota tersebut mengeluarkan Perda Retribusi PBG.;
 3. Retribusi Parkir Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dari target Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp37.813.000,00 atau 37,81%. Hal ini disebabkan penerapan Peraturan Daerah Baru yang masih membutuhkan sosialisasi yang intens kepada masyarakat, pengenaan retribusi ini mulai dilakukan pada pertengahan tahun 2021;
 4. Retribusi Izin Trayek dari target 2.000.000,00 dan terealisasi Rp780.000,00 atau 39,00%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan jumlah angkutan kendaraan perdesaan mengalami penurunan karena bukan lagi sebagai kendaraan utama angkutan antar wilayah di Luwu Timur sehingga sebagian besar angkutan kendaraan perdesaan tersebut berubah menjadi kendaraan angkutan lintas kabupaten/provinsi;
 5. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dari target 150.000.000,00 dan terealisasi Rp81.730.000,00 atau 54,49%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan terlambatnya terbit kartu izin Trayek dari Kementrian Perhubungan dimana Bulan Mei 2021 kartu tersebut baru di terima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur sehingga terjadi keterlambatan pemungutan Retribusi Izin Trayek;
 6. Retribusi Rumah Potong Hewan dari target 40.000.000,00 dan terealisasi Rp26.780.000,00 atau 66,95%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan jumlah RPH yang beroperasi berkurang selama masa pandemi covid-19 dan minat serta daya beli masyarakat yang turun/rendah;
 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target Rp511.357.900,00 dan terealisasi Rp360.654.000,00 atau 70,53%. Hal ini disebabkan pada target Retribusi Daerah Pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan tidak dapat mencapai target disebabkan untuk sewa gudang rumput laut dari target Rp120.000.000,00 dan terealisasi Rp30.000.000,00 atau 25,00% serta Retribusi sewa pabrik rumput laut dari target Rp100.000.000,00 yang tidak dapat direalisasikan sama sekali. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan telah di lakukan penagihan kepada mitra GRL.1 & 2 sebanyak 3 kali namun belum dibayar sampai dengan berakhirnya Tahun 2021, sehingga kekurangan pembayaran tersebut diakui menjadi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2021. Selain itu untuk Balai Benih Ikan juga tidak mencapai target dari pagu anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp19.545.000,00 atau 21,72% yang disebabkan pada Tahun 2021 kurangnya pembelian benih ikan dari petani pembudidaya ikan;
 8. Retribusi Tempat Pelelangan dari target Rp31.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 3,23%. Hal ini disebabkan belum ada UPTD yang dibentuk untuk melakukan lelang hasil perikanan di TPI. Selain itu masih terdapat



pembongkaran hasil perikanan yang tidak dilakukan di TPI sehingga menyulitkan pemungutan retribusinya;

9. Retribusi Terminal dari target Rp95.080.000,00 terealisasi sebesar Rp73.393.500,00 atau 77,19%. Hal ini disebabkan pada waktu tertentu pada masa pandemi covid – 19 Tahun 2021 arus bolak balik kendaraan sempat terhenti terutama untuk angkutan Bus yang ada di wilayah Luwu Timur ke Makassar. Selain itu untuk angkutan jarak pendek juga lebih kurang beroperasi di wilayah Luwu Timur terutama di masa pandemi covid – 19;

4.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2021 berupa penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT. Bank Sulselbar dan kepada BUMD PT. Bumi Timur Mineral. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp938.722.316,00 atau 3,94%.

Berdasarkan hasil RUPS tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima deviden dari PT. Bank Sulselbar sebesar Rp22.764.081.187,00 dan dari BUMD PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp132.408.606,00.

Tabel 4.5
Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.	Bank Sulselbar-LRA	22.079.184.191,00	22.764.081.187,00	103,1	23.835.212.109,00
2	BUMD PT. Bumi Timur Mineral – LRA	0,00	132.408.606,00	0,00	0,00
Jumlah		22.079.184.191,00	22.896.489.793,00	103,7	23.835.212.109,00

4.1.1.1.2 Lain-lain PAD yang Sah - LRA

Lain - lain PAD yang Sah yang ditargetkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp95.729.307.082,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp95.673.630.582,38 atau mencapai 99,94%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.484.688.677,38 atau 11,54% dari tahun sebelumnya.

Lain - Lain PAD yang Sah merupakan realisasi dari pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik kedalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain - lain PAD yang Sah untuk Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.6
Rincian Realisasi Lain-Lain PAD-LRA yang Sah
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA	258.001.184,00	343.367.283,00	133,09	466.997.625,00
1.1	Hasil Penjualan Tanah – LRA	0	5.400.000,00	0	0
1.2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat – LRA	111.403.000,00	152.870.600,00	137,22	344.719.563,00
1.3	Hasil Penjualan mesin/alat – alat berat tidak terpakai – LRA	36.832.654,00	75.331.153,00	20452	35.377.700,00
1.4	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua – LRA	109.765.530,00	109.765.530,00	100	86.900.362,00
2	Bunga Jasa Giro-LRA	4.500.000.000,00	3.707.492.586,04	82,39	3.091.350.369,68
3	Bunga Deposito-LRA	0	0	0	0
4	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	1.598.602.473,00	1.731.847.474,99	108,34	506.233.163,93
4.1	Bidang Pendidikan-LRA	25.272.435,00	25.272.435,00	100	0
4.2	Bidang Kesehatan-LRA	19.591.904,00	63.924.799,20	326,28	35.333.939,58
4.3	Bidang Pekerjaan Umum-LRA	1.515.854.941,00	1.602.968.073,79	105,75	469.582.224,35
4.5	Bidang Perumahan Rakyat-LRA	14.820.000,00	16.618.974,00	112,14	1.317.000,00
4.6	Bidang Pertanian-LRA	23.063.193,00	23.063.193,00	100	0
5	Pendapatan dari Denda Pajak-LRA	8.099.238,00	14.771.059,32	182,38	8.547.815,40
5.1	Pendapatan denda Pajak PBB-P2-LRA	8.099.238,00	14.771.059,32	182,38	8.547.815,40
6	Pendapatan Dari Pengembalian-LRA	44.655.000,00	212.169.265,00	475,13	1.071.835.131,03
6.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA	0	37.294.315,00	0	405.124.445,00
6.2	Pendapatan dari pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LRA	44.655.000,00	174.874.950,00	391,61	341.103.685,00
6.3	Pendapatan dari pengembalian Belanja Langsung	0	0	0	128.562.589,00
6.4	Pendapatan dari pengembalian Belanja Modal	0	0	0	197.044.412,03
7	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	1.417.000,00	0	0
8	Hasil Kerja Sama Daerah	3.819.949.187,00	3.933.107.507,03	102,96	0
9	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	0	569.188.694,00	0	380.098.530,72
9.1	Lain-lain PAD Yang Sah-LRA	0	569.188.694,00	0	380.098.530,72
10	Pendapatan BLUD-LRA	82.000.000.000,00	80.333.938.433,00	97,97	80.755.795.785,00
11	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi JKN)-LRA	0	0	0	17.139.469.459,00
12	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (Kapitasi Non JKN)-LRA	3.500.000.000,00	4.826.331.280,00	137,9	4.737.926.380,00
Jumlah		95.729.307.082,00	95.673.630.582,38	99,94	108.158.254.259,76



4.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2021 yang dianggarkan sebesar Rp1.099.435.740.491,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.133.306.677.695,00 atau sebesar 103,08% dan Tahun Anggaran 2020 direalisasikan sebesar Rp1.051.666.102.557,20. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp81.640.575.137,80 atau 7,76% dibandingkan Tahun 2020.

Pendapatan transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Bantuan Keuangan. Untuk Tahun Anggaran 2021 pendapatan transfer terdiri dari:

Tabel 4.7
Realisasi Pendapatan Transfer-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat-LRA	855.829.163.491,00	867.649.222.297,00	101,38	766.923.342.007,00
2	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA	117.539.647.000,00	117.263.644.446,00	99,77	115.448.707.000,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lain-Lainnya-LRA	126.066.930.000,00	148.393.810.952,00	117,71	169.294.053.550,20
Jumlah		1.099.435.740.491,00	1.133.306.677.695,00	103,08	1.051.666.102.557,20

4.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pendapatan Transfer berupa Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp855.829.163.491,00 dan direalisasikan sebesar Rp867.649.222.297,00 atau 101,38%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp100.725.880.290,00 atau 13,13% dibandingkan tahun 2020.

Pendapatan transfer yang berasal dari dana perimbangan untuk Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.8
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer –Dana Perimbangan-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Bagi Hasil Pajak-LRA	51.102.613.113,00	52.211.079.180,00	102,17	29.385.873.680,00
1.1	Bagi Hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB)-LRA	37.238.543.001	36.286.591.780,00	97,44	12.495.359.314,00
1.2	Bagi Hasil PPh pasal 25/29-LRA	404.008.559,00	319.959.500,00	79,20	531.551.629,00
1.3	Bagi Hasil PPh pasal 21-LRA	13.460.061.553,00	15.604.527.900,00	115,93	16.358.962.737,00
2	Bagi Hasil SDA-LRA	94.515.354.163,00	117.049.652.346,00	123,84	75.731.850.350,00
2.1	Sumber Daya Hutan (Reboisasi)-LRA	528.325.720,00	445.500.572,00	84,32	211.725.541,00
2.2	Iuran tetap (Land Rent)-LRA	4.220.842.291,00	3.701.866.603	87,70	3.534.514.776,00
2.3	Iuran Eksploitasi (Royalti)-LRA	87.173.838.505,00	110.150.593.404,00	126,36	71.013.842.958,00
2.4	Hasil Perikanan-LRA	1.199.925.130,00	1.357.619.150,00	113,14	788.276.289,00
2.5	Gas Bumi 30%-LRA	1.194.148.468,00	1.195.798.568,00	100,14	4.741.000,00
2.6	Gas Bumi 0.5%-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00



2.7	Minyak Bumi-15% -LRA	0,00	0,00	0,00	91.656,00
2.8	Minyak Bumi-0,5% -LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Cukai tembakau-LRA	198.274.049,00	198.274.049,00	100,00	178.658.130,00
3	Dana Alokasi Umum-LRA	502.393.009.000,00	502.393.009.000,00	100,00	508.456.665.000,00
4	Dana Alokasi Khusus-LRA	207.818.187.215,00	195.995.481.771,00	94,31	153.348.952.977,00
4.1	DAK Fisik	128.019.994.215,00	127.614.602.628,00	99,68	66.991.467.909,00
4.2	DAK Non Fisik	79.798.193.000,00	68.380.879.143,00	85,69	86.357.485.068,00
Jumlah		855.829.163.491,00	867.649.222.297,00	101,38	766.923.342.007,00

4.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya-LRA

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp117.539.647.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp117.263.644.446,00 atau 99,77%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp115.448.707.000,00, pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.090.940.000,00 atau 1,81%.

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk Tahun Anggaran 2021 adalah Dana Desa. Adapun rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dengan rincian nilai sebagai berikut.

Tabel 4.9
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya –LRA	117.539.647.000,00	117.263.644.446,00	99,77	115.448.707.000,00
1.1	Dana Desa (APBN)-LRA	117.539.647.000,00	117.263.644.446,00	99,77	115.448.707.000,00
1.2	Dana Insentif Daerah (DID)-LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		117.539.647.000,00	117.263.644.446,00	99,77	115.448.707.000,00

4.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp126.066.930.000,00 dan terealisasi sebesar Rp148.393.810.952,00 atau 117,71%. Realisasi pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp20.900.242.598,20 atau 12,35% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020 sebesar Rp169.294.053.550,20.

Transfer Pemerintah Provinsi merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2021 berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.10
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah-LRA	121.500.000.000,00	143.826.880.952,00	118,38	134.014.732.222,20
1.1	Pajak Kendaraan Bermotor-LRA	12.500.000.000,00	11.643.789.135,00	93,15	12.394.681.138,00
1.2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	8.500.000.000,00	9.291.411.722,00	109,31	8.540.388.899,00
1.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA	25.500.000.000,00	24.659.185.543,00	96,70	25.565.641.746,00
1.4	Pajak Air Permukaan-LRA	65.000.000.000,00	81.968.059.051,00	126,10	71.849.073.971,00
1.5	Pajak Rokok-LRA	10.000.000.000,00	16.264.435.501,00	162,64	15.664.946.468,20
2	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi-LRA	4.566.930.000,00	4.566.930.000,00	100,00	35.279.321.328,00
2.1	Bantuan Keuangan PKK-LRA	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	0
2.2	Bantuan Kesehatan Gratis – LRA	4.416.930.000,00	4.416.930.000,00	100,00	11.135.232.000,00
2.3	Bantuan Keuangan Infrastruktur	0,00	0,00	0,00	24.144.089.328,00
Jumlah		126.066.930.000,00	148.393.810.952,00	117,71	169.294.053.550,20

4.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebesar Rp97.117.584.174,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp110.413.700.041,00 atau mencapai 113,69%. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pos untuk menampung realisasi Pendapatan Lainnya berupa Dana Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam negeri dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan. Adapun rincian lain-lain Pendapatan daerah yang Sah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.11
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Hibah dari pemerintah Pusat –LRA	46.835.520.000,00	49.549.939.642,00	105,8	64.822.256.207,00
1.1	Hibah Dana BOS –LRA	37.655.520.000,00	39.916.172.000,00	106	40.163.511.580,00
1.2	Hibah Air Bersih-LRA	3.000.000.000,00	4.779.329.000,00	159,31	15.200.233.649,00
1.3	Hibah READSI -IFAD-LRA	6.180.000.000,00	1.488.438.642,00	24,08	9.458.510.978,00
1.4	Hibah ALS (Sanitasi)-LRA	0	3.366.000.000,00	0	0
2	Hibah dari Badan/Lembaga/ organisasi swasta-LRA	32.604.564.174,00	43.283.439.510,00	132,75	49.961.939.531,00



No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
2.1	Hibah dari Listrik-LRA	14.400.000.000,00	15.291.310.496,00	106,19	20.192.027.493,00
2.2	Hibah dari Scrap-LRA	18.204.564.174,00	27.992.129.014,00	153,76	29.769.912.038,00
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LRA	17.677.500.000,00	17.580.320.889,00	99,45	0
3.1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan-LRA	17.677.500.000,00	17.580.320.889,00	99,45	0
Jumlah		97.117.584.174,00	110.413.700.041,00	113,69	114.784.195.738,00

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menerima Pendapatan Hibah READSI-IFAD dari Pemerintah Pusat. Pemberian hibah didasarkan pada Perjanjian Hibah Daerah *Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READSI)* yang ditandatangani pada tanggal 12 Desember 2018. Pendapatan Hibah berupa hibah listrik dan *scrap* diterima dari PT Vale Indonesia, berdasarkan Naskah Hibah Daerah yang ditandatangani oleh PT Vale Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan yang awalnya di akui di Lain-lain PAD yang Sah menjadi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai Permendagri 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah..

4.1.2 Belanja

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.366.652.780.892,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.304.324.041.910,42 atau mencapai 95,44%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja tahun 2020 sebesar Rp1.224.717.801.721,05, maka realisasi Belanja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp79.605.990.189,35 atau 6,50%.

Sesuai dengan PSAP, Belanja Daerah disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan klasifikasi ekonomi atau jenisnya. Sedangkan penyajian Belanja Daerah menurut organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Realisasi Belanja Daerah menurut fungsi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Menurut Fungsi

FUNGSI		Anggaran	Realisasi	%
01	PELAYANAN UMUM	405.588.088.622,00	265.499.043.348,35	65,46
1	Pangan	1.396.873.287,00	1.377.607.361,32	98,62
2	Komunikasi dan Informatika	8.784.837.340,00	8.169.641.101,00	93,00
3	Statistik	92.489.624,00	70.161.524,00	75,86
4	Persandian	76.140.975,00	59.332.694,00	77,92
5	Kearsipan	301.797.485,00	301.633.885,00	99,95
6	Administrasi Pemerintahan	49.980.520.748,00	43.921.549.714,00	87,88
7	Pengawasan	11.736.409.981,00	9.380.629.965,00	79,93
8	Perencanaan Pembangunan	8.697.432.673,00	7.136.595.580,00	82,05
9	Keuangan	240.809.995.073,00	115.571.529.236,03	47,99



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

FUNGSI		Anggaran	Realisasi	%
10	Kepegawaian	6.627.442.567,00	6.148.608.567,00	92,77
11	Pendidikan dan Pelatihan	5.587.829.738,00	5.506.441.704,00	98,54
12	Penelitian dan Pengembangan	794.734.907,00	592.841.600,00	74,60
13	Sekretariat DPRD	34.800.925.390,00	33.136.807.586,00	95,22
14	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	35.900.658.834,00	34.125.662.831,00	95,06
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	25.968.263.622,00	24.602.494.366,20	94,74
1	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	22.220.724.783,00	21.254.411.052,20	95,65
2	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.747.538.839,00	3.348.083.314,00	89,34
04	EKONOMI	106.915.545.493,00	99.076.144.210,08	92,67
1	Tenaga Kerja	4.959.449.363,00	4.722.980.766,00	95,23
2	Pemberdayaan Masyarakat Desa	9.915.948.589,00	9.471.621.706,00	95,52
3	Perhubungan	11.622.541.986,00	11.392.054.924,98	98,02
4	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.119.063.633,00	4.013.069.589,00	97,43
5	Penanaman Modal	4.613.963.206,00	4.245.453.340,00	92,01
6	Kelautan dan Perikanan	13.239.571.155,00	13.074.942.164,10	98,76
7	Pertanian	54.783.463.412,00	48.563.194.531,00	88,65
8	Perdagangan	2.691.643.772,00	2.635.599.438,00	97,92
9	Perindustrian	479.561.382,00	469.508.506,00	97,90
10	Transmigrasi	490.338.995,00	487.719.245,00	99,47
05	LINGKUNGAN HIDUP	8.454.059.289,00	8.106.714.312,00	95,89
1	Pertanahan	550.824.385,00	485.723.728,00	88,18
2	Lingkungan Hidup	7.903.234.904,00	7.620.990.584,00	96,43
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	210.089.753.775,00	196.271.581.662,30	93,42
1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.081.164.390,00	185.644.171.806,42	93,72
2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	12.008.589.385,00	10.627.409.855,88	88,50
07	KESEHATAN	434.299.377.593,00	418.192.832.264,31	96,29
1	Kesehatan	425.668.531.788,00	409.938.145.481,31	96,30
2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.630.845.805,00	8.254.686.783,00	95,64
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	4.022.374.855,00	3.676.343.983,68	91,40
1	Kebudayaan	1.488.494.522,00	1.370.366.054,74	92,06
2	Pariwisata	2.533.880.333,00	2.305.977.928,94	91,01
10	PENDIDIKAN	353.578.220.591,00	354.185.015.879,48	100,17
1	Pendidikan	324.036.818.532,00	325.886.160.077,00	100,57
2	Kepemudaan dan Olah Raga	15.586.695.760,00	14.394.953.781,48	92,35
3	Perpustakaan	13.954.706.299,00	13.903.902.021,00	99,64
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	16.399.411.142,00	15.836.502.257,00	96,57
1	Sosial	9.438.071.544,00	9.152.401.705,00	96,97
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.097.086.687,00	1.057.105.613,00	96,36
3	Administrasi Kependudukan dan Capil	5.864.252.911,00	5.626.994.939,00	95,95

Sedangkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menurut organisasi tercantum pada tabel berikut.



Tabel 4.13
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Menurut Organisasi

No	SKPD	Tahun 2021		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	324.036.818.532.00	325.886.160.077.00	100,57
2	Dinas Kesehatan	240.068.640.010.00	228.717.117.789.39	95,27
3	Rsud I Lagaligo	185.599.891.778.00	181.221.027.691.92	97,64
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	169.881.608.670.00	158.063.142.041.92	93,04
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	41.119.518.770.00	39.039.429.548.38	94,94
6	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	17.304.754.022.00	16.945.145.344.00	97,92
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.915.970.761.00	4.309.265.708.20	87,66
8	Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.747.538.839.00	3.348.083.314.00	89,34
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	10.535.158.231.00	10.209.507.318.00	96,91
10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja Dan Perindustrian	5.929.349.740.00	5.680.208.517.00	95,80
11	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pangan	14.636.444.442.00	14.452.549.525.42	98,74
12	Dinas Lingkungan Hidup	7.542.685.624.00	7.275.724.384.00	96,46
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.864.252.911.00	5.626.994.939.00	95,95
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9.915.948.589.00	9.471.621.706.00	95,52
15	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.630.845.805.00	8.254.686.783.00	95,64
16	Dinas Perhubungan	11.622.541.986.00	11.392.054.924.98	98,02
17	Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.953.467.939.00	8.299.135.319.00	92,69
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.810.707.405.00	6.648.669.027.00	97,62
19	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.613.963.206.00	4.245.453.340.00	92,01
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga	19.609.070.615.00	18.071.297.765.16	92,16
21	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	14.256.503.784.00	14.205.535.906.00	99,64
22	Dinas Pertanian	54.783.463.412.00	48.563.194.531.00	88,65
23	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	9.492.167.580.00	7.729.437.180.00	81,43
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	240.809.995.073.00	232.835.173.682.03	96,69
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.215.272.305.00	11.655.050.271.00	95,41
26	Sekretariat Daerah	49.980.520.748.00	43.921.549.714.00	87,88
27	Sekretariat DPRD	34.800.925.390.00	33.136.807.586.00	95,22
28	Kecamatan Burau	3.119.381.489.00	3.018.540.330.00	96,77
29	Kecamatan Wotu	3.123.813.255.00	2.834.536.140.00	90,74
30	Kecamatan Tomoni	4.340.526.537.00	4.314.989.497.00	99,41
31	Kecamatan Mangkutana	3.012.396.820.00	2.946.110.507.00	97,80
32	Kecamatan Tomoni Timur	2.340.020.270.00	2.175.369.035.00	92,96
33	Kecamatan Kalaena	2.479.196.707.00	2.374.863.964.00	95,79
34	Kecamatan Angkona	2.766.473.523.00	2.561.747.784.00	92,60
35	Kecamatan Malili	4.319.696.654.00	3.879.650.946.00	89,81
36	Kecamatan Wasuponda	2.560.633.575.00	2.457.138.150.00	95,96
37	Kecamatan Towuti	3.756.646.906.00	3.644.119.884.00	97,00
38	Kecamatan Nuha	4.081.873.098.00	3.918.596.594.00	96,00
39	Inspektorat	11.736.409.981.00	9.380.629.965.00	79,93



Rincian realisasi belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) untuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.14
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	1.069.471.694.897,00	1.020.460.843.809,88	95,42	986.057.321.454,00
2	Belanja Modal	294.681.085.995,00	282.411.798.100,54	95,84	236.966.048.167,05
3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	1.451.400.000,00	58,06	1.708.532.100,00
Jumlah		1.366.652.780.892,00	1.304.324.041.910,42	95,44	1.224.731.901.721,05

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp1.020.461.093.809,88 atau 95,42% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp1.069.471.694.897,00. Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp34.403.522.355,88 atau 3,49% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp986.043.221.454,00.

Rincian belanja operasi masing-masing adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Pegawai	463.377.393.476,00	450.113.938.581,00	97,14	407.693.545.053,00
2	Belanja Barang dan Jasa	517.663.079.397,00	490.019.941.161,62	94,66	494.662.638.352,00
3	Belanja Subsidi	200.000.000,00	199.095.000,00	99,55	0,00
4	Belanja Hibah	86.703.504.524,00	78.663.751.067,26	90,73	69.606.738.049,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.527.717.500,00	1.464.368.000,00	95,85	14.080.300.000,00
Jumlah		1.069.471.694.897,00	1.020.461.093.809,88	95,42	986.043.221.454,00

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan realisasi belanja pegawai yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai tidak langsung dan realisasi belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja pegawai langsung. Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Tabel 4.16
Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1.1	Gaji dan Tunjangan	271.046.866.825,00	264.691.948.566,00	97,66	262.054.425.123,00
1.2	Tambahan Penghasilan PNS	99.137.216.354,00	95.929.693.490,00	96,76	93.723.886.560,00



1.3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	76.192.279.550,00	72.976.161.272,00	95,78	46.457.041.720,00
1.4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.843.163.369,00	13.474.924.639,00	97,34	0,00
1.5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	867.858.378,00	492.735.766,00	56,78	0
1.6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	659.080.000,00	488.422.848,00	74,11	4.336.666.650,00
1.7	Belanja Pegawai BOS	1.630.929.000,00	2.059.802.000,00	126,30	0
1.8	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0,00	44.450.000,00
1.9	Belanja Uang Lembur	0	0	0,00	1.077.075.000,00
Jumlah		463.377.393.476,00	450.113.688.581,00	97,14	407.693.545.053,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi untuk belanja pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp450.113.688.581,00** atau 97,14% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2020 sebesar Rp407.693.545.053,00, maka Belanja Pegawai Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp42.420.143.528,00 atau 10,40%.

Dikarenakan adanya perubahan rekening belanja sesuai Permendagri 90 Tahun 2020 sehingga terdapat beberapa rekening belanja pegawai yang mengalami perubahan diantaranya : Belanja Gaji Tunjangan DPRD dan Belanja Gaji Tunjangan KDH/WKDH pada Tahun 2021 terealisasi masing- masing sebesar Rp13.843.163.369,00 dan Rp492.735.766,00, pada tahun 2020 rekening tersebut disajikan pada rekening belanja Gaji dan Tunjangan; Belanja Pegawai BOS pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp2.059.802.000,00, yang sebelumnya pada Tahun 2020 disajikan pada rekening Belanja Barang Dan Jasa BOS; Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp44.450.000,00 dan pada tahun 2021 tidak dianggarkan; dan Belanja Uang Lembur pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.077.075.000,00, pada Tahun 2021 terealisasi pada rekening belanja Barang dan Jasa Operasional Rumah Sakit.

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp517.663.079.397,00, terealisasi sebesar Rp490.019.941.161,62 atau 94,66 %. Untuk tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.17
Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Barang	56.143.629.582,00	50.098.976.990,97	89,23	61.306.320.401,00
1.1	Belanja Barang Pakai Habis	56.143.629.582,00	50.098.976.990,97	89,23	61.306.320.401,00
2	Belanja Jasa	229.688.100.051,00	215.896.815.911,63	94,00	203.145.690.788,23
2.1	Belanja Jasa Kantor	140.748.271.127,00	131.932.498.210,02	93,74	128.099.396.012,73
2.2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	55.966.512.373,00	55.238.314.262,03	98,70	54.778.471.618,50



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.664.943.000,00	5.672.284.815,00	85,11	5.416.687.695,00
2.4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.047.200.000,00	1.635.450.000,00	79,89	728.677.455,00
2.5	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	13.258.837.103,00	11.006.872.105,58	83,02	2.194.329.600,00
2.6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	778.526.000,00	565.472.000,00	72,63	1.715.219.800,00
2.7	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.701.946.000,00	2.701.946.000,00	100,00	2.981.945.000,00
2.8	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.152.935.879,00	5.775.049.950,00	93,86	7.230.963.607,00
2.9	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.368.928.569,00	1.368.928.569,00	100,00	0,00
3	Belanja Pemeliharaan	26.074.971.901,00	23.250.000.061,02	89,17	23.432.376.167,90
3.1	Belanja Pemeliharaan Tanah	248.740.000,00	248.240.500,00	99,80	88.989.000,00
3.2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.782.251.224,00	7.464.001.463,00	84,99	6.405.402.937,00
3.3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.869.255.523,00	6.350.529.407,02	92,45	7.882.371.842,90
3.4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.164.725.154,00	9.177.228.691,00	90,29	8.213.812.368,00
3.5	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	841.800.020,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	64.056.469.500,00	55.536.510.756,00	86,70	47.995.362.943,00
4.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	64.056.469.500,00	55.536.510.756,00	86,70	47.995.362.943,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.125.162.000,00	18.887.923.500,00	98,76	36.418.900.000,00
5.1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.699.956.000,00	18.536.569.000,00	99,13	36.418.900.000,00
5.2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	425.206.000,00	351.354.500,00	82,63	0,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	30.574.746.363,00	35.277.846.780,00	115,38	0,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	92.000.000.000,00	91.071.867.162,00	98,99	72.458.549.500,00
8	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	21.780.222.444,82
9	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD	0,00	0,00	0,00	25.571.041.107,05
10	Belanja Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	126.800.000,00
11	Belanja Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	147.500.000,00
12	Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	0,00	0,00	2.279.875.000,00
Jumlah		517.663.079.397,00	490.019.941.161,62	94,66	494.662.638.352,00



Pada tabel di atas diuraikan jenis-jenis Belanja Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2021 yang dialokasikan sebesar Rp 517.663.079.397,00 dan direalisasikan sebesar Rp490.019.9411.161,62 atau 94,66%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2020 sebesar Rp494.662.638.352,00 maka terjadi penurunan sebesar Rp4.642.697.190,38 atau 0,94%.

Pada Tahun 2020 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPD terealisasi masing-masing sebesar Rp 21.780.222.444,82 dan Rp 25.571.041.107,05. Pada tahun 2021 terealisasi pada belanja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan.

Belanja Honorarium PNS tahun 2020 sebesar Rp126.800.000,00, tahun 2021 terealisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN. Belanja Honorarium Non PNS tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 147.500.000,00 dan tahun 2021 terealisasi pada Belanja Jasa Kantor.

Belanja Honorarium Pengelola Dana BOS tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 2.279.875.000,00 dan tahun 2021 terealisasi pada Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp 35.277.846.780,00

4.1.2.1.3 Belanja Bunga

Pada Tahun Anggaran 2021, tidak ada anggaran dan realisasi Belanja Bunga.

4.1.2.1.4 Belanja Subsidi

Belanja Subsidi Tahun 2021 dianggarkan Rp200.000.000,00 dan terealisasi Rp199.095.000,00 atau .99,55%.

4.1.2.1.5 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp86.703.504.524,00 dan direalisasikan sebesar Rp78.663.751.067,26 atau 90,73%. Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2020 sebesar Rp69.606.738.049,00, realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.057.013.018,26 atau 13,01%. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2021 berupa hibah uang kepada badan/lembaga/organisasi dan masyarakat, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 4.18
Realisasi Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	8.111.452.356,00	7.301.375.482,45	90,01	0,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan	77.818.173.317,00	70.588.496.733,81	90,71	69.606.738.049,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	773.878.851,00	773.878.851,00	100	0,00
Jumlah		86.703.504.524,00	78.663.751.067,26	90,73	69.606.738.049,00

Dari realisasi hibah sebagaimana tercantum pada tabel di atas, terdapat penerima hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp1.076.422.649,00. Belanja Hibah Tahun



2021 dan para penerima hibah secara rinci tercantum pada **Lampiran 1** untuk Hibah Uang yang diserahkan **dan Lampiran V** untuk barang yang diserahkan.

4.1.2.1.6 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp1.527.717.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.464.368.000,00 atau 95,85%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp11.441.432.000,00 atau 89,60% dibandingkan Tahun 2020. Belanja Bantuan Sosial terdiri dari:

Tabel 4.19
Realisasi Belanja Bantuan Sosial
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Bantuan Sosial	1.527.717.500,00	1.464.368.000,00	95,85	12.905.800.000,00
1a	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	816.900.000,00	776.100.000,00	95,01	12.775.300.000,00
1b	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	125.817.500,00	103.268.000,00	82,08	0,00
1c	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	585.000.000,00	585.000.000,00	100	130.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan sosial kepada anggota masyarakat yang disediakan untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan dan yang direncanakan diberikan kepada anggota masyarakat yang tertimpa bencana alam. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2021 dan masing-masing penerima tercantum pada **lampiran 2**.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp294.681.085.995,00 dan terealisasi sebesar Rp282.411.798.100,52 atau 95,84%. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp45.445.749.933,47 atau 19,18%.

Rincian Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.20
Realisasi Belanja Modal
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
1	Belanja Modal Tanah	600.000.000,00	571.282.000,00	95,21	486.845.575,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	55.911.314.561,00	52.160.400.224,13	93,29	48.030.983.980,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	99.647.671.037,00	97.920.824.771,06	98,27	60.919.461.918,58



No.	Uraian	Tahun 2021		%	Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi		
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	138.270.770.397,00	131.513.051.105,33	95,11	127.319.574.693,47
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	251.330.000,00	246.240.000,00	97,97	209.182.000,00
Jumlah		294.681.085.995,00	282.411.798.100,52	95,84	236.966.048.167,05

Anggaran dan realisasi Belanja Modal diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp571.282.000,00 atau 95,21%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp84.436.425,00 atau 17,34% dibandingkan Tahun 2020. Belanja Modal Tanah Tahun 2020 untuk pengadaan Tanah Bangunan Tempat Kerja.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp55.911.314.561,00 dengan realisasi sebesar Rp52.160.400.224,13 atau 93,29%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami Kenaikan sebesar Rp4.129.416.244,13 atau 8,60% dibandingkan Tahun 2020.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.21
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Besar	916.954.818,00	914.040.800,00	99,68
2	Belanja Modal Alat Angkutan	6.335.461.728,00	6.197.197.182,40	97,82
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	284.300.000,00	282.440.000,00	99,35
4	Belanja Modal Alat Pertanian	196.860.000,00	196.630.600,00	99,88
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.351.714.504,00	7.086.058.285,00	96,39
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.292.080.000,00	1.274.883.710,00	98,67
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	9.087.510.931,00	8.977.196.341,92	98,79
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	15.045.647.105,00	14.838.248.056,00	98,62
9	Belanja Modal Komputer	6.503.159.885,00	6.249.063.256,81	96,09
10	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	199.800.000,00	199.585.139,00	99,89
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	248.575.000,00	243.979.400,00	98,15
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.449.250.590,00	3.056.579.473,00	88,62
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	5.000.000.000,00	2.644.497.980,00	52,89
Jumlah		55.911.314.561,00	52.160.400.224,13	93,29

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp99.647.671.037,00 dengan realisasi sebesar Rp97.920.824.771,06 atau 98,27%.



Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.001.362.852,48 atau 60,74% dibandingkan Tahun 2020.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 tersebut direalisasikan untuk memperoleh/ membeli barang milik daerah sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.22
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	91.847.375.256,00	90.022.862.560,92	98,01
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	499.421.513,00	493.349.013,00	98,78
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.300.874.268,00	6.980.043.247,14	95,60
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	424.569.950,00	0,00
Jumlah		99.647.671.037,00	97.920.824.771,06	98,26

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp138.270.770.397,00 dengan realisasi sebesar Rp131.513.051.105,33 atau 95,11%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.193.476.411,86 atau 3,29% dibandingkan Tahun 2020.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.23
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Jalan	83.839.565.960,00	78.054.790.938,97	92,72
2	Jembatan	5.829.400.958,00	5.434.407.083,03	93,22
3	Bangunan air irigasi	22.369.217.773,00	22.222.860.985,92	99,35
4	Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	9.768.417.820,00	9.618.894.790,20	98,47
5	Bangunan Air Bersih/Air Baku	1.611.811.418,00	1.549.273.643,91	96,12
6	Bangunan Air Kotor	4.426.468.500,00	4.373.446.500,00	98,80
7	Instalasi air minum/air bersih	3.250.000,00	1.313.190,00	40,41
8	Instalasi pembangkit listrik	1.573.558.936,00	1.555.960.000,00	98,88
9	Instalasi Pengaman	15.000.000,00	12.675.127,00	84,50
10	Jaringan air minum	5.515.354.032,00	5.476.003.393,80	99,29
11	Jaringan listrik	3.318.725.000,00	3.213.425.452,50	96,83
Jumlah		138.270.770.397,00	131.513.051.105,33	95,11

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp251.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp246.240.000,00 atau 97,97%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp37.058.000,00 atau 17,72% dibandingkan Tahun 2020.

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 tersebut direalisasikan untuk memperoleh aset tetap sebagaimana disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.24
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak (buku)	251.330.000,00	246.240.000,00	97,97
2	Barang bercorak kebudayaan	0,00	0,00	0,00
3	Hewan	0,00	0,00	0,00
Jumlah		251.330.000,00	246.240.000,00	97,98

4.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.451.400.000,00 atau 58,06%. Realisasi belanja Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 257.132.100,00 atau 15,05% dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp1.708.532.100,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021 direalisasikan untuk kegiatan penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, yaitu Dinas Kesehatan dan Bantuan yang tidak direncanakan untuk bencana alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD).

4.1.3 Transfer

Pada tahun 2021 Dana Transfer dianggarkan sebesar Rp 198.662.314.090,00 dan terealisasi sebesar Rp 198.386.274.819,00 atau 99,86%. Dibandingkan dengan Tahun 2020, realisasi Transfer mengalami penurunan sebesar Rp1.526.199.565,00 atau 6,53%.

Realisasi Transfer tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.25
Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	19.722.667.090,00	19.722.629.773,00	100,00	17.262.101.969,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	99,85	194.985.075.098,00
Jumlah		198.662.314.090,00	198.386.274.819,00	99,86	212.247.177.067,00

4.1.3.1 Transfer Bagi Hasil ke Desa

Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp19.722.667.090,00 dan terealisasi sebesar Rp19.722.629.773,00 atau 100%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.460.527.804,00 atau 14,25% dibandingkan realisasi Tahun 2020. Realisasi Bagi Hasil ke Desa disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.26
Realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Bagi Hasil Pajak	19.272.073.582,00	19.272.063.361,00	100,00	16.843.320.838,00
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	450.593.508,00	450.566.412,00	99,85	418.781.131,00
Jumlah		19.722.667.090,00	19.722.629.773,00	99,86	17.262.101.969,00

4.1.3.1.1 Transfer Bagi Hasil Pajak

Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah kepada 124 Pemerintah Desa terealisasi sebesar Rp19.272.063.361,00 atau 100,00%. Rincian pada **Lampiran 3.a**.

4.1.3.1.2 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya merupakan pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada 124 Pemerintah Desa sebesar Rp450.566.412,00 atau 99,99%. Rincian pada **Lampiran 3.b**.

4.1.3.2 Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp178.939.647.000,00 terealisasi sebesar Rp178.663.645.046,00 atau 99,85%. Realisasi transfer tersebut turun sebesar Rp17.671.379.429.502,00 atau 9,06% dibandingkan realisasi Tahun 2020. Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari.

Tabel 4.27
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan ke desa	178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	99,85	194.388.707.000,00
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	596.368.098,00
Jumlah		178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	99,85	194.985.075.098,00

4.1.3.2.1 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lainnya tidak dianggarkan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2021.

4.1.3.2.2 Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa

Transfer Bantuan Keuangan Kepada Desa tahun 2021 terdiri dari Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan sebesar Rp61.400.000.600,00 terealisasi sebesar Rp61.400.000.600,00 atau 100% dan Dana Desa (DD) dianggarkan sebesar Rp117.263.644.446,00 dan terealisasi Rp 117.263.644.446,00 atau 100%.



Tabel 4.28
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			Realisasi 2020
		Anggaran	Realisasi	%	
a.	Bantuan Kendaraan Desa	0,00	0,00	0,00	11.660.000.000,00
b.	Alokasi Dana Desa (ADD)	61.400.000.600,00	61.400.000.600,00	100,00	67.280.000.000,00
c.	Dana Desa	117.263.644.446,00	117.263.644.446,00	100,00	115.448.707.000,00
Jumlah		178.939.647.000,00	178.663.645.046,00	100,00	196.126.348.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Desa sebesar Rp 178.663.645.046,00 merupakan Bantuan Keuangan kedesa yang diberikan kepada pemerintah desa berupa Alokasi Dana Desa (ADD), Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.400.000.600,00 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp117.263.644.446,00. Rincian masing-masing pada **lampiran 4**.

4.1.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran yang terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan;
2. Pengeluaran Pembiayaan.

4.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Realisasi sebesar Rp72.907.296.644,25 yaitu 100% dari anggaran Rp72.907.296.644,00. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.29
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2021			
		Anggaran	Realisasi	Lebih/ (Kurang)	%
1	Penggunaan SiLPA	72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	0,00	100
Jumlah		72.907.296.644,00	72.907.296.644,25	0,00	100

4.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan Daerah dianggarkan untuk pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PT Bank Sulselbar dan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi 100% merupakan penambahan modal pada PDAM sebesar Rp3.000.000.000,00 dan di bank Sulselbar sebesar Rp Rp3.000.000.000,00.



4.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp113.846.853.327,37 merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto. Rincian dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 4.30
Rincian SiLPA Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas BUD	108.749.071.589,63
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	108.614.350,00
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00
4	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	2.606.474.356,00
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	296.236.532,74
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	86.456.499,00
7	Saldo Akhir Setara Kas	2.000.000.000,00
8	Utang PFK	0,00
Jumlah		113.846.853.327,37

SiLPA per tanggal 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp113.846.853.327,37 terdiri dari :

1. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp108.749.071.589,63 yang terdiri dari:
 - a. Sisa Dana Non Sertifikasi Guru Rp107.700.000,00;
 - b. Sisa DAK Non Fisik Rp8.249.051.557,00;
 - c. Sisa DAK Fisik Rp923.229.262,00;
 - d. SiLPA Murni Tahun 2021 Rp99.469.090.770,63.
2. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp108.614.350,00;
3. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
4. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp 2.606.474.356,00;
5. Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp296.236.532,74;
6. Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS senilai Rp86.456.499,00;
7. Setara Kas (Rekening Deposito BLUD) senilai Rp2.000.000.000,00.

4.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah Laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal SiLPA dikurangi penggunaan SAL tahun berjalan ditambah SiLPA dikurangi koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 masing-masing adalah Rp113.846.853.327,37 dan Rp72.907.296.644,25

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp72.907.296.644,25 .

4.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2020 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2021, yaitu sebesar Rp72.907.296.644,25.



4.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp113.846.853.327,37 dapat diuraikan sebagai berikut:

- Surplus / Defisit Anggaran	Rp46.939.556.683,12
- Pembiayaan Netto	Rp66.907.296.644,25
- SiLPA Tahun berjalan	Rp113.846.853.327,37

4.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tidak ada koreksi kesalahan selama Tahun Anggaran 2021.

4.2.5 Lain-lain

Tidak ada transaksi lain-lain yang mempengaruhi Saldo Anggaran Lebih selama Tahun 2021.

4.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp113.846.853.327,37 atau naik sebesar Rp40.939.556.683,12 atau 56,15% dari Tahun 2020 sebesar Rp72.907.296.644,25.

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Penjelasan pos-pos neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo rekening neraca yang disajikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Posisi Keuangan per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 adalah Aset Sebesar Rp3.326.687.860.136,79 dan Rp3.303.978.832.070,39. Kewajiban per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp52.235.642.592,09 dan Rp42.841.649.073,41. Ekuitas per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 sebesar Rp3.274.452.217.544,72 dan Rp3.261.137.182.996,98.

Penjelasan secara umum Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 4.31
Ringkasan Neraca
per 31 Desember Tahun 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Selisih	%
1	Aset	3.326.687.860.136,79	3.303.978.832.070,39	22.709.028.066,42	0,69
2	Kewajiban	52.235.642.592,09	42.841.649.073,41	9.393.993.518,68	21,93
3	Ekuitas	3.274.452.217.544,70	3.261.137.182.996,98	13.315.034.547,72	0,40

Penjelasan terhadap pos-pos neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diuraikan sebagai berikut:

4.3.1 Aset

Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Rincian nilai sebagaimana pada tabel berikut:



Tabel 4.32
Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Selisih	%
1	Aset Lancar	283.061.901.309,22	203.134.604.392,96	79.927.296.916,26	0,69
2	Investasi Jangka Panjang	143.430.167.120,57	143.251.633.564,27	178.533.556,30	0,12
3	Aset Tetap	2.857.058.088.011,46	2.809.410.577.288,61	47.647.510.722,85	1,70
4	Aset Lainnya	43.137.703.695,54	148.182.016.824,55	(105.044.313.128,01)	(70,89)
Jumlah		3.326.687.860.136,79	3.303.978.832.070,39	22.709.028.066,42	0,69

Total aset tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp22.709.028.066,42 atau 0,69% dibandingkan dengan tahun 2020. Rincian masing-masing jenis Aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1 Aset Lancar

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp283.061.901.309,22 dan Rp203.134.604.392,96 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.33
Rincian Aset Lancar
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	Selisih	%
Kas dan Setara Kas	113.854.304.476,37	72.907.296.644,25	40.947.007.832,12	56,16
Piutang	121.291.232.407,18	71.644.339.014,00	49.646.893.393,18	69,30
Penyisihan Piutang	(1.361.995.011,58)	(1.049.681.808,23)	(312.313.203,35)	29,75
Beban Dibayar Dimuka	620.087.007,38	465.526.969,57	154.560.037,81	33,20
Persediaan	48.658.272.429,87	59.167.123.573,36	(10.508.851.143,49)	(17,76)
Jumlah	283.061.901.309,22	203.134.604.392,95	79.927.296.916,27	39,35

4.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah dan Kas dalam penguasaan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, BLUD, FKTP, BOS dan Kas Lainnya di Bendahara, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.34
Rincian Kas dan Setara Kas
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
	2021	2020	Selisih	%
Kas di Kas Daerah	108.749.071.589,63	52.435.799.001,79	56.313.272.587,84	107,39



Kas di Bendahara Penerimaan		40,00	(40)	(100)
Kas di Bendahara Pengeluaran	108.614.350,00	23.989.900,00	84.624.450	352,75
Kas di Bendahara BLUD	2.606.474.356,00	2.863.471.015,00	(256.996.659)	(8,98)
Kas di Bendahara FKTP	296.236.532,74	1.469.523.935,46	(1.173.287.403)	(79,84)
Kas di Bendahara BOS	86.456.499,00	564.512.752,00	(478.056.253)	(84,68)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	7.451.149,00	0,00	7.451.149,00	100
Setara Kas	2.000.000.000,00	15.550.000.000,00	13.550.000.000,00	87,14
Jumlah	113.854.304.476,37	72.907.296.644,25	40.947.007.831,84	56,16

Dari tabel di atas menunjukkan terjadi kenaikan aset lancar sebesar Rp40.947.007.831,84 atau naik sebesar 56,16%. Adapun penjelasan dari masing-masing jenis Kas dan Setara Kas dapat diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah pada neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp108.749.071.589,63 dan Rp52.435.799.001,79. Saldo berdasarkan rekening koran sebesar Rp152.306.537.663,54 dengan rincian tabel berikut..

Tabel 4.35
Rekening Kas Umum Daerah
Per 31 Desember 2021

No.	No. Rekening	Bank	Saldo
1	093.001.000009.8	PT. Bank Sulselbar Cab. Malili	46.495.404.114,98
2	093.001.000028.4	PT. Bank Sulselbar Cab. Malili	89.422.146.953,10
3	087854123	PT. BNI Capem Malili	15.237.642.306,00
4	152.00.000563442.9	PT. Bank Mandiri Cab. Sorowako	55.923.839,43
5	2189.01.000063.30.7	PT. BRI Capem Malili	1.065.387.545,60
6	2189.01.000064.30.3	PT. BRI Capem Malili	30.032.904,43
Jumlah			152.306.537.663,54

Terdapat selisih pada saldo kas di neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp43.557.466.073,91 dengan pembukuan pada bank dimana saldo menurut pembukuan sebesar Rp108.749.071.589,63 dan menurut bank sebesar Rp152.306.537.663,54. Adapun rincian selisih tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat SP2D 2021 yang *outstanding* ke Tahun 2022 pada PT. Bank Sulselbar Cabang Malili nomor rekening 093.001.000000028.4 sebanyak 290 SP2D sebesar Rp43.383.854.073,91 dan telah terbuku pada tanggal 3 dan 4 Januari 2022;
2. Terdapat SP2D 2021 yang *outstanding* ke Tahun 2022 pada PT. BNI Cabang Pembantu Malili nomor rekening 087854123 sebanyak 6 SP2D sebesar Rp174.612.000,00 dan telah terbuku tanggal 6 Januari 2022;
3. Terdapat kelebihan pembukuan SP2D nomor 0542/SP2D/LS/BPKD/2021 pada PT. Bank Sulselbar Cabang Malili pada nomor rekening 093.001.000000028.4 sebesar Rp1.000.000,00 dan telah dikoreksi pada tanggal 4 Januari 2022.



4.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp108.614.350,00 per tanggal 31 Desember 2021. Sisa Kas Bendahara Pengeluaran disetor pada tahun 2022 dengan bukti Setoran Nomor '001/STS-GU/PKM-WWD/2022 senilai Rp56.313.489,00 dan '002/STS-GU/PKM-WWD/2022 senilai Rp52.300.861,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 4.36
Rekening Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Tahun		Tanggal Penyetoran Ke Kas Daerah
		2021	2020	
1	Kecamatan Burau	0,00	23.989.900,00	4 Januari 2021
2	Puskesmas Wawondula	108.614.350,00	0,00	001/STS-GU/PKM-WWD/2022 senilai Rp56.313.489,00 dan '002/STS-GU/PKM-WWD/2022 senilai Rp52.300.861,00
Jumlah		108.614.350,00	23.989.900,00	

4.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp40,00 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.37
Rekening Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	Tahun		Tanggal Penyetoran Ke Kas Daerah
		2021	2020	
1	Kecamatan Nuha	00,00	40,00	04 Februari 2021
2	Kecamatan Angkona	0,00	0,00	
3	Puskesmas Tomoni Timur	0,00	0,00	
Jumlah		0,00	40,00	

4.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo Kas pada RSUD I La Galigo yang merupakan perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan keuangan dengan pola BLUD. Kas di bendahara BLUD pertanggal 31 Desember tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.606.474.356,00 dan sebesar Rp2.863.471.015,00.

Tabel 4.38
Rekening Kas di Bendahara BLUD
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Keterangan
		2021	2020	
1	Kas BLUD	2.606.474.356,00	2.863.471.015,00	BRI No. Rek. 214901000315304
Jumlah		2.606.474.356,00	2.863.471.015,00	



4.3.1.1.1.5 Setara Kas

Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 dan Rp15.550.000.000,00 adalah rekening deposito Badan Layanan Umum daerah (BLUD) RSUD I La Galigo dengan berjangka waktu sampai dengan tiga bulan dan dapat dicairkan sewaktu-waktu (*on call*) dengan nominal sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.39
Rekening Setara Kas
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Setara Kas (Deposito)	2.000.000.000,00	15.550.000.000,00
Jumlah		2.000.000.000,00	15.550.000.000,00

Rincian setara kas sebagaimana pada **Lampiran 8**.

4.3.1.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP

Tabel 4.40
Kas di Bendahara FKTP
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Dana Kapitasi 18 PKM	296.236.532,74	1.469.523.935,46
Jumlah		296.236.532,74	1.469.523.935,46

Kas di bendahara JKN tahun 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp296.236.532,74 dan Rp1.469.523.935,46. Kas di bendahara JKN per tanggal 31 Desember 2021 merupakan kas yang berada pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP atau Puskesmas) Kas FKTP yang terdiri dari 18 Puskesmas dan merupakan Surplus dari Pendapatan dan Belanja Puskesmas Tahun Anggaran 2021 yang berasal dari Dana Kapitasi BPJS. Rincian Kas FKTP pada **Lampiran 9**.

4.3.1.1.1.7 Kas di Bendahara BOS

Tabel 4.41
Kas di Bendahara BOS
per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1.	Kas Dana BOS Sekolah Negeri	86.456.499,00	564.512.752,00
Jumlah		86.456.499,00	564.512.752,00

Kas Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp86.456.499,00 dan Rp564.512.752,00. Sisa Kas BOS merupakan Dana Hibah dari Kementerian Pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Negeri SMPN dan SDN untuk tahun 2021. Atas saldo Kas BOS tersebut terdiri dari BOS Reguler sebesar



Rp60.103.569,00, BOS Afirmasi senilai Rp25.059.100,00 dan Bos Kinerja senilai Rp1.293.830,00.

Adapun rincian sisa kas Belanja Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 10, Lampiran 11, dan Lampiran 12.**

4.3.1.1.1.8 Kas Lainnya di Bendahara

Kas Lainnya di Bendahara merupakan saldo kas pada 22 Sekolah, yang dibuka untuk menampung kegiatan Swakelola Dana Alokasi Khusus (DAK) yang belum ditutup oleh bendahara Sekolah setelah kegiatan telah selesai. Adapun Kas Lainnya di Bendahara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.42
Kas Lainnya di Bendahara per 31 Desember 2021

No	Bank	Nama Rekening	Nomor Rekening	Saldo 31 Des 2021	Sumber Dana	Keterangan Sisa Dana
1	Sulselbar	SMPN 2 TOWUTI	093-202-000000431-8	32.007,00	DAK	Pembangunan Rumah Dinas Guru SMP Negeri 2 Towuti, Kec. Towuti (DAK)
2	Sulselbar	SMPN 1 TOWUTI	093-202-000000107-6	146.028,00	DAK	Rehabilitasi 2 RKB SMPN 1 Towuti Kec. Towuti
3	Sulselbar	SMPN 1 TOMONI TIMUR	093-202-000000106-8	560.125,00	DAK	Pegadaan Peralatan Laboratorium IPA SMPN 1 Tomoni Timur
4	Sulselbar	SMP NEGERI 04 WOTU	093-202-000017695-0	125.689,00	DAK	Pegadaan Peralatan Laboratorium IPA SMPN 4 Wotu
5	Sulselbar	SDN NO 280 SP I MAHALONA	093-202-000000050-9	140.784,00	DAK	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 280 SP I Mahalona Kec. Towuti
6	Sulselbar	SDN NO 276 TOKALIMBO	093-202-000000103-3	94.691,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
7	Sulselbar	SDN NO 269 LAMBATU	093-202-000000104-1	130.239,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
8	Sulselbar	SDN NO 268 TOWUTI	093-202-000000183-1	193.042,00	DAK	Pembangunan WC SDN 268 Towuti Kec. Towuti
9	Sulselbar	SDN NO 258 SINONGKO	093-202-000000045-2	86.530,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
10	Sulselbar	SDN NO 224 LAMPIA	093-202-000000034-7	4.757.712,00	DEKON	sisa dana untuk pembelian buku



11	Sulselbar	SDN NO 182 BAKTI NUSA	093-202-000017718-2	56.813,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
12	Sulselbar	SDN NO 180 TAMPAK SIRING	093-202-000013700-8	219.008,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
13	Sulselbar	SDN NO 154 MANGKULANDE	093-202-000017681-0	76.320,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
14	Sulselbar	SDN NO 150 MANGKUTANA	093-202-000000187-4	33.738,00	DAK	Pembangunan 3 RKB SDN 150 Mangkutana
15	Sulselbar	SDN NO 138 KARAMBUA	093-202-000000101-7	225.708,00	DAK	Pembangunan ruang guru SDN 138 Karambua, Kec. Wotu (DAK)
16	Sulselbar	SDN 283 SP III MAHALONA	093-202-000000436-9	36.300,00	DAK	Pembangunan 3 RKB SDN No. 283 SP III Mahalona, Kec. Towuti (DAK)
17	Sulselbar	SDN 281 SP II MAHALONA	093-202-000000430-0	32.893,00	DAK	Pembangunan Rumah Dinas Guru SDN 281 SP II Mahalona, Kec. Towuti (DAK)
18	Sulselbar	SDN 274 PEKALOA	093-202-000000437-7	60.933,00	DAK	Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SDN No. 274 Pekaloa, Kec. Towuti (DAK)
19	Sulselbar	SDN 261 LIMBUA	093-202-000000043-6	76.877,00	DAK	Pembangunan Perpustakaan SDN No. 261 Limbua, Kec. Wasuponda (DAK)
20	Sulselbar	SDN 206 MANTADULU	093-202-000000041-0	163.285,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
21	Sulselbar	SDN 114 BATANGGE	093-202-000000038-0	75.744,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
22	Sulselbar	SDN 111 BURAU PANTAI	093-202-000000036-3	126.683,00	DAK	sisa dana pekerjaan bangunan
JUMLAH				7.451.149,00		

4.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek tidak dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020.

4.3.1.1.3 Piutang

Piutang per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp121.291.232.407,18 dan Rp71.644.339.014,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 4.43
Rincian Piutang
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
Piutang Pajak	2.324.249.854,36	14.325.546.799,00
Piutang Retribusi	68.333.333,33	0,00
Piutang Lain- lain PAD yang Sah	45.392.076.144,00	16.114.721.334,00
Piutang Transfer	71.116.860.504,00	38.459.270.881,00
Piutang Lainnya	2.389.712.571,49	2.744.800.000,00
Jumlah	121.291.232.407,18	71.644.339.014,00

Penjelasan untuk masing-masing Piutang diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.1.3.1 Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.324.249.854,36 dan Penyisihan senilai Rp792.128.606,13 sehingga piutang netto sebesar Rp1.532.121.248,23 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 13**.

Rincian Piutang Pajak adalah sebagai berikut.

Tabel 4.44
Rincian Piutang Pajak
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Selisih	%
1	Piutang PBB	1.043.453.494,36	1.007.950.743,00	35.502.751,36	3,52
2	Piutang PPJ	0,00	3.424.499.703,00	(3.424.499.703,00)	(100)
3	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	1.024.824.685,00	9.532.324.563,00	(8.507.499.878,00)	89,25
4	Piutang Pajak Restoran	194.516.050,00	360.771.790,00	(166.255.740,00)	(46,08)
5	Piutang Pajak Reklame	61.455.625,00	0,00	61.455.525,00	100
6	Penyisihan Piutang	(772.875.180,68)	(763.087.847,15)	(9.787.333,53)	3,81
	Jumlah (Netto)	1.551.374.673,68	13.562.458.951,85	(12.011.084.378,17)	(88,70)

Dari Piutang Pajak Tahun 2021 sebesar Rp2.324.249.854,36 terdapat penyisihan piutang Pajak senilai Rp 772.875.180,68 sehingga Piutang Pajak Netto sebesar Rp1.551.374.673,68 (Rp2.324.249.854,36– Rp 772.875.180,68).

Pada tahun 2021 Piutang Pajak Daerah *netto* mengalami penurunan sebesar Rp12.011.084.378,17 atau 88,56 % disebabkan adanya penurunan piutang Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Piutang Pajak Restoran dan Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tidak terdapat di tahun 2021. Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar Rp35.502.751,36 atau 3,52 %. Piutang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Tahun 2021 tidak terdapat di tahun 2021. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2021 mengalami penurunan di bandingkan Tahun 2020 sebesar Rp8.507.499.878,00 atau 89,25%.. Piutang Pajak Restoran mengalami Penurunan di tahun 2021 sebesar Rp166.255.740,00 atau 46,08%. Tahun 2021 terdapat piutang baru yaitu piutang pajak reklame sebesar Rp61.455.625,00

Nilai piutang *netto* yang disajikan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah nilai setelah dilakukan penyisihan piutang. Penyisihan piutang disajikan tersendiri pada akun penyisihan piutang dalam Neraca:



1. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Netto sampai dengan tahun pajak 2021 sebesar Rp276.982.295,48 (Rp1.043.453.494,36 – Rp766.471.198,88) sebagaimana tercantum pada **Lampiran 14**.
2. Piutang pajak penerangan jalan tahun 2021 sebesar Rp 0,00.
3. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan *netto* tahun 2021 sebesar Rp1.019.700.561,58 (Rp1.024.824.685,00- Rp5.124.123,43) . Rincian Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tercantum pada **Lampiran 15**.
4. Piutang Pajak Restoran *netto* Tahun 2021 sebesar Rp193.543.469,75 (Rp194.516.050,00- Rp972.580,25. Rincian Piutang Pajak Restoran pada **Lampiran 15**.

4.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi tahun 2021 dan 2020 masing- masing senilai Rp68.333.333,33 dan Rp 0,00. Piutang retribusi tahun 2021 merupakan sewa pabrik rumput laut pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Rincian Piutang Retribusi pada **Lampiran 16**.

4.3.1.1.3.3 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD merupakan piutang yang berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp45.392.076.144,00 yang terdiri dari Piutang Pendapatan dari Non JKN Dinas Kesehatan sebesar Rp669.663.040,00 Piutang Jasa Pelayanan BLUD Rp44.722.413.104,00. Penyisihan Piutang senilai Rp228.361.611,72 sehingga Piutang Lain- lain PAD yang Sah Netto Rp45.163.714.532,28 sebagaimana pada **Lampiran 17**.

Tabel 4.45
Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Selisih	%
1	Piutang Operasional BLUD	44.722.413.104,00	15.155.017.694,00	29.567.395.410,00	195,10
2	Piutang PAD Lainnya pada Dinas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Dinas Kesehatan	669.663.040,00	959.703.640,00	(290.040.600,00)	(30,22)
4	Penyisihan Piutang	(228.361.611,72)	(80.573.606,67)	(147.788.005,05)	183,42
Jumlah		45.163.714.532,28	16.034.147.727,33	29.129.566.804,95	181,67

4.3.1.1.3.4 Piutang Transfer

Piutang Transfer per 31 Desember 2021 terdiri dari Piutang kepada Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai Rp 14.052.022.105,00 dan Piutang kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan senilai Rp 57.064.838.399,00.

Piutang Transfer *netto* Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan merupakan kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2021 sebesar Rp13.981.761.994,48, dengan penyisihan piutang sebesar Rp70.260.110,53. (Rincian pada **Lampiran 18**). Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.46
Rincian Piutang Transfer
Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan
per Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)	
		2021	2020	Selisih	%
1	DBH PPH Pasal 21 dan Pasal 25/29	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DBH Pajak Bumi dan bangunan	14.052.022.105,00	3.234.414.902,00	10.817.607.203,00	334,45
3	Sumber Daya Alam Kehutanan	0,00	56.949.287,00	(56.949.287,00)	(100)
4	DBH Sumber daya Alam Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
5	DBH Sumber daya Alam Minyak Bumi dan, Gas	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sumber daya Alam Perikanan	0,00	170.627.903,00	(170.627.903,00)	(100)
7	DBH CHT	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat –Dana Perimbangan	(70.260.110,52)	(17.309.960,46)	(52.950.150,06)	305,89
Jumlah		13.981.761.994,48	3.444.682.131,54	10.537.079.862,94	305,89

Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp57.064.838.399,00. Piutang Dana Bagi Hasil merupakan piutang yang berasal dari transfer Pemerintah Provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai 31 Desember 2021 dengan penyisihan piutang sebesar Rp285.324.192,00 sehingga Piutang Transfer Pemerintah Provinsi netto sebesar Rp56.779.514.207,01 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.47
Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2021	2020		
1	Pajak Kendaraan Bermotor	6.681.233.903,00	3.673.397.813,00	3.007.836.090,00	81,88
2	Bea Balik Nama Kendaraan	5.799.995.912,00	2.542.550.512,00	3.257.445.400,00	128,12
3	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.925.533.030,00	7.970.220.043,00	9.955.312.987,00	124,91
4	Pajak Air Permukaan	23.769.536.900,00	17.804.523.986,00	5.965.012.914,00	33,50
5	Pajak Rokok	2.888.538.654,00	3.006.586.435,00	(118.047.781,00)	(3,93)
6	Penyisihan Piutang	(285.324.192,00)	(174.986.393,95)	(110.337.798,05)	63,06
Jumlah		56.779.514.207,00	34.822.292.395,05	21.957.221.811,95	63,87

Rekapitulasi Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

4.3.1.1.3.5 Piutang Lainnya

Piutang Lainnya Tahun 2021 dan 2020 masing – masing sebesar Rp 2.389.712.571,49 dan Rp 2.744.800.000,00 dan nilai piutang lainnya netto yang disajikan



per 31 Desember 2021 adalah nilai Rp2.384.880.321,49 (Rp 2.389.712.571,49- Rp 4.832.250,00), dengan rincian pada **Lampiran 22**.

Piutang Lainnya terdiri dari:

Tabel 4.48
Rincian Piutang Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2021	2020		
1	KPRI Sehati Luwu Timur	966.450.000,00	2.744.800.000,00	(1.778.350.000,00)	(64,79)
2	Piutang Pengadaan barang dan Jasa	1.423.262.571,49	0,00	1.423.262.571,49	100,00
3	Penyisihan Piutang	(4.832.250,00)	(13.724.000,00)	8.891.750,00	(64,79)
Jumlah		2.384.880.321,49	2.731.076.000,00	(346.195.678,51)	71,89

Piutang Lainnya merupakan Piutang biaya ganti rugi pembebasan tanah untuk perumahan Pegawai Negeri Sipil yang awalnya disajikan senilai Rp3.098.500.000,00 (555 Kavling senilai Rp1.498.500.000,00 dan Kelebihan Tanah senilai Rp1.600.000.000). Sampai dengan tahun 2021 KPRI telah melakukan penyetoran sebesar Rp353.700.000,00 sehingga saldo piutang per 31 desember 2020 sebesar Rp2.744.800.000,00.

Pada tahun 2021 telah dilakukan perubahan Naskah Perjanjian antara Pemerintah Daerah dan KPRI, sehingga Piutang atas pembebasan Tanah untuk perumahan PNS sebesar Rp966.450.000,00,00

4.3.1.1.3.6 Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang dicatat sesuai dengan aging schedule berdasarkan Kualitas Piutang. Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.361.995.011,58 yang terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp1.357.162.761,58 dan Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp4.832.250,00.

4.3.1.1.3.6.1 Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.088.787.875,30, terdiri dari:

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp772.875.180,68;
2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp341.666,67;
3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp228.361.611,72;
4. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp70.260.110,525;
5. Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp285.324.192,00..

4.3.1.1.3.6.2 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar Rp4.832.250,00 merupakan penyisihan Piutang kepada KPRI Sehati.

4.3.1.1.4 Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp 620.087.007,38 dan Rp465.526.969,57, dengan rincian pada tabel berikut.



Tabel 4.49
Belanja Dibayar Dimuka
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	SKPD	STNK	Asuransi	Barang / Jasa	Tahun	
					2021	2020
1	Dinas Pendidikan	5.808.734,17	0	0	5.808.734,17	6.725.760,00
2	Dinas Kesehatan	57.684.138,17	0	0	57.684.138,17	49.461.653,33
3	RSUD I Lagaligo	18.469.092,58	1.693.333,00	0	20.162.425,58	15.299.569,17
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.694.377,25	0	0	3.694.377,25	7.228.755,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.560.506,67	0	0	1.560.506,67	3.409.979,17
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	18.392.363,67	0	0	18.392.363,67	20.498.103,33
7	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.051.574,42	0	0	1.051.574,42	914.229,17
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.709.395,00	0	0	4.709.395,00	9.080.094,17
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.049.664,33	0	0	5.049.664,33	5.628.934,67
10	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	2.006.281,67	0	0	2.006.281,67	2.806.060,00
11	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	2.149.049,17	0	0	2.149.049,17	1.766.525,50
12	Dinas Lingkungan Hidup	22.666.990,75	0	0	22.666.990,75	24.759.099,17
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.124.426,67	0	0	1.124.426,67	1.189.750,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.878.429,58	0	0	1.878.429,58	1.836.821,67



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.418.974,17	0	0	13.418.974,17	6.812.697,50
16	Dinas Perhubungan	34.293.324,67	0	0	34.293.324,67	32.133.460,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.211.007,17	0	0	1.211.007,17	773.333,33
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.642.480,92	0	0	2.642.480,92	2.809.482,50
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.500.875,67	0	0	2.500.875,67	3.231.641,67
20	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	1.513.740,00	0	0	1.513.740,00	1.553.642,50
21	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	3.191.299,58	0	0	3.191.299,58	4.054.416,67
22	Dinas Pertanian	12.207.122,92	0	142.880.000,00	155.087.122,92	17.345.000,00
23	Sekretariat Daerah	40.673.998,17	152.618.714,42	0	193.292.712,59	33.903.624,17
24	Sekretariat DPRD	6.474.608,67	31.079.182,75	0	37.553.791,42	6.888.860,42
25	Kecamatan Burau	1.425.835,58	0	0	1.425.835,58	1.405.484,67
26	Kecamatan Wotu	1.381.445,92	0	0	1.381.445,92	1.470.021,67
27	Kecamatan Tomoni	1.716.304,33	0	0	1.716.304,33	1.437.214,17
28	Kecamatan Mangkutana	1.423.988,25	0	0	1.423.988,25	1.360.102,50
29	Kecamatan Tomoni Timur	214.958,33	0	0	214.958,33	1.307.560,83
30	Kecamatan Kalaena	1.563.992,50	0	0	1.563.992,50	1.427.935,83
31	Kecamatan Angkona	1.234.710,58	0	0	1.234.710,58	563.696,67
32	Kecamatan Malili	1.653.373,25	0	0	1.653.373,25	1.544.935,83
33	Kecamatan Wasuponda	2.067.684,17	0	0	2.067.684,17	1.574.852,50



34	Kecamatan Towuti	3.451.687,33	0	0	3.451.687,33	3.161.529,17
35	Kecamatan Nuha	1.658.916,92	0	0	1.658.916,92	1.722.657,50
36	Inspektorat	2.212.596,50	0	0	2.212.596,50	1.646.380,83
37	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.425.691,67	0	0	3.425.691,67	3.043.750,00
38	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.295.269,17	0	0	3.295.269,17	2.834.345,83
39	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	716.866,67	0	0	716.866,67	675.125,00
Jumlah		291.815.777,21	185.391.230,17	142.880.000,00	620.087.007,38	285.287.086,11

Beban dibayar dimuka Tahun 2021 terdiri dari Belanja STNK senilai Rp291.815.777,166, Belanja atas Premi Asuransi 2021 senilai Rp185.391.230,50 dan Belanja dibayar dimuka Barang dan jasa Rp 142.880.000,00 sebagaimana tercantum pada **Lampiran 21**.

4.3.1.1.5 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan barang-barang yang peruntukannya akan diserahkan ke masyarakat, namun sampai dengan 31 Desember 2021 belum diserahkan. Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 48.658.272.429,86 dan Rp59.167.123.573,35 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.50
Rincian Persediaan Berdasarkan Jenis Barang
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Jenis Persediaan	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2021	2020		
A	BAHAN				
1	Bahan Kimia	507.481.227,83	697.292.644,00	(189.811.416,17)	(27,22)
2	Bahan Bakar dan Pelumas	2.034.250,00	2.317.500,00	(283.250,00)	(12,22)
3	Bahan/Bibit Tanaman	31.981.500,00	85.700.000,00	(53.718.500,00)	(62,68)
4	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	8.228.000,00	(8.228.000,00)	(100,00)
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	35.466.000,00	25.140.000,00	10.326.000,00	41,07



6	Bahan Lainnya	3.231.403.342,23	8.877.334.291,26	(5.645.930.949,03)	(63,60)
B	SUKU CADANG				
1	Suku Cadang Alat Kedokteran	4.738.562.010,02	0,00	4.738.562.010,02	100,00
C	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR				
1	Alat Tulis Kantor	39.552.615,00	70.620.000,00	(31.067.385,00)	(43,99)
2	Bahan Cetak	525.328.815,50	555.784.300,00	(30.455.484,50)	(5,48)
3	Benda Pos	300.000,00	2.798.000,00	(2.498.000,00)	(89,28)
4	Alat Listrik	13.967.000,00	38.975.800,00	(25.008.800,00)	(64,16)
5	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	816.000,00	55.083.278,00	(54.267.278,00)	(98,52)
D	OBAT-OBATAN				
1	Obat	11.680.911.309,27	15.085.207.121,64	(3.404.295.812,37)	(22,57)
2	Obat-obatan Lainnya	1.244.273.485,57	0,00	1.244.273.485,57	100,00
E	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN				
1	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	19.195.777.892,00	33.585.989.173,45	(14.390.211.281,45)	(42,85)
2	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	7.301.375.482,45	0,00	7.301.375.482,45	100,00
F	NATURA DAN PAKAN				
1	Natura	109.041.500,00	76.653.465,00	32.388.035,00	42,25
Jumlah		48.658.272.429,87	59.167.123.573,35	(10.508.851.143,48)	(17,76)

Rincian pada Lampiran 23.

4.3.1.1.5.1 Alat Tulis Kantor

Alat Tulis Kantor sebesar Rp39.552.615,00 merupakan persediaan ATK yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.51
Rincian Alat Tulis Kantor
Per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2.083.800,00
2	RSUD I Lagaligo	12.500.000,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	225.315,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	608.000,00
5	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	4.200.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15.000.000,00



No.	SKPD	Jumlah
7	Dinas Perhubungan	195.000,00
8	Sekretariat Daerah	1.796.500,00
9	Kecamatan Wotu	894.000,00
10	Inspektorat	2.050.000,00
Jumlah		39.552.615,00

4.3.1.1.5.2 Alat Listrik

Alat Listrik sebesar Rp13.967.000,00 merupakan persediaan Alat Listrik yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.52
Rincian Alat Listrik
Per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	13.967.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00
Jumlah		13.967.000,00

4.3.1.1.5.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sejumlah Rp816.000,00 merupakan persediaan yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.53
Rincian Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
Per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00
2	RSUD I Lagaligo	0,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	170.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	646.000,00
Jumlah		816.000,00

4.3.1.1.5.4 Materai Perangko dan Benda Pos Lainnya

Materai, Perangko dan Benda Pos Lainnya Rp300.000,00 merupakan persediaan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana daerah.

4.3.1.1.6.5 Bahan Cetak

Persediaan Cetak/Blangko sebesar Rp525.328.815,50 merupakan persediaan yang ada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.54
Rincian Bahan Cetak di SKPD
per 31 Desember 2021

No	SKPD	Jumlah
1	RSUD I Lagaligo	95.556.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00



No	SKPD	Jumlah
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	362.270.140,50
4	Kecamatan Wotu	360.000,00
5	Kecamatan Wasuponda	120.000,00
6	Kecamatan Kalaena	1.800.000,00
7	Kecamatan Angkona	1.010.000,00
8	Kecamatan Towuti	245.000,00
9	Kecamatan Nuha	1.176.000,00
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	62.791.675,00
Jumlah		525.328.815,50

4.3.1.1.5.6 Bahan Bakar dan Pelumas

Persediaan Bahan Bakar sebesar Rp2.034.250,00 merupakan persediaan pada RSUD I Lagaligo.

4.3.1.1.5.7 Bahan Kimia

Bahan Kimia sebesar Rp507.481.227,83 merupakan persediaan yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.55
Rincian Bahan Kimia di SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	25.850.000,00
2	RSUD I Lagaligo	481.631.227,83
Jumlah		507.481.227,83

4.3.1.1.5.8 Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan

Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan sebesar Rp31.981.500,00 merupakan persediaan yang ada pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.56
Rincian Bibit dan Benih di SKPD
Per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	35.466.000,00
2	Dinas Pertanian	0,00
Jumlah		35.466.000,00

4.3.1.1.5.9 Natura

Natura sebesar Rp109.041.500,00 merupakan persediaan bahan makanan yang ada pada SKPD sebagai berikut.

Tabel 4.57
Rincian Natura di SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	RSUD I Lagaligo	10.005.500,00
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	99.036.000,00
Jumlah		109.041.500,00



4.3.1.1.5.10 Obat

Obat sebesar Rp11.680.911.309,27 merupakan persediaan yang ada di SKPD sebagai berikut.

Tabel 4.58
Rincian Obat di SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	0,00
2	Dinas Kesehatan	6.216.685.005,73
3	RSUD I Lagaligo	5.295.581.503,54
4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	157.890.400,00
5	Dinas Pertanian	10.754.400,00
Jumlah		11.680.911.309,27

4.3.1.1.5.11 Obat-obatan Lainnya

Obat-obatan Lainnya sebesar Rp1.244.273.485,57 merupakan persediaan yang ada di SKPD sebagai berikut.

Tabel 4.59
Rincian Obat-obatan Lainnya di SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	1.103.352.443,57
2	Dinas Pertanian	140.921.042,00
Jumlah		1.244.273.485,57

4.3.1.1.5.12 Bahan/Bibit Tanaman

Bahan/Bibit Tanaman sebesar Rp31.891.500,00 merupakan persediaan yang ada pada Dinas Pertanian.

4.3.1.1.5.13 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp19.195.777.892,00 merupakan persediaan yang ada di SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.60
Rincian Persediaan Barang yang akan diserahkan di SKPD
Per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	2.509.294.347,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.579.168.545,00
3	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	8.925.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	98.390.000,00
Jumlah		19.195.777.892,00

Persediaan barang yang diserahkan pada Dinas Pendidikan yaitu Pembangunan dan rehab untuk sekolah swasta yang ada pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp2.509.294.347,00. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, persediaan barang yang akan diserahkan tahun 2021 sebesar Rp16.579.168.545,00



Dinas Kelautan, Perikanan dan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga persediaan barang yang akan diserahkan masing-masing sebesar Rp8.925.000,00 dan Rp98.390.000,00.

4.3.1.1.6.14 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya sebesar Rp7.301.375.482,45 merupakan persediaan yang ada pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.61
Rincian Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya di SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	00,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.301.375.482,45
3	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	00,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	00,00
Jumlah		7.301.375.482,45

4.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifatnya terdiri dari dua jenis, yaitu Investasi Permanen dan Investasi Non Permanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali sedangkan Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali.

Tabel 4.62
Rincian Investasi Jangka Panjang
Per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
Investasi Non Permanen	716.517.440,22	822.773.728,56
Investasi Permanen	142.713.649.680,35	142.428.859.885,71
Jumlah	143.430.167.120,57	143.251.633.564,27

Masing-masing Investasi Jangka Panjang diuraikan sebagai berikut.

4.3.1.2.1 Investasi Non Permanen

Tabel 4.63
Investasi Non Permanen
per 31 Desember 2021 dan 2020

Uraian	Tahun		Kenaikan/(Penurunan)
	2021	2020	
Pinjaman Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	716.517.440,22	822.773.728,56	(106.256.288,34)
Jumlah	716.517.440,22	822.773.728,56	(106.256.288,34)

Investasi Non Permanen Lainnya merupakan nilai investasi dana bergulir yang pengembaliannya belum diterima sampai dengan 31 Desember 2021. Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp716.517.440,22 dan



Rp822.773.728,56 dan terjadi Penurunan Investasi Non permanen senilai Rp106.256.288,34 (Rp716.517.440,22 – Rp822.773.728,56) sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur LHP Nomor 700/037/III/ITKAB tanggal 2 Maret 2022.

Penjelasan Investasi Non Permanen (dana bergulir) dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

4.3.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen merupakan Investasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada PT Bank Sulselbar, PDAM Tirta Dharma, PT Bumi Timur Agro, PT Bumi Timur Mineral, PT Timur Investama dan PT Nusa Timur Energi. Tahun Anggaran 2021 terdapat penambahan Investasi pada PDAM senilai Rp3.000.000.000,00 dan PT Bank Sulselbar Sebesar Rp 3.000.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal uang yang diserahkan Tahun 2021 diuraikan pada **Lampiran 25**.

Nilai Investasi Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sejumlah Rp142.713.649.680,35 dan Rp142.428.859.835,71 terdapat kenaikan Investasi Permanen Tahun 2021 senilai Rp284.789.844,64. Kenaikan investasi disebabkan adanya Bagian Pemda Atas Rugi 2 (dua) BUMD masing-masing PDAM Tirta Dharma senilai (Rp5.244.645.772,00) dan PT Nusa Timur Energi senilai (Rp56.624.452,88). Saldo Investasi Permanen pada BUMD PT Bumi Timur Agro, PT Bumi Timur Mineral dan PT Timur Investama per 31 Desember 2021 bernilai negatif sehingga saldo Investasi Permanen disajikan senilai Rp1,00.

Di tahun 2021, BUMD yang menyerahkan laporan keuangan ke pemerintah daerah yaitu PDAM Tirta Dharma, PT Timur Investama dan laporan keuangan telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), PT Bumi Timur Mineral dan PT Nusa Timur Energi dan laporan keuangan telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Untuk PT. Bumi Timur Agro belum menyerahkan Laporan Keuangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.64
Bagian Pemda Atas Laba/(Rugi)
Tahun 2021

Nama BUMD	Nilai Investasi Permanen per 31 Des 2020	Penyertaan Modal TA 2021	Bagian Pemda Laba/(Rugi) 2021	Koreksi	Nilai Investasi per 31 Des 2021	Penyesuaian Saldo Investasi Permanen
PT. Bank Sulselbar	70.000.000.000,00	3000.000.000,00	0,00	-	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00
PDAM Tirta Dharma	71.924.817.774,68	3.000.000.000,00	(5.244.645.772,00)	0,00	69.680.172.002,68	69.680.172.002,68
PT. Bumi Timur Agro	(1.418.070.041,01)	0,00	0,00	0,00	(1.418.070.041,01)	1,00
PT. Bumi Timur Mineral	413.939.931,48	0,00	649.691.780,91	0,00	77.679.758,03	1,00
PT. Timur Investama	(11.450.465.924,80)	0,00	0,00	0,00	(11.450.465.924,80)	1,00
PT. Nusa Timur Energi	90.102.127,55	0,00	(56.624.452,88)	0,00	33.477.674,67	. 33.477.674,67
Jumlah	129.560.323.867,90	6.000.000.000,00		0,00	129.922.793.469,57	142.713.649.680,35



1. Penyertaan Modal pada PT Bank Sulselbar Saldo penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2021 sebesar Rp73.000.000.000,00 merupakan saldo penyertaan modal berbentuk saham dengan persentase kepemilikan sebesar 6,44%. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya (*cost method*) yaitu sebesar harga perolehan. Bagi hasil dividen yang diterima Pemda untuk laba Tahun Buku 2020 adalah sebesar Rp23.835.212.109,00 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp26.214.125.742,00.
2. Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Dharma mengalami penambahan sebesar Rp3.000.000.000,00. Saldo penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma per 31 Desember 2021 sebesar Rp69.680.172.002,68 merupakan saldo penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan.
3. Penyertaan Modal pada PT Bumi Timur Agro Saldo penyertaan modal pada PT Bumi Timur Agro per 31 Desember 2021 sebesar Rp1,00. Penyertaan modal disajikan dengan menggunakan metode ekuitas.
4. Penyertaan Modal pada PT Bumi Timur Mineral per 31 Desember 2021 sebesar 1,00 dan disajikan berdasarkan metode ekuitas.
5. Penyertaan Modal pada PT Timur Investama Saldo penyertaan modal pada PT Timur Investama per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1,00 dan disajikan berdasarkan metode ekuitas.
6. Penyertaan Modal pada PT Nusa Timur Energi per 31 Desember 2021 sebesar Rp33.477.674,67 dan disajikan berdasarkan metode ekuitas.

4.3.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.857.058.088.011,46 dan Rp2.809.410.557.288,61. Nilai tersebut di atas adalah nilai buku aset tetap dimana nilai perolehan aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan nilai perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga beli, nilai konstruksi, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan, antara lain: biaya administrasi, biaya perencanaan, biaya pengawasan, dan biaya kepanitiaan.

Aset tetap terdiri atas Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Jaringan dan Irigasi, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. Kebijakan akuntansi tentang penyusutan dan *Capitalization Threshold* telah diterapkan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Aset tetap pada neraca LKPD 2021 mencakup barang intrakomptabel yaitu berupa aset tetap yang memenuhi kriteria/nilai batasan kapitalisasi dan yang diperoleh sebelum berlakunya kebijakan kapitalisasi, dan aset yang diperoleh melalui transaksi transfer masuk/penerimaan dari pertukaran/pengalihan masuk serta aset yang dipindahbukukan dari buku barang Ekstrakomptabel pada saat nilai akumulasi biaya perolehan dan nilai pengembangannya telah mencapai batas minimum kapitalisasi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Aset tetap yang



dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap, harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Rincian aset tetap Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.65
Perbandingan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020

No.	Rincian Aset Tetap	Tahun		Lebih/(Kurang)	%
		2021	2020		
1	Tanah	312.748.261.979,20	298.224.086.389,63	14.524.175.589,57	4,87
2	Peralatan dan Mesin	586.635.903.665,53	532.881.362.803,61	53.754.540.861,92	10,09
3	Gedung dan Bangunan	1.160.164.317.454,52	1.056.897.823.540,82	103.266.493.913,70	9,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.662.283.423.651,39	2.492.756.788.527,18	169.526.635.124,21	6,8
5	Aset Tetap Lainnya	9.099.651.063,74	24.389.468.784,93	(15.289.817.721,19)	(62,69)
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	69.859.038.330,33	84.441.148.054,10	(14.582.109.723,77)	(17,27)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.943.732.508.133,25)	(1.680.180.100.811,66)	(263.552.407.321,59)	15,69
Jumlah		2.857.058.088.011,46	2.809.410.577.288,61	47.647.510.722,85	1,70

Sedangkan kenaikan Aset Tetap dalam Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.647.510.722,85 atau sebesar 1,70% dibanding dengan saldo per 31 Desember 2020 yang dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4.66
Perubahan Aset Tetap
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun 2020	Penambahan	Pengurangan	Tahun 2021
1	Tanah	298.224.086.389,63	15.418.263.617,57	894.088.028,00	312.748.261.979,20
2	Peralatan dan Mesin	532.881.362.803,61	71.343.814.197,03	17.589.273.335,11	586.635.903.665,53
3	Gedung dan Bangunan	1.056.897.823.540,82	125.237.973.493,48	21.971.479.579,78	1.160.164.317.454,52
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.492.756.788.527,18	210.257.286.554,73	40.730.651.430,52	2.662.283.423.651,39
5	Aset Tetap Lainnya	24.389.468.784,93	259.345.144,00	15.549.162.865,19	9.099.651.063,74
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.441.148.054,10	17.041.714.516,76	31.623.824.240,53	69.859.038.330,33
7	Akumulasi Penyusutan	(1.680.180.100.811,66)	(298.141.930.800,16)	(34.589.523.478,57)	(1.943.732.508.133,25)
Jumlah		2.809.410.577.288,61	141.416.466.723,41	93.768.956.000,56	2.857.058.088.011,46

Penambahan sebesar Rp141.416.466.723,41 berasal dari realisasi belanja modal, belanja barang di luar belanja modal, belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap (atau dapat dikategorikan dalam aset tetap), hibah berupa barang dari provinsi/pusat/pihak lain dan mutasi barang dari SKPD lain serta koreksi atau penyesuaian. Penambahan aset tetap tersebut di atas merupakan nilai aset tetap yang masuk dalam kelompok pencatatan intrakomptable.

Pengurangan sebesar Rp93.768.956.000,56 adalah akumulasi nilai aset yang berasal dari realisasi belanja modal yang masuk dalam ekstra komptable, penghapusan



aset tetap setelah dilakukan pelelangan, mutasi barang ke SKPD dan koreksi atau penyesuaian serta barang yang masuk dalam kategori rusak berat (RB) yang pada penyajian aset di Laporan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Luwu Timur TA 2021 direklasifikasi ke kelompok aset lainnya – sebagai kelompok aset tetap yang akan diajukan atau diusulkan untuk dilakukan penghapusan.

Penjelasan mengenai jenis aset dapat diuraikan sebagai berikut:

4.3.1.3.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp312.748.261.979,20 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp298.224.086.389,63. Rekap mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2021 adalah sebagaimana terlampir pada **Lampiran 44**.

Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.524.175.589,57 dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp15.418.263.617,57, yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp571.282.000,00;
2. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp894.088.028,00;
3. Reklas bertambah sebesar Rp12.731.110.439,57;
4. Hasil Inventarisasi sebesar Rp1.221.783.150,00.

Pengurangan Aset Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp894.088.028,00, yang terdiri dari:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp894.088.028,00;

Tabel 4.67

Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah per SKPD Tahun 2021

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Dinas Lingkungan Hidup	894.088.028,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	1.641.065.150,00	0,00
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	187.867.000,00	0,00
4	Dinas Perhubungan	3.145.949.978,77	0,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	228.281.300,00	0,00
6	Dinas Kesehatan	1.688.747.166,88	0,00
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.828.861.061,60	0,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.900.730.243,00	0,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.796.673.689,32	0,00
10	Dinas Pertanian	0,00	894.088.028,00
11	Kecamatan Angkona	106.000.000,00	0,00
Jumlah		15.418.263.617,57	894.088.028,00

Adapun rincian untuk penambahan Aset Tanah sebesar Rp15.418.263.617,57, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp571.282.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.68
Realisasi Belanja Modal Tanah per SKPD
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Belanja	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	571.282.000,00
Jumlah			571.282.000,00

2. Mutasi masuk SKPD sebesar Rp894.088.028,00

Tabel 4.69
Mutasi Masuk Aset Tanah
Tahun 2021

No.	SKPD Asal	Uraian	Harga Perolehan	SKPD Penerima
1	Dinas Pertanian	Tanah Kebun	894.088.028,00	Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah			894.088.028,00	

Mutasi Aset Tanah tersebut sesuai Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor: 17/IX/Tahun 2021 Tanggal 10 September 2021

3. Reklas bertambah sebesar Rp12.731.110.439,57, dengan rincian:

- a. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Rp44.462.000,00, berupa Biaya Jasa Penilai Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 Rp1.579.379.227,27;

Tabel 4.70
Reklasifikasi Tambah Aset Tanah
Yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	1.379.976.801,27	pematangan lahan pembangunan Rumah Sakit Atue
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	199.402.426,00	Penimbunan Lantai Jemur 1029,32 M3
Jumlah		1.579.379.227,27	

- c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 Rp183.819.300,00, berupa Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Reklas dari Konstruksi dalam Pengerjaan Rp156.770.365,61, berupa pematangan lahan pembangunan Rumah Sakit Atue pada Dinas Kesehatan.
- e. Reklasifikasi dari Aset Tetap lainnya sebesar Rp10.766.679.546,69;

Tabel 4.71
Reklasifikasi Tambah Aset Tanah
yang berasal dari Aset Tetap Lainnya

No.	SKPD	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	98.134.524,00	Tanah Timbunan Lantai Jemur Desa Bawalipu Kecamatan Wotu



No.	SKPD	Harga Perolehan	Keterangan
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.531.324.111,60	Tanah Timbunan PPI Wotu Desa Bawalipu Kecamatan Wotu
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	187.867.000,00	penataan lapangan soekarno Hatta desa puncak indah
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.796.673.689,32	Penimbunan Pasar Pusat Niaga Malili
5	Dinas Perhubungan	214.930.000,00	Penataan Pelataran Halaman Dermaga Timampu
6	Dinas Perhubungan	825.241.647,30	Penimbunan Terminal Malili
7	Dinas Perhubungan	2.105.778.331,47	Penimbunan Terminal Tarengge
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.138.692.243,00	Penataan lahan perumahan nelayan kec. Angkona
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	261.960.000,00	Penataan Lapangan Sepakbola, Desa Puncak Indah
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	485.678.000,00	Penimbunan lokasi perumahan Nelayan Desa Wewangriu, Kec. Malili
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	14.400.000,00	Penimbunan Rumah deret Kec. Malili
12	Kecamatan Angkona	106.000.000,00	Penimbunan Halaman Gedung Serba Guna
Jumlah		10.766.679.546,69	

4. Hasil Inventarisasi sebesar Rp1.221.783.150,00 yang terdapat pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, dengan rincian:

Tabel 4.72
Hasil Inventarisasi Aset tetap Tanah
Tahun 2021

NO	NAMA ASET	NO. SERTIFIKAT/ AKTA HIBAH	LUAS (M2)	NJOP	NILAI	KETERANGAN
1	SDN 116 Mabasi	104/SKPTG/BR/VI II/2018	2.728,00	2.450	6.683.600,00	Ada Surat Keterangan Hibah
2	SDN 117 Benteng	1501/SKH/IX/2017	2.500,00	7.150	17.875.000,00	Ada Surat Keterangan Hibah
3	SDN 187 Sumber Agung	185/DS.L/VI/2005	4.800,00	7.150	34.320.000,00	Ada Surat pernyataan dari Desa
4	SDN 165 Malela	-	7.840,00	3.500	27.440.000,00	Sudah Pengukuran untuk Sertifikat Tanah
5	SDN 166 Ambawa	SINDOKA/dir/001/X/2011	5.000,00	7.150	35.750.000,00	Ada Surat Pernyataan dari PT Zindoka
6	SDN 164 Pertasi Kencana	Nomor/25/Tahun 2021	19.247,50	10.000	192.475.000,00	Ada Surat keterangan Dari Desa



NO	NAMA ASET	NO. SERTIFIKAT/ AKTA HIBAH	LUAS (M2)	NJOP	NILAI	KETERANGAN
7	SDN 260 Palauru	-	2.600,00	2.450	6.370.000,00	Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, belum ada pembebasan lahan
8	SDN 261 Limbua	-	9.700,00	2.450	23.765.000,00	Masuk dalam Kawasan Hutan Lindung, belum ada pembebasan lahan
9	SDN 268 Towuti	20.26.08.03.3.0000 07	2.500,00	7.150	17.875.000,00	Ada Sertifikat Tanahnya
10	SDN 280 SP I Mahalona	-	20.000,00	2.450	49.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
11	SDN 281 SP II Mahalona	-	19.200,00	5.000	96.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
12	SDN 282 Wawomeusa	20.26.08.05.3.0000 9	3.007,00	7.150	21.500.050,00	Ada Sertifikat Tanahnya
13	SDN 283 SP III Mahalona	-	10.000,00	3.500	35.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
14	SDN 284 SP IV Mahalona	-	10.000,00	5.000	50.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
15	SMP Negeri 3 Angkona	01/AH/KA-IX/2006	10.000,00	2.450	24.500.000,00	ada Akta Hibah
16	SMP Negeri 5 Angkona	20.26.06.04.3.0001 1	18.553,00	3.500	64.935.500,00	Ada Sertifikat Tanahnya
17	SMP Negeri 5 Malili	20.26.07.05.1.0000 9	54.470,00	3.500	190.645.000,00	Ada Sertifikat Tanahnya
18	SMP Negeri 3 Wasuponda	20.26.10.06.3.0000 7	10.860,00	7.150	77.649.000,00	Ada Sertifikat Tanahnya
19	SMP Negeri 3 Towuti	-	40.000,00	2.450	98.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
20	Puskesmas Mahalona	-	7.600,00	2.450	152.000.000,00	Tanah Pemerintah (Transmigrasi)
JUMLAH			260.605,50		1.221.783.150,00	

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Tanah sebesar Rp894.088.028,00, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp894.088.028,00 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Tanah:

1. Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sampai dengan 31 Desember 2021 sebanyak 4.902 bidang dengan luas 24.936.538,57 M², yang terdiri dari tanah bersertifikat sebanyak 547 bidang tanah dan yang belum bersertifikat sebanyak 4.355 bidang tanah.
2. Aset tetap tanah yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
 - a. Perjanjian sewa tanah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulawesi Bagian Selatan Nomor 593.1/01/Pem-



- LT/II/2018 dan 0018.PJ/HKM.00.01/ UIPSULBAGSEL/2018 tanggal 24 April 2018;
- b. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Bank Sulselbar) Nomor 147.54/24/PKS/Pem-LT/2018 dan 009.PKS-BSS/IX/ 2018 tanggal 24 September 2018;
- c. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Nomor 14.54/36/PKS/Pem-LT/2018 dan B.2899-KC/XIII/Log/ II/2018 tanggal 19 November 2018;
- d. Perjanjian sewa tanah untuk lokasi Anjungan Tunai Mandiri (ATM) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan PT. BNI Cab. Palopo Nomor 147.543/10/PKS/Pem-LT/2019 dan PLP/2/1027/R tanggal 7 Februari 2018
3. Terdapat Aset Tanah yang telah dihibahkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 147.54./16/NPHD/PEM-LT/XII/2021 dan 131/RT.01/7324/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik daerah berupa Tanah dan Bangunan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian:
- Nama Aset : Tanah Bangunan Laboratorium
 - Tahun Perolehan : 2005
 - Luas : 5000 M²
 - Lokasi : Jl. Soekarno Hatta Malili
 - Nomor Sertifikat : 22.26.07.13.3.00025
 - Tanggal Sertifikat : 22 April 2009
 - Nilai Perolehan : Rp54.481.703,00
- Aset tersebut tercatat pada SKPD Dinas Lingkungan Hidup, namun hingga saat ini masih tetap tercatat pada SKPD terkait, karena belum ada Surat Keputusan penghapusan atas aset yang telah dihibahkan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun berkenaan, sehingga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.
4. Terdapat Aset Tanah yang telah dihibahkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 147.54./17/NPHD/PEM-LT/XII/2021 dan 78/PL.04/SN-10/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin dan Bangunan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian:
- Nama Aset : Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
 - Tahun Perolehan : 2005
 - Luas : 1511 M²
 - Lokasi : Jl. Dr Ratulangi Malili
 - Nomor Sertifikat : 22.26.07.13.4.00125
 - Tanggal Sertifikat : 29 Januari 2021
 - Nilai Perolehan : Rp227.336.000,00
- Aset tersebut tercatat pada SKPD Dinas Pendidikan, namun hingga saat ini masih tetap tercatat pada SKPD terkait, karena belum ada Surat Keputusan penghapusan atas aset yang telah dihibahkan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun berkenaan, sehingga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.



Tabel 4.73
Daftar Aset Tanah yang disewa Pihak Lain

NO	NAMA ASET	ALAMAT	PENGELOLA / MITRA	DIREKTUR	KONTRIBUTSI TETAP	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK
1	Pabrik Es Malili	Kompleks TPI Malili Desa Wewangriu Kec. Malili	CV. Alief Karya Teknik	Mansyur	38.000.000	523/01/NKB /DKP2	03 Agustus 2020
2	Pabrik Es Burau	Jl. Poros Burau Pantai Desa Burau Pantai Kec. Burau	PT. Nusantara Indo Properti Palopo	Subhan	15.000.000	523/02/NKB /DKP2	03 Agustus 2020
3	Pabrik Rumput Laut Pasi-Pasi	Kompleks Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kec. Malili	CV. Bahtera Karya	Sri Miastuti Tahir	100.000.000	523/03/NKB /DKP2	01 Desember 2020
4	Gudang Rumput Laut – 1	Kompleks Gudang Rumput Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili	Koperasi Tunas Baru	Julhaenuddin	60.000.000	523/04/NKB /DKP2	29 Januari 2021
5	Gudang Rumput Laut - 2	Kompleks Gudang Rumput Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili	Gapoktan Manurung Jaya	Y. Randa Embong	60.000.000	523/05/NKB /DKP2	29 Januari 2021

4.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp586.635.903.665,53 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp532.881.362.803,61. Penjelasan terkait kenaikan nilai aset Peralatan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.754.540.861,92 adalah sebagai berikut:

Penambahan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.343.814.197,03, yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 Rp45.320.472.598,13;
2. Belanja BLUD pada RSUD I Lagaligo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.644.497.980,00;
3. Belanja BOS Reguler Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.056.579.473,00;
4. Belanja BOS Afirmasi Tahun Anggaran 2020 yang belum dicatat sebagai aset pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.509.999,00;
5. Belanja JKN Tahun Anggaran 2021 pada Puskesmas sebesar Rp1.138.850.173,00;
6. Belanja Non Kapitasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp269.254.308,00;
7. Hibah Masuk sebesar Rp482.108.900,00;
8. Mutasi Masuk SKPD sebesar Rp6.370.130.510,00;
9. Koreksi Catat sebesar Rp186.789.338,00;
10. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp11.729.437.941,90;
11. Utang sebesar Rp132.182.976,00

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.589.273.335,11, yang terdiri dari:



1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp6.370.130.510,00;
2. Hibah Keluar sebesar Rp737.499.572,00;
3. Penghapusan sebesar Rp468.077.000,00;
4. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp9.735.127.279,19;
5. Koreksi catat sebesar Rp228.438.973,92;
6. Pembayaran Utang sebesar Rp50.000.000,00.

Tabel 4.74
Rincian Penambahan dan Pengurangan
Aset Peralatan dan Mesin per SKPD
Tahun 2021

No	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	420.160.000,00	28.650.000,00
2	Sekretariat Daerah	1.777.782.805,00	1.383.346.000,00
3	Inspektorat	139.772.000,00	134.364.708,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	329.599.900,00	0,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	992.597.974,00	0,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	131.340.000,00	6.600.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.075.000,00	24.760.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	38.280.000,00	190.591.440,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	334.999.000,00	49.200.600,00
10	Dinas Pendidikan	22.901.347.428,00	3.191.687.955,20
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	530.517.379,81	3.970.738,00
12	Dinas Perhubungan	2.351.225.600,00	156.732.140,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	873.781.626,00	125.631.055,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	815.684.410,00	61.962.000,00
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	204.655.322,00	29.951.000,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	319.105.000,00	0,00
17	Dinas Kesehatan	7.700.006.605,40	8.317.387.532,81
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	637.670.878,00	266.693.419,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	4.620.980.420,50	1.875.832.664,10
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	317.289.800,00	7.425.000,00
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	62.652.000,00	7.394.000,00
22	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	689.817.604,00	0,00
23	RSUD I Lagaligo	22.283.042.091,32	459.638.204,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.265.000,00	0,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	313.638.700,00	3.650.000,00
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.942.000,00	241.979.800,00
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	553.041.400,00	275.810.900,00
28	Dinas Pertanian	111.200.000,00	152.495.000,00
29	Kecamatan Malili	75.048.000,00	0,00



No	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
30	Kecamatan Kalaena	86.220.000,00	29.515.000,00
31	Kecamatan Tomoni	145.070.000,00	7.400.000,00
32	Kecamatan Wasuponda	31.800.000,00	19.300.000,00
33	Kecamatan Angkona	46.659.899,00	41.170.000,00
34	Kecamatan Mangkutana	149.844.200,00	13.612.000,00
35	Kecamatan Tomoni Timur	22.053.800,00	15.602.000,00
36	Kecamatan Burau	30.900.000,00	0,00
37	Kecamatan Wotu	130.700.000,00	5.444.500,00
38	Kecamatan Nuha	173.490.000,00	0,00
39	Kecamatan Towuti	287.558.354,00	461.475.679,00
Jumlah		71.343.814.197,03	17.589.273.335,11

Adapun rincian untuk penambahan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp71.343.814.197,03, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp45.320.472.598,13 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.75
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari dana APBD per SKPD
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	131.340.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.075.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	204.655.322,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	329.599.900,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	438.085.739,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	319.105.000,00
7	Dinas Kesehatan	3.189.418.500,40
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	873.781.626,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	38.280.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	141.477.379,81
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	815.684.410,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	79.599.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	179.265.000,00
14	Dinas Pendidikan	19.625.457.956,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	992.597.974,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM	317.289.800,00
17	Dinas Perhubungan	2.351.225.600,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	483.942.000,00
19	Dinas Pertanian	111.200.000,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.211.301.400,00
21	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	689.511.628,00
22	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	62.652.000,00
23	Inspektorat	139.772.000,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	111.788.700,00
25	Kecamatan Angkona	33.984.772,00
26	Kecamatan Burau	30.900.000,00
27	Kecamatan Kalaena	86.220.000,00
28	Kecamatan Malili	75.048.000,00
29	Kecamatan Mangkutana	149.844.200,00
30	Kecamatan Nuha	173.490.000,00
31	Kecamatan Tomoni	145.070.000,00
32	Kecamatan Tomoni Timur	22.053.800,00
33	Kecamatan Towuti	110.558.354,00



No.	Uraian	Jumlah
34	Kecamatan Wasuponda	31.800.000,00
35	Kecamatan Wotu	130.700.000,00
36	Puskesmas Lampia	28.700.000,00
37	Puskesmas Nuha	40.982.800,00
38	Puskesmas Parumpantai	149.605.370,00
39	Puskesmas Timampu	7.950.000,00
40	Puskesmas Tomoni Timur	900.000,00
41	RSUD I Lagaligo	8.754.566.061,92
42	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	357.612.000,00
43	Sekretariat Daerah	1.682.221.305,00
44	Sekretariat DPRD	420.160.000,00
Jumlah		45.320.472.598,13

2. Belanja BLUD pada RSUD I Lagaligo sebesar Rp2.644.497.980,00;

Tabel 4.76
Realisasi BLUD pada RSUD I Lagaligo
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	AC Split 1 PK	110.022.506,00
2	AC Split 1/2 PK	35.800.000,00
3	AC Split 2 PK	63.596.500,00
4	AC Standing	38.600.000,00
5	Alat Sterilisator (Vertikal Sterilisator 50-L, Automatic Dryng anf Water Filling Super Falcon SA-300VFA	204.994.000,00
6	Anesthesia Syringe SAF1	759.000,00
7	Anatomic Dressing Forceps / PT41	1.276.000,00
8	Angular Ligature Cutter -45 Angle	4.812.500,00
9	Articulator	3.300.000,00
10	ASA Dental , Oral Diagnostic Set	5.505.000,00
11	ASA Dental Cement Spatula (0903-2)	715.000,00
12	ASA Dental Cement Spatula (1101-1)	715.000,00
13	ASA Dental Mouth Mirrors and Handle For Mouth Mirror (2200e-4)@12	285.000,00
14	ASA Dental Mouth Mirrors and Handle For Mouth Mirror (S2100) @5	585.000,00
15	ASA ONE Saliva Ejectors (Transparent)	715.000,00
16	Bein Set (17.001.11/12/13)	4.125.000,00
17	Biaya Pengadaan Aplikasi Pengelolaan Keuangan BLUD I Lagaligo / Treasury Management System (TMS) TA.2021	100.000.000,00
18	Biaya Upgrade Aplikasi Sistem Akuntansi BLUD RSUD I Lagaligo TA.2021 (SANBALU)	75.000.000,00
19	Bone Scraper BSF	737.000,00
20	BONE WELL BSWSUS1	462.000,00
21	Bonerounger RNG178	3.201.000,00
22	Bracket Holder	4.030.000,00
23	Breket Standing Mobile	2.500.000,00
24	Bur Diamond Preparasi Crown 10.801.0055	660.000,00
25	Caliper Dental	165.000,00
26	Chek Retractor Model T	33.000,00
27	Chek Retractor Model U	33.000,00
28	Citojet Sopira	19.976.000,00
29	Classic Shade Guide	2.145.000,00
30	Composite Spatula / Plugger Combinantion 26.120.10Ti	1.430.000,00
31	Contraster	440.000,00
32	Cover Pelindung Scaler (100)	99.000,00
33	CPAP (Masker Wajah)	9.900.000,00
34	CPAP (Masker Wajah Penuh) Ukuran L	9.250.000,00
35	CPAP (Masker Wajah Penuh) Ukuran M	9.250.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Jumlah
36	CPAP (Masker Wajah Penuh) Ukuran S	9.250.000,00
37	Crosmed (Dg Spin)	222.222.000,00
38	Cryer # 17.337.15/16	2.970.000,00
39	Dental Instrumen Tray	1.870.000,00
40	Dispenser	25.000.000,00
41	Dispenser (Hot & Cool)	2.500.000,00
42	Dispenser Bottom Loading + Galon	2.560.000,00
43	Distal And Safety Hold Cutter Slim	14.437.500,00
44	Dyspenser Galon Bawah	7.500.000,00
45	Electrosurgery / Cauter	15.950.000,00
46	Exhaust Fan	5.416.000,00
47	Fox Plane	660.000,00
48	Gorden Zebra Blind	12.675.000,00
49	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR11-12	682.000,00
50	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR1-2	682.000,00
51	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR13-14	682.000,00
52	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR17-18	341.000,00
53	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR7-8	341.000,00
54	Gracey Currette Standar Metal Handle CGR9-10	341.000,00
55	Gracey Currette Standar Silicone Handle 2CGR1-2	484.000,00
56	Gracey Currette Standar Silicone Handle 2CGR13-14	968.000,00
57	Gracey Currette Standar Silicone Handle 2CGR17-18	484.000,00
58	Gracey Currette Standar Silicone Handle 2CGR9-10	484.000,00
59	Gunting Benang #0300-2	440.000,00
60	Gunting Jaringan Curved #0305-1	770.000,00
61	Gunting Jaringan Goldman #0304-2	858.000,00
62	Haemostatic Forceps # 0500-1	660.000,00
63	Hand Phone	4.400.000,00
64	Hard Wire Cutter	13.804.500,00
65	HELMUT ZEPF Extracting Forceps For Adult @ 10 Tang	15.025.000,00
66	Helmut Zepf Needle Holder (41.011.17 TC)	4.535.000,00
67	Helmut Zepf Raspatory Instrument (41.862.11)	795.000,00
68	HELMUT ZEPF Root Elevator Set (Set 17.336.15& 17.336.16)	1.485.000,00
69	Helmut Zepf Scalpel Handles and Blades (46.010.03)	443.000,00
70	HELMUT ZEPF Tissue Suture Forceps (22.278.15)	980.000,00
71	Hook Crimping Plier	5.156.250,00
72	Implant Curretes ICGR11-12	792.000,00
73	Implant Curretes ICGR13-14	792.000,00
74	Implant Curretes ICGR17-8	792.000,00
75	Intraoral Mirror Photography DME1	1.023.000,00
76	Intraoral Mirror Photography DME2	1.023.000,00
77	Intraoral Mirror Photography DME3	1.023.000,00
78	Intraoral Mirror Photography DME4	1.023.000,00
79	Intraoral Mirror Photography DME5	1.023.000,00
80	Kipas Angin	10.450.000,00
81	Kirkland Knife # MV1803-D	715.000,00
82	Kompor Gas	1.402.538,00
83	Kompor Gas (Selang Regulator)	1.800.000,00
84	Kompor Gas + Selang + Regulator	4.102.500,00
85	Komputer PC	16.600.000,00
86	Kulkas	16.931.827,00
87	Kulkas Show Case	49.600.000,00
88	Kursi Kerja	1.337.188,00
89	Kursi Pegawai	7.500.000,00
90	Kursi Rapat	3.000.000,00
91	Kursi Tunggu Pasien	215.800.000,00
92	Laptop	8.856.000,00
93	Lecron Wax Carver	1.650.000,00
94	Lemari Buffet	1.800.000,00
95	Lemari Pakaian	5.364.401,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Jumlah
96	Ligature Director -Double End	1.443.750,00
97	Ligature Forceps / OPLF01	2.805.000,00
98	Light Curing Bluephase Style	43.382.500,00
99	Loker Petugas	7.500.000,00
100	Loop Forming Plier Old Type	3.987.500,00
101	Meja 1/ 2 Biro	7.050.000,00
102	Meja 1/2 Biro	3.579.402,00
103	Meja Kantor	1.800.000,00
104	Meja Kerja	2.350.000,00
105	Membrane Forceps MF01	1.188.000,00
106	Mesin Penghancur Kertas	8.000.000,00
107	Mikrodont Diamond Bur (10.801.002)	620.000,00
108	Minnesota RTAN20	792.000,00
109	Minnesota RTCRM	660.000,00
110	Mixing Tip Coklat	358.600,00
111	Mixing Tip Kuning	358.600,00
112	Monitex BlueLEX LED Curing Light	4.917.000,00
113	Mosquito	5.940.000,00
114	Mosquito / HTM130C	1.584.000,00
115	Mouth Mirror With Retractor (Ergoform Handle Mouth)	2.350.000,00
116	Mouth Props MPM	726.000,00
117	Mouth Props MPS	363.000,00
118	Needle Holder # 0435-14TC	3.190.000,00
119	Needle Holder #41.011.17TC	19.800.000,00
120	Needle Holder / NHC150TC	3.938.000,00
121	Orban Knife # 1804-D	550.000,00
122	Panel Induk -SDP	147.000.000,00
123	PC Komputer	249.000.000,00
124	Periostel Elevator # 41.862.21	1.885.000,00
125	Periostel Elevator EP9H	1.342.000,00
126	Pin & Ligature Cutter	3.162.500,00
127	Pin & Ligature Cutter With TC Tip	4.812.500,00
128	Pinset Jaringan # 0622-2	682.000,00
129	Platelet Incubator (Jembayaran Utang Tahun 2020)	50.000.000,00
130	Poket Marker Set (isi 2) # 0650-1/2	1.225.000,00
131	PRF & GRF BOX GRF	3.388.000,00
132	Printer	49.800.000,00
133	Printer Label	6.850.000,00
134	Printer Laser	15.804.000,00
135	Printer Thermal	5.200.000,00
136	Probe Nabers #0708L-2N	407.000,00
137	Probe Nabers BPQ2N	554.400,00
138	Probe UNC15	455.400,00
139	Radmart The Weight Relie Ver	35.557.630,00
140	Rak Piring	1.280.000,00
141	Rak Piring	3.122.213,00
142	Retractor (Mega Duo mouth Mirror # 6100	105.000,00
143	Retractor / Lip Wider RTCPD1	115.500,00
144	Retractor / Lip Wider RTCPD2	231.000,00
145	Retractor / Lip Wider RTLAS	330.000,00
146	Retractor And Mouth Mirror + Handle, Ergorm Handle Mouth Mirror + Mega Duo Mouth Mirror	235.000,00
147	Rice Cooker	2.360.025,00
148	Scalpel Handle + Scalpel Blade	748.000,00
149	Scalpel Handle SHC	462.000,00
150	Scalpel Handle SHS	462.000,00
151	Sendok Cetak Anak Plastik	49.500,00
152	Sendok Cetak Dewasa (SS) S,M,L	990.000,00
153	Sendok Cetak Gigi Dewasa Partial (S,M,L)	2.475.000,00
154	Sickle Scaler 2LSJAC31-32	968.000,00



No.	Uraian	Jumlah
155	Sickle Scaler LSU15-30/TOWNER U15	341.000,00
156	Sofa	3.300.000,00
157	Sofa Ruang Tunggu	30.000.000,00
158	Spatel #5400-8	242.000,00
159	Spring Bed	4.800.000,00
160	Spring Bed Olympic 180 Plt	4.802.030,00
161	Springbed No 1	9.600.000,00
162	Stavolt	82.820.000,00
163	Step Plier 1 mm	8.800.000,00
164	Stop Plier	4.601.500,00
165	Sub-Zero Curette CUSUB-0	836.000,00
166	Surgical Curette URCL 86	1.364.000,00
167	Surveyor Dental	1.870.000,00
168	Tabung Gas (5.5 Kg)	400.000,00
169	Tabung Gas 5 Kg	3.050.000,00
170	Tempat Tidur Lipat	8.750.000,00
171	Tempat Tidur No.1	14.400.000,00
172	Tempat Tidur No.3	8.700.000,00
173	Tempat Tidur No.3 Susun	3.850.000,00
174	Tip Skeler USEA	451.000,00
175	Tip Skeler USEP	451.000,00
176	Tip Skeler USEPS	902.000,00
177	Tirai Psien	222.500.000,00
178	Tissue Pliers#0630-2	352.000,00
179	Torquing Plier #F	3.712.500,00
180	Torquing Plier #M	3.712.500,00
181	Tunneling Instrument Kit TITU 3	781.000,00
182	Tunneling Instrument Kit TITU 4	781.000,00
183	Tunneling Instrument Kit TITU 5	781.000,00
184	TV 32"	3.300.000,00
185	TV 60" Android	14.700.000,00
186	TV LED	6.700.520,00
187	TV LED 32"	6.589.000,00
188	Vita Toothguide 3D	1.320.000,00
189	Vitamaster 3D	1.941.500,00
190	Weingart Utility Plier	2.750.000,00
191	Weingart Utility Plier Inserted	3.300.000,00
192	Wire Cauter Soft	4.994.000,00
193	Wire Cutter Hard OPPCO2	4.292.200,00
Jumlah		2.644.497.980,00

3. Belanja BOS pada Dinas Pendidikan Rp3.056.579.473,00;

Tabel 4.77
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari dana BOS per Sekolah
Tahun 2021

No.	Nama Sekolah	Jumlah
1	SDN 101 Lauwo	15.600.000,00
2	SDN 102 Burau	27.180.856,00
3	SDN 103 Lumbewe	41.295.000,00
4	SDN 104 Jalajja	12.962.533,00
5	SDN 105 Mabonta	4.143.000,00
6	SDN 106 Manangalu	7.017.000,00
7	SDN 107 Lagego	9.000.000,00
8	SDN 108 Bone pute	24.493.000,00
9	SDN 109 Majaleje	10.500.000,00
10	SDN 110 Saele	4.320.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Jumlah
11	SDN 111 Burau pantai	7.460.000,00
12	SDN 112 Lemo	23.560.000,00
13	SDN 113 Mambotu	11.200.000,00
14	SDN 114 Batangnge	5.000.000,00
15	SDN 115 Lanosi	4.000.000,00
16	SDN 116 Mabasi	9.200.000,00
17	SDN 117 Benteng	7.800.000,00
18	SDN 120 Campae	23.500.000,00
19	SDN 121 Lampenai	6.759.000,00
20	SDN 122 Dauloloe	16.905.000,00
21	SDN 123 Tarengge	8.300.000,00
22	SDN 124 Rantetiku	2.000.000,00
23	SDN 125 Maramba	20.050.000,00
24	SDN 126 Lembah Bahagia	15.430.000,00
25	SDN 127 Buanipa	14.510.000,00
26	SDN 128 Pepuro	11.700.000,00
27	SDN 129 Maramba	3.800.000,00
28	SDN 130 Karambua	14.650.000,00
29	SDN 131 Kampung Alau	21.435.000,00
30	SDN 132 Lambu-Lambu	9.650.000,00
31	SDN 133 Banalara	13.080.000,00
32	SDN 134 Kalaena	18.620.000,00
33	SDN 135 Binano	4.441.500,00
34	SDN 136 Cendana Hijau	30.379.000,00
35	SDN 137 Molelengku	20.945.000,00
36	SDN 138 Karambua	7.250.000,00
37	SDN 139 Buana Indah	4.200.000,00
38	SDN 140 Tarebbi Indah	1.900.000,00
39	SDN 146 Maleku	26.750.000,00
40	SDN 147 Wonorejo	22.100.000,00
41	SDN 148 Tawibaru	10.600.000,00
42	SDN 149 Sindubinangun	1.360.000,00
43	SDN 150 Mangkutana	950.000,00
44	SDN 151 Kalaena Kiri I	2.350.000,00
45	SDN 152 Kalaena Kiri II	27.120.000,00
46	SDN 153 Taripa	24.350.000,00
47	SDN 154 Mangkulande	18.550.000,00
48	SDN 155 Karya Mukti	12.700.000,00
49	SDN 156 Kalaena	16.900.000,00
50	SDN 157 Sindu Agung	10.550.000,00
51	SDN 158 Balai Kembang	19.300.000,00
52	SDN 159 Pakatan	3.250.000,00
53	SDN 160 Sido Tepung	4.400.000,00
54	SDN 161 Sendang Sari	8.450.000,00
55	SDN 162 Limbomampongo	19.150.000,00
56	SDN 163 Koroncia	7.380.000,00
57	SDN 164 Pertasi Kencana	12.315.000,00
58	SDN 165 Malela	3.000.000,00
59	SDN 166 Ambawa	2.500.000,00
60	SDN 169 Bayondo	5.030.000,00
61	SDN 170 Mulyasari	28.767.500,00
62	SDN 171 Purwosari	41.870.000,00
63	SDN 172 Tomoni	9.950.000,00
64	SDN 173 Kertoraharjo	3.150.000,00
65	SDN 174 Gunung Sari	17.379.800,00
66	SDN 175 Kawarasan	19.250.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Jumlah
67	SDN 176 Kaya'a	5.950.000,00
68	SDN 177 Cendana Hitam	80.000,00
69	SDN 178 Tuban	12.105.000,00
70	SDN 179 Baku	7.150.000,00
71	SDN 180 Tampak Siring	950.000,00
72	SDN 181 Welira	2.400.000,00
73	SDN 182 Bakti Nnusa	3.550.000,00
74	SDN 183 Buyuntana	17.385.500,00
75	SDN 184 Gianyar	9.800.000,00
76	SDN 185 Harapan Makmur	9.630.000,00
77	SDN 186 Kebun Rami	4.200.000,00
78	SDN 187 Sumber Agung	5.525.000,00
79	SDN 188 Manunggal	8.725.000,00
80	SDN 189 Ujung Baru	10.925.000,00
81	SDN 190 Tadulako	21.123.000,00
82	SDN 202 Angkona	30.950.000,00
83	SDN 203 Bongkamanu	38.600.000,00
84	SDN 204 Kalaena Kiri III	19.850.000,00
85	SDN 205 Kalaena Kiri IV	2.200.000,00
86	SDN 206 Mantadulu	18.599.200,00
87	SDN 207 Taripa	17.100.000,00
88	SDN 208 Lambaru	31.400.000,00
89	SDN 209 Mantaipi	31.695.000,00
90	SDN 210 Maliowo	14.850.000,00
91	SDN 211 Tawakua	3.750.000,00
92	SDN 212 Bubu	2.150.000,00
93	SDN 213 Rinjani	15.000.000,00
94	SDN 214 Kalaena Kiri III	18.100.000,00
95	SDN 220 Cerekang	3.100.000,00
96	SDN 221 Malili	30.800.000,00
97	SDN 222 Batu Merah	28.350.000,00
98	SDN 223 Balantang	26.250.000,00
99	SDN 224 Lampia	17.100.000,00
100	SDN 225 Karebbe	7.600.000,00
101	SDN 226 Ppatande	17.400.000,00
102	SDN 227 Puncak	23.780.000,00
103	SDN 228 Lagaroang	22.450.000,00
104	SDN 229 Waru	8.650.000,00
105	SDN 230 Tarabbi	2.400.000,00
106	SDN 231 Lakawali	9.800.000,00
107	SDN 232 Wulasi	14.200.000,00
108	SDN 233 Ussu	1.800.000,00
109	SDN 234 Kore-Korea	7.950.000,00
110	SDN 235 Pongkeru	10.449.560,00
111	SDN 236 Laoli	4.550.000,00
112	SDN 237 Atue	17.380.000,00
113	SDN 238 Mallaulu	5.000.000,00
114	SDN 239 Salu Minanga	21.400.000,00
115	SDN 240 Podomoro	14.400.000,00
116	SDN 241 Labose	9.300.000,00
117	SDN 246 Tabarano	6.300.000,00
118	SDN 247 Sorowako	23.500.000,00
119	SDN 249 Matano	350.000,00
120	SDN 250 Wasuponda	17.450.000,00
121	DN 251 Pae-Pae	41.350.000,00
122	SDN 252 Nikkel	21.700.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama Sekolah	Jumlah
123	SDN 253 Amasi	4.950.000,00
124	SDN 255 Bonepute	1.680.000,00
125	SDN 256 Dongi	25.458.000,00
126	SDN 257 Kawata	2.231.900,00
127	SDN 258 Sinongko	14.400.000,00
128	SDN 259 Balambano	478.220,00
129	SDN 264 Wawondula	63.200.000,00
130	SDN 265 Timampu	14.900.000,00
131	SDN 266 Bantilang	15.250.000,00
132	SDN 267 Lampesue	17.750.000,00
133	SDN 268 Towuti	14.000.000,00
134	SDN 269 Lambatu	16.980.000,00
135	SDN 270 Matompi	25.800.000,00
136	SDN 271 Apundi	15.300.000,00
137	SDN 272 Parahua	13.600.000,00
138	SDN 273 Masiku	21.601.304,00
139	SDN 274 Pekaloa	8.500.000,00
140	SDN 275 Lioka	6.600.000,00
141	SDN 276 Tokalimbo	11.000.000,00
142	SDN 278 Mahalona	17.900.000,00
143	SDN 279 Rante Angin	23.600.000,00
144	SDN 280 SP I Mahalona	17.425.000,00
145	SDN 281 SP II Mahalona	30.500.000,00
146	SDN 283 SP III Mahalona	15.000.000,00
147	SDN 284 SP IV Mahalona	6.000.000,00
148	SMP SATAP 189 Ujung Baru	900.000,00
149	SMPN 1 Angkona	31.945.000,00
150	SMPN 1 Burau	38.725.000,00
151	SMPN 1 Kalaena	50.250.000,00
152	SMPN 1 Malili	77.275.000,00
153	SMPN 1 Mangkutana	93.776.000,00
154	SMPN 1 Nuha	10.742.000,00
155	SMPN 1 Tomoni	51.550.000,00
156	SMPN 1 Tomoni Timur	28.580.000,00
157	SMPN 1 Towuti	62.100.000,00
158	SMPN 1 Wasuponda	29.085.000,00
159	SMPN 1 Wotu	33.370.000,00
160	SMPN 2 Angkona	17.410.000,00
161	SMPN 2 Burau	60.260.000,00
162	SMPN 2 Malili	40.300.000,00
163	SMPN 2 Tomoni Timur	12.690.000,00
164	SMPN 2 Towuti	20.575.000,00
165	SMPN 2 Wotu	9.400.000,00
166	SMPN 3 Angkona	38.460.000,00
167	SMPN 3 Burau	61.365.000,00
168	SMPN 3 Malili	51.500.000,00
169	SMPN 3 Towuti	33.995.000,00
170	SMPN 3 Wasuponda	13.420.600,00
171	SMPN 3 Wotu	12.900.000,00
172	SMPN 4 Angkona	4.400.000,00
173	SMPN 4 Malili	46.850.000,00
174	SMPN 4 Wotu	6.050.000,00
175	SMPN 5 Angkona	26.726.000,00
176	SMPN 5 Malili	27.415.000,00
177	SMPN Satap Matano	8.300.000,00
Jumlah		3.056.579.473,00



4. Belanja BOS Affirmasi Tahun Anggaran 2020 yang belum dicatat sebagai aset pada Dinas Pendidikan sebesar Rp13.509.999,00;

Tabel 4.78

**Rincian Penambahan Aset Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Dana BOS Afirmasi Tahun 2020**

No	Uraian Aset	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Laptop	6.800.000,00	SDN 280 SP 1 Mahalona
2	Printer Epson L120	1.950.000,00	SDN 182 Bakti Nusa
3	Printer MP 287	1.180.000,00	SDN 182 Bakti Nusa
4	Speaker Advan	380.000,00	SDN 182 Bakti Nusa
5	Speaker Portabel	3.199.999,00	SMPN 255 Satap Bonepute
Jumlah		13.509.999,00	

5. Belanja JKN pada Puskesmas Rp1.138.850.173,00;

Tabel 4.79

**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Dana JKN Kapitasi Puskesmas
Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Bantilang	98.719.000,00
2	Puskesmas Burau	58.294.565,00
3	Puskesmas Kalaena	100.474.000,00
4	Puskesmas Lakawali	69.859.908,00
5	Puskesmas Lampia	20.500.000,00
6	Puskesmas Mahalona	82.207.800,00
7	Puskesmas Malili	124.290.000,00
8	Puskesmas Mangkutana	85.290.000,00
9	Puskesmas Nuha	15.000.000,00
10	Puskesmas Parumpanai	51.541.000,00
11	Puskesmas Timampu	18.500.000,00
12	Puskesmas Tomoni	90.940.000,00
13	Puskesmas Tomoni Timur	54.060.000,00
14	Puskesmas Wasuponda	102.240.000,00
15	Puskesmas Wotu	166.933.900,00
Jumlah		1.138.850.173,00

6. Belanja Non Kapitasi Rp269.254.308,00;

Tabel 4.80

**Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Dana Non Kapitasi Puskesmas
Tahun 2021**

No.	Uraian	Jumlah
1	Puskesmas Angkona	61.240.000,00
2	Puskesmas Mahalona	23.150.000,00
3	Puskesmas Malili	72.600.000,00
4	Puskesmas Nuha	7.353.808,00
5	Puskesmas Timampu	7.100.000,00
6	Puskesmas Tomoni	3.100.000,00
7	Puskesmas Tomoni Timur	13.056.500,00
8	Puskesmas Wawondula	65.890.000,00
9	Puskesmas Wotu	15.764.000,00
Jumlah		269.254.308,00



7. Hibah Masuk sebesar Rp482.108.900,00; dengan rincian :
 - a. Hibah Masuk dari PT. Putra Mahalona sebesar Rp177.000.000,00 pada Kecamatan Towuti, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 147.54/18/NPHD /Pem-LT/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, berupa Mobil Jenazah sebanyak 1 unit;
 - b. Hibah Masuk dari PT. MARS sebesar Rp105.108.900,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupa lampu penerangan jalan umum sebanyak 17 buah, sesuai Berita Acara Nomor : 145/MSI/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
 - c. Hibah Masuk dari PT. Putra Mahalona sebesar Rp200.000.000,00 pada Puskesmas Mahalona, sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor: 147.54/18/NPHD /Pem-LT/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021, berupa Mobil Jenazah sebanyak 1 unit.
8. Mutasi Masuk SKPD sebesar Rp6.370.130.510,00;

Tabel 4.81
Mutasi Masuk Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Uraian	Harga Perolehan	SKPD Penerima
1	Dinas Kesehatan	alat kedokteran radiodiagnostic lainnya (dst)	199.402.280,00	RSUD I Lagaligo
2	Dinas Kesehatan	alat laboratorium umum lainnya (dst)	5.149.277.430,00	RSUD I Lagaligo
3	Dinas Kesehatan	Kursi Putar	46.225.000,00	RSUD I Lagaligo
4	Dinas Kesehatan	Meja Kerja Kayu	20.390.500,00	RSUD I Lagaligo
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Server	54.755.500,00	Sekretariat Daerah
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Station Wagon	240.979.800,00	RSUD I Lagaligo
7	Sekretariat Daerah	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	201.850.000,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
8	Sekretariat Daerah	Station Wagon	255.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9	Sekretariat Daerah	Station Wagon	201.850.000,00	Dinas Pendidikan
Jumlah			6.370.130.510,00	

9. Koreksi Catat sebesar Rp186.789.338,00;

Tabel 4.82
Rincian Koreksi Catat Aset Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No	SKPD	Nama Aset	Nilai Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Umum	7.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	26.119.000,00
3	Sekretariat Daerah	Alat Kantor Lainnya	40.806.000,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rambu Tidak Bersuar	101.614.338,00
5	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Alat Komunikasi Telephone	1.200.000,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Alat Pelindung Lainnya	10.050.000,00
Jumlah			186.789.338,00

10. Reklasifikasi bertambah sebesar Rp11.729.437.941,90;
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Rp2.855.405.854,00;



Tabel 4.83
Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	Alat Pengukur tekanan Darah/tensimeter dengan manset dewasa	26.225.000,00
2	Dinas Kesehatan	Brankar	43.684.776,00
3	Dinas Kesehatan	Dopler	141.420.000,00
4	Dinas Kesehatan	Hecting Set	11.652.000,00
5	Dinas Kesehatan	Infan Radient Warmer	1.913.296.000,00
6	Dinas Kesehatan	Kulkas Vaksin Refrigerator	192.999.400,00
7	Dinas Kesehatan	Nebulizer	10.619.000,00
8	Dinas Kesehatan	Ophthalmoscope	10.102.000,00
9	Dinas Kesehatan	Otoscope	50.747.000,00
10	Dinas Kesehatan	Resusisator manual (Sungkup Dewasa)	3.168.000,00
11	Dinas Kesehatan	Resusisator manual (Sungkup Bayi)	3.168.000,00
12	Dinas Kesehatan	Stetoskop (Bayi, Anak, Dewasa)	2.924.200,00
13	Dinas Kesehatan	Tempat Tidur Gekonology	13.089.228,00
14	Dinas Kesehatan	Tempat Tidur Periksa	45.305.600,00
15	Dinas Kesehatan	Tensi meter Digital	30.912.000,00
16	Dinas Kesehatan	Tensimeter Digital	8.280.000,00
17	Dinas Kesehatan	Tensimeter Roda	4.716.000,00
18	Dinas Kesehatan	Termometer Digital	1.697.000,00
19	Dinas Kesehatan	THT Set	14.991.500,00
20	Dinas Kesehatan	Timbangan Bayi	54.656.000,00
21	Dinas Kesehatan	Timbangan Berdiri Digital	18.431.250,00
22	Dinas Kesehatan	Timbangan Digital	14.544.000,00
23	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
24	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Alat Pemadam Kebakaran	184.179.400,00
25	Puskesmas Parumpanai	Alat Kedokteran umum lainnya	7.200.000,00
26	Puskesmas Parumpanai	Bak Instrument (Stainles,Kaca,Email)	500.000,00
27	Puskesmas Parumpanai	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	3.000.000,00
28	Puskesmas Parumpanai	Standar Infus	4.000.000,00
29	Puskesmas Parumpanai	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	1.700.000,00
30	Puskesmas Parumpanai	Stopwatch	863.500,00
31	Puskesmas Parumpanai	Tensimeter	7.335.000,00
Jumlah			2.855.405.854,00

b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021
Rp5.205.802.039,40;

Tabel 4.84
Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2021



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	RSUD I Lagaligo	AC Split 1 PK	233.158.500,00
2	RSUD I Lagaligo	AC Central	171.619.200,00
3	RSUD I Lagaligo	AC Central	272.700.000,00
4	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	5.081.670,00
5	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	4.704.480,00
6	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	414.216,00
7	RSUD I Lagaligo	Fail Alrm	53.840.000,00
8	RSUD I Lagaligo	Nurse call	40.824.000,00
9	RSUD I Lagaligo	Tabung Pemadam 5 Kg	33.885.740,00
10	RSUD I Lagaligo	X-Ray Viewer	53.625.000,00
11	RSUD I Lagaligo	instrumen Cabinet	167.025.000,00
12	RSUD I Lagaligo	Information Fanel	26.446.883,40
13	RSUD I Lagaligo	Opration Timer	53.046.000,00
14	RSUD I Lagaligo	Wastafel	485.000.000,00
15	RSUD I Lagaligo	Elevator Lift	1.298.000.000,00
16	RSUD I Lagaligo	Alat Pemadam	28.520.000,00
17	RSUD I Lagaligo	AC Split	48.055.000,00
18	RSUD I Lagaligo	AC Split	39.060.000,00
19	RSUD I Lagaligo	AC Split	90.594.000,00
20	RSUD I Lagaligo	AC Split	41.496.000,00
21	RSUD I Lagaligo	AC Split	13.251.000,00
22	RSUD I Lagaligo	AC Split	14.007.000,00
23	RSUD I Lagaligo	AC Central	14.469.000,00
24	RSUD I Lagaligo	AC Central	75.492.900,00
25	RSUD I Lagaligo	AC Central	104.420.400,00
26	RSUD I Lagaligo	AC Central	26.274.150,00
27	RSUD I Lagaligo	AC Central	56.370.300,00
28	RSUD I Lagaligo	AC Central	59.031.000,00
29	RSUD I Lagaligo	Outdoor Multi V 5 Pro	252.088.120,00
30	RSUD I Lagaligo	Outdoor Multi V 5 Pro	467.076.480,00
31	RSUD I Lagaligo	Lift	866.250.000,00
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Papan Pengumuman	59.249.000,00
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	50.727.000,00
Jumlah			5.205.802.039,40

- c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021
Rp3.105.654.909,50;

Tabel 4.85
Reklasifikasi Tambah Peralatan dan Mesin
Yang berasal dari Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Kecamatan Angkona	CCTV	12.675.127,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Lampu Penerangan Jalan umum	3.092.979.782,50
Jumlah			3.105.654.909,50

- d. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021
Rp3.105.654.909,50;

Tabel 4.86
Reklasifikasi antar Aset tetap
Tahun 2021



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	359.040.000,00	Reklas dari Aset Tetap lainnya
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Sumur Pemboran	199.585.139,00	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan
3	Dinas Pendidikan	Sumur Pemboran	3.950.000,00	Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan
Jumlah			562.575.139,00	

11. Utang Retensi/Rekanan Tahun 2021 sebesar Rp305.976,00, berupa biaya retensi pengadaan mobil jenazah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp305.976,00 dan Utang Pengadaan Alat Kesehatan pada RSUD I Lagaligo Rp131.877.000,00.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp17.589.273.335,11 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar SKPD sebesar Rp6.370.130.510,00 merupakan lawan akun dari mutasi tambah SKPD;
2. Hibah Keluar sebesar Rp737.499.572,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.87
Hibah Keluar Aset Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Penerima	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	Dinas Perhubungan	Pick Up	80.000.000,00	Yayasan Pendidikan Kristen GKST Mawomalinu Desa Maleku Kecamatan Mangkutana	Nomor: 329/F-04/VI/Tahun 2021 tanggal 11 November 2021
2	Puskesmas Wasuponda	Sepeda Motor	14.410.000,00	Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Taripa kec. Angkona	Nomor: 329/F-04/VI/Tahun 2021 tanggal 11 November 2021
3	Sekretariat Daerah	Station Wagon	185.000.000,00	Pondok Pesantren Uswatun Hasanah Desa Cendana Hijau Kecamatan Wotu	Nomor: 329/F-04/VI/Tahun 2021 tanggal 11 November 2021
4	Dinas Pendidikan	Kursi Guru	543.327,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
5	Dinas Pendidikan	Kursi Siswa	14.457.120,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
6	Dinas Pendidikan	Lemari	945.275,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
7	Dinas Pendidikan	Meja Guru	1.044.453,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
8	Dinas Pendidikan	Meja Siswa	15.569.240,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
9	Dinas Pendidikan	Papan Tulis	540.374,00	Pasraman Lakawali	160/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
10	Dinas Pendidikan	Kursi Guru	2.468.835,00	Pesantren Al Mujahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD asal	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Penerima	Nomor dan Tanggal Dokumen
					Oktober 2021
11	Dinas Pendidikan	Kursi Siswa	43.371.360,00	Pesantren Al Mubahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
12	Dinas Pendidikan	Lemari	2.835.825,00	Pesantren Al Mubahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
13	Dinas Pendidikan	Meja Guru	3.285.207,00	Pesantren Al Mubahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
14	Dinas Pendidikan	Meja Siswa	46.707.720,00	Pesantren Al Mubahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
15	Dinas Pendidikan	Papan Tulis	1.317.825,00	Pesantren Al Mubahidin Nahdlatul Watan	158/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
16	Dinas Pendidikan	Konektor	638.853,00	SD Islam Terpadu Budi Utomo	161/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
17	Dinas Pendidikan	Laptop	19.881.894,00	SD Islam Terpadu Budi Utomo	161/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
18	Dinas Pendidikan	Layar Proyektor	2.731.446,00	SD Islam Terpadu Budi Utomo	161/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
19	Dinas Pendidikan	LCD Proyektor	19.548.051,00	SD Islam Terpadu Budi Utomo	161/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
20	Dinas Pendidikan	Modem	2.443.127,00	SD Islam Terpadu Budi Utomo	161/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
21	Dinas Pendidikan	Konektor	229.138,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
22	Dinas Pendidikan	Laptop	194.700.026,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
23	Dinas Pendidikan	Layar Proyektor	1.049.583,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
24	Dinas Pendidikan	LCD Proyektor	6.310.147,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
25	Dinas Pendidikan	Printer	966.855,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
26	Dinas Pendidikan	Router	5.786.618,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
27	Dinas Pendidikan	Scanner	4.093.123,00	SDIT Wahdah Islamiyah 02	162/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
28	Dinas Pendidikan	Kursi Guru	1.645.890,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
29	Dinas Pendidikan	Kursi Siswa	28.914.240,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/ Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021



No.	SKPD asal	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Penerima	Nomor dan Tanggal Dokumen
30	Dinas Pendidikan	Lemari	1.890.550,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
31	Dinas Pendidikan	Meja Guru	2.156.440,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
32	Dinas Pendidikan	Meja Siswa	31.138.480,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
33	Dinas Pendidikan	Papan Tulis	878.550,00	SMPN Kristen Mangkutana	159/BAST B3/Disdik/2021 tanggal 28 Oktober 2021
Jumlah			737.499.572,00		

3. Penghapusan sebesar Rp468.077.000,00;

Tabel 4.88
Daftar Penghapusan Aset Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	Sekretariat Daerah	Station Wagon	2013	454.100.000,00	Nomor: 221/F-04/VI/Tahun 2021 tanggal 26 Juni 2021
2	Kecamatan Tomoni Timur	Sepeda Motor	2007	13.977.000,00	Nomor: 299/XII/2018 tanggal 28 Desember 2021
Jumlah				468.077.000,00	

4. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp9.735.127.279,19;
a. Rekalsifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp358.335.139,00;

Tabel 4.89
Reklasifikasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin
ke Aset Jalan Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	RSUD I Lagaligo	Pengadaan Panel induk	147.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	Sumur Bor	1.950.000,00	SDN 203 Bongkamanu
3	Dinas Pendidikan	Pemasangan PDAM	1.300.000,00	SDN 239 Salu Minanga
4	Dinas Pendidikan	Pemasangan jaringan Air bersih (PDAM)	4.500.000,00	SDN 256 Dongi
5	Dinas Pendidikan	Pemasangan KWH	2.000.000,00	SDN 279 Rante Angin
6	Dinas Pendidikan	Sumur Bor	2.000.000,00	SMPN 1 Angkona
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Sumur dengan Pompa (Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili)	199.585.139,00	
Jumlah			358.335.139,00	

b. Rekalsifikasi ke Aset tetap lainnya Rp11.425.000,00;

Tabel 4.90
Reklasifikasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin
ke Aset Tetap Lainnya
Tahun 2021



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Pendidikan	Buku Seni Budaya kelas 9 (Peg.Guru)	100.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
2	Dinas Pendidikan	Buku Pendidikan Agama Islam kelas 7 (Peg.Guru)	101.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
3	Dinas Pendidikan	Buku Bahasa Inggris kelas 9 (Peg.Guru)	102.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
4	Dinas Pendidikan	Buku Seni Budaya kelas 8 (Peg.Guru)	102.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
5	Dinas Pendidikan	Buku Bahasa Indonesia kelas 8 (Peg.Guru)	107.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
6	Dinas Pendidikan	Buku Bahasa Inggris kelas 8 (Peg.Guru)	107.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
7	Dinas Pendidikan	Buku Matematika SMP/Mts Kelas 8 (Peg. Guru)	122.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
8	Dinas Pendidikan	Buku Seni Budaya kelas 7 (Peg.Guru)	127.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
9	Dinas Pendidikan	Buku Matematika SMP/Mts Kelas 7 (Peg. Guru)	140.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
10	Dinas Pendidikan	Buku IPA Terpadu SMP/ Mts Kelas 9 (Peg.Guru)	147.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
11	Dinas Pendidikan	Buku IPS Kelas 7 (Peg.Guru)	147.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
12	Dinas Pendidikan	Buku IPA Terpadu SMP/ Mts Kelas 7 (Peg.Guru)	152.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
13	Dinas Pendidikan	Buku IPS Kelas 8 (Peg.Guru)	152.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
14	Dinas Pendidikan	Buku IPA Terpadu SMP/ Mts Kelas 8 (Peg.Guru)	157.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
15	Dinas Pendidikan	Buku IPS Kelas 9 (Peg.Guru)	162.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
16	Dinas Pendidikan	Buku Induk Siswa	9.500.000,00	SMPN 1 Tomoni Timur
Jumlah			11.425.000,00	

c. Reklasifikasi ke Aset lainnya Rp4.948.437.171,10;

Tabel 4.91
Reklasifikasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6.600.000,00	
2	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9.305.000,00	
3	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Layar Film/Projector	22.500.000,00	
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Mesin Absensi	15.180.000,00	
5	Dinas Kesehatan	Mobil Ambulance	139.500.000,00	
6	Dinas Kesehatan	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	357.720.000,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
7	Dinas Kesehatan	Sepeda Motor	23.250.000,00	Puskesmas Wasuponda
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4.150.455,00	
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	Server	34.510.000,00	
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.932.000,00	
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12.932.000,00	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6.500.000,00	
13	Dinas Pendidikan	A.C. Split	8.400.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
14	Dinas Pendidikan	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	2.400.000,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
15	Dinas Pendidikan	alat laboratorium biologi lainnya (dst)	395.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
16	Dinas Pendidikan	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	1.697.500,00	SMA Negeri 1 Malili
17	Dinas Pendidikan	alat laboratorium kimia lainnya (dst)	395.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
18	Dinas Pendidikan	alat laboratorium umum lainnya (dst)	1.650.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
19	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	1.500.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
20	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	300.000,00	SMA Negeri 1 Malili
21	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	750.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni
22	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	1.100.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
23	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	1.000.000,00	SMA Negeri 2 Malili
24	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	28.581.810,00	SMK Negeri 1 Malili
25	Dinas Pendidikan	alat peraga kejuruan lainnya (dst)	1.920.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
26	Dinas Pendidikan	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ips lainnya (dst)	485.000,00	SMA Negeri 1 Wotu
27	Dinas Pendidikan	alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	2.450.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
28	Dinas Pendidikan	alat peraga praktek sekolah bidang studi	750.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
		: olah raga lainnya (dst)		
29	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	77.000.000,00	SMA Negeri 1 Burau
30	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	69.520.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
31	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	10.990.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
32	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	42.467.638,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
33	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	49.200.000,00	SMA Negeri 2 Malili
34	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	78.000.000,00	SMK Negeri 1 Malili
35	Dinas Pendidikan	Bangku Sekolah	86.609.840,00	SMK Negeri 1 Tomoni
36	Dinas Pendidikan	Brandkas	3.429.000,00	SMA Negeri 1 Malili
37	Dinas Pendidikan	Brandkas	7.275.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
38	Dinas Pendidikan	Camera film	1.500.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
39	Dinas Pendidikan	Camera film	2.500.000,00	SMA Negeri 2 Malili
40	Dinas Pendidikan	Filing Cabinet Besi	2.500.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
41	Dinas Pendidikan	Hard Disk	700.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni
42	Dinas Pendidikan	Kipas Angin	400.000,00	SMA Negeri 1 MALILI
43	Dinas Pendidikan	Kipas Angin	500.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
44	Dinas Pendidikan	Kipas Angin	3.000.000,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
45	Dinas Pendidikan	Kipas Angin	1.200.000,00	SMA Negeri 1 Wotu
46	Dinas Pendidikan	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	10.750.000,00	SMK Negeri 1 Malili
47	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5.700.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
48	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3.122.000,00	Sma Negeri 1 Burau
49	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4.985.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
50	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2.166.200,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
51	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4.750.000,00	SMA Negeri 1 Nuha



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
52	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1.050.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni
53	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	18.415.995,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
54	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5.617.187,50	SMA Negeri 2 Malili
55	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6.743.000,00	SMK Negeri 1 Malili
56	Dinas Pendidikan	Kursi Kerja Pejabat lainnya	17.128.312,50	SMK Negeri 1 Tomoni
57	Dinas Pendidikan	Kursi Putar	4.445.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
58	Dinas Pendidikan	Kursi Rapat	5.600.000,00	SMK Negeri 1 Malili
59	Dinas Pendidikan	Kursi Tamu	3.400.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
60	Dinas Pendidikan	Lap Top	8.000.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
61	Dinas Pendidikan	Layar Film/Projector	5.750.000,00	SMA Negeri 2 Malili
62	Dinas Pendidikan	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2.500.000,00	SMA Negeri 1 Burau
63	Dinas Pendidikan	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2.500.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
64	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	15.846.800,00	SMA Negeri 1 Burau
65	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	2.000.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
66	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	8.969.400,00	SMA Negeri 1 Malili
67	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	7.260.800,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
68	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	5.244.000,00	SMA Negeri 1 Nuha
69	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	3.775.628,57	SMA Negeri 1 Tomoni
70	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	11.390.628,57	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
71	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	4.500.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
72	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	4.789.410,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
73	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	6.533.128,57	SMA Negeri 2 Malili
74	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	19.726.400,00	SMK Negeri 1 Malili
75	Dinas Pendidikan	Lemari Kayu	30.858.628,57	SMK Negeri 1 Tomoni
76	Dinas Pendidikan	Meja 1/2 Biro	6.000.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
77	Dinas Pendidikan	Meja 1/2 Biro	49.200.000,00	SMK Negeri 1 Malili
78	Dinas Pendidikan	Meja 1/2 Biro	100.000.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
79	Dinas Pendidikan	Meja Kerja	935.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
80	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	4.226.000,00	SMA Negeri 1 Burau
81	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	12.960.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
82	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	9.900.000,00	SMA Negeri 1 Malili
83	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	3.156.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
84	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	1.750.000,00	SMA Negeri 1 Nuha
85	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	9.071.400,00	SMA Negeri 1 Tomoni
86	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	14.688.853,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
87	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	700.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
88	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	1.562.100,00	SMA Negeri 2 Malili
89	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	4.060.000,00	SMK Negeri 1 Malili
90	Dinas Pendidikan	Meja Kerja Kayu	26.896.350,00	SMK Negeri 1 Tomoni
91	Dinas Pendidikan	Meja Sekolah	750.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
92	Dinas Pendidikan	Meja Sekolah	2.250.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
93	Dinas Pendidikan	Meja Sekolah	51.081.600,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
94	Dinas Pendidikan	Meja Sekolah	100.000.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
95	Dinas Pendidikan	Mesin Fotocopy Folio	29.600.000,00	SMA Negeri 1 Burau
96	Dinas Pendidikan	Mesin Pemotong Rumput	3.895.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
97	Dinas Pendidikan	Mesin Pemotong Serat	6.900.000,00	SMA Negeri 1 Burau
98	Dinas Pendidikan	Mesin Pemotong Serat	2.910.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
99	Dinas Pendidikan	Microscope	1.550.000,00	SMA Negeri 1 Wotu
100	Dinas Pendidikan	Mikroskop	9.180.000,00	SMA Negeri 1 Burau
101	Dinas Pendidikan	Modem	350.000,00	SMA Negeri 1 Malili



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
102	Dinas Pendidikan	Monitor	1.970.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
103	Dinas Pendidikan	Monitor	18.351.500,00	SMK Negeri 1 Malili
104	Dinas Pendidikan	Monitor	2.700.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
105	Dinas Pendidikan	P.C Unit	96.680.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
106	Dinas Pendidikan	P.C Unit	40.005.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
107	Dinas Pendidikan	P.C Unit	8.000.000,00	SMA Negeri 2 Malili
108	Dinas Pendidikan	P.C Unit	80.000.000,00	SMK Negeri 1 Malili
109	Dinas Pendidikan	P.C Unit	250.397.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
110	Dinas Pendidikan	P.C Unit	568.000,00	SMA Negeri 1 Malili
111	Dinas Pendidikan	P.C Unit	3.249.500,00	SMA Negeri 1 Towuti
112	Dinas Pendidikan	P.C Unit	500.000,00	SMK Negeri 1 Malili
113	Dinas Pendidikan	P.C Unit	1.200.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
114	Dinas Pendidikan	Peralatan Personal Komputer lainnya	4.500.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
115	Dinas Pendidikan	Peralatan Personal Komputer lainnya	6.477.000,00	SMK Negeri 1 Malili
116	Dinas Pendidikan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	900.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
117	Dinas Pendidikan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.800.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
118	Dinas Pendidikan	Rak Kayu	1.000.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
119	Dinas Pendidikan	Rak Kayu	1.000.000,00	Sma Negeri 1 Tomoni Timur
120	Dinas Pendidikan	Rak Kayu	2.560.000,00	SMK Negeri 1 Malili
121	Dinas Pendidikan	recorder display lainnya (dst)	2.921.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
122	Dinas Pendidikan	Sirine	2.900.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
123	Dinas Pendidikan	Sofa	3.000.000,00	SMA Negeri 1 Tomoni Timur
124	Dinas Pendidikan	Sound System	2.000.000,00	SMA Negeri 1 Angkona
125	Dinas Pendidikan	Sound System	12.000.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
126	Dinas Pendidikan	Sound System	2.370.000,00	SMA Negeri 1 Wotu



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
127	Dinas Pendidikan	Sound System	20.110.000,00	SMK Negeri 1 Malili
128	Dinas Pendidikan	Speaker Komputer	500.000,00	SMA Negeri 1 Malili
129	Dinas Pendidikan	Stabilizer	3.500.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
130	Dinas Pendidikan	Tenda	1.500.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
131	Dinas Pendidikan	Tenda	1.200.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
132	Dinas Pendidikan	Tenda	15.000.000,00	SMA Negeri 1 Wasuponda
133	Dinas Pendidikan	Tenda	2.945.000,00	SMA Negeri 1 Wotu
134	Dinas Pendidikan	Tenda	700.000,00	SMK Negeri 1 Malili
135	Dinas Pendidikan	Tenda	3.500.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
136	Dinas Pendidikan	Teralis	1.350.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
137	Dinas Pendidikan	Uninterrupted Power Supply (UPS)	2.670.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
138	Dinas Pendidikan	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1.000.000,00	SMA Negeri 1 Towuti
139	Dinas Pendidikan	Unit Power Supply	6.250.000,00	SMA Negeri 1 Kalaena
140	Dinas Pendidikan	White Board	2.092.200,00	SMA Negeri 1 Burau
141	Dinas Pendidikan	White Board	2.092.000,00	SMA Negeri 1 Mangkutana
142	Dinas Pendidikan	White Board	1.254.000,00	SMA Negeri 1 Wotu
143	Dinas Pendidikan	White Board	3.495.400,00	SMK Negeri 1 Malili
144	Dinas Pendidikan	White Board	950.000,00	SMK Negeri 1 Tomoni
145	RSUD I Lagaligo	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27.025.000,00	
146	Sekretariat Daerah	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12.125.000,00	
147	Sekretariat DPRD	Camera Electronic	19.000.000,00	
148	Sekretariat DPRD	Televisi	6.150.000,00	
149	Dinas Perhubungan	Aplikasi Blu E	18.617.500,00	
150	Dinas Perhubungan	Aplikasi Retribusi dan Denda	58.107.500,00	
151	RSUD I Lagaligo	Aplikasi Sistem Akuntansi BLUD RSUD I Lagaligo	75.000.000,00	
152	RSUD I Lagaligo	Treasury	100.000.000,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
		Management System (TMS)		
153	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-learning	6.500.000,00	SDN 120 Campae
154	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	7.055.000,00	SDN 122 Dauloloe
155	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 123 Tarengge
156	Dinas Pendidikan	Website-Learning	6.500.000,00	SDN 125 Maramba
157	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00	SDN 128 Pepuro
158	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00	SDN 128 Pepuro
159	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	2.000.000,00	SDN 128 Pepuro
160	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00	SDN 130 Karambua
161	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.950.000,00	SDN 133 Banalara
162	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 136 Cendana Hijau
163	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00	SDN 137 Molelengku
164	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00	SDN 138 Karambua
165	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning paket	6.500.000,00	SDN 147 Wonorejo
166	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 173 Kertoraharjo
167	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-learning	1.500.000,00	SDN 186 Kebun Rami
168	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-learning	1.500.000,00	SDN 246 Tabarano
169	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 251 Pae-Pae
170	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 253 Amasi
171	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.800.000,00	SDN 258 Sinongko
172	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	1.500.000,00	SDN 264 Wawondula
173	Dinas Pendidikan	Aplikasi E-Learning	6.500.000,00	SDN 272 Parahua
174	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kursi Putar	1.716.000,00	
175	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Lap Top	17.500.000,00	
176	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.430.000,00	
177	Dinas Kesehatan	Sepeda Motor	140.425.915,00	
178	Dinas Lingkungan Hidup	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	173.500.000,00	
179	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.450.000,00	
180	Dinas	A.C. Split	4.940.000,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
181	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Camera Electronic	1.960.600,00	
182	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Lap Top	16.400.000,00	
183	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Papan Pengumuman	11.900.000,00	
184	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Papan Visual/Papan Nama	7.500.000,00	
185	Dinas Pendidikan	Sepeda Motor	34.017.500,00	
186	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.500.000,00	
187	Puskesmas Wotu	Sepeda Motor	8.000.000,00	
188	Inspektorat	Alat Kantor Lainnya	675.000,00	
189	Inspektorat	Camera Video	23.400.000,00	
190	Inspektorat	Handy Cam	7.147.208,00	
191	Inspektorat	Hard Disk	950.000,00	
192	Inspektorat	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	21.000.000,00	
193	Inspektorat	Lap Top	67.500.000,00	
194	Inspektorat	Lemari Kaca	2.136.000,00	
195	Inspektorat	Meja 1/2 Biro	4.523.000,00	
196	Inspektorat	Meja Kerja Kayu	668.500,00	
197	Inspektorat	Meja Komputer	700.000,00	
198	Inspektorat	Mesin Ketik Listrik	1.965.000,00	
199	Inspektorat	Papan Pengumuman	1.800.000,00	
200	Inspektorat	Printer (Peralatan Personal Komputer)	900.000,00	
201	Inspektorat	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1.000.000,00	
202	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Kursi Rapat	492.500,00	
203	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	Lap Top	25.600.000,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
	Kebakaran			
204	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mesin Absensi	15.180.000,00	
205	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6.875.000,00	
206	Kecamatan Angkona	Sepeda Motor	40.670.000,00	
207	Kecamatan Kalaena	A.C. Window	4.475.000,00	
208	Kecamatan Kalaena	Kompas Gas (Alat Dapur)	575.000,00	
209	Kecamatan Kalaena	Kursi Tamu	9.700.000,00	
210	Kecamatan Kalaena	Meja Rapat	1.450.000,00	
211	Kecamatan Kalaena	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4.715.000,00	
212	Kecamatan Kalaena	Tempat Tidur Kayu	5.740.000,00	
213	Kecamatan Mangkutana	Lap Top	8.300.000,00	
214	Kecamatan Mangkutana	Meja 1/2 Biro	2.512.000,00	
215	Kecamatan Tomoni Timur	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.625.000,00	
216	Kecamatan Towuti	A.C. Window	12.845.000,00	
217	Kecamatan Towuti	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	55.200.000,00	
218	Kecamatan Towuti	Gordiyin/Kray	22.995.000,00	
219	Kecamatan Towuti	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2.450.000,00	
220	Kecamatan Towuti	P.C Unit	7.800.000,00	
221	Kecamatan Towuti	Station Wagon	357.685.679,00	
222	Puskesmas Wawondula	A.C. Split	20.500.000,00	
223	Puskesmas Wawondula	Alat Dapur lainnya	660.000,00	
224	Puskesmas Wawondula	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	878.500,00	
225	Puskesmas Wawondula	alat kedokteran anak lainnya (dst)	3.548.700,00	
226	Puskesmas Wawondula	alat kedokteran keluarga berencana	1.050.900,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
		lainnya (dst)		
227	Puskesmas Wawondula	Alat Kedokteran umum lainnya	219.139.643,00	
228	Puskesmas Wawondula	alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan lainnya (dst)	8.191.000,00	
229	Puskesmas Wawondula	alat komunikasi radio vhf lainnya (dst)	8.450.000,00	
230	Puskesmas Wawondula	alat laboratorium lain lainnya (dst)	130.436.449,00	
231	Puskesmas Wawondula	Alat Laboratorium lainnya	725.000,00	
232	Puskesmas Wawondula	alat laboratorium makanan lainnya (dst)	500.000,00	
233	Puskesmas Wawondula	alat laboratorium umum lainnya (dst)	113.746.024,49	
234	Puskesmas Wawondula	ALat Peraga PMP Lain-lain Dst-.	3.493.500,00	
235	Puskesmas Wawondula	Bak Air	5.800.000,00	
236	Puskesmas Wawondula	Bangku Tunggu	3.840.000,00	
237	Puskesmas Wawondula	Blood Pressure Meter With Pump Raksa	3.600.000,00	
238	Puskesmas Wawondula	Bowl Solution	531.500,00	
239	Puskesmas Wawondula	Dispencer	1.770.000,00	
240	Puskesmas Wawondula	Dopler (Fetal Heart Sound Detector)	6.882.000,00	
241	Puskesmas Wawondula	Genset	7.420.000,00	
242	Puskesmas Wawondula	Gynecological Examining Table	14.066.650,00	
243	Puskesmas Wawondula	Head Lamp (Alat Kedokteran Umum)	1.575.000,00	
244	Puskesmas Wawondula	Instrumen Cabinet	8.194.352,72	
245	Puskesmas Wawondula	Kipas Angin	5.435.792,39	
246	Puskesmas Wawondula	Kursi Besi/Metal	1.500.000,00	
247	Puskesmas Wawondula	Kursi Kerja Pejabat lainnya	10.863.500,00	
248	Puskesmas Wawondula	Lampu	12.000.000,00	
249	Puskesmas	Lap Top	8.200.000,00	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
	Wawondula			
250	Puskesmas Wawondula	Layar Film/Projector	8.500.000,00	
251	Puskesmas Wawondula	Lemari Es	55.160.500,00	
252	Puskesmas Wawondula	Lemari Kayu	700.000,00	
253	Puskesmas Wawondula	Lemari Penyimpan	15.860.000,00	
254	Puskesmas Wawondula	Loudspeaker	3.461.645,00	
255	Puskesmas Wawondula	Meja Kerja Kayu	21.525.360,00	
256	Puskesmas Wawondula	Meja Periksa Pasien	1.650.000,00	
257	Puskesmas Wawondula	Mesin Absensi	17.815.000,00	
258	Puskesmas Wawondula	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	3.320.000,00	
259	Puskesmas Wawondula	Mesin Pemotong Rumput	2.970.000,00	
260	Puskesmas Wawondula	Microphone/Wireless	9.999.000,00	
261	Puskesmas Wawondula	Nebulizer Perimeter (Anesthesi)	15.050.000,00	
262	Puskesmas Wawondula	Note Book	18.202.000,00	
263	Puskesmas Wawondula	P.C Unit	50.982.000,00	
264	Puskesmas Wawondula	Papan Nama Instansi	22.625.000,00	
265	Puskesmas Wawondula	Pispot Dewasa	30.000,00	
266	Puskesmas Wawondula	Pompa Air	7.810.000,00	
267	Puskesmas Wawondula	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5.930.000,00	
268	Puskesmas Wawondula	Sepeda Motor	26.250.000,00	
269	Puskesmas Wawondula	Speculum Model Kit	75.000,00	
270	Puskesmas Wawondula	Spirometer (Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam)	950.000,00	
271	Puskesmas Wawondula	Stabilizer	8.820.000,00	
272	Puskesmas Wawondula	Standar Infus	1.455.547,42	
273	Puskesmas Wawondula	Sterilisator	12.506.042,80	



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
274	Puskesmas Wawondula	Suction Pump	100.000,00	
275	Puskesmas Wawondula	Tensimeter	52.038.997,00	
276	Puskesmas Wawondula	Termos A.J	5.940.000,00	
277	Puskesmas Wawondula	Treng Air/Tandon Air	250.000,00	
278	Puskesmas Wawondula	Uninterrupted Power Supply (UPS)	1.250.000,00	
279	Puskesmas Wawondula	White Board	500.000,00	
Jumlah			4.948.437.171,10	

d. Reklasifikasi ke Beban barang dan jasa Rp588.292.289,00;

Tabel 4.92
Rekapitulasi Reklasifikasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin
ke Beban Barang dan Jasa pada SKPD
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.200.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.609.852,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.300.000,00
4	Dinas Pendidikan	228.691.833,00
5	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	3.650.000,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	205.979.400,00
7	Puskesmas Bantilang	3.924.000,00
8	Puskesmas Parumpanai	359.000,00
9	Puskesmas Tomoni Timur	200.000,00
10	RSUD I Lagaligo	54.357.204,00
11	Sekretariat Daerah	68.021.000,00
Jumlah		588.292.289,00

e. Reklasifikasi antar Aset Tetap Rp1.825.105.664,10, berupa reklasifikasi Lampu Penerangan Jalan Umum (KIB B) sebanyak 115 buah ke Jaringan Transmisi (KIB D) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

f. Reklasifikasi ke Extracomtable Rp2.003.532.015,99

Tabel 4.93
Reklasifikasi Kurang Aset Peralatan dan Mesin ke Extracomtable
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kendaraan tak bermotor penumpang	3.910.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pompa	7.650.000,00
3	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.010.000,00
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Pompa	28.418.280,00
5	Dinas Kesehatan	Alat Dapur	1.369.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	Dinas Kesehatan	Alat Kantor Lainnya	6.230.000,00
7	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	250.000,00
8	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Gigi	111.092.054,24
9	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	935.000,00
10	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran THT	125.000,00
11	Dinas Kesehatan	Alat Kedokteran Umum	47.229.734,00
12	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	163.000,00
13	Dinas Kesehatan	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1.050.000,00
14	Dinas Kesehatan	Alat Laboratorium Batuan/Geologi	209.000,00
15	Dinas Kesehatan	Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	461.000,00
16	Dinas Kesehatan	Alat Laboratorium Pertanian	13.025.000,00
17	Dinas Kesehatan	Alat Pemadam Kebakaran	88.000,00
18	Dinas Kesehatan	Alat Pendingin	250.000,00
19	Dinas Kesehatan	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	584.175.000,00
20	Dinas Kesehatan	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	12.900.000,00
21	Dinas Kesehatan	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	34.000,00
22	Dinas Kesehatan	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	13.500,00
23	Dinas Kesehatan	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	263.000,00
24	Dinas Kesehatan	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.483.000,00
25	Dinas Kesehatan	Alat-Alat Peternakan	73.260.000,00
26	Dinas Kesehatan	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.500.000,00
27	Dinas Kesehatan	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	18.828.362,00
28	Dinas Kesehatan	Kendaraan tak bermotor penumpang	24.225.000,00
29	Dinas Kesehatan	Kursi Kerja Pejabat	20.164.500,00
30	Dinas Kesehatan	Mebel	43.415.055,56
31	Dinas Kesehatan	Peralatan Studio Audio	60.000,00
32	Dinas Kesehatan	Pompa	71.886.000,00
33	Dinas Kesehatan	Tractor	163.555.000,00
34	Dinas Komunikasi dan Informatika	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	32.215.100,00
35	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	1.935.000,00
36	Dinas Lingkungan Hidup	Alat Produksi Perikanan	9.500.000,00
37	Dinas Lingkungan Hidup	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	3.581.440,00
38	Dinas Lingkungan Hidup	Pompa	2.075.000,00
39	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pompa	2.520.738,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	40.730.000,00
41	Dinas Pendidikan	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	249.213.266,00
42	Dinas Pendidikan	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	16.730.600,00
43	Dinas Pendidikan	Kendaraan tak bermotor	7.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		penumpang	
44	Dinas Pendidikan	Mesin Bor	3.105.000,00
45	Dinas Pendidikan	Pompa	74.176.000,00
46	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pompa	7.425.000,00
47	Dinas Perhubungan	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	7.140,00
48	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.000.000,00
49	Dinas Pertanian	Alat Laboratorium Hidrokimia	250.000,00
50	Dinas Pertanian	Alat-Alat Peternakan	6.000.000,00
51	Dinas Pertanian	Kursi Kerja Pejabat	1.400.000,00
52	Dinas Pertanian	Kursi Rapat Pejabat	3.750.000,00
53	Dinas Pertanian	Mebel	139.695.000,00
54	Dinas Pertanian	Pompa	1.400.000,00
55	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	50.727.000,00
56	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Alat Pendingin	894.000,00
57	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Compacting Equipment	3.000.000,00
58	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	2.000.000,00
59	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pompa	21.684.000,00
60	Kecamatan Angkona	Pompa	500.000,00
61	Kecamatan Kalaena	Pompa	2.080.000,00
62	Kecamatan Kalaena	Stand Mic (3 buah)	780.000,00
63	Kecamatan Mangkutana	Pompa	2.800.000,00
64	Kecamatan Tomoni	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2.500.000,00
65	Kecamatan Tomoni	Hauler	900.000,00
66	Kecamatan Tomoni	Pompa	4.000.000,00
67	Kecamatan Towuti	Pompa	2.500.000,00
68	Kecamatan Wasuponda	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	400.000,00
69	Kecamatan Wasuponda	Kursi Kerja Pejabat	2.000.000,00
70	Kecamatan Wasuponda	Lemari dan Arsip Pejabat	400.000,00
71	Kecamatan Wasuponda	Mebel	15.500.000,00
72	Kecamatan Wasuponda	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	750.000,00
73	Kecamatan Wasuponda	Mesin Ketik	250.000,00
74	Kecamatan Wotu	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	742.500,00
75	Kecamatan Wotu	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	4.500.000,00
76	Kecamatan Wotu	Mebel	202.000,00
77	Puskesmas Angkona	Lori Dorong	650.000,00
78	Puskesmas Burau	Trolley Car/Lori	1.049.746,19
79	Puskesmas Kalaena	Kursi Biasa	9.880.000,00
80	Puskesmas Malili	Pompa Air	5.000.000,00
81	Puskesmas Malili	Timbangan Orang	1.000.000,00
82	Puskesmas Mangkutana	Lori Dorong	650.000,00
83	Puskesmas Tomoni	Alat Laboratorium lainnya	3.500.000,00
84	Puskesmas Wotu	Pompa Air	2.000.000,00
85	RSUD I Lagaligo	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	6.256.000,00
86	Sekretariat Daerah	Alat penyimpan hasil	2.500.000,00



		percobaan pertanian	
87	Sekretariat Daerah	Mesin pompa Air	2.500.000,00
88	Sekretariat DPRD	Alat penyimpan hasil percobaan pertanian	3.500.000,00
Jumlah			2.003.532.015,99

5. Koreksi catat sebesar Rp228.438.973,92 pada Dinas Pendidikan, dimana aset tersebut telah diserahkan kepada Sekolah swasta.

Tabel 4.94
Rincian Koreksi catat Aset Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Alat Rumah Tangga Lain-lain	580.000,00
2	Bangku Sekolah	12.282.600,00
3	Bel Listrik	3.500.000,00
4	Camera film	4.400.000,00
5	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3.775.000,00
6	Hard Disk	900.000,00
7	Kursi Biasa	1.965.000,00
8	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	529.800,00
9	Kursi Kerja Pejabat lainnya	8.811.686,96
10	Lap Top	25.259.000,00
11	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	10.537.800,00
12	Lemari Kayu	37.245.000,00
13	Meja 1/2 Biro	60.373.886,96
14	Meja Kerja Kayu	36.906.700,00
15	Model Torso Mini	6.150.000,00
16	P.C Unit	5.450.000,00
17	Rak Kayu	3.400.000,00
18	Server	1.800.000,00
19	Sound System	1.572.500,00
20	Treng Air/Tandon Air	3.000.000,00
Jumlah		228.438.973,92

6. Pembayaran Utang sebesar Rp50.000.000,00 berupa pembayaran utang Platelet Incubator pada RSUD I Lagaligo.

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Peralatan dan Mesin:

- Aset tetap Peralatan dan Mesin yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
 - Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Operasional Toyota Avanza Velos DP 247 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Agama Malili Nomor 119/01/NK/Pem-LTt/2019 dan W20-A27/93/UM.01/II/2019 tanggal 7 Februari 2019;
 - Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 31 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pengadilan Negeri Malili Nomor 119/02/NK/Pem-LTt/2019 dan W22-U25/UM/III/2019 tanggal 7 Februari 2019;
 - Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 68 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kejaksaan Negeri Wotu Nomor 030/02/VII/BPKD/2019 dan B-081/R4.23.6/CP.1/07/2019 tanggal 10 Juli 2019;
 - Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 8137 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur



- dengan Kejaksaan Negeri Malili Nomor 030/04/VIII/BPKD/ 2019 dan B-223/P.4.36/CP1.1/10/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
- e. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil HYLUX Double Cabin DP 8138 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Polres Luwu Timur Nomor 030/05/VIII/BPKD/ 2019 dan B/02/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
 - f. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 78 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Polres Luwu Timur Nomor 030/06/VIII/BPKD/ 2019 dan B/03/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
 - g. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 59 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kementerian Agama Lutim Nomor 030/01/I/BPKD/2020 dan 253/KK.21.10/I/KU.00/01/2020 tanggal 20 Januari 2020;
 - h. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Isuzu Panther DP 9053 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Baznas Luwu Timur Nomor 030/05/XI/BPKD/2020 dan 375/B/ BAZNAS-LT/XI/2020 tanggal 9 November 2020;
 - i. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 100 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lutim Nomor 030/01/II/BPKD/2020 dan 007/21.24/B.2020 tanggal 20 Januari 2020;
 - j. Perjanjian pinjam pakai Kendaraan Dinas Milik Pemerintah (Mobil Toyota Kijang Innova DP 65 G) antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Dandim Sawerigading Nomor 030/01/III/BPKD/2020 dan SP/10/II/2020 tanggal 10 Februari 2020;
2. Terdapat Aset Peralatan dan Mesin yang telah dihibahkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 147.54./17/NPHD/PEM-LT/XII/2021 dan 78/PL.04/SN-10/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin dan Bangunan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, berupa teralis dengan nilai perolehan sebesar Rp7.000.000,00.

Aset tersebut tercatat pada SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, namun hingga saat ini masih tetap tercatat pada SKPD terkait, karena belum ada Surat Keputusan penghapusan atas aset yang telah dihibahkan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun berkenaan, sehingga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

4.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.160.164.317.454,52 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.056.897.823.540,82. Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.266.493.913,70 adalah sebagai berikut:

Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp125.237.973.493,48, yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.456.254.821,08;
2. Belanja BLUD pada RSUD I Lagaligo Rp424.569.950,00;
3. Belanja JKN pada Puskesmas Rp40.000.000,00;
4. Hibah masuk sebesar Rp24.232.950.484,00;



5. Mutasi masuk sebesar Rp1.710.455.135,00;
 6. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp1.149.561.767,84;
 7. Utang sebesar Rp105.867.814,56;
 8. Koreksi Catat sebesar Rp118.313.521,00
- Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.971.479.579,78, yang terdiri dari:
1. Mutasi keluar sebesar Rp1.710.455.135,00;
 2. Hibah keluar sebesar Rp928.764.347,00;
 3. Penghapusan Aset sebesar Rp2.339.372.730,00;
 4. Reklasifikasi kurang sebesar Rp16.670.751.722,64;
 5. Pembayaran Utang sebesar Rp303.465.645,14;
 6. Koreksi Catat sebesar Rp18.670.000,00.

Tabel 4.95
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset
Gedung dan Bangunan per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	646.191.559,00	40.617.659,00
2	Sekretariat Daerah	274.487.000,00	36.981.877,00
3	Inspektorat	196.780.000,00	0,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87.387.490,00	0,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	22.800.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.722.749.656,00	0,00
7	Dinas Pendidikan	32.408.939.480,00	2.107.270.290,02
8	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.990.638.300,68	1.456.446.095,95
9	Dinas Perhubungan	3.105.831.930,01	21.200.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4.165.685.913,21	3.295.498.637,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	23.105.000,00	67.300.000,00
12	Dinas Kesehatan	7.708.019.921,27	2.316.754.294,41
13	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	895.307.480,08	309.041.327,00
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	793.845.860,23	109.976.000,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	23.569.806.649,00	1.072.557.540,00
16	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.864.000,00	54.914.000,00
17	RSUD I Lagaligo	36.413.319.750,00	9.111.607.762,40
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.708.000,00	0,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	29.299.000,00	0,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.837.596.004,00	0,00
21	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.658.000,00	3.658.000,00
22	Dinas Pertanian	160.781.000,00	1.790.855.135,00
23	Kecamatan Malili	0,00	15.800.000,00
24	Kecamatan Tomoni	0,00	31.900.000,00
25	Kecamatan Wasuponda	0,00	17.573.500,00



No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
26	Kecamatan Angkona	0,00	3.308.374,00
27	Kecamatan Mangkutana	0,00	4.200.000,00
28	Kecamatan Burau	0,00	18.900.000,00
29	Kecamatan Wotu	0,00	17.200.000,00
30	Kecamatan Nuha	89.971.500,00	45.119.088,00
Jumlah		125.237.973.493,48	21.971.479.579,78

Adapun rincian untuk penambahan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp125.237.973.493,48, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.456.254.821,08, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.96
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	646.191.559,00
2	Sekretariat Daerah	261.727.000,00
3	Inspektorat	196.780.000,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	87.387.490,00
5	Dinas Pendidikan	29.744.259.880,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.795.940.426,31
7	Dinas Perhubungan	2.923.618.883,19
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.530.730.352,00
9	Dinas Kesehatan	7.614.950.821,27
10	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	895.307.480,08
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	627.669.860,23
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.907.063.765,00
13	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	50.864.000,00
14	RSUD I Lagaligo	35.988.749.800,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	63.708.000,00
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	29.299.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.837.596.004,00
18	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.658.000,00
19	Dinas Pertanian	160.781.000,00
20	Kecamatan Nuha	89.971.500,00
Jumlah		97.456.254.821,08

2. Belanja BLUD pada RSUD I Lagaligo Rp424.569.950,00;

Tabel 4.97
Rincian Realisasi Belanja BLUD pada RSUD I Lagaligo
Tahun Anggaran 2021

No.	Nama Pekerjaan	Jumlah
1	Instalasi Gas Medis	179.000.000,00
2	Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Fisik Lainnya (Pekerjaan Partisi IGD Umum)	195.900.000,00
3	Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Ruang Tunggu Poly	24.750.000,00
4	Pekerjaan Lajutan Rehabilitasi Ruang ICU	24.919.950,00
Jumlah		424.569.950,00

3. Belanja JKN pada Puskesmas Rp40.000.000,00, berupa belanja modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga pada Puskesmas Angkona



4. Hibah masuk sebesar Rp24.232.950.484,00;

Tabel 4.98
Hibah Masuk Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD Penerima	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Pemberi	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen (Parumpanai)	6.099.845.000,00	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	637/M-DAG/BAST/11/2021 tanggal 22 November 2021
2	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen (Solo)	5.299.756.872,00	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	635/M-DAG/BAST/11/2021 tanggal 22 November 2021
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen (Taripa)	3.660.472.574,00	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	641/M-DAG/BAST/11/2021 tanggal 22 November 2021
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen (Timampu)	6.275.623.438,00	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	639/M-DAG/BAST/11/2021 tanggal 22 November 2021
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bangunan Tempat Ibadah (Desa Watangpanua Kec. Angkona)	247.370.000,00	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	147.54/01/NPHD/Pem-LT/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021
6	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.283.573.500,00	Yayasan baladul Amin	919/BA/DC/2021 tanggal 31 Desember 2021
7	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	700.096.185,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bangunan 6 RKB)	919/BA/DC/2021 tanggal 31 Desember 2021
8	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	286.340.740,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bangunan 3 RKB)	919/BA/DC/2021 tanggal 31 Desember 2021
9	Dinas Pendidikan	Taman Permanen	74.762.000,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	919/BA/DC/2021 tanggal 31 Desember 2021
10	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	305.110.175,00	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	919/BA/DC/2021 tanggal 31 Desember 2021
Jumlah			24.232.950.484,00		

5. Mutasi masuk sebesar Rp1.710.455.135,00;

Tabel 4.99
Mutasi Masuk Gedung Dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Harga Perolehan	SKPD Penerima
1	Dinas Pertanian	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.073.331.546,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Pertanian	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	30.271.589,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Dinas Pertanian	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	230.132.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
4	Dinas Pertanian	Pagar Lain-lain (dst)	376.720.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah			1.710.455.135,00	



6. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp1.149.561.767,84;
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 Rp182.213.046,82; berupa Pembangunan WC Terminal Tarengge pada Dinas Perhubungan;
 - b. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Rp368.313.863,02;

Tabel 4.100
Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan
Yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Lapangan Pantai Lemo (Perencanaan)	5.407.535,06
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (PAGAR) - (Perencanaan)	598.786,93
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Signage Desa Harapan Kec. Malili (Perencanaan)	2.980.666,66
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Signage Desa Harapan Kec. Malili (Pengawasan)	2.998.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan Halaman Rumah Susun Sederhana Sewa (RUSUNAWA) ASN Luwu Timur	149.731.000,00
6	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pembangunan Gudang Kantor	183.492.874,37
7	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rehab bangunan gedung kantor	23.105.000,00
Jumlah			368.313.863,02

- c. Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2021 Rp599.034.858,00.

Tabel 4.101
Reklasifikasi Tambah Gedung dan Bangunan
yang berasal dari Konstruksi dalam Pengerjaan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat Daerah	perencanaan kanopi	5.863.000,00
2	Sekretariat Daerah	perencanaan penambahan teras kanopi dan kubang musallah, penambahan wc musallah rujab Bupati	6.897.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	DED + Adm Penataan Lapangan Olahraga Perumahan PNS	11.205.000,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	UKL - UPL Pasar Desa Bonepute	39.800.000,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja UKL-UPL Pasar Desa Cendana Hijau	39.875.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Biaya desain Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU Ussu)	16.445.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	462.507.858,00
8	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pembangunan Pagar	10.747.000,00
9	Dinas Kesehatan	Pemb.Pagar PKM Bone Pute	5.695.000,00
Jumlah			599.034.858,00



6. Utang sebesar Rp105.867.814,56.

Tabel 4.102
Rincian Utang Aset Gedung dan Bangunan per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	pembangunan laboratorium PKM Malili	4.985.350,00
2	Dinas Kesehatan	Pekerjaan Penimbunan Halaman PKM Bone Pute	9.977.250,00
3	Dinas Kesehatan	penataan halaman PKM Tomoni Timur	7.492.550,00
4	Dinas Kesehatan	Pemb tempat parkir kantor DINKES	9.950.000,00
5	Dinas Kesehatan	Pemb.Pagar PKM Bone Pute	7.477.700,00
6	Dinas Kesehatan	pembangunan pagar Pustu Reformasi	7.491.250,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Lapangan Pantai Lemo	5.483.952,59
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	47.476.961,97
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	1.482.800,00
10	Dinas Pendidikan	Penataan Halaman TK Pembina Towuti (Utang Pengawasan)	1.500.000,00
11	Dinas Pendidikan	Pembangunan WC TK Negeri Pembina Wotu (Utang Pengawasan)	2.550.000,00
Jumlah			105.867.814,56

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp21.971.479.579,78, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar sebesar Rp1.710.455.135,00 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;
2. Hibah keluar sebesar Rp928.764.347,00, dengan rincian:

Tabel 4.103
Hibah Keluar Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD Asal	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Penerima	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	Dinas Pendidikan	Pembangunan Aula	11.031.790,00	Desa Benteng, Kec. Burau	970/01/Disdik Tanggal 16 September 2021
2	Dinas Pendidikan	Pembangunan Aula	3.064.386,00	SMP Kristen Mangkutana, Kec. Mangkutana	970/06/Disdik Tanggal 07 Desember 2021
3	Dinas Pendidikan	Pembangunan kantor	12.257.544,00	kantor MIS DDI Al Falah, Kec. Angkona	970/03/Disdik Tanggal 22 November 2021
4	Dinas Pendidikan	Pembangunan 1 RKB	5.975.552,00	TK Al-Amin	420/991.C/Disdik Tanggal 31 Desember 2021
5	Dinas Pendidikan	Pembangunan 1 RKB	5.975.552,00	TK Bina Kasih Patengko, Kec. Tomoni	420/991.A/Disdik Tanggal 31 Desember 2021
6	Dinas Pendidikan	Pembangunan 1 RKB	5.975.552,00	TK Pratama Kumara, Kec.	420/991.B/Disdik



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD Asal	Nama Aset	Harga Perolehan	Instansi/Organisasi Penerima	Nomor dan Tanggal Dokumen
				Angkona	Tanggal 31 Desember 2021
7	Dinas Pendidikan	Pembangunan 1 RKB	108.172.831,00	TPA AT-TAQWA, Kec. Angkona	420/717.B/Disdik Tanggal 31 Desember 2021
8	Dinas Pendidikan	Pembangunan 2 RKB	431.547.286,00	SMP Kristen Mangkutana, Kec. Mangkutana	970/04/Disdik Tanggal 13 Agustus 2021
9	Dinas Pendidikan	Pembangunan WC	53.155.060,00	Ponpes Nurul Qur'an, Kec. Malili	970/02/Disdik Tanggal 08 Oktober 2021
10	Dinas Pendidikan	Pengadaan Tempat Permainan	49.731.926,00	PAUD Bina Mandiri, Kec. Malili	420/717.A/Disdik Tanggal 31 Desember 2021
11	Dinas Pendidikan	Penataan Halaman	9.029.923,00	Ponpes Hidayatullah MIS Darul Ilmi Towuti, Kec. Towuti	970/09/Disdik Tanggal 07 Desember 2021
12	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar	9.139.217,00	Tsanawiyah Negeri Luwu Timur, Kec. Towuti	970/05/Disdik Tanggal 11 November 2021
13	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar	214.568.511,00	MIS Dongi, Kec. Burau	970/01/Disdik Tanggal 06 September 2021
14	Dinas Pendidikan	Pembangunan Pagar	9.139.217,00	Pondok Pesantren Al Muhajirin, Kec. Mangkutana	970/07/Disdik Tanggal 07 Desember 2021
Jumlah			928.764.347,00		

3. Penghapusan Aset sebesar Rp2.339.372.730,00, dengan rincian:

Tabel 4.104
Daftar Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Nomor dan Tanggal Dokumen
1	RSUD I Lagaligo	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	1.260.079.180,00	Nomor: 44/Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021
2	RSUD I Lagaligo	Bangunan Rumah Sakit Umum	2008	1.079.293.550,00	Nomor: 44/Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021
Jumlah				2.339.372.730,00	

4. Reklasifikasi kurang sebesar Rp16.670.751.722,64;
a. Reklasifikasi ke Tanah Rp1.579.379.227,27;

Tabel 4.105
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Tanah
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Kesehatan	pematangan lahan pembangunan Rumah Sakit Atue	1.379.976.801,27
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Penimbunan Lantai Jemur 1029,32 M3 TA. 202	199.402.426,00
Jumlah			1.579.379.227,27



b. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.205.802.039,40

Tabel 4.106
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	RSUD I Lagaligo	AC Split 1 PK	233.158.500,00
2	RSUD I Lagaligo	AC Central	171.619.200,00
3	RSUD I Lagaligo	AC Central	272.700.000,00
4	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	5.081.670,00
5	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	4.704.480,00
6	RSUD I Lagaligo	Exhaust Fan	414.216,00
7	RSUD I Lagaligo	Fail Alrm	53.840.000,00
8	RSUD I Lagaligo	Nurse call	40.824.000,00
9	RSUD I Lagaligo	Tabung Pemadam 5 Kg	33.885.740,00
10	RSUD I Lagaligo	X-Ray Viewer	53.625.000,00
11	RSUD I Lagaligo	instrumen Cabinet	167.025.000,00
12	RSUD I Lagaligo	Information Fanel	26.446.883,40
13	RSUD I Lagaligo	Opration Timer	53.046.000,00
14	RSUD I Lagaligo	Wastafel	485.000.000,00
15	RSUD I Lagaligo	Elevator Lift	1.298.000.000,00
16	RSUD I Lagaligo	Alat Pemadam	28.520.000,00
17	RSUD I Lagaligo	AC Split	48.055.000,00
18	RSUD I Lagaligo	AC Split	39.060.000,00
19	RSUD I Lagaligo	AC Split	90.594.000,00
20	RSUD I Lagaligo	AC Split	41.496.000,00
21	RSUD I Lagaligo	AC Split	13.251.000,00
22	RSUD I Lagaligo	AC Split	14.007.000,00
23	RSUD I Lagaligo	AC Central	14.469.000,00
24	RSUD I Lagaligo	AC Central	75.492.900,00
25	RSUD I Lagaligo	AC Central	104.420.400,00
26	RSUD I Lagaligo	AC Central	26.274.150,00
27	RSUD I Lagaligo	AC Central	56.370.300,00
28	RSUD I Lagaligo	AC Central	59.031.000,00
29	RSUD I Lagaligo	Outdoor Multi V 5 Pro	252.088.120,00
30	RSUD I Lagaligo	Outdoor Multi V 5 Pro	467.076.480,00
31	RSUD I Lagaligo	Lift	866.250.000,00
32	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Papan Pengumuman	59.249.000,00
33	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rambu-rambu Petunjuk/Penuntun	50.727.000,00
Jumlah			5.205.802.039,40

c. Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp5.096.149.363,32;

Tabel 4.107
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Objek Wisata Landmark	215.888.886,72
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Objek Wisata Landmark	215.739.728,60
3	Kecamatan Nuha	Penutup Saluran Pembuang	45.119.088,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II	2.504.578.532,00
5	RSUD I Lagaligo	Ipal/ Instalasi Jaringan Air Kotor	184.550.000,00
6	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis (Gedung Rawat Inap	762.238.000,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
		Mahalona 1)	
7	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis (Kamar Operasi)	471.176.042,60
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pekerjaan penambahan jaringan tersier dan pemasangan sambungan rumah Pusat Niaga Malili	16.430.000,00
9	Puskesmas Kalaena	TPS Limbah B3	14.980.000,00
10	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis	179.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker)	37.298.855,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (LADSKEP)	138.113.430,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS	169.850.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel	141.186.800,00
Jumlah			5.096.149.363,32

d. Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan Rp1.923.242.707,63.

Tabel 4.108
Reklasifikasi Kurang Aset Gedung dan Bangunan ke Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat DPRD	Perencanaan Rehab Atap Gedung Kantor DPRD	10.440.000,00
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemb. Tribun Mini Lap.Sirio-Rio Kec. Towuti	1.024.817.480,63
3	Dinas Kesehatan	biaya DED Pembangunan rumah sakit Atue	99.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Mangkutana	43.707.950,00
5	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Tomoni Timur	43.629.000,00
6	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wawondula	43.670.000,00
7	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wotu	43.615.000,00
8	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Nuha	43.725.000,00
9	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wasuponda	43.725.000,00
10	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Bantilang	43.521.500,00
11	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Angkona	43.670.000,00
12	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Lampia	43.780.000,00
13	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Burau	43.670.000,00
14	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Kalaena	43.705.200,00
15	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Mahalona	41.910.000,00
16	Dinas Kesehatan	DED pembangunan unit transfusi darah	70.565.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti	145.227.577,00
18	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan	DED Pembangunan Pasar di Pusat Kota Desa Libukan Mandiri	50.864.000,00
Jumlah			1.923.242.707,63

e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya Rp1.120.727.540,00, karena kondisinya sudah Rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi.

Tabel 4.109
Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Aset Lain-lain Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	Dinas Perdagangan, Koperasi	Bangunan Gedung Pertokoan	85.700.000,00	Desa Margolembo



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
	dan Usaha Kecil Menengah	Lain-lain (dst)		
2	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	85.700.000,00	Desa Margolembo
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	96.000.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	99.200.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	99.200.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	99.200.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	129.600.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	162.866.540,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Gedung Pertokoan/ Koperasi/Pasar Permanen	198.661.000,00	Pasar Sentral Kec. Tomoni
10	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Gedung Pos Jaga Permanen	64.600.000,00	Desa Kasintuwu, Kec.Mangkutana
Jumlah			1.120.727.540,00	

f. Reklasifikasi ke Extracountabel Rp1.744.750.845,02.

Tabel 4.110

Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi ke Extracountabel Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	19.500.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pagar Permanen	3.300.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pagar Permanen	2.700.000,00
4	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Bangunan Gedung Kantor Darurat	10.484.000,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	14.600.000,00
6	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24.759.151,00
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	28.900.000,00
8	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	21.400.000,00
9	Dinas Kesehatan	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2.600.000,00
10	Dinas Kesehatan	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	29.949.000,00
11	Dinas Kesehatan	Bangunan Klinik/Puskesmas	19.600.000,00
12	Dinas Kesehatan	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	17.089.000,00
13	Dinas Kesehatan	Pagar Permanen	14.500.000,00
14	Dinas Kesehatan	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	11.950.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14.600.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	58.600.000,00
17	Dinas Pendidikan	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	22.100.000,00
18	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	194.913.492,36
19	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	129.853.455,17
20	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	30.824.645,67
21	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	10.000.000,00
22	Dinas Pendidikan	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	12.000.000,00
23	Dinas Pendidikan	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain (dst)	182.566.909,20
24	Dinas Pendidikan	Gedung Pos Jaga Permanen	15.000.000,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
25	Dinas Pendidikan	Pagar Permanen	46.295.247,97
26	Dinas Pendidikan	Pagar Semi Permanen	11.700.000,00
27	Dinas Pendidikan	Pilar/tugu/tanda lainnya	11.000.000,00
28	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	512.252.192,65
29	Dinas Perhubungan	Gedung Pos Jaga Permanen	21.200.000,00
30	Dinas Pertanian	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	8.300.000,00
31	Dinas Pertanian	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	72.100.000,00
32	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain (dst)	4.050.000,00
33	Kecamatan Angkona	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	3.308.374,00
34	Kecamatan Burau	Pagar Permanen	18.900.000,00
35	Kecamatan Malili	Pagar Permanen	15.800.000,00
36	Kecamatan Mangkutana	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4.200.000,00
37	Kecamatan Tomoni	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	16.400.000,00
38	Kecamatan Tomoni	Pagar Permanen	15.500.000,00
39	Kecamatan Wasuponda	Pagar Permanen	17.573.500,00
40	Kecamatan Wotu	Pagar Permanen	17.200.000,00
41	RSUD I Lagaligo	Bangunan Rumah Sakit Umum	7.200.000,00
42	Sekretariat Daerah	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	14.581.877,00
43	Sekretariat Daerah	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	3.700.000,00
44	Sekretariat Daerah	Gedung Pos Jaga Permanen	10.400.000,00
45	Sekretariat Daerah	Pagar Permanen	8.300.000,00
46	Sekretariat DPRD	Bangunan Gedung Kantor Permanen	13.000.000,00
Jumlah			1.744.750.845,02

g. Reklasifikasi antar aset tetap Rp700.000,00 berupa Bangunan peninggalan ke Bangunan pelengkap irigasi (sumur bor), sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

5. Pembayaran Utang sebesar Rp303.465.645,14.

Tabel 4.111
Rincian Pembayaran Utang Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat DPRD	Lanjutan Pagar dan Penataan Halaman Belakang Waka I DPRD	9.687.659,00
2	Sekretariat DPRD	Rehap Atap dan Plafon Wakil ketua 1 DPRD	7.490.000,00
3	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pembangunan Pagar Kantor Satpol PP (DED)	1.562.000,00
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pembangunan Pagar Kantor Satpol PP (Pengawasan)	2.096.000,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Pembangunan Lantai Jemur Desa Burau Pantai	9.495.750,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	1.482.800,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	23.738.481,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Pengawasan Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	13.345.200,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa Libukan Mandiri	47.476.962,00
10	RSUD I Lagaligo	Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Ruang Tunggu Poli	24.750.000,00
11	RSUD I Lagaligo	Pekerjaan Lanjutan Rehabilitasi Ruang ICU	24.919.950,00
12	RSUD I Lagaligo	Retensi Pembangunan Selasar Mahalona 3	8.945.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
13	RSUD I Lagaligo	Retensi Pembangunan Nurse Station VIP A-B	9.090.000,00
14	RSUD I Lagaligo	Retensi Pembangunan TPS B3	4.540.000,00
15	Dinas Kesehatan	Rehab Pustu Landangi	9.974.182,69
16	Dinas Kesehatan	pemb UGD PKM Timampu	18.474.034,71
17	Dinas Kesehatan	Rehab koridor PKM TomTim dri ruang UGD ke R.perawatan	1.921.791,00
18	Dinas Kesehatan	penataan halaman Poskesdes Burau Pantai	7.772.529,74
19	Dinas Kesehatan	Perenc PKM Bonepute	8.900.000,00
20	Dinas Kesehatan	Pembangunan rumah paramedis PKM Lakawali	21.023.013,00
21	Dinas Kesehatan	Pemb Pagar Pustu Kanawatu	9.895.000,00
22	Dinas Kesehatan	pemb pagar belakang PKM Lakawali	9.982.036,00
23	Dinas Kesehatan	pembangunan pagar poskesdes Lauwo Pantai	5.972.661,00
24	Dinas Kesehatan	pembangunan pagar belakang PKM Burau	6.085.871,00
25	Dinas Kesehatan	Pemb pagar & penimbunan hlman Poskesdes Maramba	9.892.024,00
26	Dinas Kesehatan	pembangunan pagar poskesdes Baruga kec Malili	4.952.700,00
Jumlah			303.465.645,14

6. Koreksi Catat sebesar Rp18.670.000,00 yang terdapat pada Dinas Kesehatan.

Hal-hal penting yang perlu diinformasikan berkaitan dengan Aset Tetap Gedung dan Bangunan:

1. Aset tetap Gedung dan Bangunan yang dimanfaatkan dan dikerjasamakan dengan instansi lain:
 - a. Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Pol-Airud Wilayah Luwu Timur Nomor 030/06/XI/BPKD/2020 dan /03/XI/2020/KP XIV-1022 tanggal 9 September 2020, berupa Pinjam Pakai Eks Bangunan TPI Lama Malili;
 - b. Perjanjian Pinjam Pakai Bangunan antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan KNPI Luwu Timur Nomor 030/07/XII/BPKD/2020 dan 003/B/Sek/ XII/2020 tanggal 4 Desember 2020, berupa Pinjam Pakai Gedung Nursery Malili;
 - c. Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kelautan. Perikanan dan Pangan yang disewakan kepada Pihak Ketiga dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4.112
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Yang disewakan kepada pihak ketiga
Tahun 2021

(dalam Rupiah)

No	Nama BMD	Alamat	Pengelola/Mitra	Direktur	Kontribusi Tetap	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Ket
1	Pabrik Es Malili	Kompleks TPI Malili Desa Wewangriu Kec. Malili	CV. Alief Karya Tehnik	Mansyur	38.000.000	523/01/NKB/D KP2	03 Agustus 2020	
2	Pabrik Es Burau	Jl. Poros Burau Pantai Desa Burau Pantai Kec. Burau	PT. Nusantara Indo Properti Palopo	Subhan	15.000.000	523/02/NKB/D KP2	03 Agustus 2020	
3	Pabrik Rumput Laut Pasi-Pasi	Kompleks Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kec.	CV. Bahtera Karya	Sri Miastuti Tahir	100.000.000	523/03/NKB/D KP2	01 Desember 2020	



		Malili						
4	Gudang Rumput Laut – 1	Kompleks Gudang Rumput Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili	Koperasi Tunas Baru	Julhaenuddin	60.000.000	523/04/NKB/D KP2	29 Januari 2021	
5	Gudang Rumput Laut - 2	Kompleks Gudang Rumput Laut Desa Lakawali Pantai Kec. Malili	Gapoktan Manurung Jaya	Y. Randa Embong	60.000.000	523/05/NKB/D KP2	29 Januari 2021	

2. Terdapat Aset Gedung dan Bangunan yang telah dihibahkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 147.54./16/NPHD/PEM-LT/XII/2021 dan 131/RT.01/7324/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik daerah berupa Tanah dan Bangunan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian:

Tabel 4.113

Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang dihibahkan ke Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Sekretariat Daerah	Pagar Permanen	2009	233.979.000,00	Pagar KPU
2	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2010	1.379.755.000,00	Gedung KPU
Jumlah				1.613.734.000,00	

Aset tersebut tercatat pada SKPD Sekretariat Daerah, namun hingga saat ini masih tetap tercatat pada SKPD terkait, karena belum ada Surat Keputusan penghapusan atas aset yang telah dihibahkan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun berkenaan, sehingga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

3. Terdapat Aset Tanah yang telah dihibahkan, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, Nomor: 147.54./17/NPHD/PEM-LT/XII/2021 dan 78/PL.04/SN-10/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Hibah Barang Milik daerah berupa Tanah, Peralatan dan Mesin dan Bangunan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, dengan rincian:

Tabel 4.114

Rincian Aset Gedung dan Bangunan yang dihibahkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021

No.	SKPD asal	Nama Aset	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
1	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	2005	154.880.000,00	Fisik Rp.74.930.000,00
Jumlah				154.880.000,00	

Aset tersebut tercatat pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, namun hingga saat ini masih tetap tercatat pada SKPD terkait, karena belum ada Surat Keputusan



penghapusan atas aset yang telah dihibahkan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan keuangan tahun berkenaan, sehingga dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini.

4.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.662.283.423.651,39 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.492.756.788.527,18. Penjelasan terkait adanya kenaikan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp169.526.635.124,21 adalah sebagai berikut:

Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember sebesar Rp210.257.286.554,73, yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.509.537.915,33;
2. Belanja JKN pada Puskesmas Rp3.513.190,00;
3. Hibah masuk sebesar Rp32.985.584.980,00;
4. Mutasi masuk sebesar Rp747.579.753,00;
5. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp41.993.668.798,02;
6. Utang Tahun 2020 yang pengakuan asetnya telah dicatat 100% sebesar Rp227.782.396,68.

7. Koreksi Catat sebesar Rp2.789.619.521,70

Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember sebesar Rp40.730.651.430,52, yang terdiri dari:

1. Mutasi keluar sebesar Rp747.579.753,00;
2. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp33.724.516.546,30;
3. Pembayaran Utang retensi tahun sebelumnya yang pencatatan aset telah diakui 100% sebesar Rp 6.258.555.131,22.

Tabel 4.115
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD Tahun 2021

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	160.083.000,00	7.499.376,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	400.000,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.126.094,20	0,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	747.579.753,00	0,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	785.000,00
6	Dinas Pendidikan	33.750.000,00	13.950.000,00
7	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	431.628.615,32	0,00
8	Dinas Perhubungan	182.213.046,82	228.748.046,82
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	0,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.901.786.028,16	20.245.471.761,52
11	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	0,00	25.250.000,00
12	Dinas Kesehatan	3.506.961.459,00	52.385.000,00
13	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	501.274.559,93	216.429.139,00
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	31.283.059.522,60	18.928.530.326,50



No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.430.000,00	47.782.600,68
16	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	164.651.000,00	88.945.000,00
17	RSUD I Lagaligo	1.743.964.043,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	348.400,00
19	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	413.400,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	1.020.000,00
21	Dinas Pertanian	0,00	762.429.753,00
22	Kecamatan Malili	162.860.917,70	0,00
23	Kecamatan Kalaena	14.253.000,00	19.800.000,00
24	Kecamatan Tomoni	128.871.300,00	35.038.500,00
25	Kecamatan Angkona	12.675.127,00	25.775.127,00
26	Kecamatan Burau	0,00	19.000.000,00
27	Kecamatan Nuha	45.119.088,00	750.000,00
28	Kecamatan Towuti	0,00	9.900.000,00
Jumlah		210.257.286.554,73	40.730.651.430,52

Adapun rincian untuk Adapun rincian untuk penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp210.257.286.554,73, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp131.509.537.915,33, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.116
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
Tahun 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	160.083.000,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	215.126.094,20
3	Dinas Pendidikan	22.000.000,00
4	Dinas Perhubungan	182.213.046,82
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.170.609.991,88
6	Dinas Kesehatan	1.609.952.670,00
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	215.031.270,93
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	25.527.826.714,50
9	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	164.651.000,00
10	Kecamatan Malili	133.623.000,00
11	Kecamatan Kalaena	14.253.000,00
12	Kecamatan Tomoni	81.493.000,00
13	Kecamatan Angkona	12.675.127,00
Jumlah		131.509.537.915,33

2. Belanja JKN pada Puskesmas Rp3.513.190,00;

Tabel 4.117
Realisasi Belanja Modal Pada Puskesmas
Tahun 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Puskesmas Mangkutana (JKN)	1.313.190,00
2	Puskesmas Tomoni Timur (JKN)	2.200.000,00
Jumlah		3.513.190,00



3. Hibah masuk sebesar Rp32.985.584.980,00; berupa jalan kabupaten lain-lain yang berasal dari Dirjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel) sesuai no PS.04.03-Bb13/PJN.WIL.II/1211 25 Agustus 2021.
4. Mutasi masuk sebesar Rp747.579.753,00;

Tabel 4.118
Mutasi Masuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD asal	Uraian	Harga Perolehan	SKPD Penerima
1	Dinas Pertanian	Jalan lainnya	187.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
2	Dinas Pertanian	Saluran Banjir	396.015.888,00	Dinas Lingkungan Hidup
3	Dinas Pertanian	Instalasi Perkubuan	164.063.865,00	Dinas Lingkungan Hidup
Jumlah			747.579.753,00	

5. Reklasifikasi Tambah sebesar Rp41.993.668.798,02;
 - a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2021 Rp358.335.139,00;

Tabel 4.119
Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
Yang berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan	Keterangan
1	RSUD I Lagaligo	Pengadaan Panel induk	147.000.000,00	
2	Dinas Pendidikan	Sumur Bor	1.950.000,00	SDN 203 Bongkamanu
3	Dinas Pendidikan	Pemasangan PDAM	1.300.000,00	SDN 239 Salu Minanga
4	Dinas Pendidikan	Pemasangan jaringan Air bersih (PDAM)	4.500.000,00	SDN 256 Dongi
5	Dinas Pendidikan	Pemasangan KWH	2.000.000,00	SDN 279 Rante Angin
6	Dinas Pendidikan	Sumur Bor	2.000.000,00	SMPN 1 Angkona
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Sumur dengan Pompa (Kawasan Industri Malili Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili)	199.585.139,00	
Jumlah			358.335.139,00	

- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 Rp5.096.149.363,32;

Tabel 4.120
Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
Yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Penataan Objek Wisata Landmark	215.888.886,72
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan,	Penataan Objek Wisata Landmark	215.739.728,60



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Kepemudaan dan Olahraga		
3	Kecamatan Nuha	Penutup Saluran Pembuang	45.119.088,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II	2.504.578.532,00
5	RSUD I Lagaligo	Ipal/ Instalasi Jaringan Air Kotor	184.550.000,00
6	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis (Gedung Rawat Inap Mahalona 1)	762.238.000,00
7	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis (Kamar Operasi)	471.176.042,60
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pekerjaan penambahan jaringan tersier dan pemasangan sambungan rumah Pusat Niaga Malili	16.430.000,00
9	Puskesmas Kalaena	TPS Limbah B3	14.980.000,00
10	RSUD I Lagaligo	Instalasi Gas Medis	179.000.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker)	37.298.855,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (LADSKEP)	138.113.430,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS	169.850.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel	141.186.800,00
Jumlah			5.096.149.363,32

c. Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 Rp6.008.550.553,17;

Tabel 4.121
Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
Yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Puskesmas Bantilang	Instalasi Pembuang Air Limbah	625.938.533,00
2	Puskesmas Mangkutana	Instalasi Pembuang Air Limbah	625.938.533,00
3	Puskesmas Mahalona	Instalasi Pembuang Air Limbah	625.938.533,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duicker Jl. WR. Supratman Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	724.700,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Madani (By. Perencanaan)	931.500,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duicker Dusun Langgiri Desa Lampenai (By. Perencanaan)	1.440.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Desa Matompi (By. Perencanaan)	1.500.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata (By. Perencanaan)	1.650.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duicker Jl. Sungai Kandora Dusun Kasindula (By. Perencanaan)	2.000.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli (By. Perencanaan)	2.791.300,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpangi Timur (By. Perencanaan)	2.730.000,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula (By. Perencanaan)	3.000.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sungai Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	3.000.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Desa Mahalona (By. Perencanaan)	3.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II (By. Pengawasan)	89.863.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	3.750.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Pancakarsa (By. Perencanaan)	3.750.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Lambatu Desa Ranteanging (By. Perencanaan)	4.108.500,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Wanasari Kec. Angkona (By. Perencanaan)	3.900.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Jl. Abdullah Kec. Malili (By. Perencanaan)	3.900.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jl. Pengkuburan Desa Bawalipu (By. Perencanaan)	3.985.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Tauncho Dusun Kebun Rame 3 Desa Mandiri (By. Perencanaan)	3.990.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Desa Lestari (By. Perencanaan)	3.990.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Pertasi Kencana (By. Perencanaan)	3.990.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Desa Tabaroge (By. Perencanaan)	3.985.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Desa Cendana Hijau (By. Perencanaan)	3.985.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Malela Desa Margolembo (By. Perencanaan)	3.990.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (By. Perencanaan)	3.985.000,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Langgiri Desa Madani (By. Perencanaan)	3.985.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Dusun Laoli Desa Harapan (By. Perencanaan)	4.000.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Badan Jalan Menuju Objek Wisata Tompo Tikka Desa Ussu (By. Perencanaan)	4.000.000,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan RT.3 Dusun Lembah Desa Tarabbi (By. Perencanaan)	4.000.000,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jl. Maitara Atas Desa Asuli (By. Perencanaan)	4.000.000,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lr.11 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung RUAS 1 (By. Perencanaan)	5.348.600,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula (By. Perencanaan)	4.127.000,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu (By. Perencanaan)	4.391.000,00
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MADANI (By. Perencanaan)	4.244.156,70
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan drainase + plat duicker jl. Rajawali - jalan garuda dusun lembo tengah desa wasuponda (by. Perencanaan)	4.244.156,70
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang (By. Perencanaan)	4.381.100,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Madani Kec. Wotu (By. Perencanaan)	4.478.000,00
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Balimas (By. Perencanaan)	4.485.000,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penimbunan Jalan Pisang Seberang Sungai Dusun Rende Haka (By. Perencanaan)	4.472.600,00
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Lera (By. Perencanaan)	4.494.800,00
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Jl. Tupai (By. Perencanaan)	4.500.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi (By. Perencanaan)	4.500.000,00
46	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi (By. Perencanaan)	4.500.000,00
47	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lera (By. Perencanaan)	4.700.333,99
48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Dalam Desa Wonorejo (By. Perencanaan)	4.970.800,00
49	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	5.000.000,00
50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Dusun Puncak Desa Tarabbi (By. Perencanaan)	5.000.000,00
51	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan Jl. Bayam Desa Wawondula (By. Perencanaan)	5.000.000,00
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Loeha (By. Perencanaan)	5.100.000,00
53	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah (By. Perencanaan)	6.000.000,00
54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sungai Laoli Desa Harapan (By. Perencanaan)	5.250.000,00
55	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan air bersih dusun Kotine (By. Perencanaan)	5.250.000,00
56	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Karambua (By. Perencanaan)	5.400.000,00
57	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase batas desa Sumber Alam - Mandiri dusun Harapan Makmur (By. Perencanaan)	5.223.577,51
58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan (By. Perencanaan)	5.223.577,51
59	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu (By. Perencanaan)	5.223.577,51
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Batu Putih (By. Perencanaan)	5.223.577,51
61	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau (By. Perencanaan)	5.223.577,51
62	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat (By. Perencanaan)	5.223.577,51
63	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan drainase Blok D Desa Libukang mandiri Kec Towuti (By. Perencanaan)	5.223.577,51
64	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase blok B Desa Libukang mandiri kec Towuti (By. Perencanaan)	5.223.577,51
65	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole kec Towuti (By. Perencanaan)	5.223.577,51
66	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Blok C desa libukang mandiri kec Towuti (By. Perencanaan)	5.223.577,51
67	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona kec Towuti (By. Perencanaan)	5.223.577,51
68	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau (By. Perencanaan)	5.520.000,00
69	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lagego (By. Perencanaan)	5.520.000,00
70	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan Talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda (By. Perencanaan)	5.579.000,00
71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko (By. Perencanaan)	5.885.000,00
72	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae (By. Perencanaan)	5.884.700,00
73	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Kantor Dinas PUPR (By. Perencanaan)	6.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
74	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Lingkungan Bulu-Bulu Kecamatan Tomoni (By. Perencanaan)	5.968.500,00
75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalaena Kec. Wotu (By. Perencanaan)	5.912.000,00
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	6.000.000,00
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	6.000.000,00
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata (By. Perencanaan)	6.000.000,00
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai (By. Perencanaan)	6.000.000,00
80	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli (By. Perencanaan)	6.000.000,00
81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai (By. Perencanaan)	5.970.250,00
82	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih (By. Perencanaan)	5.966.950,00
83	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya (By. Perencanaan)	5.970.250,00
84	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu (By. Perencanaan)	5.970.250,00
85	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	5.970.250,00
86	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya (By. Perencanaan)	6.000.000,00
87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto (By. Perencanaan)	6.000.000,00
88	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau (By. Perencanaan)	6.000.000,00
89	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana (By. Perencanaan)	6.000.000,00
90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego (By. Perencanaan)	6.000.000,00
91	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo (By. Perencanaan)	6.000.000,00
92	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai (By. Perencanaan)	6.000.000,00
93	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue (By. Perencanaan)	6.000.000,00
94	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu (By. Perencanaan)	6.000.000,00
95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo (By. Perencanaan)	6.000.000,00
96	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona (By. Perencanaan)	6.000.000,00
97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua (By. Perencanaan)	6.000.000,00
98	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Buangin (By. Perencanaan)	6.000.000,00
99	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae (By. Perencanaan)	6.000.000,00
100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano (By. Perencanaan)	6.000.000,00
101	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula (By. Perencanaan)	6.000.000,00
102	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi (By. Perencanaan)	6.000.000,00
103	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Perencanaan)	6.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
104	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha) (By. Perencanaan)	6.000.000,00
105	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan (By. Perencanaan)	7.500.000,00
106	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 2 (By. Perencanaan)	7.487.500,00
107	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Bronjong Dusun Lowu Timur Desa Tabarano (By. Perencanaan)	9.000.000,00
108	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora (By. Perencanaan)	9.000.000,00
109	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo (By. Perencanaan)	9.000.000,00
110	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	8.770.000,00
111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lining Pembuang kampung KB desa Pertasi Kencana (By. Perencanaan)	9.000.000,00
112	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Ussu (By. Perencanaan)	9.000.000,00
113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Intake Irigasi Desa Kalpataru (By. Perencanaan)	9.000.000,00
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari (By. Perencanaan)	3.900.000,00
115	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua (By. Perencanaan)	10.685.000,00
116	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole) (By. Perencanaan)	10.500.000,00
117	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri (By. Perencanaan)	11.877.000,00
118	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni (By. Perencanaan)	12.000.000,00
119	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sisi Kiri Wilayah Pantai Desa Lakawali Pantai (By. Perencanaan)	15.000.000,00
120	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai (By. Perencanaan)	15.000.000,00
121	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Perencanaan)	19.372.000,00
122	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (By. Perencanaan)	20.881.400,00
123	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (By. Perencanaan)	22.385.000,00
124	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 1 (By. Perencanaan)	22.462.500,00
125	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano (By. Perencanaan)	29.447.000,00
126	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (By. Perencanaan)	29.950.000,00
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo (By. Perencanaan)	29.934.700,00
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Kawata (By. Perencanaan)	34.994.600,00
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II (By. Perencanaan)	89.784.000,00
130	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker) (By. Perencanaan)	1.095.681,00
131	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (LADSKEP) (By. Perencanaan)	4.057.183,00
132	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS (By. Perencanaan)	4.915.940,97



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
133	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel (By. Perencanaan)	4.096.945,20
134	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duicker Jl. WR. Supratman Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	718.500,00
135	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Drainase Desa Madani (By. Pengawasan)	931.500,00
136	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duiker Dusun Langgiri Desa Lampenai (By. Pengawasan)	1.500.000,00
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Desa Matompi (By. Pengawasan)	1.500.000,00
138	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pintu Air Desa Tole Dusun Tandu Mata (By. Pengawasan)	1.650.000,00
139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Plat Duicker Jl. Sungai Kandora Dusun Kasindula (By. Pengawasan)	2.000.000,00
140	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Danau Tondano dan Danau Poso Desa Asuli (By. Pengawasan)	2.543.250,00
141	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan SPAM Jaringan Perpipaan Dusun Lahumpang Timur (By. Pengawasan)	2.730.000,00
142	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan drainase desa kalpataru (by. Pengawasan)	5.994.718,44
143	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Pembuang Desa Wawondula (By. Pengawasan)	3.000.000,00
144	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sungai Dusun Mallaulu Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	3.000.000,00
145	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Desa Mahalona (By. Pengawasan)	3.000.000,00
146	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan (By. Pengawasan)	7.472.000,00
147	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	3.750.000,00
148	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Pancakarsa (By. Pengawasan)	3.750.000,00
149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Lambatu Desa Ranteanging (By. Pengawasan)	3.528.250,00
150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jaringan Perpipaan Desa Wanasari Kec. Angkona (By. Pengawasan)	3.900.000,00
151	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Saluran Pembuang Jl. Abdullah Kec. Malili (By. Pengawasan)	3.900.000,00
152	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Jl. Pengkuburan Desa Bawalipu (By. Pengawasan)	4.000.000,00
153	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Tauncho Dusun Kebun Rame 3 Desa Mandiri (By. Pengawasan)	3.995.000,00
154	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Desa Lestari (By. Pengawasan)	3.995.000,00
155	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Pertasi Kencana (By. Pengawasan)	3.995.000,00
156	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Desa Tabaroge (By. Pengawasan)	4.000.000,00
157	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Desa Cendana Hijau (By. Pengawasan)	4.000.000,00
158	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Malela Desa Margolembo (By. Pengawasan)	3.995.000,00
159	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (By. Pengawasan)	4.000.000,00
160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Langgiri Desa Madani (By. Pengawasan)	4.000.000,00
161	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Dusun Laoli Desa Harapan (By. Pengawasan)	3.986.628,00
162	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Badan Jalan Menuju Objek Wisata Tompo Tikka Desa Ussu (By. Pengawasan)	3.986.628,00
163	Dinas Pekerjaan Umum	Pengerasan Jalan RT.3 Dusun Lembah Desa	3.986.628,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	dan Penataan Ruang	Tarabbi (By. Pengawasan)	
164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jl. Maitara Atas Desa Asuli (By. Pengawasan)	4.000.000,00
165	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lr.11 Desa Rinjani - Desa Sumber Agung RUAS 1 (By. Pengawasan)	2.699.827,00
166	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Labu 3 Desa Wawondula (By. Pengawasan)	4.117.650,00
167	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Utama 3 Desa Mantadulu (By. Pengawasan)	4.193.400,00
168	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEMBANGUNAN DRAINASE DESA MADANI (By. Pengawasan)	4.481.052,03
169	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PEMBANGUNAN DRAINASE + PLAT DUJCKER JL. RAJAWALI - JALAN GARUDA DUSUN LEMBO TENGAH DESA WASUPONDA (By. Pengawasan)	4.481.052,03
170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Depan Kantor Desa Balantang (By. Pengawasan)	4.456.150,00
171	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Madani Kec. Wotu (By. Pengawasan)	4.400.000,00
172	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Balimas (By. Pengawasan)	4.485.000,00
173	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penimbunan Jalan Pisang Seberang Sungai Dusun Rende Haka (By. Pengawasan)	4.500.000,00
174	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Lera (By. Pengawasan)	4.500.000,00
175	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Jl. Tupai (By. Pengawasan)	4.500.000,00
176	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Marmut Desa Matompi (By. Pengawasan)	4.500.000,00
177	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Singa Desa Matompi (By. Pengawasan)	4.500.000,00
178	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lera (By. Pengawasan)	4.963.626,86
179	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Dalam Desa Wonorejo (By. Pengawasan)	4.978.300,00
180	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	5.000.000,00
181	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Dusun Puncak Desa Tarabbi (By. Pengawasan)	5.000.000,00
182	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan Jl. Bayam Desa Wawondula (By. Pengawasan)	5.000.000,00
183	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Loeha (By. Pengawasan)	5.100.000,00
184	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Samping Taman Makam Pahlawan Malili Desa Puncak Indah (By. Pengawasan)	4.456.150,00
185	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sungai Laoli Desa Harapan (By. Pengawasan)	5.250.000,00
186	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan air bersih dusun Kotine (By. Pengawasan)	5.274.000,00
187	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Karambua (By. Pengawasan)	5.250.000,00
188	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase batas desa Sumber Alam - Mandiri dusun Harapan Makmur (By. Pengawasan)	5.515.140,96
189	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lambara Harapan (By. Pengawasan)	5.515.140,96
190	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Tarengge Kec Wotu (By. Pengawasan)	5.515.140,96
191	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Batu Putih (By. Pengawasan)	5.515.140,97



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
192	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Cendana Hijau (By. Pengawasan)	5.515.140,97
193	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Pepuro Barat (By. Pengawasan)	5.515.140,97
194	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan drainase Blok D Desa Libukang mandiri Kec Towuti (By. Pengawasan)	5.515.140,97
195	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase blok B Desa Libukang mandiri kec Towuti (By. Pengawasan)	5.515.140,97
196	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pemb Drainase Desa Tole kec Towuti (By. Pengawasan)	5.515.140,97
197	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Blok C desa libukang mandiri kec Towuti (By. Pengawasan)	5.515.140,97
198	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Ballawai Desa Mahalona kec Towuti (By. Pengawasan)	5.515.140,97
199	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Dusun Tembo'e Desa Burau Kec. Burau (By. Pengawasan)	5.520.000,00
200	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Lagego (By. Pengawasan)	5.520.000,00
201	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan Talud Jalan Gunung Latimojong Desa Wasuponda (By. Pengawasan)	5.910.000,00
202	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi dan Pelebaran Jalan Lr.1 Depan Puskesmas Tomoni Timur Dusun Harapan Mandiri Desa Pattengko (By. Pengawasan)	5.658.400,00
203	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan Proteksi Dusun Paorebbae (By. Pengawasan)	5.683.000,00
204	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Kantor Dinas PUPR (By. Pengawasan)	5.718.500,00
205	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Lingkungan Bulu-Bulu Kecamatan Tomoni (By. Pengawasan)	5.900.000,00
206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kalaena Kec. Wotu (By. Pengawasan)	5.976.000,00
207	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	5.910.000,00
208	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Penyangga Ombak Dusun Beau Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	5.910.000,00
209	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Tansere Dusun Tole-Tole Desa Kawata (By. Pengawasan)	5.910.000,00
210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Desa Mahalona Dusun Ballawai (By. Pengawasan)	5.910.000,00
211	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Jalan Poros Desa Asuli (By. Pengawasan)	5.910.000,00
212	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan Samping SMPN 2 Wotu Dusun Jambu Desa Lampenai (By. Pengawasan)	5.944.800,00
213	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Batu Putih (By. Pengawasan)	5.966.950,00
214	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi dan Pengerasan Jalan Dusun Buyuntana Desa Bangun Karya (By. Pengawasan)	5.976.000,00
215	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Badan Jalan Kuburan Desa Bawalipu (By. Pengawasan)	5.977.000,00
216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Pekuburan Islam Dusun Nusa Indah Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	5.977.000,00
217	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Kayu Jalan Sesko Desa Langkea Raya (By. Pengawasan)	5.962.000,00
218	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Proteksi Jembatan Dusun Mojokerto (By. Pengawasan)	5.966.950,00
219	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Samping Masjid Raya Desa Burau (By. Pengawasan)	6.000.000,00
220	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Dongi-Dongi Desa Cendana (By. Pengawasan)	6.000.000,00
221	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Proteksi Dusun Batangnge Desa Lagego (By. Pengawasan)	6.000.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
222	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Penghubung Latiba Kiri Desa Maliwowo (By. Pengawasan)	6.000.000,00
223	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan + Proteksi Penghubung Antar Dusun Podomakmur Desa Lakawali Pantai dan Dusun Saluminanga Desa Lakawali Pantai (By. Pengawasan)	6.000.000,00
224	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Atue (By. Pengawasan)	6.000.000,00
225	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Bendungan Bakaran Bakara Desa Timampu (By. Pengawasan)	6.000.000,00
226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Desa Lambara Harapan Akses Ke Desa Balo-Balo (By. Pengawasan)	6.000.000,00
227	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Mahalona Area Jembatan SP 4 Desa Mahalona (By. Pengawasan)	6.000.000,00
228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan Jalan RK 3 Desa Tawakua (By. Pengawasan)	6.000.000,00
229	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Buangin (By. Pengawasan)	6.000.000,00
230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Poros Pesantren Dusun Turungengmincarae (By. Pengawasan)	6.000.000,00
231	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Pekuburan Desa Balambano (By. Pengawasan)	6.000.000,00
232	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembentukan Jalan Kuburan Desa Wawondula (By. Pengawasan)	6.000.000,00
233	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun dan Boxcalver Dusun Wulasi (By. Pengawasan)	6.000.000,00
234	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Pengawasan)	6.000.000,00
235	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Pembangunan Irigasi Desa Loeha) (By. Pengawasan)	6.000.000,00
236	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana (By. Pengawasan)	12.375.000,00
237	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Lintas UGD PKM Lampia Desa Harapan (By. Pengawasan)	5.940.000,00
238	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo (By. Pengawasan)	13.500.000,00
239	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 2 (By. Pengawasan)	7.481.100,00
240	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Bronjong Dusun Lowu Timur Desa Tabarano (By. Pengawasan)	8.594.000,00
241	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Apundi Dusun Sora (By. Pengawasan)	8.610.000,00
242	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Dusun Babasalo Desa Tokalimbo (By. Pengawasan)	8.610.000,00
243	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Pembuang Dusun Delima Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	9.000.000,00
244	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Lining Pembuang kampung KB desa Pertasi Kencana (By. Pengawasan)	9.000.000,00
245	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan Bronjong Desa Ussu (By. Pengawasan)	9.000.000,00
246	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Intake Irigasi Desa Kalpataru (By. Pengawasan)	9.000.000,00
247	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Wanasari (By. Pengawasan)	15.300.000,00
248	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Dusun Tikulembang Desa Tawakua (By. Pengawasan)	9.000.000,00
249	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano (By. Pengawasan)	20.864.999,00
250	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A) (By. Pengawasan)	20.911.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
251	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan (Lanjutan Peningkatan Irigasi Ponsoa Desa Tole) (By. Pengawasan)	10.801.800,00
252	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan A. Hasan (By. Pengawasan)	22.380.000,00
253	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A) (By. Pengawasan)	22.434.500,00
254	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute (By. Pengawasan)	22.500.000,00
255	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Tanggul Sungai Singgeni Desa Kalatiri (By. Pengawasan)	11.705.000,00
256	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Tebing Sungai Singgeni (By. Pengawasan)	12.000.000,00
257	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A) (By. Pengawasan)	29.690.000,00
258	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna (By. Pengawasan)	29.700.000,00
259	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari (By. Pengawasan)	29.891.800,00
260	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi Sisi Kiri Wilayah Pantai Desa Lakawali Pantai (By. Pengawasan)	15.000.000,00
261	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Talud Dusun Lauwo Pantai (By. Pengawasan)	15.000.000,00
262	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka (By. Pengawasan)	35.551.001,00
263	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Manggala (By. Pengawasan)	19.440.000,00
264	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Dusun Podomakmur Desa Lakawali Menghubungkan Desa Manurung (By. Pengawasan)	20.920.000,00
265	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Kalaena. (By. Pengawasan)	44.596.200,00
266	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli (By. Pengawasan)	44.760.000,00
267	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Margomulyo (By. Pengawasan)	22.380.000,00
268	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Bayondo - Beringin Jaya ruas 1 (By. Pengawasan)	22.443.300,00
269	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai (By. Pengawasan)	46.201.200,00
270	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20 (By. Pengawasan)	49.239.750,00
271	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano (By. Pengawasan)	29.558.200,00
272	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana (By. Pengawasan)	59.374.200,00
273	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung (By. Pengawasan)	59.679.400,00
274	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Kabupaten Kolektor Spesifikasi : Peningkatan Jalan Ruas Maramba - Kanawatu - Karambua. (By. Pengawasan)	59.717.900,00
275	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Cendana Hitam Timur (By. Pengawasan)	29.816.700,00
276	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Balo-Balo (By. Pengawasan)	29.917.140,00
277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Kawata (By. Pengawasan)	33.620.125,00
278	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rehab Tanggul Jl. M Natsir ling.Batu Merah Keg. Pemb dan pengemb infrastruktur kawasan permk di kawasan strategis daerah Kab/Kota	1.401.338.678,00
279	Dinas Perumahan,	Rehabilitasi Jln Lingkungan Desa Tarabbi	199.690.000,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Kawasan Permukiman dan Pertanahan		
	Jumlah		6.008.550.553,17

- d. Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan Tahun 2021
Rp28.704.828.078,43

Tabel 4.122
Reklasifikasi Tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan
Yang berasal dari Konstruksi dalam Pengerjaan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Biaya Desain pembangunan proteksi Desa Lambarese	8.017.999,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non Status Lokasi Kec. Towuti KTM Mahalona (DAK)	2.330.444.797,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Mahalona - Bantilang Kec. Towuti	11.185.291.834,99
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan/Pengkerikilan Jalan Kampung Baru- Mahalona (Ruas Pekaloo - Tole) Kec. Towuti	3.603.500.935,47
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Wewangriu- Pasi Pasi Kec. Malili	7.735.538.146,58
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna	50.996.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung	51.084.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana	37.158.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute	34.820.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa	49.220.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20	45.799.600,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Mulyasri	49.220.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A)	37.500.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A)	21.414.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A)	20.000.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari	39.677.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari.	46.348.940,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai	30.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Induk Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK))	99.980.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kawata (DAK)	1.884.031.438,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa Desa Asuli	25.259.310,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Jalan Poros	131.135.945,92



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Penataan Ruang	Lioka Dusun Wawomeusa Desa Langkea Raya	
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Kalpataru	4.487.500,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asana	6.305.580,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan	5.400.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano	13.414.545,46
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka	24.695.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo	13.486.486,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II	92.642.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel	20.700.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Teknis (DED) Paket 31 BM Pembangunan Jembatan di Dusun Cendana Hitam Timur	15.394.550,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru	991.863.970,01
Jumlah			28.704.828.078,43

- e. Reklasifikasi antar aset tetap Rp1.825.805.664,10, dengan rincian:
- Reklasifikasi Lampu ke Jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 115 buah dengan nilai perolehan Rp1.825.105.664,10 sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
 - Reklasifikasi Bangunan peninggalan ke Jalan, irigasi dengan nilai perolehan Rp700.000,00 sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

6. Utang Tahun 2021 yang pengakuan asetnya telah dicatat 100% sebesar Rp227.782.396,68;

Tabel 4. 123
Rincian Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Lambolavue Desa Matano	47.328.451,45
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Asuli	53.427.820,90
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan Halaman Kantor Dinas PUPR (Plat Duicker)	5.832.931,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Proteksi dan Penataan Halaman Mesjid Perumahan PNS	4.985.411,45
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel	4.154.841,90
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru	82.752.399,59
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Pengawasan Lanjutan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non Status Lokasi Kec. Towuti	7.470.540,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
		KTM Mahalona (DAK)	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Mulyasri	21.830.000,00
Jumlah			227.782.396,68

7. Koreksi Catat sebesar Rp2.789.619.521,70.

Tabel 4.124
Rincian Koreksi Catat Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Jembatan Khusus Lain-lain	86.658.150,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Kecil	5.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa	272.207.187,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Drainage	28.057.500,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Desa Lain-lain	46.041.800,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Khusus Kompleks	49.300.000,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Khusus Lainnya	164.168.338,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jembatan Desa Lain-lain	573.917.562,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jembatan Pada Jalan Desa	128.323.726,00
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1.359.329.041,00
11	Kecamatan Malili	Jembatan Pada Jalan Desa	29.237.917,70
12	Kecamatan Tomoni	Jembatan Khusus Lain-lain	47.378.300,00
Jumlah			2.789.619.521,70

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp40.730.651.430,52, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mutasi keluar sebesar Rp747.579.753,00 merupakan lawan akun mutasi masuk SKPD;
2. Reklasifikasi Kurang sebesar Rp33.724.516.546,30, dengan rincian:
 - a. Rekalsifikasi ke Tanah sebesar Rp183.819.300,00, berupa Pengadaan Tanah Jalan Akses IPLT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Rekalsifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.105.654.909,50;

Tabel 4.125
Reklasifikasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan
Ke Peralatan dan Mesin
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Kecamatan Angkona	CCTV	12.675.127,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Lampu Penerangan Jalan umum	3.092.979.782,50
Jumlah			3.105.654.909,50

- c. Rekalsifikasi ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp182.213.046,82, berupa Pembangunan WC Terminal Tarengge pada Dinas Perhubungan;



- d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rp15.461.691.127,00;

Tabel 4.126
Reklasifikasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-lain
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Lokasi	Harga Perolehan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Cendana Kec. Burau	779.801.006,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Batuputih Kec. Burau	1.009.690.000,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Non blok Kec. Kalaena	1.071.238.166,00
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Kasintuwu Kec. Mangkutana	1.131.352.478,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Nuha Kec. Nuha	1.355.037.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Mantadulu Kec. Angkona	2.092.220.524,00
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTM Kapasitas Kecil	Desa Bantilang Kec. Towuti	4.067.713.000,00
8	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Instalasi PLTS Kapasitas Besar	Desa Koroncia	3.954.638.953,00
Jumlah				15.461.691.127,00

- e. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp442.949.300,00;

Tabel 4.127
Reklasifikasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan
ke Beban Barang dan Jasa
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Rehabilitasi Jln Lingkungan Desa Tarabbi	199.690.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Jembatan Tersebar	243.259.300,00
Jumlah			442.949.300,00

- f. Reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp203.535.139,00;

- 1) Reklasifikasi antar aset tetap Rp3.950.000,00 berupa sumur pemboran lainnya (dst) yang tercatat sebelumnya dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke sumur lainnya (Peralatan dan Mesin) pada Dinas Pendidikan, sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- 2) Reklasifikasi antar aset tetap Rp199.585.139,00 berupa sumur pemboran lainnya (dst) yang tercatat sebelumnya dalam Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan ke sumur lainnya (Peralatan dan Mesin) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;

- g. Reklasifikasi ke extracomptabel Rp857.653.949,80;

Tabel 4.128
Reklasifikasi kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Extracomptable
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat DPRD	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	7.499.376,00
2	Badan Kepegawaian dan	Pompa Air	400.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Pengembangan Sumber Daya Manusia		
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jaringan Telepon Di bawah tanah Lain-lain	785.000,00
4	Dinas Pendidikan	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	10.000.000,00
5	Dinas Perhubungan	Saluran Pembuang Air Buangan Air Pertanian	46.535.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Desa	4.532.467,15
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jalan Khusus Lainnya	30.625.689,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Desa Lain-lain	114.612.665,04
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Khusus Lain-lain	16.213.550,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Jalan Desa	224.776.227,87
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Drainage	41.289.857,06
12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Waduk Pasang Surut	25.250.000,00
13	Dinas Kesehatan	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	2.460.000,00
14	Dinas Kesehatan	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	49.925.000,00
15	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Jalan Khusus Lain-lain	5.900.000,00
16	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Jaringan Distribusi Tegangan Dibawah 1 KVA	999.000,00
17	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangunan Hidran Umum	26.506.464,00
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	20.719.303,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangunan Pintu Air/Klep (Bangunan Pengaman Irigasi)	444.526,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangunan Syphon (Bangunan Pelengkap Irigasi)	6.783.841,00
21	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jalan Khusus Lainnya	16.540.035,00
22	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Saluran Drainage	42.853.048,00
23	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	15.315.800,00
24	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	16.430.000,00
25	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	16.036.800,68
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	348.400,00
27	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	413.400,00
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas Kecil	1.020.000,00
29	Dinas Pertanian	Sumur Artetis	14.850.000,00
30	Kecamatan Kalaena	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	19.800.000,00
31	Kecamatan Tomoni	Bak Penyimpanan/Tower Air Baku	1.561.500,00
32	Kecamatan Tomoni	Bangunan Plat Deker	33.477.000,00
33	Kecamatan Angkona	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	13.100.000,00
34	Kecamatan Burau	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	19.000.000,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
35	Kecamatan Nuha	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	750.000,00
36	Kecamatan Towuti	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	9.900.000,00
Jumlah			857.653.949,00

h. Reklasifikasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp13.286.999.774,18;

Tabel 4.129
Reklasifikasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan
Ke Konstruksi dalam Pengerjaan
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan	DED Normalisasi Saluran Irigasi Desa Tole	88.945.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	406.494.684,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan	632.463.216,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua	50.446.891,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Desa Balai Kembang	319.791.683,76
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	575.044.387,25
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3)	1.004.064.752,73
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	446.301.361,53
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2)	9.703.125.596,90
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	pembangunan Plat Duicker Perumahan PNS	60.322.200,00
Jumlah			13.286.999.774,18

3. Pembayaran Utang retensi tahun sebelumnya yang pencatatan aset telah diakui 100% sebesar Rp6.258.555.131,22.

Tabel 4.130
Realisasi Pembayaran Utang Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Pembangunan Jembatan Tambak Desa Lagego	9.945.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Desa Kalaena	4.812.115,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Lanosi	4.950.130,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Desa Balirejo	4.959.780,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Dusun Margosuko Desa Margolembo	6.157.165,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan Jalan Penghubung Mantadulu - Tawakua	6.282.325,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan jalan belakang Pasar Desa Lakawali	6.396.385,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembuatan proteksi Desa Bonepute	6.481.230,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Dusun Birono jaya Desa Parumpanai	6.543.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan jalan Dusun Sumali Desa Rinjani	6.546.340,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengkerikilan jalan peternakan Dusun Tuban Desa Bangun Jaya	6.688.500,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan jalan Desa Arolipu - Desa Bawalipu	6.728.265,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Taripa	7.312.205,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan jalan Desa Tabaroge	7.441.310,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan jalan pekuburan Lengkomali Desa Tole	8.992.750,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan jalan Dusun Kurusumanga Desa Loeha	9.235.860,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengerasan jalan ruas Wotu - Wotu Desa Kawata	9.335.075,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan peningkatan jalan lingkari Lioka-Baruga	9.570.795,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Embung Desa Lagego	13.735.661,50
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Desa Lewonu	14.102.689,60
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bronjong Sungai Apundi Polapi Desa Lioka	14.468.584,51
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jembatan Pada Pembangunan Jembatan Dusun Labose Desa Laskap	16.887.105,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Tersier Bb. 3 Ki	19.187.011,60
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bronjong Sungai Loeha	19.335.380,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Irigasi Desa Loppe	21.152.487,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa Buangin	22.825.015,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Jaringan Irigasi DI Bambalu	23.700.760,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Tersier Bb. 4 Ki	23.985.612,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Saluran Tersier BK. 9 Ki	24.006.151,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Sekunder Teluk Bone	26.645.681,92
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Irigasi Sekunder Desa Lanosi	28.347.046,85
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pintu Pembuang Desa Maliwowo	28.419.545,00
33	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo	30.960.550,00
34	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung Kec. Kalaena - Desa Taripa Kec. Angkona	37.023.204,00
35	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Retensi Pembangunan Sea Wall Pantai Lemo Desa Mabonta	37.200.074,00
36	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Penghubung Desa Argomulyo - Desa Cendana Hitam Timur	37.661.657,00



No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
37	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Saluran Tersier BA. 2 tg	38.311.525,00
38	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Loppe Desa Lampenai	40.204.404,00
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Bendung Desa Rante Angin	57.142.611,00
40	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Perkuatan Tebing Sungai Depan Pertamina Desa Puncak Indah	67.124.120,80
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Wewangriu (DAK)	86.473.741,00
42	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan/Pengkerikilan Jalan Kampung Baru- Mahalona (Ruas Pekaloe - Tole) Kec. Towuti	510.065.346,47
43	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Wewangriu- Pasi Pasi Kec. Malili	2.116.355.531,98
44	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Mahalona - Bantilang Kec. Towuti	2.774.855.404,99
Jumlah			6.258.555.131,22

4.3.1.3.1 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.099.651.063,74 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.389.468.784,93. Penjelasan terkait adanya penurunan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember sebesar (Rp15.289.817.721,19) adalah sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember sebesar Rp259.345.144,00, yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp246.240.000,00;
2. Reklas bertambah Rp11.425.000,00;
3. Koreksi Catat sebesar Rp1.680.144,00.

Pengurangan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember sebesar Rp15.549.162.865,19, yang terdiri dari:

1. Reklas berkurang sebesar Rp15.119.933.424,19;
2. Koreksi Catat sebesar Rp71.900.000,00;
3. Penghapusan sebesar Rp357.329.441,00.

Tabel 4.131
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2021

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	97.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	112.325.000,00	3.674.705.977,50
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	0,00	546.907.000,00
4	Dinas Perhubungan	0,00	3.145.949.978,77
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	71.900.000,00
6	Dinas Kesehatan	0,00	203.000,00
7	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	0,00	1.629.458.635,60
8	Dinas Perumahan, Kawasan	0,00	2.258.059.684,00



No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
	Permukiman dan Pertanahan		
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	3.796.673.689,32
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	147.020.144,00	221.354.900,00
11	Kecamatan Angkona	0,00	106.000.000,00
12	Kecamatan Nuha	0,00	950.000,00
Total		259.345.144,00	15.549.162.865,19

Adapun rincian untuk penambahan Aset Tetap lainnya sebesar Rp259.345.144,00, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp246.240.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.132
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD
Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	100.900.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	145.340.000,00
Jumlah		246.240.000,00

2. Reklas bertambah Rp11.425.000,00 merupakan reklas dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Pendidikan.
3. Koreksi Catat sebesar Rp1.680.144,00, merupakan reklas dari Extracomtabel pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupa Buku Umum Lain-lain sebanyak 12 buah.

Adapun rincian untuk pengurangan Aset Tetap lainnya sebesar Rp15.549.162.865,19, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas berkurang sebesar Rp15.119.933.424,19 dengan rincian :
 - a. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain Rp453.210.000,00.

Tabel 4.133
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-lain
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Nilai Perolehan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Marcing Band (Alat Tiup Trombone merek. Subaru) 4 Buah	30.000.000,00
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Marching Band (Alat Tiup Mellophone Merek Subaru) 4 Buah	28.000.000,00
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Alat Marching Band (Alat Tiup Tuba Merk Subaru) 2 Buah	39.000.000,00
4	Kecamatan Nuha	Buku Ekonomi	380.000,00
5	Kecamatan Nuha	Buku Hukum	570.000,00
6	Dinas Pendidikan	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	355.260.000,00
Total			453.210.000,00

- b. Reklasifikasi antar aset tetap Rp11.125.719.546,69, sesuai hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.



Tabel 4.134
Reklasifikasi antar aset tetap
Aset Tetap Lainnya
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Nilai Perolehan
1	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Tanah Timbunan Lantai Jemur Desa Bawalipu Kecamatan Wotu	98.134.524,00
2	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	Tanah Timbunan PPI Wotu Desa Bawalipu Kecamatan Wotu	1.531.324.111,60
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	penataan lapangan soekarno Hatta desa puncak indah	187.867.000,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	Permainan dan Olah Raga	359.040.000,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penimbunan Pasar Pusat Niaga Malili	126.965.689,32
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pematangan Lahan Pasar Pusat Niaga Malili	3.669.708.000,00
7	Dinas Perhubungan	Penataan Pelataran Halaman Dermaga Timampu	214.930.000,00
8	Dinas Perhubungan	Penimbunan Terminal Tarengge	2.105.778.331,47
9	Dinas Perhubungan	Penimbunan Terminal Malili	825.241.647,30
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan Lapangan Sepakbola, Desa Puncak Indah	261.960.000,00
11	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penimbunan lokasi perumahan Nelayan Desa Wewangriu, Kec. Malili	485.678.000,00
12	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penataan lahan perumahan nelayan kec. Angkona	353.876.000,00
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Lanjutan penimbunan lokasi perumahan nelayan kec. Angkona	784.816.243,00
14	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penimbunan Rumah deret Kec. Malili	14.400.000,00
15	Kecamatan Angkona	Penimbunan Tanah Gedung pertemuan	106.000.000,00
Total			11.125.719.546,69

c. Reklasifikasi ke extracomtabel Rp3.541.003.877,50

Tabel 4.135
Reklasifikasi Aset Tetap Lainnya ke Extracomtable
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Nilai Perolehan
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	buku agama lainnya (dst)	7.494.000,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	buku filsafat lainnya (dst)	10.120.000,00
3	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	10.640.000,00
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	37.486.000,00
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Buku Umum Lain-lain	36.152.000,00
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ilmu Pengetahuan Umum	119.462.900,00
7	Dinas Kesehatan	Ensyclopedia, Kamus, Buku Referensi	90.000,00
8	Dinas Kesehatan	Buku Umum Lain-lain	113.000,00
9	Dinas Pendidikan	Buku Umum Lain-lain	3.294.057.463,50
10	Dinas Pendidikan	Alat Kesenian Lain-lain	25.388.514,00
Total			3.541.003.877,50



2. Koreksi Catat sebesar Rp71.900.000,00, berupa koreksi catat atas Renovasi Kantor Ranting Kalaena Kanan I yang double catat pada KIB Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Penghapusan sebesar Rp357.329.441,00, berupa Aset Renovasi yang telah diserahkan ke PDAM sesuai Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 12/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4.3.1.3.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp69.859.038.330,33 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp84.441.148.054,10. Penjelasan terkait adanya penurunan nilai aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp14.524.175.589,57) dengan rincian sebagai berikut:

Penambahan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp17.041.714.516,76, yang terdiri dari:

1. Reklas bertambah Rp16.940.911.068,57;
2. Utang Tahun 2021 Rp97.003.498,19;
3. Hasil Inventarisasi Tahun 2021 Rp3.799.950,00.

Pengurangan Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp31.623.824.240,53, yang terdiri dari:

1. Penghapusan sebesar Rp739.928.367,00
2. Reklas berkurang sebesar Rp29.460.633.302,04;
3. Koreksi Catat sebesar Rp1.423.262.571,49.

Tabel 4.136
Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan per SKPD Tahun 2021

No.	SKPD	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	10.440.000,00	0,00
2	Sekretariat Daerah	0,00	12.760.000,00
3	Dinas Pendidikan	0,00	349.161.200,00
4	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.024.817.480,63	11.205.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.114.432.186,13	30.785.571.007,92
6	Dinas Kesehatan	691.893.650,00	162.465.365,61
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.322.200,00	51.925.000,00
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	0,00	250.736.667,00
9	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	139.809.000,00	0,00
Jumlah		17.041.714.516,76	31.623.824.240,53

Adapun rincian untuk penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp17.041.714.516,76, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Reklas bertambah Rp16.940.911.068,57, dengan rincian:
 - a. Reklas dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2021 sebesar Rp1.923.242.707,63;



Tabel 4.137
Reklasifikasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat DPRD	Perencanaan Rehab Atap Gedung Kantor DPRD	10.440.000,00
2	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	PEMB. TRIBUN MINI LAP.SIRIO-RIO KEC. TOWUTI	1.024.817.480,63
3	Dinas Kesehatan	biaya DED Pembangunan rumah sakit Atue	99.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Mangkutana	43.707.950,00
5	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Tomoni Timur	43.629.000,00
6	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wawondula	43.670.000,00
7	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wotu	43.615.000,00
8	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Nuha	43.725.000,00
9	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Wasuponda	43.725.000,00
10	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Bantilang	43.521.500,00
11	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Angkona	43.670.000,00
12	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Lampia	43.780.000,00
13	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Burau	43.670.000,00
14	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Kalaena	43.705.200,00
15	Dinas Kesehatan	perencanaan pembangunan PONED PKM Mahalona	41.910.000,00
16	Dinas Kesehatan	DED pembangunan unit transfusi darah	70.565.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti	145.227.577,00
18	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan	DED Pembangunan Pasar di Pusat Kota Desa Libukan Mandiri	50.864.000,00
Jumlah			1.923.242.707,63

- b. Reklas dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2021 sebesar Rp13.286.999.774,18;

Tabel 4.138
Reklasifikasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan	DED Normalisasi Saluran Irigasi Desa Tole	88.945.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	406.494.684,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan	632.463.216,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Peningkatan Jalan Poros Tarabbi -	50.446.891,00



No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
	Ruang	Tawakua	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Desa Balai Kembang	319.791.683,76
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	575.044.387,25
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3)	1.004.064.752,73
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	446.301.361,53
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tabaroge (Ruas Tabaroge 2)	9.703.125.596,90
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	pembangunan Plat Duicker Perumahan PNS	60.322.200,00
Jumlah			13.286.999.774,18

- c. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa Tahun 2021 sebesar Rp1.730.668.586,76 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan rincian:

Tabel 4.139
Reklasifikasi Tambah Konstruksi dalam Pengerjaan
yang berasal dari Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Perencanaan Paket 18 CK (Perencanaan Pembangunan TPS3R Desa Lioka (17,956,333,34)	17.956.333,34
2	Perencanaan Paket 18 CK Pembangunan TPS3R Desa Tarengge (17,956,333,33)	17.956.333,33
3	Perencanaan Paket 18 CK Pembangunan TPS3R Desa Lakawali (17,956,333,33)	17.956.333,33
4	Perencanaan Teknis Paket 10 SDA (Lanjutan pembangunan Perkuatan Tebing Sungai Malili CV. JINAN WALITAMA	130.120.000,00
5	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA (Pembangunan Bronjong Dusun Marannu Desa Lambara Harapan (16,510,000)	16.510.000,00
6	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Bronjong Dusun 1 Kanawatu (10,545,000)	10.545.000,00
7	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Lining Saluran Pembuang Dusun Karang Anyar Desa Mulyasri (4,411,000)	4.411.000,00
8	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Lr.7 Desa Margomulyo	4.411.000,00
9	Perencanaan Teknis Paket 9 SDA Pembangunan Bronjong Desa Madani (4,440,000)	4.440.000,00
10	Perencanaan Teknis Paket 11 SDA (Pembangunan Bronjong sungai La sio-sio Dusun Puncak (37,260,000) CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	37.260.000,00
11	Perencanaan Teknis Paket 11 SDA Pembangunan Proteksi Sungai Angkona Desa Watangpanua (4,490,000) CV. ARYANDS UTAMA KONSULTAN	4.490.000,00
12	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA (Pembangunan Bronjong Dusun Korondeme (13,770,000)	13.770.000,00
13	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA Pembangunan Proteksi Sungai Magege Dusun Sendang Sari 1 Desa wonorejo	11.000.000,00
14	Perencanaan Teknis Paket 14 SDA Pembangunan Proteksi Saluran Pembuang Desa Margolembo (5,400,000) CV. DLUNA ENGINEERING	5.400.000,00
15	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA (Pembangunan Bronjong Desa Pekalao (5,411,250) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	5.411.250,00
16	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA Pembangunan Bronjong Dusun Waomeusa (12,662,750) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	12.662.750,00
17	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA, Pembangunan Bronjong RT 01 dan RT 02 Balambano (9,712,500) PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	9.712.500,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
18	Perencanaan Teknis Paket 12 SDA Pembangunan Talud Dusun Lahumpangi Timur PT. INTRA PERSADA KONSULTAN	5.403.500,00
19	Pembayaran 100% CV. MIRACLE ENGINEERING KONSULTAN) Perencanaan Teknis (DED) Paket 6 BM Peningkatan Jalan Desa Sindu Agung	29.852.900,00
20	perencanaan Pengaspalan Jalan Rusunawa Polres Malili	4.500.000,00
21	Pembayaran 100% CV. ALFA GRAHA) Perencanaan Teknis (DED) Paket 23 BM Lanjutan Peningkatan Jalan Loppe Desa Lampenai (70.914,800)	70.914.800,00
22	Pembayaran 100% Paket 32 BM CV. BINTANG SEMBILAN TIMUR RAYA (Peningkatan Jalan Reformasi Desa Maliwowo)(Ruas Maliwowo 2) (87.474.200)	87.474.200,00
23	Perencanaan Teknis Paket 21 BM (CV. JINAN WALITAMA KONSULTAN) Peningkatan Jalan Ruas Tole-Tole Landangi)	87.600.700,00
24	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Jalan Ambo Ngaru Desa Laskap	5.385.000,00
25	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Menuju Pekuburan Palanteo Dusun Cerekang Desa Manurung	5.385.000,00
26	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Pengerasan Jalan Wonorejo Timur	4.035.000,00
27	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Pembentukan dan Pengerasan Jalan Desa Tadulako dan Pepuro	5.385.000,00
28	Perencanaan Teknis (DED) Paket 41 BM Peningkatan Jalan Lorong 5 Dusun Wanasari Desa Cendana Hitam	5.385.000,00
29	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pengerasan Jalan Dusun Martasari dan Martaguna Desa Mantadulu	5.339.400,00
30	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pengerasan Jalan Dusun Gentabuana Desa Taripa	5.339.400,00
31	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pembentukan Jalan Dusun Watampanua Desa Lamaeto	5.339.400,00
32	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Pembangunan Proteksi Jalan Dusun Sidodadi Desa Solo	5.339.400,00
33	Perencanaan Teknis (DED) Paket 33 BM Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Tampinna	5.339.400,00
34	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Peningkatan Jalan Dalam Pemukiman Desa Sumber Agung	5.343.800,00
35	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Peningkatan Jalan Lr.12 Desa Sumber Makmur	5.343.800,00
36	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Lanjutan Pembangunan Proteksi Jalan Lorong Lerengkume Dusun Wulasi	5.343.800,00
37	Perencanaan Teknis (DED) Paket 38 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Dusun Lembah ke Dusun Tengkositara Desa Tarabbi	5.343.800,00
38	Perencanaan Teknis (DED)Paket 38 BM Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Susuejaya dan Dusun Tirtokencono Desa Lakawali	5.343.800,00
39	Perencanaan Teknis Paket 37 BM (CV. MASERENPULU CONSULTAN) Lanjutan Peningkatan Jalan Dusun Labose Desa Laskap	36.007.400,00
40	Perencanaan Teknis BM (CV. KHA LINE KONSULTAN Peningkatan Jalan Kontara Desa Wowundula	29.817.700,00
41	Perencanaan Teknis BM (CV. ALFA GRAHA) Lanjutan Peningkatan Jalan Kontara Desa Wowundula	28.507.600,00
42	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Dusun Bonepute Desa Nuha	27.778.300,00
43	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Buangin	5.400.000,00
44	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Malindoe Desa Lioka	5.400.000,00
45	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Jl. Pontara Dusun Wawomeusa Desa Wawondula	3.600.000,00
46	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Desa Timampu	4.050.000,00
47	Perencanaan Teknis (DED) Paket 46 BM Pengerasan Jalan Jalur Dua Desa Kalosi	4.050.000,00
48	Perencanaan Teknis BM (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Lioka	5.278.300,00
49	Perencanaan Teknis BM (CV. TRAXIAL KONSULTAN) Lanjutan Peningkatan	20.949.999,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
	Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	
50	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembangunan Jalan Dalam Permukiman Dusun Cinta Damai Desa Balambano	4.050.000,00
51	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembangunan Proteksi Jalan Jl. Dongi-Dongi Desa Ledu-Ledu	4.400.000,00
52	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pembentukan Jalan Dusun Lahumpangi Timur Desa Parumpanai	4.050.000,00
53	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pengerasan Jalan Dusun Lampangi Barat, Rende-Rende, Desa Parumpanai	4.400.000,00
54	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Pengerasan Jalan Lampangi Timur ke Lampangi Barat Desa Parumpanai	4.400.000,00
55	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Peningkatan Jalan Akses SMP 3 Dusun Togo	4.400.000,00
56	Perencanaan Teknis (DED) Paket 48 BM Peningkatan Jalan Dusun Togo	4.627.000,00
57	Perencanaan Teknis Paket 43 BM (CV. R3I KONSULTAN) Pembangunan Proteksi Desa Kalaena (10,460,000)	10.460.000,00
58	Perencanaan Teknis Paket 43 BM (CV. R3I KONSULTAN) Peningkatan Jalan Kelurahan Magani (4,474,700)	4.474.700,00
59	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Pengerasan Jalan Desa Tabaroge	5.375.000,00
60	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Pengerasan Jalan Dusun Langgiri Desa Lampenai	5.375.000,00
61	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Pengerasan Jalan Jl. Karya Marannu Desa Tarengge Timur	5.375.000,00
62	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Pengerasan Jl. Pajatobu Desa Tarengge Timur	5.375.000,00
63	Perencanaan Teknis Paket 49 (CV. GITA KARUNIA KONSULTAN) Peningkatan Jalan Desa Lagego	14.735.100,00
64	Perencanaan Teknis Paket 36 (CV. AKSARA LONTARA INDONESIA) Peningkatan Jalan Akses Terminal/Pusat Niaga	35.860.000,00
65	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Pengerasan Jalan Sambea Dusun Labose Desa Laskap	2.927.080,00
66	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Peningkatan Jalan Dusun Wulasi Desa Manurung	5.400.000,00
67	Perencanaan Teknis (DED) Paket 39 BM Pembangunan Jalan Beton Desa Tarabbi	8.100.000,00
68	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Desa Manurung	5.400.000,00
69	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pengerasan Jalan Lorong 3 dan 4 Dusun Podomoro Desa Lakawali	5.400.000,00
70	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pengerasan Jalan Desa Puncak Indah (Depan Texture)	5.400.000,00
71	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Sungai Popong Dusun Karebbe Desa Laskap	2.689.700,00
72	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Samping Gardu Induk KM 4 Dusun Balambano Desa Puncak Indah	2.689.700,00
73	Perencanaan teknis (DED) Paket 40 BM Pembentukan Jalan Lingkungan Desa Puncak Indah	5.400.000,00
74	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Lanjutan Pengerasan Jalan Desa Lambara	5.365.000,00
75	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pembangunan Jalan Poros Desa Bone Pute	5.365.000,00
76	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BMPembangunan Proteksi Jalan Lorong I dan II Desa Bone Pute	5.365.000,00
77	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pengerasan Jalan Durian Dusun Bambalu Desa Lumbewe	5.365.000,00
78	Perencanaan Teknis (DED) Paket 35 BM Pengkerikilan Jalan Masjid Raya Desa Burau	5.228.200,00
79	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BMPengerasan Jalan S. Begawan Solo Desa Langkea Raya	5.400.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
80	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Pengerasan Jalan Trans Sulawesi Desa Mahalona	5.400.000,00
81	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Peningkatan Jalan Dalam Pemukiman Desa Loeha	5.400.000,00
82	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BM Peningkatan Jalan Dalam Permukiman Desa Masiku	5.400.000,00
83	Perencanaan Teknis (DED) Paket 47 BMPeningkatan Jalan Komodo Desa Langkea Raya	5.140.700,00
84	Pembayaran 100% Paket 22 BM CV. PT. INTRA PERSADA KONSULTAN (Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari) (63.665.800)	63.665.800,00
85	Perencanaan Teknis (DED) Paket 19 BM Pembangunan Jembatan Desa Bonepute	6.000.000,00
86	Perencanaan Teknis (DED) Paket 18 BM Pembangunan Jembatan Penghubung Dusun Mallaulu Desa Ussu ke Dusun Gemini Indah Desa Puncak Indah	14.967.500,00
87	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 51 BM Pembangunan Jembatan Akses Pekuburan Desa Mabonta (46.900.000)	46.900.000,00
88	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 51 BM Pembangunan Jembatan Desa Manurung - Desa Lakawali (7.500.000)	7.500.000,00
89	Pembayaran 100% CV. KHA LINE CONSULTANT) Perencanaan Teknis (DED) Paket 50 BM Pembangunan Jembatan Desa Taripa	69.447.400,00
90	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan Jalan Poros Loppe Dusun Benteng	5.860.000,00
91	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan Karambua	5.860.000,00
92	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan penghubung desa pasi-pasi dan desa harapan	9.810.000,00
93	Perencanaan Teknis (DED) Paket 52 BM Pembangunan Jembatan sungai popong dusun karebbe desa laskap	5.860.000,00
94	Perencanaan Teknis Paket 53 BM (Pembangunan jembatan jalan veteran ujung desa langkea raya)	77.371.800,00
95	Biaya Perencanaan Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta	198.925.600,00
96	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti	5.326.028,76
97	By. Desain Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	29.907.900,00
98	By. Desain Pengaspalan Desa Balai Kembang	29.962.900,00
99	By. Desain Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	20.949.999,00
100	By. Pengawasan Peningkatan Jalan Cinta Damai Desa Balambano (Balambano 3)	28.706.480,00
101	By. Desain Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	29.866.100,00
Jumlah		1.730.668.586,76

2. Utang Tahun 2021 Rp97.003.498,19;

Tabel 4.140
Rincian Utang Konstruksi dalam Pengerjaan
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Uelanti	3.486.535,58
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Biaya Perencanaan Pembangunan Mess Pemda Kab. Luwu Timur di Jakarta	49.731.400,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	By. Pengawasan Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	4.005.631,80
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	By. Pengawasan Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan	9.912.936,22
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	By. Pengawasan Pengaspalan Desa Balai Kembang	402.651,00
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	By. Pengawasan Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	10.423.784,80



No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	By. Pengawasan Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	4.106.958,79
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Teknis (DED) Paket 03 (Tiga) BM Pelebaran Jembatan Jalan Poros Desa Tarengge Timur (Maramba 1)	14.933.600,00
Jumlah			97.003.498,19

3. Hasil Inventarisasi Tahun 2021 Rp3.799.950,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Perencanaan Pembangunan TPA Ussu.

Adapun rincian untuk pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp31.623.824.240,53, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penghapusan sebesar Rp739.928.367,00;

Tabel 4.141
Rincian Penghapusan Aset Konstruksi dalam Pengerjaan
Tahun 2021

No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
1	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Desain Tenda PKL Pantai Lemo	6.000.000,00
2	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + Tower air pasar Lakawali	2.841.667,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar kalaena	2.841.667,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar wonorejo	2.841.667,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar tawakua	2.841.667,00
6	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar sumber makmur	2.841.667,00
7	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar sumasang	2.833.333,00
8	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DEDMCK + tower air pasar Madani	2.833.333,00
9	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	MCK + tower air pasar pepuro barat	2.833.333,00
10	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED MCK + tower air pasar wanasari	2.833.333,00
11	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pasar Bonepute DED Rp. 14.900.000,-	14.900.000,00
12	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	DED Pemb. Industri rumput laut	44.900.000,00
13	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja UKL - UPL Pasar Ds. Pasi-Pasi	39.820.000,00
14	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Penataan Halaman Pujasera Pasar F	15.000.000,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Pengukuran Lahan Pasar Wasuponda	24.900.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket V Pengkerikilan jalan tani Desa Kawatu	10.713.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket IV Pembentukan Jalan Tani Laroea - Laumpangi	11.650.000,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket VIII Pembentukan Jalan tani Desa Masiku 3.000 M + Jembatan	22.350.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan paket IV Pengkerikilan jalan tani + plat duiecker desa sumber agung kec.kalaena	19.402.500,00



No.	SKPD	Uraian	Harga Perolehan
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket 20 pengkrikilan jalan tani desa kanawatu, pengkrikilan jalan desa lampainai+ 1 unit jembatan pengkrikilan jalan desa bandoa desa lera	46.930.000,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket VIII proteksi bronjong tanggul Dusun Margosuko Desa Margolembo	49.890.000,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan paket 29 Pengaspalan jalan desa lestari kec. Tomoni ruas II	15.002.000,00
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Paket 09 Pembentukan Jalan Terminal Tarengge Desa Tarengge	5.755.000,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket 22 pemb. jembatan gantung saluanna	12.680.000,00
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan teknis paket V Pemb. Jembatan beton B=15 m Dsn Dandawas Ds. Parumpanai	22.180.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DED Paket 32 Pembangunan jembatan B. 6 M & B.14 M Desa Lakawali kec.Malili	5.400.000,00
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	perencanaan paket 34 Pembangunan jembatan desa madani	8.500.000,00
28	Dinas Pendidikan	Rumah Adat	95.862.000,00
29	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	17.421.800,00
30	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	17.421.800,00
31	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	17.421.800,00
32	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	17.421.800,00
33	Dinas Pendidikan	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	10.200.000,00
34	Dinas Pendidikan	Pagar Permanen	19.750.000,00
35	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	13.990.000,00
36	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	15.015.000,00
37	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	15.020.000,00
38	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	16.980.000,00
39	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	31.950.000,00
40	Dinas Pendidikan	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	49.960.000,00
Jumlah			739.928.367,00

2. Reklas berkurang sebesar Rp29.460.633.302,04, dengan rincian:
 - a. Reklas ke Tanah sebesar Rp156.770.365,61 berupa pematangan lahan pembangunan Rumah Sakit Atue pada Dinas Kesehatan.
 - b. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp599.034.858,00;

Tabel 4.142
Reklasifikasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan
ke Aset Gedung dan Bangunan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Sekretariat Daerah	perencanaan kanopi	5.863.000,00
2	Sekretariat Daerah	perencanaan penambahan teras kanopi dan kubang musallah, penambahan wc musallah rujab Bupati	6.897.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	DED + Adm Penataan Lapangan Olahraga Perumahan PNS	11.205.000,00
4	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	UKL - UPL Pasar Desa Bonepute	39.800.000,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Belanja UKL-UPL Pasar Desa Cendana Hijau	39.875.000,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Biaya desain Penataan Tempat Pemakaman Umum (TPU Ussu)	16.445.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan	Pembangunan Gedung Pemerintahan Desa	462.507.858,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Penataan Ruang	Libukan Mandiri	
8	Dinas Pendidikan	Perencanaan Pembangunan Pagar	10.747.000,00
9	Dinas Kesehatan	Pemb.Pagar PKM Bone Pute	5.695.000,00
Jumlah			599.034.858,00

c. Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp28.704.828.078,43

Tabel 4.143
Reklasifikasi Kurang Konstruksi dalam Pengerjaan
ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Biaya Desain pembangunan proteksi Desa Lambarese	8.017.999,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Non Status Lokasi Kec. Towuti KTM Mahalona (DAK)	2.330.444.797,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Mahalona - Bantilang Kec. Towuti	11.185.291.834,99
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan/Pengkerikilan Jalan Kampung Baru- Mahalona (Ruas Pekalao - Tole) Kec. Towuti	3.603.500.935,47
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Rabat Beton Jalan Poros Wewangriu- Pasi Pasi Kec. Malili	7.735.538.146,58
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Dusun Turunan Bajo Desa Tampinna	50.996.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lorong Pesantren Desa Tampinna Ke Lorongkume Desa Manurung	51.084.000,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Ruas Cendana 1 Desa Cendana	37.158.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Lr. 4 Desa Bone Pute	34.820.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Ruas Jalan Poros Mekarsari - Taripa	49.220.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan dalam Kota Baru - Ruas CL-20	45.799.600,00
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Mulyasri	49.220.000,00
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Libukan Mandiri - Mahalona (DAK A)	37.500.000,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Buangin (DAK A)	21.414.000,00
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Ruas Jalan Tole - Kalosi (DAK A)	20.000.000,00
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Bahari 1 Desa Bahari	39.677.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Poros Sumber Agung - Mekarsari.	46.348.940,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Jembatan Desa Burau Pantai	30.000.000,00
19	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Saluran Induk Jaringan Irigasi DI Bakkara (DAK))	99.980.000,00
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kawata (DAK)	1.884.031.438,00
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipa Desa Asuli	25.259.310,00
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Jalan Poros Lioka Dusun Wawomeusa Desa Langkea Raya	131.135.945,92
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Drainase Desa Kalpataru	4.487.500,00
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipa Desa	6.305.580,00



No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
	Penataan Ruang	Asana	
25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Harapan	5.400.000,00
26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Matano	13.414.545,46
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Lioka	24.695.000,00
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Balo - Balo	13.486.486,00
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Penataan Tanggul Sungai Malili Tahap II	92.642.000,00
30	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pedestrian Desa Nikkel	20.700.000,00
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perencanaan Teknis (DED) Paket 31 BM Pembangunan Jembatan di Dusun Cendana Hitam Timur	15.394.550,00
32	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Ujung Baru	991.863.970,01
Jumlah			28.704.828.078,43

3. Koreksi Catat sebesar Rp1.423.262.571,49, dengan rincian:

Tabel 4.144
Koreksi Catat Konstruksi dalam Pengerjaan
ke Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun 2021

No.	SKPD	Nama Aset	Harga Perolehan
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Bangunan Plat Duicker	27.462.001,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengaspalan Desa Balai Kembang	289.196.335,80
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Ruas Rante Mario - Ujung Baru	188.089.776,39
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Desa Argomulyo	257.304.569,07
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Harapan	293.537.639,62
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Pemakaman Umum Desa Ledu-Ledu	295.280.283,61
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Jalan Poros Tarabbi - Tawakua	46.481.891,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan Pagar Bangunan Pengendap Intake Ue Lanti	25.910.075,00
Jumlah			1.423.262.571,49

4.3.1.3.3 Akumulasi Penyusutan

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.943.732.508.133,25) dan 31 Desember 2020 sebesar (Rp1.680.180.100.811,66). Mutasi akumulasi penyusutan tersebut dapat digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 4.145
Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2021 dan 2020

Aset Tetap	Akumulasi per 31 Desember 2020	Mutasi		Akumulasi per 31 Desember 2021
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	355.934.124.839,91	69.472.038.987,94	12.168.346.825,17	413.237.817.002,68
Gedung dan Bangunan	233.682.459.009,39	42.690.521.799,61	2.309.673.958,00	274.063.306.851,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.084.385.989.659,67	174.389.072.015,90	4.689.927.312,00	1.254.085.134.363,57
Aset Tetap Lainnya	6.177.527.302,69	5.651.390.828,91	9.482.668.215,60	2.346.249.916,00
Jumlah	1.680.180.100.811,66	292.203.023.632,36	28.650.616.310,77	1.943.732.508.133,25

Tabel 4.146
Rincian Akumulasi Penyusutan SKPD
per 31 Desember 2021

No.	SKPD	Harga Perolehan
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.946.750.749,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.911.334.594,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.292.730.340,42
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.079.869.110,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	31.072.060.411,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.257.088.519,00
7	Dinas Kesehatan	95.765.283.632,43
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.639.898.993,69
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.604.680.962,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.101.948.123,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.084.945.543.750,57
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.733.251.283,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.178.335.190,00
14	Dinas Pendidikan	177.272.000.691,22
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.215.466.129,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.895.985.696,00
17	Dinas Perhubungan	22.576.465.763,15
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.655.931.137,00
19	Dinas Pertanian	17.666.164.565,50
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	176.207.700.048,20
21	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	4.632.944.723,00
22	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.204.914.522,00
23	Inspektorat	2.053.493.407,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.770.923.120,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.818.208.436,00
26	Kecamatan Angkona	2.462.985.830,00
27	Kecamatan Burau	2.520.899.538,00
28	Kecamatan Kalaena	2.318.129.552,00
29	Kecamatan Malili	2.667.790.098,00
30	Kecamatan Mangkutana	1.790.327.084,00
31	Kecamatan Nuha	1.884.032.158,00
32	Kecamatan Tomoni	2.497.602.261,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	2.032.369.791,00
34	Kecamatan Towuti	3.104.177.979,00



No.	SKPD	Harga Perolehan
35	Kecamatan Wasuponda	2.156.572.921,00
36	Kecamatan Wotu	2.166.423.427,00
37	RSUD I Lagaligo	131.460.805.121,99
38	Sekretariat Daerah	46.798.285.540,08
39	Sekretariat DPRD	22.373.132.936,00
Jumlah		1.943.732.508.133,25

Tabel 4.147
Perbandingan Akumulasi Penyusutan
Tahun 2021 dan 2020

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.946.750.749,00	1.791.680.458,00	8,66
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.911.334.594,00	5.874.031.147,00	17,66
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.292.730.340,42	5.596.780.310,42	12,43
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.079.869.110,00	2.745.745.650,00	12,17
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	31.072.060.411,00	28.096.552.400,61	10,59
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.257.088.519,00	3.064.703.065,00	6,28
7	Dinas Kesehatan	95.765.283.632,43	89.639.140.836,81	6,83
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.639.898.993,69	3.779.006.018,00	22,78
9	Dinas Lingkungan Hidup	15.604.680.962,00	13.398.320.044,00	16,47
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	10.101.948.123,00	7.287.738.259,50	38,62
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.084.945.543.750,57	944.438.103.844,17	14,88
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.733.251.283,00	2.061.093.289,00	32,61
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.178.335.190,00	1.980.739.287,00	9,98
14	Dinas Pendidikan	177.272.000.691,22	146.763.550.336,43	20,79
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.215.466.129,00	4.219.348.144,00	23,61
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.895.985.696,00	17.743.918.119,52	17,76
17	Dinas Perhubungan	22.576.465.763,15	20.671.683.617,73	9,21
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.655.931.137,00	3.178.423.378,00	15,02
19	Dinas Pertanian	17.666.164.565,50	15.891.605.283,50	11,17
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	176.207.700.048,20	148.895.053.333,01	18,34
21	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.632.944.723,00	3.842.847.841,00	20,56
22	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	3.204.914.522,00	2.837.842.427,00	12,93
23	Inspektorat	2.053.493.407,00	1.881.897.517,00	9,12
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan	1.770.923.120,00	1.408.749.421,00	25,71



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Nama SKPD	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
	Politik			
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	13.818.208.436,00	11.688.541.847,75	18,22
26	Kecamatan Angkona	2.462.985.830,00	2.302.525.856,33	6,97
27	Kecamatan Burau	2.520.899.538,00	2.370.795.157,00	6,33
28	Kecamatan Kalaena	2.318.129.552,00	2.155.861.365,00	7,53
29	Kecamatan Malili	2.667.790.098,00	2.399.193.323,00	11,20
30	Kecamatan Mangkutana	1.790.327.084,00	1.658.424.797,00	7,95
31	Kecamatan Nuha	1.884.032.158,00	1.698.735.750,00	10,91
32	Kecamatan Tomoni	2.497.602.261,00	2.115.511.397,00	18,06
33	Kecamatan Tomoni Timur	2.032.369.791,00	1.890.593.745,00	7,50
34	Kecamatan Towuti	3.104.177.979,00	3.225.821.336,00	-3,77
35	Kecamatan Wasuponda	2.156.572.921,00	2.020.313.042,00	6,74
36	Kecamatan Wotu	2.166.423.427,00	1.952.693.639,00	10,95
37	RSUD I Lagaligo	131.460.805.121,99	104.092.754.652,87	26,29
38	Sekretariat Daerah	46.798.285.540,08	42.827.436.336,00	9,27
39	Sekretariat DPRD	22.373.132.936,00	20.692.344.540,00	8,12
Jumlah		1.943.732.508.133,25	1.680.180.100.811,65	15,69

Tabel 4.148
Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD
per 31 Desember 2021

No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.199.874.922,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.080.866.192,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	3.783.021.575,42
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.999.186.716,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	16.848.735.111,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.558.927.154,00
7	Dinas Kesehatan	61.056.387.618,43
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.244.761.316,69
9	Dinas Lingkungan Hidup	12.981.987.186,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	2.276.076.539,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.159.611.348,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.926.163.873,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.565.508.735,00
14	Dinas Pendidikan	65.217.342.951,22
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.978.133.934,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.315.777.650,00
17	Dinas Perhubungan	18.323.378.700,15
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.230.056.606,00
19	Dinas Pertanian	10.503.700.126,50
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.865.934.493,20
21	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	3.400.317.826,00
22	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.575.339.807,00
23	Inspektorat	1.729.854.848,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.224.377.939,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	12.730.552.826,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

26	Kecamatan Angkona	1.295.130.681,00
27	Kecamatan Burau	1.296.156.944,00
28	Kecamatan Kalaena	1.147.213.735,00
29	Kecamatan Malili	1.570.018.910,00
30	Kecamatan Mangkutana	1.013.848.678,00
31	Kecamatan Nuha	1.282.866.018,00
32	Kecamatan Tomoni	1.335.589.605,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	964.276.330,00
34	Kecamatan Towuti	1.486.842.711,00
35	Kecamatan Wasuponda	1.258.494.727,00
36	Kecamatan Wotu	1.346.531.131,00
37	RSUD I Lagaligo	115.282.666.949,99
38	Sekretariat Daerah	24.697.901.323,08
39	Sekretariat DPRD	9.484.403.266,00
Jumlah		413.237.817.002,68

Tabel 4.149
Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	456.830.000,00
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	966.222.001,00
3	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	6.741.142.548,00
4	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	12.049.017.423,00
5	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	24.104.955.507,00
6	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	16.056.523.342,00
7	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	23.011.333.301,00
8	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	103.298.800,00
9	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	171.960.768,00
10	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	146.608.002,00
11	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	527.133.930,00
12	Akumulasi Penyusutan Alat Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	375.269.684,00
13	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Intelijen	55.930.000,00
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Peralatan Selam	66.249.228,00
15	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	439.620.088,00
16	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Kayu	19.548.820,00
17	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Listrik	83.182.084,00
18	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Bengkel Service	1.287.863,00
19	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	119.966.900,50
20	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	3.000.907,00
21	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pabrik Es	1.310.980.451,00
22	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin- Perkakas Pengangkat Bermesin	3.166.113,00
23	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Bengkel	3.679.299,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
	Khusus Peladam	
24	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Besi	52.409.998,00
25	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	83.077.036,00
26	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Kerja	35.069.000,00
27	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	7.468.707,00
28	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Standard (Standard Tools)	39.092.000,00
29	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Aggregate and Concrete Equipment	18.242.813,00
30	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Compacting Equipment	750.000.000,00
31	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat- Excavator	3.775.107.061,00
32	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Alat Pengangkat	36.506.666,00
33	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Grader	5.545.461.513,00
34	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Mesin Proses	374.193.485,00
35	Akumulasi Penyusutan Alat Besar Darat-Tractor	39.410.875,00
36	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	8.664.876.867,25
37	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	10.175.033.773,28
38	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	197.816.351,00
39	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	138.228.500,00
40	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Mesin Ketik	248.419.814,00
41	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	2.413.532.087,54
42	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	7.760.596.314,14
43	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	12.519.051.474,67
44	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Jantung	755.017,00
45	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	2.577.969.421,31
46	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	3.951.000.094,43
47	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICCU	80.000,00
48	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung	3.187.470.057,00
49	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kamar Jenazah/Mortuary	745.470.000,00
50	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Keluarga Berencana	510.629.984,01
51	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	120.094.218,00
52	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	1.007.367,00
53	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	1.764.605.755,00
54	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	6.907.146.163,97
55	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Nuklir	8.127.793.678,51
56	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	128.921.497,44
57	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	5.926.679.230,00
58	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radioterapi	26.500.000,00
59	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	2.015.278.422,01
60	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Transfusi Darah	16.357.230,00
61	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	43.408.576.816,20
62	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5.162.425.524,26
63	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	1.184.750.141,87
64	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	415.965,00
65	Akumulasi Penyusutan Alat Kerja Penerbangan- Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	24.534.770,00
66	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Kepolisian	6.392.752,00
67	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Matra Laut	549.154.798,00
68	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan Umum- Alat Kesehatan Umum Lainnya	109.288.498,00
69	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat- Alat Sandi	19.450.000,00
70	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM	77.299.998,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
71	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio SSB	79.878.333,00
72	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio VHF	252.147.000,00
73	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Sosial	118.191.000,00
74	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	1.813.797.539,00
75	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Assembly/Counting System	18.236.819,00
76	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Measuring/Testing Device	250.000,00
77	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Modular Counting and Scientific Electronic	14.455.304,00
78	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Radiation Detector	1.794.688,00
79	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-Recorder Display	70.805.614,00
80	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika-System/Power Supply	814.047.288,00
81	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	6.303.796,00
82	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	111.607.750,00
83	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Udara	295.000.000,00
84	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Penunjang	35.615.829,00
85	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	138.391.054,00
86	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	176.520.898,00
87	Akumulasi Penyusutan Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	846.766.815,00
88	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pasca Panen	325.415.000,00
89	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Lainnya	291.885.000,00
90	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.051.412.900,00
91	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	638.591.010,80
92	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat Produksi Perikanan	10.404.777.556,00
93	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	1.086.831.103,00
94	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Kejuruan	3.858.343.354,99
95	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	9.012.498,00
96	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	9.150.000,00
97	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	226.848.116,63
98	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	17.459.703,55
99	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	1.050.518.936,30
100	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	983.547.981,36
101	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	108.676.816,00
102	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	140.523.872,56
103	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.180.362.648,42
104	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	6.495.042,00
105	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	213.412.280,25
106	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik	212.442.380,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
	Sekolah Bidang Studi:Olahraga	
107	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:PKN	129.503.500,00
108	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	402.460.940,00
109	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Kesehatan Kerja	85.502.738,00
110	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan-Alat Ukur Fisika Kesehatan	15.480.000,00
111	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga- Mebel	35.874.090.797,74
112	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	833.672.863,00
113	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	1.838.231.169,09
114	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.183.961.711,00
115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	9.712.900.460,00
116	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pengukur Waktu	9.051.805,00
117	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.718.926.573,02
118	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Kerja Bawah Air	129.955.418,00
119	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	1.441.396.897,10
120	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Penolong	3.816.667,00
121	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Cetak	441.918.161,00
122	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	904.784.248,92
123	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	665.890.927,00
124	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.402.717.948,16
125	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Timbangan/Biara	268.571.470,59
126	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lain-Lain	59.027.059,00
127	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Universal	555.734.914,00
128	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Pembandingan	217.513.902,00
129	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur/Test Alat Kepribadian	899.722,36
130	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Anak Timbangan/Biara	2.500.000,00
131	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Takaran Lainnya	2.310.000,00
132	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Universal Tester	70.828.493,00
133	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	990.781.565,00
134	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.708.940.570,00
135	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.321.215,00
136	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	37.102.557.634,94
137	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	67.732.400,00
138	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	3.191.472.476,81
139	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	322.652.113,00
140	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	2.394.117.573,18
141	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	1.034.855.513,32
142	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	2.439.477.827,45
143	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya	111.567.925,00
144	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mainframe	3.536.799.868,00
145	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer- Peralatan Mini Computer	118.963.392,00
146	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Cavitation Tunnel	13.287.913,00
147	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-MOB	2.125.000,00
148	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Electrical Workshop	33.916.064,00
149	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Pemesinan:Model Ship Workshop	8.800.348,00
150	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Umum	9.110.691,00
151	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Olahraga Lainnya	80.904.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
152	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga- Peralatan Permainan	151.497.940,00
153	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Feeder	25.764.881,00
154	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena HF/SW	20.720.716,00
155	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena MF/MW	26.437.749,00
156	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena Penerima VHF	60.732.253,00
157	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena SHF/Parabola	105.684.378,00
158	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena UHF	22.260.285,00
159	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Antena VHF/FM	25.756.665,00
160	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Microwave FPU	2.312.500,00
161	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar MF/MW	75.568.567,00
162	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar SHF	2.897.502,00
163	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Peralatan Pemancar VHF/FM	27.441.667,00
164	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Program Input Equipment	90.392.000,00
165	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Sumber Tenaga	3.793.336.832,00
166	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher Antena	28.072.917,00
167	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar- Switcher/Menara Antena	66.115.064,00
168	Akumulasi Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory-Peralatan Hidrologi	175.000.000,00
169	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	1.634.800.689,00
170	Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar	4.874.530.255,15
171	Akumulasi Penyusutan Sumur-Sumur Pemboran	1.696.126,00
172	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	35.202.252,00
173	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	365.655.781,00
174	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Batuan/Geologi	83.371.082,00
175	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Biologi Perairan	274.352.126,10
176	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Farmasi	117.370.372,00
177	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Film	175.779.866,00
178	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Fisika	39.857.350,00
179	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Geofisika	120.468.044,00
180	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hematologi	500.307.576,00
181	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Hidrokimia	289.706.048,00
182	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Immunologi	673.384.030,00
183	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia	1.016.842.706,00
184	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	85.521.018,00
185	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lain	3.422.842.281,10
186	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	178.421.514,00
187	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	318.953.357,00
188	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Makanan	234.058.889,00
189	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	24.895.264,00
190	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	96.984.319,00
191	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Mikrobiologi	1.041.534.617,00
192	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Model Hidrolika	43.169.270,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
193	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Oseanografi	23.085.938,00
194	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pasir	26.342.708,00
195	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Patologi	1.558.345.183,10
196	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Pertanian	3.052.468.700,00
197	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	30.528.266,00
198	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	21.580.000,00
199	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	9.635.417,00
200	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	233.375.000,00
201	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	11.838.288,38
202	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Tambang	5.778.124,00
203	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Keramik	12.000.000,00
204	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Uji Tekstil	650.000,00
205	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Umum	11.490.876,00
206	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-General Laboratory Tool	155.797.967,00
207	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Glassware Plastic/Utensils	223.601.984,00
208	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Instrument Probe/Sensor	13.750.000,00
209	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir-Laboratory Safety Equipment	412.610.000,00
210	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	334.585.897,00
211	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Laboratorium Kearsipan	16.174.718,00
212	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	8.587.734,00
213	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Umum	9.728.796.257,92
Jumlah		413.237.817.002,68

Tabel 4.150
Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD
per 31 Desember 2021

No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	549.121.647,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.056.479.643,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.415.779.910,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.057.914.005,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	9.374.674.742,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	676.198.103,00
7	Dinas Kesehatan	33.070.294.710,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	385.041.517,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.065.376.538,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	7.055.420.911,00
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.783.482.895,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	565.265.974,00



No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	561.986.230,00
14	Dinas Pendidikan	110.321.715.715,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.223.195.186,00
16	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.777.130.345,00
17	Dinas Perhubungan	3.746.468.479,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.237.829.415,00
19	Dinas Pertanian	6.581.512.631,00
20	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9.505.700.827,00
21	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	1.222.817.102,00
22	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	1.543.402.902,00
23	Inspektorat	271.056.343,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	536.740.788,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	907.305.449,00
26	Kecamatan Angkona	1.153.055.652,00
27	Kecamatan Burau	1.220.765.334,00
28	Kecamatan Kalaena	1.168.569.531,00
29	Kecamatan Malili	1.030.101.643,00
30	Kecamatan Mangkutana	773.066.044,00
31	Kecamatan Nuha	593.869.708,00
32	Kecamatan Tomoni	962.924.321,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	1.052.856.795,00
34	Kecamatan Towuti	1.615.633.185,00
35	Kecamatan Wasuponda	894.861.527,00
36	Kecamatan Wotu	815.814.067,00
37	RSUD I Lagaligo	13.067.507.301,00
38	Sekretariat Daerah	21.047.532.174,00
39	Sekretariat DPRD	12.174.837.562,00
Jumlah		274.063.306.851,00

Tabel 4.151
Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	3.557.252.022,00
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	397.361,00
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun	8.620.591.974,00
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	1.774.337.942,00
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	5.585.321.303,00
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	759.593.875,00
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	12.277.940.968,00
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	92.723.808,00
9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	192.954.182,00
10	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	313.531.299,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
11	Akumulasi Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	686.721.828,00
12	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Fasilitas Umum	3.364.556.145,00
13	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Garasi/Pool	594.583.314,00
14	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Instalasi	1.973.116.169,00
15	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	65.691.533.363,00
16	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Laboratorium	2.049.932.461,00
17	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pabrik	1.230.424.971,00
18	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Perpustakaan	9.972.980.891,00
19	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	17.175.391.197,00
20	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1.741.833.089,00
21	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.879.452.243,00
22	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Olahraga	3.494.732.198,00
23	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	71.784.820.258,00
24	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	3.286.308.036,00
25	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	92.426.115,00
26	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	511.188.363,00
27	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gudang	5.171.493.481,00
28	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Industri	14.392.848,00
29	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan	24.180.615.993,00
30	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Parkir	6.171.250,00
31	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Pengujian Kelaikan	1.588.424.781,00
32	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja- Taman	212.380.975,00
33	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi	1.687.961.500,00
34	Akumulasi Penyusutan Tugu Tanda Batas-Pagar	20.497.220.648,00
Jumlah		274.063.306.851,00

Tabel 4.152
Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
per 31 Desember 2021

No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.744.180,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.773.988.759,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.093.928.855,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	22.768.389,00



No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	4.848.650.558,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.963.262,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.096.160,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	547.817.238,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	147.009.089,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.072.002.449.507,57
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	241.821.436,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.840.225,00
13	Dinas Pendidikan	1.052.921.704,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14.137.009,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	241.541.034,00
16	Dinas Perhubungan	506.618.584,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	188.045.116,00
18	Dinas Pertanian	580.951.808,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	162.836.064.728,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	9.809.795,00
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	86.171.813,00
22	Dinas Kesehatan	1.638.601.304,00
23	Inspektorat	52.582.216,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9.804.393,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.248.817,00
26	Kecamatan Angkona	14.799.497,00
27	Kecamatan Burau	3.977.260,00
28	Kecamatan Kalaena	2.346.286,00
29	Kecamatan Malili	67.669.545,00
30	Kecamatan Mangkutana	3.412.362,00
31	Kecamatan Nuha	7.296.432,00
32	Kecamatan Tomoni	199.088.335,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	15.236.666,00
34	Kecamatan Towuti	1.702.083,00
35	Kecamatan Wasuponda	3.216.667,00
36	Kecamatan Wotu	4.078.229,00
37	RSUD I Lagaligo	3.110.630.871,00
38	Sekretariat Daerah	939.212.043,00
39	Sekretariat DPRD	713.892.108,00
Jumlah		1.254.085.134.363,57

Tabel 4.153
Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	549.162.475,00
2	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	464.895.624,00
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	3.284.240,00
4	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	300.525.191,00
5	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	12.551.285,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
6	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi	12.851.897.191,00
7	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembawa Irigasi	7.428.669.357,00
8	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi	8.542.359.255,00
9	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengaman Irigasi	6.765.616.871,00
10	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pengambilan Irigasi	12.316.550.860,00
11	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pelengkap Air Kotor	130.597.391,00
12	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembawa Air Kotor	22.378.835,00
13	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor- Bangunan Pengaman Air Kotor	7.483.264,00
14	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pelengkap Pasang Surut	4.331.689,00
15	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Pengaman Pasang Surut	479.159.800,00
16	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Bangunan Waduk Pasang Surut	45.018.467,00
17	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	285.784.968,00
18	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	6.166.140.947,45
19	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	173.463.290.081,07
20	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	34.162.312.345,13
21	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	64.588.040,00
22	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai	108.706.957,00
23	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder-Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	57.900.000,00
24	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	42.149.625,00
25	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	3.858.282.862,00
26	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	65.459.833,00
27	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah- Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	267.455.678,00
28	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.359.024.850,00
29	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	2.479.822,00
30	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dalam	2.152.750,00
31	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Tanah Dangkal	3.457.060,00
32	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor- Instalasi Air Buangan Domestik	886.392.627,00
33	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Distribusi	170.162.130,00
34	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Gardu Listrik Induk	133.815.138,00
35	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik- Instalasi Pusat Pengatur Listrik	770.118.165,00
36	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Gas Lainnya	32.958.124,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Harga Perolehan
37	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas-Instalasi Jaringan Pipa Gas	665.685.022,00
38	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	265.160.751,00
39	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	4.950.580,00
40	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	61.696.905,00
41	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	1.358.790.058,00
42	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.377.398.868,00
43	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman- Instalasi Pengaman Penangkal Petir	16.818.750,00
44	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah-Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	128.768.355,00
45	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan- Instalasi Pertahanan di Darat	17.298.756,00
46	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Desa	852.566.038.801,35
47	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten	20.898.211.733,58
48	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Khusus	51.343.583.899,99
49	Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Lainnya	62.551.520,00
50	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Cabang Distribusi	4.775.683.854,00
51	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Induk Distribusi	10.030.787,00
52	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Pembawa	2.613.999.820,00
53	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum- Jaringan Sambungan ke Rumah	1.744.864.139,00
54	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Transmisi	839.699.696,00
55	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa	33.002.000.145,00
56	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Khusus	639.705.357,00
57	Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan Penyeberangan	8.865.082.768,00
Jumlah		1.254.085.134.363,57

Tabel 4.154
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per SKPD
per 31 Desember 2021

No	SKPD	Akumulasi per 31 Desember 2021
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	186.010.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	9.500.000,00
3	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	623.441.584,00
4	Dinas Pendidikan	680.020.321,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	561.536.667,00
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	172.101.344,00
7	Sekretariat Daerah	113.640.000,00
Jumlah		2.346.249.916,00

Tabel 4.155
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi-Aset Tetap Dalam Renovasi	1.102.801.376,00
2	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	1.243.448.540,00
Jumlah		2.346.249.916,00



4.3.1.3.4 Aset Lainnya

Nilai aset lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp43.137.703.695,54 dan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp148.182.016.824,55, terdapat penurunan Aset Lainnya sebesar (Rp105.044.313.129,01) atau (70,89%).

Aset Lainnya Tahun 2021 terdiri dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.622.021.100,00, Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp2.112.826.896,00), Aset Lain-lain sebesar Rp152.171.442.777,52, Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp110.542.933.285,98) sebagai berikut:

Tabel 4.156
Rekap Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Aset Tidak Berwujud	3.622.021.100,00	3.295.991.100,00
2	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.112.826.896,00)	(1.496.871.096,32)
3	Aset Lain - Lainnya	152.171.442.777,52	146.382.896.820,87
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(110.542.933.285,98)	0,00
Jumlah		43.137.703.695,54	148.182.016.824,55

Tabel 4.157
Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
1	Sekretariat DPRD	39.380.000,00	Updating Digital Arsip
2	Dinas Perhubungan	18.617.500,00	Aplikasi Blue
3	Dinas Perhubungan	58.107.500,00	Aplikasi Retribusi dan Denda
4	Dinas Kesehatan	14.000.000,00	Software Aplikasi Sistem Pelaporan Imunisasi
5	Dinas Kesehatan	14.000.000,00	Software Aplikasi Surpelance
6	Puskesmas wawondula	6.000.000,00	Software Antrian Bcom Versi Windows Dan Android Unlimited
7	Puskesmas mangkutana	24.999.700,00	Aplikasi Antrian Online
8	Puskesmas malili	36.036.000,00	Aplikasi Antrian
9	Puskesmas wasuponda	4.950.000,00	Software Antrian
10	Puskesmas wasuponda	3.432.000,00	Software IKM
11	Puskesmas wasuponda	1.082.400,00	Software Survey Monitor
12	RSUD I Lagaligo	197.800.000,00	Sambalu-BLUD
13	RSUD I Lagaligo	229.515.000,00	Aplikasi SIM RS
14	RSUD I Lagaligo	100.000.000,00	Treasury Management System (TMS)
15	RSUD I Lagaligo	75.000.000,00	Aplikasi Sistem Akuntansi BLUD RSUD I Lagaligo
16	Dinas Pendidikan	194.700.000,00	Aplikasi Beasiswa On Line
17	Dinas Pendidikan	192.500.000,00	Aplikasi BOP TK
18	Dinas Pendidikan	139.975.000,00	Aplikasi CBT (Aplikasi Ujian Nasional)
19	Dinas Pendidikan	193.050.000,00	Aplikasi Pelaporan Kinerja Dan Monitoring
20	Dinas Pendidikan	194.700.000,00	Sistem Aplikasi Proyek



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
21	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
22	Dinas Pendidikan	7.055.000,00	Aplikasi E-Learning
23	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
24	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
25	Dinas Pendidikan	2.000.000,00	Aplikasi E-Learning
26	Dinas Pendidikan	2.000.000,00	Aplikasi E-Learning
27	Dinas Pendidikan	2.000.000,00	Aplikasi E-Learning
28	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
29	Dinas Pendidikan	1.950.000,00	Aplikasi E-Learning
30	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
31	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
32	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
33	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
34	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
35	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
36	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
37	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
38	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
39	Dinas Pendidikan	1.800.000,00	Aplikasi E-Learning
40	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
41	Dinas Pendidikan	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
42	SMP Negeri 3 Angkona	2.000.000,00	Pemasangan Website
43	SMP Negeri 1 Tomoni	2.500.000,00	Aplikasi E-Learning
44	SMP Negeri 1 Towuti	1.500.000,00	Pemasangan Website
45	SMP Negeri 3 Towuti	1.500.000,00	Pemasangan Website
46	SDN No. 104 Jalajja	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
47	SDN No. 106 Manangalu	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
48	SDN No .107 Lagego	6.500.000,00	Pemasangan Website
49	SDN No .108 Bonepute	3.870.000,00	Aplikasi E-Learning
50	SDN No.108 bonepute	555.000,00	Pemasangan Website
51	SDN No.127 Buanipa	1.560.000,00	Pemasangan Website
52	SDN No.135 Binano	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
53	SDN No 170 Mulyasri	6.500.000,00	Pemasangan Website
54	SDN No.172 Tomoni	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
55	SDN No.172 Tomoni	550.000,00	Pemasangan Website
56	SDN No .176 Kaya,a	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
57	SDN No. 148 Tawibaru	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
58	SDN No. 148 Tawibaru	550.000,00	Pemasangan Website
59	SDN No. 158 Balai Kembang	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
60	SDN No.153 Taripa	5.000.000,00	Aplikasi E-Learning
61	SDN No.156 Kalaena	6.000.000,00	Aplikasi E-Learning
62	SDN No.162 Limbomampongo	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning
63	SDN No.202 Angkona	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
64	SDN No.202 Angkona	550.000,00	Pemasangan Website
65	SDN No.206 Mantadulu	3.500.000,00	Aplikasi E-Learning



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
66	SDN No.209 Mantaipi	6.500.000,00	Pemasangan Website
67	SDN No.220 Cerekang	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
68	SDN No.220 Cerekang	550.000,00	Pemasangan Website
69	SDN No.221 Malili	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
70	SDN No.221 Malili	555.000,00	Pemasangan Website
71	SDN No.222 Batu Merah	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
72	SDN No.223 Balantang	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
73	SDN No.223 Balantang	555.000,00	Pemasangan Website
74	SDN No.224 Lampia	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
75	SDN No.224 Lampia	555.000,00	Pemasangan Website
76	SDN No.225 Karebbe	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
77	SDN No.226 Patande	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
78	SDN No.227 Puncak	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
79	SDN No.227 Puncak	555.000,00	Pemasangan Website
80	SDN No.228 Lagaroang	555.000,00	Aplikasi E-Learning
81	SDN No.228 Lagaroang	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
82	SDN No.234 Kore-Korea	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
83	SDN No.234 Kore-Korea	550.000,00	Aplikasi E-Learning
84	SDN No.236 Laoli	550.000,00	Pemasangan Website
85	SDN No.236 Laoli	6.500.000,00	Pemasangan Website
86	SDN No.239 Saluminanga	1.500.000,00	Pemasangan Website
87	SDN No.250 Wasponda	1.500.000,00	Aplikasi E-Learning
88	SDN No.247 Sorowako	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
89	SDN No.252 Nikkel	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
90	SDN No.256 Dongi	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
91	SDN No. 211 Tawakua	3.000.000,00	Aplikasi E-Learning
92	SDN No. 213 Rinjani	6.500.000,00	Aplikasi E-Learning
93	SDN No. 241 Labose	1.700.000,00	Aplikasi E-Learning
94	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.000.000,00	Website
95	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.000.000,00	Software Cont Off-Line Computer
96	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00	Software Antrian
97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	45.500.000,00	Sistem WEB Arsip
98	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.000.000,00	Software Data Kependudukan
99	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	131.500.000,00	Perangkat Lunak Sistem Operasi
100	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	40.700.000,00	Perangkat Lunak Sistem Operasi
101	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	237.600.000,00	Perangkat Lunak Sistem Operasi
102	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	195.000.000,00	Software Pajak untuk PBB-P2
103	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	195.000.000,00	SIM Perizinan
104	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	24.750.000,00	Website
105	Kantor Satuan Polisi Pamong	167.200.000,00	Aplikasi Call center



No	SKPD	Nilai Perolehan	Keterangan
	Praja dan Pemadam Kebakaran		
106	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	179.832.000,00	
107	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	153.529.000,00	
108	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	105.000.000,00	
109	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	36.000.000,00	Aplikasi SIMPEG
Total		3.622.021.100,00	

Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp(2.112.826.896,00) dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(1.496.871.096,32), Koreksi tambah Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp96.616.666,68, Koreksi kurang Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp0,00 dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2021 sebesar Rp519.339.133,00.

Tabel 4.158
Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Nilai Amortisasi
1	Sekretariat DPRD	(18.377.333,00)
2	Dinas Perhubungan	(7.672.500,00)
3	Dinas Kesehatan	(38.542.308,00)
4	RSUD I Lagaligo	(348.084.250,00)
5	Dinas Pendidikan	(421.296.823,00)
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(17.883.333,00)
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(119.824.999,00)
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	(530.050.000,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(195.000.000,00)
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(15.262.500,00)
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(39.013.333,00)
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(361.819.517,00)
Jumlah		(2.112.826.896,00)

Tabel 4.159
Rincian Aset Lain-Lain per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	Nilai Perolehan
1	Sekretariat DPRD	2.416.280.558,00
2	Sekretariat Daerah	8.985.087.404,91
3	Inspektorat	527.457.108,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.127.841.100,00
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.116.517.500,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	108.900.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.600.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	861.508.682,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.924.400,00
10	Dinas Pendidikan	45.276.926.880,73
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	35.940.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	SKPD	Nilai Perolehan
12	Dinas Perhubungan	1.075.383.563,85
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	38.660.455,00
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.180.793.451,75
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.441.583.476,54
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.028.055.733,33
17	Dinas Kesehatan	16.048.507.581,37
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	8.039.019.654,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	24.682.598.408,00
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.345.666.738,83
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	377.644.990,00
22	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	31.230.000,00
23	RSUD I Lagaligo	5.031.934.934,76
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	307.791.580,00
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	246.445.000,00
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.000.000,33
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	38.950.000,00
28	Dinas Pertanian	16.907.157.467,12
29	Kecamatan Malili	647.439.000,00
30	Kecamatan Kalaena	91.090.000,00
31	Kecamatan Tomoni	287.600.000,00
32	Kecamatan Wasuponda	388.990.000,00
33	Kecamatan Angkona	218.835.000,00
34	Kecamatan Mangkutana	87.455.500,00
35	Kecamatan Tomoni Timur	105.117.000,00
36	Kecamatan Burau	444.621.500,00
37	Kecamatan Wotu	315.771.000,00
38	Kecamatan Nuha	277.047.680,00
39	Kecamatan Towuti	740.069.429,00
	Jumlah	152.171.442.777,52

Tabel 4.160
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per SKPD
Tahun Anggaran 2021

No	SKPD	Nilai Perolehan
1	Sekretariat DPRD	(2.354.137.501,00)
2	Sekretariat Daerah	(8.821.875.245,50)
3	Inspektorat	(507.005.872,00)
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(3.123.849.183,00)
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.089.798.348,00)
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(108.900.000,00)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(80.679.973,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(725.734.575,00)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(49.200.600,00)
10	Dinas Pendidikan	(43.550.015.356,79)
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	(35.940.000,00)
12	Dinas Perhubungan	(870.526.395,85)
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	(38.660.455,00)
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(1.051.757.251,00)



No	SKPD	Nilai Perolehan
15	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	(766.634.581,00)
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(908.726.639,00)
17	Dinas Kesehatan	(14.460.550.562,58)
18	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	(2.899.925.242,00)
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	(8.144.394.556,00)
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.659.363.314,00)
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	(329.869.197,00)
22	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(25.514.373,00)
23	RSUD I Lagaligo	(4.817.817.831,26)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(293.067.810,00)
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(238.878.333,00)
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(148.302.501,00)
27	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(38.950.000,00)
28	Dinas Pertanian	(7.959.246.989,00)
29	Kecamatan Malili	(600.873.686,00)
30	Kecamatan Kalaena	(89.590.000,00)
31	Kecamatan Tomoni	(285.384.980,00)
32	Kecamatan Wasuponda	(379.919.167,00)
33	Kecamatan Angkona	(218.046.111,00)
34	Kecamatan Mangkutana	(87.455.500,00)
35	Kecamatan Tomoni Timur	(99.063.083,00)
36	Kecamatan Burau	(386.826.389,00)
37	Kecamatan Wotu	(310.946.972,00)
38	Kecamatan Nuha	(276.097.680,00)
39	Kecamatan Towuti	(709.407.033,00)
	Jumlah	(110.542.933.285,98)

4.3.1 Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan utang yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang menjadi kewajiban dimasa yang akan datang. Sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur masing-masing sebesar Rp52.226.522.162,09 dan Rp42.841.649.073,41 yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.161
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2021	2020		
1	Kewajiban Jangka Pendek	52.226.522.162,09	42.841.649.073,41	9.384.873.088,68	21,91
	Jumlah	52.226.522.162,09	42.841.649.073,41	9.384.873.088,68	21,91



Rincian kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut.

4.3.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang diharapkan akan dibayar atau jatuh tempo dalam 12 bulan. Kewajiban jangka pendek pemerintah Kabupaten Luwu Timur per 31 Desember 2021 dan 2020 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.162
Kewajiban Jangka Pendek
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
per 31 Desember 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		2021	2020		
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	449.248.272,05	446.966.089,62	2.282.182,43	0,51
3	Utang Belanja	45.552.065.282,71	4.214.214.238,00	41.337.851.044,71	980,71
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.234.329.037,33	38.180.468.745,79	(31.946.139.708,46)	(83,67)
Jumlah		52.235.642.592,09	42.841.649.073,41	9.393.993.518,68	21,93

Penjelasan masing-masing kewajiban jangka pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Tahun 2021 sebesar Rp.0,00.

Terdapat utang PFK atas potongan pajak SP2D yang belum terbuku pada Bank RKUD Pemerintah kabupaten Luwu Timur sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.701.782.009,00 yang disebabkan jumlah SP2D yang diterbitkan oleh Kuasa BUD sangat banyak sehingga Bank tidak sempat melakukan pemindahbukuan ke rekening PFK serta melimpahkan potongan SP2D ke Kas Negara.

Adapun rincian utang PFK tersebut sebagai berikut:

1. Terdapat Utang PFK atas potongan 5 SP2D Tahun 2021 yang *outstanding* ke Tahun 2022 pada PT. BNI Cabang Pembantu Malili sebesar Rp11.296.543,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPN sebesar Rp.9055.635,00
 - b. PPh 22 sebesar Rp1.086.072,00
 - c. PPh Ps 4 sebesar Rp859.564,00
 - d. PPh 23 sebesar Rp295.272,00
2. Terdapat Utang PFK atas potongan 275 SP2D Tahun 2021 yang *outstanding* ke Tahun 2022 pada PT. Bank Sulselbar Cabang Malili sebesar Rp4.690.485.466,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPN sebesar Rp3.774.582.786,00
 - b. PPh 22 sebesar Rp214.977.031,00



c. PPh Ps 4 sebesar Rp698.225.667,00

d. PPh 21 sebesar Rp2.700.000,00

Atas seluruh utang PFK tersebut telah disetorkan ke Kas Negara oleh PT. BNI Cabang Pembantu Malili dan PT. Bank Sulselbar Cabang Malili pada Bulan Januari 2022.

2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp449.248.272,05 sesuai **Lampiran** terdiri dari Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp36.501.304,17 sesuai **Lampiran 26**, RSUD Ilaga Ligo sebesar Rp20.625.000,00 **Lampiran 28**, Dinas Kelautan dan Perikanan Sebesar Rp30.916.666,67 **Lampiran 27** dan sebesar Rp361.205.301,21 sesuai **Lampiran 29** merupakan Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Reklame Di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan beban yang masih harus dibayar ditahun berikutnya sebesar Rp45.552.065.282,71 sesuai **Lampiran** yang terdiri dari Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp43.791.058.167,00 sesuai **Lampiran 31** dan Utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.449.158.153,00 sesuai **Lampiran 30** serta Utang Belanja Hibah sebesar Rp311.848.962,71 sesuai **Lampiran 32**.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang atas pelaksanaan kegiatan pada SKPD yang belum dibayar sepenuhnya dan diharapkan dibayar tahun berikutnya sebesar Rp6.234.329.037,34 dapat dilihat pada **Lampiran 34**, terdiri dari Utang Pengadaan Aset Tetap. Nilai tersebut adalah utang atas pelaksanaan kegiatan dihitung berdasarkan selisih antara kemajuan fisik dan keuangan Utang Jangka Pendek lainnya.

4.4 Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Laporan Operasional

4.4.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp1.604.543.707.220,78 yang terdiri dari:

Tabel 4.163
Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020



1	Pendapatan Asli Daerah-LO	322.956.691.722,78	325.664.017.271,00
2	Pendapatan Transfer-LO	1.165.964.267.318,00	1.048.928.291.506,20
3	Lain-lain Pendapatan yang sah-LO	168.114.344.405,00	147.316.763.621,00
Jumlah		1.657.035.303.445,78	1.521.909.072.398,20

4.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah -LO

Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp322.956.691.722,78 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.164
Pendapatan Asli Daerah-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	171.133.909.740,49	193.247.251.553,57
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	4.290.219.766,91	4.458.448.269,67
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.896.489.793,00	23.835.212.109,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	124.636.072.422,38	104.123.105.338,76
Jumlah		322.956.691.722,78	325.664.017.271,00

4.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp171.133.909.740,49. Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan pendapatan tahun berjalan dan hak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang.

Tabel 4.165
Pendapatan Pajak Daerah-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Jenis Pajak	Tahun	
		2021	2020
1	Pajak Hotel-LO	806.564.464,00	396.139.445,00
2	Pajak Restoran-LO	7.804.354.190,00	5.874.118.250,60
3	Pajak Hiburan-LO	12.900.000,00	16.465.000,00
4	Pajak Reklame-LO	1.431.234.479,49	1.039.487.043,97
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	47.943.840.993,00	52.714.217.397,00
6	Pajak Air Tanah-LO	21.062.279,00	20.024.123,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	105.284.910.041,00	126.194.034.127,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan-LO	4.548.188.823,00	4.506.112.802,00



9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	3.280.854.471,00	2.486.653.365,00
Jumlah		171.133.909.740,49	193.247.251.553,57

4.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2020 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp4.290.219.766,91 Rincian jumlah Retribusi Daerah yang telah disetorkan ke kas daerah selama Tahun Anggaran 2021 dan hak pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.166
Pendapatan Retribusi Daerah-LO
Tahun Anggaran 2021 Dan 2020

No.	JenisRetribusi	Tahun	
		2021	2020
1	Retribusi Jasa Umum-LO	984.810.600,00	921.333.750,00
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	22.502.000,00	24.795.000,00
1.2	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum-LO	37.813.000,00	0,00
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	179.175.500,00	163.161.750,00
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	81.730.000,00	151.567.000,00
1.5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	602.450.000,00	581.810.000,00
1.6	Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO	61.140.100,00	0,00
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	871.409.941,41	893.411.183,58
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	404.596.441,41	345.437.183,58
2.2	Retribusi Tempat PelelanganL-O	1.000.000,00	3.000.000,00
2.3	Retribusi Terminal-LO	63.313.500,00	77.583.000,00
2.4	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	26.780.000,00	31.440.000,00
2.5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	96.252.000,00	46.885.000,00
2.6	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	269.388.000,00	378.536.000,00
2.7	Retribusi Kios terminal-LO	10.080.000,00	10.530.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	2.433.999.225,50	2.643.703.336,09
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-LO	2.433.219.225,50	2.641.783.336,09
3.2	Retribusi Izin Trayek-LO	780.000,00	1.920.000,00
Jumlah		4.290.219.766,91	4.458.448.269,67

4.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp22.896.489.793.00 yang merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan tahun berjalan berupa deviden atas penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp22.764.081.187.00 dan atas Penyertaan Modal kepada BUMD atas nama PT. Bumi Timur Mineral sebesar Rp132.408.606,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 4.167
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2021	2020
1	Penerimaan dari Bank Sulselbar-LO	22.764.081.187,00	23.835.212.109,00
2	PDAM-LO	0	0
3	BUMD-LO	132.408.606,00	0
Jumlah		22.896.489.793,00	23.835.212.109,00

4.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp124.636.072.422,38. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 4.168
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2021	2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LO	343.367.283,00	466.997.625,00
1.1	Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai-LO	0	0
1.2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua-LO	109.765.530,00	35.377.700,00
1.3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat-LO	152.870.600,00	431.619.925,00
1.4	Penjualan Bahan-bahan Bekas bangunan-LO	75.331.153,00	0
1.5	Penjualan Hasil Pelepasan Hak atas Tanah-LO	5.400.000,00	0
2	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	3.933.107.507,03	0
3	Jasa Giro-LO	3.707.492.586,04	3.091.350.369,68
4	Penerimaan Bunga Deposito-LO	0	0
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)-LO	0	0
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.731.847.474,99	506.233.163,93
6.1	Bidang Pendidikan-LO	25.272.435,00	0
6.2	Bidang Kesehatan-LO	63.924.799,20	35.333.939,58
6.3	Bidang Pekerjaan Umum-LO	1.602.968.073,79	469.582.224,35
6.4	Bidang Penataan Ruang-LO	0	0
6.5	Bidang Perdagangan-LO	0	1.317.000,00
6.6	Bidang Pertanian-LO	23.063.193,00	0



6.7	Bidang Perumahan Rakyat-LO	16.618.974,00	0
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	14.771.059,32	8.547.815,40
7.1	Pendapatan Denda PBB-P2-LO	14.771.059,32	8.547.815,40
8	Pendapatan dari Pengembalian-LO	215.989.265,00	1.071.835.131,03
8.1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	37.294.315,00	405.124.445,00
8.2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	178.694.950,00	341.103.685,00
8.3	Pendapatan dari Pengembalian Belanja Modal-LO	0	197.044.412,03
8.4	Pendapatan dari Pengembalian LS-LO	0	128.562.589,00
9	Pendapatan dari BLUD-LO	109.901.333.843,00	75.701.960.805,00
10	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	4.536.290.680,00	4.384.556.900,00
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	1.417.000,00	0
12	Lain-lain PAD yang Sah-LO	250.455.724,00	1.463.801.430,72
13	Pendapatan Lain-lain yang sah BLUD-LO	0	288.352.639,00
14	Pendapatan Jaminan Kesehatan Nasional (Non-JKN)-LO	0	17.139.469.459,00
Jumlah		124.636.072.422,38	104.123.105.338,76

4.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan Transfer-LO merupakan pendapatan yang telah diterima pada Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan yang akan diterima pada tahun mendatang sebesar Rp1.113.472.671.093,00. Pendapatan Transfer merupakan pos untuk menampung penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Untuk Tahun Anggaran 2021 pendapatan transfer terdiri dari:

Tabel 4.169
Pendapatan Transfer-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	JenisPendapatan	Tahun	
		2021	2020
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	995.502.896.756,00	756.635.685.958,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya-LO	0	115.448.707.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	170.461.370.562,00	152.699.809.220,20
4	BantuanKeuangan-LO	0	24.144.089.328,00
Jumlah		1.165.964.267.318,00	1.048.928.291.506,20



4.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO berasal dari Dana Perimbangan untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp995.502.896.756,00 yang merupakan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 4.170
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	JenisPendapatan	Tahun	
		2021	2020
1	Dana Bagi Hasil Pajak-LO	63.028.686.383,00	21.928.217.241,00
1.1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO	47.104.198.983,00	7.992.029.800,00
1.2	Bagi Hasil PPH 21 Orang Pribadi-LO	15.604.527.900,00	13.555.340.643,00
1.3	Bagi Hasil PPh Pasal 25/29-LO	319.959.500,00	380.846.798,00
2	Dana Bagi Hasil SDA-LO	116.822.075.156,00	72.901.850.740,00
2.1	Sumber Daya Hutan-LO	388.551.285,00	122.920.300,00
2.2	Iuran tetap (Land Rent)-LO	3.701.866.603,00	2.655.657.105,00
2.3	Iuran Eksploitasi (Royalti)-LO	110.150.593.404,00	69.162.220.077,00
2.4	Hasil Perikanan-LO	1.186.991.247,00	784.599.000,00
2.5	Gas Bumi 30%-LO	1.195.798.568,00	4.741.000,00
2.6	Gas Bumi 0.5%-LO	0,00	0,00
2.7	Minyak Bumi 15%-LO	0,00	0,00
2.8	Minyak Bumi 0.5%-LO	0,00	8.958,00
2.9	Cukai Tembakau	198.274.049,00	171.704.300,00
3	Dana Alokasi Umum-LO	502.393.009.000,00	508.456.665.000,00
4	Dana Alokasi Khusus-LO	195.995.481.771,00	153.348.952.977,00
5	Dana Desa-LO	117.263.644.446,00	0,00
Jumlah		995.502.896.756,00	756.635.685.958,00

4.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya –LO sebesar Rp117.263.644.446,00 merupakan pendapatan dana penyesuaian berupa Dana Alokasi Desa (ADD-APBN) yang diterima Tahun 2021 dan penganggarannya pindah ke Pendapatan Transfer Pusat pada Dana Perimbangan.

Adapun rincian pendapatan transfer Pemerintah Pusat – Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 4.171
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO
TahunAnggaran 2021dan 2020

No.	JenisPendapatan	Tahun	
		2021	2020
A.	Dana Penyesuaian-LO	0	115.448.707.000,00
1.	Alokasi Dana Desa APBN-LO	0	115.448.707.000,00
Jumlah		0	115.448.707.000,00



4.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Provinsi- LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2021 sebesar Rp170.461.370.562,00 yang terdiri dari Penerimaan Dana Bagi Hasil yang diterima tahun 2021 sebesar Rp165.894.440.562,00, Bantuan Keuangan kepada PKK sebesar Rp150.000.000.00 dan Bantuan Keuangan Kesehatan Gratis sebesar Rp4.416.930.000,00 merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Bantuan keuangan dan Pendapatan Bantuan Keuangan Kesehatan Gratis. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.172
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2021	2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor-LO	14.651.625.225,00	9.639.569.493,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	12.548.857.122,00	6.430.488.881,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	34.614.498.530,00	8.294.920.706,00
4	Pajak Air Permukaan-LO	87.933.071.965,00	66.537.372.883,00
5	Pajak Rokok-LO	16.146.387.720,00	15.664.946.468,20
6	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor-LO	0	3.673.397.813,00
7	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	0	2.542.550.512,00
8	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan-LO Bermotor-LO	0	7.970.220.043,00
9	Piutang Pajak Air Permukaan -LO	0	17.804.523.986,00
10	Piutang Pajak Rokok-LO	0	3.006.586.435,00
11	Bantuan Keuangan-LO	150.000.000,00	24.144.089.328,00
12	Pendapatan Dana Kesehatan Gratis-LO	4.416.930.000,00	11.135.232.000,00
Jumlah		170.461.370.562,00	176.843.898.548,20

4.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO sebesar Rp168.114.344.405,00 merupakan pendapatan dana Hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dari Organisasi Badan/Lembaga lainnya dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan tahun 2021. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.173
Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO
Tahun Anggaran 2021 Dan 2020

No.	Jenis Pendapatan	Tahun	
		2021	2020
A	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	106.521.105.106,00	102.531.352.576,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Hibah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (Desa Solo) sesuai BAST Nomor : 637/M-DAG/BAST/11/2021 – LO	6.099.845.000,00	0
2	Hibah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (Desa Solo) sesuai BAST Nomor : 635/M-DAG/BAST/11/2021 – LO	5.299.756.872,00	0
3	Hibah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (Desa Taripa) sesuai BAST Nomor : 641/M-DAG/BAST/11/2021 – LO	3.660.472.574,00	0
4	Hibah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berupa Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen (Desa Timampu) sesuai BAST Nomor : 639/M-DAG/BAST/11/2021 – LO	6.275.623.438,00	0
5	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Dirjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulsel) berupa Jalan Kabupaten Lain-lain sesuai BAST Nomor : PS.04.03-Bb13/PJN.WIL.II/1211 – LO	32.985.584.980,00	0
6	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bangunan 6 RKB) berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sesuai BAST Nomor : 919/BA/DC/2021– LO	1.283.573.500,00	0
7	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Bangunan 3 RKB) berupa Bangunan Gedung Pendidikan Permanen sesuai BAST Nomor : 919/BA/DC/2021– LO	700.096.185,00	0
8	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen sesuai BAST Nomor : 919/BA/DC/2021– LO	286.340.740,00	0
9	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Taman Permanen sesuai BAST Nomor : 919/BA/DC/2021– LO	74.762.000,00	0
10	Hibah pada Hibah pada Hibah pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa Bngunan Gedung Perpustakaan Permanen sesuai BAST Nomor : 919/BA/DC/2021– LO	305.110.175,00	0
11	Hibah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Kementerian PU dan PR sesuai BAST nomor 14/BA/DC/2016 berupa gedung dan bangunan untuk rumah susun – LO	0	33.943.204.800,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12	Hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan sesuai BAST nomor PL.301/11/6/DJPL/2019 berupa Kapal Boat untuk kegiatan pengangkutan orang dan barang di Danau – LO	0	2.342.817.469,00
13	Hibah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari HIBAH DIRJEN LINJAMSOS RI sesuai BAST nomor 122/LJS.JSK/PL.03-10/2019 berupa PC Komputer untuk kegiatan operasional Kantor – LO	0	10.350.000,00
14	Hibah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari HIBAH DIRJEN LINJAMSOS RI sesuai BAST nomor 122/LJS.JSK/PL.03-10/2019 berupa PC Komputer untuk kegiatan operasional Kantor – LO	0	10.350.000,00
15	Hibah pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari HIBAH DIRJEN LINJAMSOS RI sesuai BAST nomor 122/LJS.JSK/PL.03-10/2019 berupa Tablet PC untuk kegiatan operasional Kantor – LO	0	3.494.000,00
16	Hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan sesuai BAST nomor 782/BAST/PSAP/XII/2008 berupa Mini Bus untuk kegiatan pengangkutan untuk Anak Sekolah – LO	0	229.500.700,00
17	Hibah pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan sesuai BAST nomor 782/BAST/PSAP/XII/2008 berupa Mini Bus untuk kegiatan pengangkutan untuk Anak Sekolah – LO	0	229.500.700,00
18	Pendapatan Dana Bos-LO	39.916.172.000,00	40.163.511.580,00
19	Hibah Bahan Obat-obatan dari BKKBN untuk Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana –LO	0	939.878.700,00
20	Hibah Sanitasi/air limbah setempat dari Kementerian PU&PR – LO	3.366.000.000,00	3.270.000.000,00
21	Hibah Air Minum Perdesaan PDAM dari Kementerian PU&PR – LO	2.868.000.000,00	8.763.000.000,00
22	Hibah Air Minum Perkotaan dari Kementerian PU&PR LO	1.911.329.000,00	3.167.233.649,00
23	Penerimaan Dana Hibah Retsi (Pertanian) - LO	1.488.438.642,00	9.458.510.978,00
B	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	44.012.918.410,00	44.785.411.045,00
1	Hibah pada Kecamatan Towuti dari PT. Putra Mahalona berupa Mobil Jenazah sesuai BAST Nomor 147.54/18/NPHD /Pem-LT/XII/2021 – LO	177.000.000,00	0
2	Hibah pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dari Yayasan Baladul Amin berupa Bangunan Tempat Ibadah (Desa Watangpanua Kec. Angkona) sesuai BAST Nomor : 147.54/01/NPHD/Pem-LT/X/2021 – LO	247.370.000,00	0
3	Hibah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari PT. MARS berupa Peralatan/Mesin (Lampu) sebanyak 17 Item sesuai BAST Nomor : 145/MSI/XII/2021 – LO	105.108.900,00	0
4	Hibah pada Puskesmas Mahalona dari PT. Putra Mahalona berupa Mobil Jenazah sesuai BAST Nomor 147.54/18/NPHD /Pem-LT/XII/2021 – LO	200.000.000,00	0



5	Hibah pada Kecamatan Wotu dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
6	Hibah pada Kecamatan Wotu dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
7	Hibah pada Kecamatan Tomoni dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
8	Hibah pada Kecamatan Towuti dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
9	Hibah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
10	Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
11	Hibah pada Dinas Lingkungan Hidup dari PT. Bank Sulselbar sesuai BAST nomor SR/388/B/MLL/VIII/2016 berupa kendaraan bermotor khusus lainnya untuk kegiatan pengangkutan sampah – LO	0	28.340.000,00
12	Penerimaan Dana Hibah Scrap Tahun 2021 PT. Vale Indonesia. Tbk – LO	27.992.129.014,00	29.769.912.038,00
13	Penerimaan Dana Hibah Listrik Tahun 2021 PT. Vale Indonesia. Tbk – LO	15.291.310.496,00	13.174.736.944,00
14	Penerimaan Hibah-LO	0	1.642.382.063,00
C	Pendapatan Lainnya –LO	17.580.320.889,00	0,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan	17.580.320.889,00	0
Jumlah		168.114.344.405,00	147.316.763.621,00

4.4.2 Beban

Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.516.676.421.124,61 dan Rp1.420.009.047.727,38 merupakan beban yang terjadi pada saat peralihan hak dari pihak lain dan ke Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tanpa diikuti keluarnya kas saat terjadi pengeluaran kas dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi. Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.174
Rincian Beban Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Pegawai	447.694.552.992,00	407.834.611.653,00
2	Beban Barang dan Jasa	531.098.063.265,79	447.376.040.627,75
3	Beban Subsidi	199.095.000,00	0
4	Beban Hibah	58.493.665.942,44	94.120.005.655,79
5	Beban Bantuan Sosial	1.464.368.000,00	20.236.300.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	312.313.203,35	51.995.885,50
7	Beban Lain-lain	179.628.746,19	0,00
8	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.545.550.210,85	63.779.493.157,34
9	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.155.806.287,00	38.344.920.194,00
10	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	173.602.715.753,00	135.508.962.941,00
11	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	577.595.076,00	0
12	Beban Penyusutan Aset Lainnya	447.452.695,99	0
13	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	519.339.133,00	509.540.546,00
14	Beban Bagi Hasil	19.722.629.773,00	17.262.101.969,00
15	Beban Bantuan Keuangan	178.663.645.046,00	194.985.075.098,00
4.4.2.1 a	Jumlah	1.516.676.421.124,61	1.420.009.047.727,38

s

4.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban pegawai Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp447.694.552.992,00 dan Rp407.834.611.653,00 merupakan beban pengeluaran untuk belanja pegawai dan kewajiban pegawai yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban pegawai terdiri dari:

Tabel 4.175
Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
A	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	264.833.683.663,00	256.040.321.823,00
	Beban Gaji Pokok ASN	195.286.194.350,00	191.193.108.749,00
	Beban Tunjangan Keluarga ASN	19.732.319.307,00	18.198.970.396,00
	Beban Tunjangan Jabatan ASN	5.474.918.400,00	6.494.333.450,00
	Beban Tunjangan Fungsional ASN	17.056.798.463,00	14.562.013.000,00
	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	1.509.472.000,00	1.344.927.530,00
	Beban Tunjangan Beras ASN	12.109.173.928,00	9.881.724.298,00
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	469.454.354,00	652.398.819,00
	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.826.173,00	2.469.512,00
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	11.000.000.000,00	12.000.000.000,00
	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	663.550.229,00	460.398.831,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.528.976.459,00	1.249.977.238,00
B	Beban Tambahan Penghasilan ASN	95.992.929.946,00	88.814.890.256,00
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	90.317.944.885,00	82.740.823.656,00
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN	2.601.905.061,00	2.564.066.600,00
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	702.380.000,00	-
	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.370.700.000,00	3.510.000.000,00
C	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	70.352.054.130,00	50.827.732.924,00
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.666.787.944,00	4.196.444.320,00
	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	736.297.186,00	174.246.884,00
	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	45.785.776.000,00	45.073.791.720,00
	Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan (Tamsil) PNSD	15.427.410.000,00	1.383.250.000,00
	Beban Honorarium	2.556.803.000,00	-
	Beban Jasa Pengelolaan BMD	1.178.980.000,00	-
D	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.474.879.639,00	9.592.503.300,00
	Beban Uang Representasi DPRD	659.715.000,00	-
	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	59.626.000,00	-
	Beban Tunjangan Beras DPRD	83.238.000,00	-
	Beban Uang Paket DPRD	56.479.500,00	57.582.000,00
	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	956.586.750,00	-
	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	89.340.300,00	94.821.300,00
	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.247.900.000,00	3.780.000.000,00
	Beban Tunjangan Reses DPRD	1.293.600.000,00	913.500.000,00
	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	285.778.209,00	-
	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.142.515.880,00	2.106.000.000,00
	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	2.600.100.000,00	2.640.600.000,00
E	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	492.780.766,00	679.371.700,00
	Beban Gaji Pokok KDH/WKDH	36.300.000,00	-
	Beban Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	4.110.000,00	-
	Beban Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	65.340.000,00	-
	Beban Tunjangan Beras KDH/WKDH	3.476.160,00	-
	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	925.586,00	-
	Beban Pembulatan Gaji KDH/WKDH	960,00	-
	Beban Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH	2.872.440,00	-



	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	369.892.420,00	666.256.700,00
	Beban Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	9.863.200,00	13.115.000,00
F	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	488.422.848,00	758.266.650,00
	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	161.280.000,00	201.600.000,00
	Beban Dana Operasional Pimpinan KDH/WKDH	327.142.848,00	556.666.650,00
G	Beban Pegawai BOS	2.059.802.000,00	-
H	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO	-	44.450.000,00
I	Beban Uang Lembur PNS - LO	-	1.077.075.000,00
Jumlah		447.694.552.992,00	407.834.611.653,00

4.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp532.684.380.388,16 dan Rp447.376.040.627,75 merupakan beban pengeluaran untuk belanja barang dan jasa yang timbul dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban barang dan jasa terdiri dari:

Tabel 4.176
Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

No	Uraian	2021	2020
A	Beban Barang	67.537.291.781,71	75.159.329.235,88
	Beban Barang Pakai Habis	67.537.291.781,71	75.159.329.235,88
B	Beban Jasa	236.378.609.115,76	205.786.657.529,71
	Beban Jasa Kantor	158.257.112.587,44	135.553.287.204,67
	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	55.234.856.248,32	54.811.264.018,04
	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	5.672.284.815,00	5.406.187.695,00
	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.635.450.000,00	728.677.455,00
	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.997.866.087,00	2.194.329.600,00
	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	565.472.000,00	1.286.952.950,00
	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.701.946.000,00	2.981.945.000,00
	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.775.049.950,00	2.824.013.607,00
	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	538.571.428,00	0,00
C	Beban Pemeliharaan	21.936.339.803,45	23.087.628.568,63
	Beban Pemeliharaan Tanah	248.240.500,00	88.989.000,00
	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.490.017.411,13	6.374.183.480,73



	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.969.242.579,32	7.672.801.342,90
	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.218.839.313,00	8.109.854.725,00
	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	841.800.020,00
D	Beban Perjalanan Dinas	55.540.330.756,00	47.995.362.943,00
	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.540.330.756,00	47.995.362.943,00
E	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.359.521.673,45	30.262.900.000,00
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	18.536.569.000,00	30.262.900.000,00
	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	29.822.952.673,45	0,00
F	Beban Barang dan Jasa BOS	35.277.596.780,00	0,00
G	Beban Barang dan Jasa BLUD	66.068.373.355,42	57.138.661.340,30
H	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	5.391.051.010,23
I	Beban Honorarium PNS - LO	0,00	126.800.000,00
J	Beban Honorarium Non PNS - LO	0,00	147.500.000,00
K	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	2.279.875.000,00
L	Beban BMD di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	275.000,00
Jumlah		531.098.063.265,79	447.376.040.627,75

4.4.2.1.5.1 Beban Barang Pakai Habis

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp67.537.291.781,71 dan Rp118.706.881.104,41, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.177
Beban Barang Pakai Habis
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Bahan	12.491.337.172,73	10.010.131.512,27
1.1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.037.556.486,27	35.168.750,00
1.2	Bahan Kimia	2.681.180.891,17	1.054.142.979,33
1.3	Bahan Bakar dan Pelumas	1.278.690.825,00	1.825.111.468,00
1.4	Bahan Baku	166.840.000,00	0,00
1.5	Bahan/Bibit Tanaman	69.253.500,00	109.931.000,00
1.6	Isi Tabung Pemadam Kebakaran	26.398.000,00	26.406.000,00
1.7	Isi Tabung Gas	245.881.500,00	270.792.700,00
1.8	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	24.574.000,00	5.220.000,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.9	Bahan Lainnya	6.960.961.970,29	6.683.358.614,94
2	Beban Suku Cadang	5.801.606.923,99	8.000.983.939,79
2.1	Suku Cadang Alat Angkutan	192.552.331,00	3.179.495.041,00
2.2	Suku Cadang Alat Besar	312.765.000,00	0,00
2.3	Suku Cadang Alat Kedokteran	5.117.131.938,73	4.799.338.898,79
2.4	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	3.850.000,00	22.150.000,00
2.5	Suku Cadang Alat Bengkel	475.000,00	0,00
2.6	Suku Cadang Lainnya	174.832.654,26	0,00
3	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor	13.766.881.923,50	21.558.284.593,00
3.1	Alat Tulis Kantor	4.834.381.566,00	6.695.750.772,00
3.2	Kertas dan Cover	1.200.000,00	0,00
3.3	Bahan Cetak	6.548.663.462,50	3.674.796.306,00
3.4	Benda Pos	105.760.063,00	351.521.500,00
3.5	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	42.244.075,00	0,00
3.6	Bahan Komputer	18.695.000,00	0,00
3.7	Perabot Kantor	203.928.304,00	1.200.754.540,00
3.8	Alat Listrik	631.543.160,00	1.258.644.200,00
3.9	Perlengkapan Dinas	199.762.800,00	788.593.427,00
3.10	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	20.750.000,00	241.859.980,00
3.11	Suvenir/Cendera Mata	108.600.000,00	227.225.000,00
3.12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.051.353.493,00	7.119.138.868,00
4	Beban Obat-Obatan	15.719.803.757,49	15.232.105.645,82
4.1	Obat	15.247.029.984,06	15.232.105.645,82
4.2	Obat-Obatan Lainnya	472.773.773,43	0,00
5	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.313.389.572,00	5.391.051.010,23
5.1	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	3.313.389.572,00	5.391.051.010,23
6	Beban Natura dan Pakan	(22.382.535,00)	1.375.388.063,00
6.1	Natura	(22.382.535,00)	1.365.388.063,00
6.2	Pakan	0,00	10.000.000,00
7	Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.378.192.400,00	0,00
8	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.703.965.112,00	0,00
9	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	13.250.000,00	0,00
10	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.020.274.050,00	0,00
11	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.047.395.000,00	0,00
12	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	207.279.700,00	0,00
13	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	243.280.000,00	0,00



14	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	117.893.600,00	0,00
15	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	23.748.400,00	0,00
16	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	863.899.375,00	0,00
17	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	184.143.440,00	0,00
18	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	128.576.500,00	0,00
19	Beban Pakaian Penyelamatan	19.000.000,00	0,00
20	Beban Pakaian Siaga	12.600.000,00	0,00
21	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	26.100.000,00	0,00
22	Beban Pakaian Adat Daerah	17.450.000,00	0,00
23	Beban Pakaian Batik Tradisional	14.100.000,00	0,00
24	Beban Pakaian Olahraga	212.480.540,00	0,00
25	Beban Pakaian Jas/Safari	233.026.850,00	0,00
26	Beban Barang BLUD	0,00	57.138.661.340,30
27	Beban BMD di Bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	0,00	275.000,00
Jumlah		67.537.291.781,71	118.706.881.104,41

4.4.2.1.1.2 Beban Jasa

Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp386.214.521.594,63 dan Rp262.705.641.852,44 merupakan konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Beban Jasa Kantor, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 4.178
Beban Jasa Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	58.800.000,00	0,00
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.849.496.000,00	50.000.000,00
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.470.650.000,00	76.800.000,00
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	33.200.000,00	0,00
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	480.000.000,00	0,00
6	Beban Honorarium Rohaniwan	6.533.050.000,00	0,00
7	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	864.800.000,00	147.500.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	18.838.400.000,00	4.406.950.000,00
9	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	42.140.320.534,00	0,00
10	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	186.508.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	3.759.000,00	0,00
12	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.609.383.723,00	0,00
13	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.578.343.931,00	0,00
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	132.750.000,00	0,00
15	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	345.024.000,00	0,00
16	Beban Jasa Tenaga Administrasi	5.055.945.100,00	85.007.036.918,00
17	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	34.000.000,00	0,00
18	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	36.895.242.154,02	26.965.484.014,94
19	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.760.225.909,00	3.368.055.000,00
20	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.146.809.460,00	0,00
21	Beban Jasa Tenaga Keamanan	1.089.680.000,00	0,00
22	Beban Jasa Tenaga Supir	1.147.532.355,00	0,00
23	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	192.000.000,00	0,00
24	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	219.694.663,00	0,00
25	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	123.580.000,00	0,00
26	Beban Jasa Tata Rias	7.500.000,00	0,00
27	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	163.050.370,00	0,00
28	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	25.000.000,00	0,00
29	Beban Jasa Kalibrasi	3.237.700,00	0,00
30	Beban Jasa Pengukuran Tanah	94.909.120,00	0,00
31	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.184.250.000,00	1.745.150.000,00
32	Beban Tagihan Telepon	125.265.684,00	189.803.502,00
33	Beban Tagihan Air	358.206.055,00	290.563.518,00
34	Beban Tagihan Listrik	6.415.263.071,00	7.027.039.232,00
35	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	949.597.500,00	1.533.520.500,00
36	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.472.184.699,00	4.066.148.653,00
37	Beban Paket/Pengiriman	481.794.665,00	354.407.147,00
38	Beban Penambahan Daya	125.793.723,00	0,00
39	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	31.758.617,42	0,00
40	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	57.420.000,00	0,00
41	Beban Pengolahan Air Limbah	0,00	0,00
42	Beban Lembur	2.208.340.500,00	0,00
43	Beban Medical Check Up	95.052.600,00	54.329.357.038,67
44	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	1.187.150.000,00	0,00
45	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	9.482.143.454,00	0,00
46	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.382.965.871,03	0,00
47	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	53.451.522.300,00	0,00
48	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	163.707.600,00	0,00
49	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	236.660.477,29	481.906.979,37
50	Beban Sewa Alat Besar Apung Lainnya	151.910.000,00	0,00
51	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	185.800.000,00	10.000.000,00
52	Beban Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.715.575.000,00	0,00
53	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	1.658.430.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

54	Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	309.495.000,00	4.471.420.000,00
55	Beban Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	63.540.000,00	161.360.000,00
56	Beban Sewa Kapal Terbang	17.672.000,00	19.124.695,00
57	Beban Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya	5.293.406,00	0,00
58	Beban Sewa Alat Ukur Lain-Lain	12.270.000,00	0,00
59	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	109.790.909,00	367.750.000,00
60	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.125.000,00	0,00
61	Beban Sewa Meja Kerja Pejabat	71.240.000,00	106.033.000,00
62	Beban Sewa Kursi Kerja Pejabat	5.537.500,00	
63	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	90.000.000,00	270.500.000,00
64	Beban Sewa Alat Studio Lainnya	27.000.000,00	0,00
65	Beban Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	7.000.000,00	0,00
66	Beban Sewa Alat Laboratorium Lain	20.022.000,00	0,00
67	Beban Sewa Komputer Jaringan	199.584.000,00	0,00
68	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	20.000.000,00	0,00
69	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	773.775.000,00	45.600.000,00
70	Beban Sewa Hotel	826.675.000,00	683.077.455,00
71	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	35.000.000,00	0,00
72	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	0,00	0,00
73	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	12.650.000,00	2.158.479.600,00
74	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00
75	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	(749.640.750,00)	0,00
76	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.777.149.600,00	0,00
77	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	616.154.134,00	0,00
78	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	0,00	0,00
79	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	(14.165.750,17)	0,00
80	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.024.105.000,00	0,00
81	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	64.124.750,17	0,00
82	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	85.716.000,00	0,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

83	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	1.139.482.000,00	35.850.000,00
84	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	(1.442.871.776,00)	0,00
85	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.456.628.179,00	0,00
86	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	1.007.776.300,00	0,00
87	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Survei Permukaan Tanah	60.000.000,00	0,00
88	Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	676.701.800,00	0,00
89	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	284.056.600,00	0,00
90	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	541.562.000,00	947.920.000,00
91	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	23.910.000,00	339.032.950,00
92	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	2.701.946.000,00	2.981.945.000,00
93	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	3.054.185.000,00	1.602.307.000,00
94	Beban Bimbingan Teknis	2.720.864.950,00	1.221.706.607,00
95	Beban Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	538.571.428,00	0,00
96	Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	0,00	451.999.999,73
97	Beban Jasa Sertifikasi	0,00	147.128.720,00
98	Beban Penggandaan	0,00	3.121.303.380,00
99	Beban Jilid	0,00	190.214.500,00
100	Beban Dokumentasi	0,00	85.730.000,00
101	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	0,00	1.939.978.799,73
102	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00	4.621.821.750,00
103	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.476.644.000,00
104	Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	2.706.030.343,00
105	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	45.240.000,00
106	Beban Makanan dan Minuman Pasien	0,00	242.375.300,00
107	Beban Makanan dan Minuman Lembur	0,00	51.060.000,00
108	Beban Makanan dan Minuman Kegiatan	0,00	4.181.957.250,00
109	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	65.248.000,00
110	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	4.000.000,00
111	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	95.665.000,00
112	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	222.309.000,00
113	Beban Pakaian Kerja Lapangan	0,00	589.497.000,00
114	Beban Pakaian Olahraga	0,00	111.915.000,00
115	Beban Pakaian Paskibraka dan kelengkapannya	0,00	63.580.000,00
116	Beban pakaian seragam sekolah	0,00	2.286.690.000,00
117	Beban pakaian KORPRI	0,00	650.000,00
118	Beban Uang untuk Di berikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	0,00	27.400.000,00



119	Beban Barang untuk Di berikan Kepada Pihak Ketiga/masyarakat	0,00	30.235.500.000,00
120	Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	0,00	2.279.875.000,00
Jumlah		236.378.609.115,76	262.705.641.852,44

4.4.2.1.1.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp23.531.777.355,82 dan Rp17.968.154.727,90 dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal, yang terdiri dari:

Tabel 4.179

Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Pemeliharaan Tanah	248.240.500,00	88.989.000,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.490.017.411,13	1.254.709.640,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.205.840.453,69	7.672.801.342,90
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	9.577.678.991,00	8.109.854.725,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	10.000.000,00	841.800.020,00
Jumlah		23.531.777.355,82	17.968.154.727,90

4.4.2.1.1.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 masing- masing Rp 55.540.330.756,00 dan Rp47.995.362.943,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas:

Tabel 4.180

Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Perjalanan Dinas	55.540.330.756,00	47.995.362.943,00
Jumlah		55.540.330.756,00	47.995.362.943,00

4.4.2.1.1.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 masing- masing Rp 55.540.330.756,00 dan Rp47.995.362.943,00 merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas terdiri atas:



Tabel 4.181

**Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

No	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	334.665.000,00	-
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	198.600.000,00	-
3	Beban Beasiswa	15.732.000.000,00	-
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	6.600.000,00	-
5	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	2.264.704.000,00	-
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	88.145.000,00	-
7	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	29.734.807.673,45	-
Jumlah		48.359.521.673,45	-

4.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah Tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp58.493.665.942,44 dan Rp94.120.005.655,79 merupakan Beban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berupa Barang atau uang untuk diserahkan kepada masyarakat, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4.182

Realisasi Beban Hibah Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	48.115.055,01	0,00
2	Beban Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi	58.445.550.887,43	94.120.005.655,79
Jumlah		58.493.665.942,44	94.120.005.655,79

4.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Realisasi Beban Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp20.236.300.000,00 dan Rp20.236.300.000,00.

Tabel 4.183

**Realisasi Bantuan Sosial yang Diserahkan Kepada Masyarakat
Tahun Anggaran 2021 dan 2020**

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	776.100.000,00	18.931.300.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	585.000.000,00	1.305.000.000,00



No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	103.268.000,00	0,00
Jumlah		1.464.368.000,00	20.236.300.000,00

4.4.2.1.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

4.4.2.1.5.1 Beban Penyusutan

Beban penyusutan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah senilai masing-masing Rp278.848.459.155,84 dan Rp238.142.916.838,34..

Tabel 4.184
Beban Penyusutan Aset Tetap
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	66.545.550.210,84	64.494.469.803,34
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	37.155.806.287,00	37.629.943.548,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	173.602.715.753,00	135.499.164.352,00
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	577.595.076,00	0,00
5	Beban Amortisasi	519.339.133,00	519.339.135,00
6	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	447.452.696,00	0,00
Jumlah		278.848.459.155,84	238.142.916.838,34

Adapun rincian Beban Penyusutan dan amortisasi per 31 Desember 2021 pada 39 SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Tabel 4.185
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	169.346.024,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	214.963.649,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	363.286.673,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	229.353.964,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	2.293.676.739,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198.733.860,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	869.310.630,69
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.537.887.442,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	696.614.724,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	489.681.581,50
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	219.904.844,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	147.613.370,00
13	Dinas Pendidikan	14.997.013.374,48
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	832.439.580,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Jumlah
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	306.656.788,00
16	Dinas Perhubungan	2.154.422.195,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	257.030.018,00
18	Dinas Pertanian	993.021.470,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	706.607.927,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	562.916.763,00
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	170.189.810,00
22	Dinas Kesehatan	9.436.268.080,58
23	Inspektorat	198.752.030,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	136.764.289,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.824.803.603,00
26	Kecamatan Angkona	68.324.877,00
27	Kecamatan Burau	35.116.818,00
28	Kecamatan Kalaena	81.840.624,00
29	Kecamatan Malili	105.507.220,00
30	Kecamatan Mangkutana	55.914.067,00
31	Kecamatan Nuha	116.271.361,00
32	Kecamatan Tomoni	162.688.542,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	35.273.055,00
34	Kecamatan Towuti	169.048.717,00
35	Kecamatan Wasuponda	47.590.420,00
36	Kecamatan Wotu	98.611.047,00
37	RSUD I Lagaligo	21.592.636.312,61
38	Sekretariat Daerah	3.268.186.125,98
39	Sekretariat DPRD	701.281.595,00
Jumlah		66.545.550.210,84

Tabel 4.186
Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	
1	Beban Penyusutan Aggregate and Concrete Equipment	3.588.750,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	146.608.002,00
3	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	234.281.746,00
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	35.722.800,00
5	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	230.565.710,00
6	Beban Penyusutan Alat Dapur	129.769.413,00
7	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	1.211.668.852,67
8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Anak	398.901.472,00
9	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	1.673.286.194,60
10	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah	2.136.675.561,00
11	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Bedah Jantung	708.113,00
12	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gawat Darurat	587.392.232,00
13	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Gigi	930.025.103,05
14	Beban Penyusutan Alat Kedokteran ICCU	80.000,00



No.	Uraian	
15	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Jantung	621.307.881,00
16	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	80.979.035,00
17	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	4.608.376,00
18	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Lainnya	1.007.367,00
19	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Mata	255.808.071,00
20	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.482.702.387,97
21	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Nuklir	2.437.101.778,00
22	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Poliklinik	18.393.200,00
23	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Radiodiagnostic	1.263.769.010,00
24	Beban Penyusutan Alat Kedokteran THT	394.720.607,00
25	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Transfusi	16.132.649,00
26	Beban Penyusutan Alat Kedokteran Umum	6.515.282.274,82
27	Beban Penyusutan Alat Kerja Bawah Air	14.425.418,00
28	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	950.661.348,72
29	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kepolisian	6.392.752,00
30	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Kerja	20.489.468,00
31	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Matra Laut	12.884.008,00
32	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	181.682.592,87
33	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	100.635.833,00
34	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio HF/FM	499.998,00
35	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Radio SSB	10.100.833,00
36	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Sosial	18.161.233,00
37	Beban Penyusutan Alat Komunikasi Telephone	724.977.662,00
38	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	6.925.033,00
39	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	36.833.125,00
40	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Batuan/ Geologi	18.497.926,00
41	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Biologi Perairan	33.328.857,00
42	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Farmasi	4.917.435,00
43	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Film	65.795.568,00
44	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika	2.620.650,00
45	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Geofisika	28.242.141,00
46	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hematologi	97.581.564,00
47	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Hidrokimia	61.945.777,00
48	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Immunologi	92.746.681,00
49	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran	1.552.429,00
50	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia	189.307.119,00
51	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	25.076.615,00



No.	Uraian	
52	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	21.249.389,00
53	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lain	811.411.100,00
54	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	41.732.077,00
55	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Logam,	46.596.358,00
56	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Makanan	14.668.901,00
57	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	3.962.338,00
58	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi Teknik Kesehatan	26.705.960,00
59	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Mikrobiologi	240.349.341,00
60	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Model Hidrolika	20.721.250,00
61	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Oseanografi	3.693.750,00
62	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pasir	4.159.375,00
63	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Patologi	245.962.914,00
64	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Penunjang	8.043.755,00
65	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Pertanian	650.124.204,00
66	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	5.120.571,00
67	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	3.125.000,00
68	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	2.475.000,00
69	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia	355.465,00
70	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lain	37.575.469,00
71	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Tambang	522.500,00
72	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Uji Tekstil	100.000,00
73	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	291.067.613,00
74	Beban Penyusutan Alat Musik	44.242.100,00
75	Beban Penyusutan Alat Pasca Panen	22.550.710,00
76	Beban Penyusutan Alat Pelindung Lainnya	152.767.723,00
77	Beban Penyusutan Alat Pemadam Kebakaran	347.987.634,00
78	Beban Penyusutan Alat Pembersih	193.381.119,00
79	Beban Penyusutan Alat Pendingin	1.512.533.413,00
80	Beban Penyusutan Alat Pendukung Pencarian	138.214.253,00
81	Beban Penyusutan Alat Pengangkat	6.400.000,00
82	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	67.912.130,00
83	Beban Penyusutan Alat Pengukur Waktu	1.078.073,00
84	Beban Penyusutan Alat Penolong	3.816.667,00
85	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	124.188.629,80
86	Beban Penyusutan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	918.776.740,90
87	Beban Penyusutan Alat Peraga Kejuruan	549.248.952,95
88	Beban Penyusutan Alat Peraga PAUD/TK	9.012.498,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	
89	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Agama	2.096.875,00
90	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Bahasa Indonesia	473.958,00
91	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	3.415.548,00
92	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Dasar	204.093.313,24
93	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Lanjutan	114.778.541,00
94	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	28.228.349,00
95	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPS	160.417,00
96	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	56.726.650,00
97	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	158.750,00
98	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Matematika	2.441.645,00
99	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	13.644.791,00
100	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	371.722.347,00
101	Beban Penyusutan Alat Produksi Perikanan	1.705.489.837,00
102	Beban Penyusutan Alat Reproduksi (Penggandaan)	8.483.860,00
103	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.065.068.637,00
104	Beban Penyusutan Alat Timbangan/Biara	35.794.387,00
105	Beban Penyusutan Alat Ukur Fisika Kesehatan	3.765.000,00
106	Beban Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	10.142.034,00
107	Beban Penyusutan Alat Ukur Universal	24.232.024,00
108	Beban Penyusutan Alat Ukur/Pembanding	90.701.964,00
109	Beban Penyusutan Alat-Alat Peternakan	84.645.250,00
110	Beban Penyusutan Assembly/Counting System	8.856.490,00
111	Beban Penyusutan Cavitation Tunnel	3.163.166,00
112	Beban Penyusutan Excavator	332.835.000,00
113	Beban Penyusutan Feeder	25.764.881,00
114	Beban Penyusutan General Laboratory Tool	12.744.829,00
115	Beban Penyusutan Grader	539.055.175,00
116	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	396.239.709,00
117	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.544.607.955,00
118	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Khusus	3.811.127.874,00
119	Beban Penyusutan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.017.964.086,00
120	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.153.437.468,00
121	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	47.345.284,00
122	Beban Penyusutan Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	91.635.178,00
123	Beban Penyusutan Komputer Jaringan	182.561.732,00
124	Beban Penyusutan Komputer Unit Lainnya	5.938.045,00
125	Beban Penyusutan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	2.920.938,00



No.	Uraian	
126	Beban Penyusutan Kursi Kerja Pejabat	416.923.514,99
127	Beban Penyusutan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	32.860.546,00
128	Beban Penyusutan Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	73.010.332,00
129	Beban Penyusutan Laboratorium Kearsipan	3.378.328,00
130	Beban Penyusutan Laboratorium Lingkungan	59.410.681,00
131	Beban Penyusutan Lemari dan Arsip Pejabat	323.492.886,00
132	Beban Penyusutan Measuring/Testing Device	200.000,00
133	Beban Penyusutan Mebel	4.664.057.990,14
134	Beban Penyusutan Meja Kerja Pejabat	127.128.200,32
135	Beban Penyusutan Mesin Ketik	20.788.695,00
136	Beban Penyusutan Mesin Proses	73.067.233,00
137	Beban Penyusutan MOB	1.020.000,00
138	Beban Penyusutan Modular Counting And Scientific Electronic	1.633.267,00
139	Beban Penyusutan Pemesinan:Electrical Workshop	4.195.802,00
140	Beban Penyusutan Pemesinan:Model Ship Workshop	1.731.216,00
141	Beban Penyusutan Peralatan Antena HF/SW	5.074.460,00
142	Beban Penyusutan Peralatan Antena MF/MW	6.237.000,00
143	Beban Penyusutan Peralatan Antena Penerima VHF	12.480.840,00
144	Beban Penyusutan Peralatan Antena SHF/Parabola	24.077.995,00
145	Beban Penyusutan Peralatan Antena UHF	4.991.800,00
146	Beban Penyusutan Peralatan Antena VHF/FM	4.380.000,00
147	Beban Penyusutan Peralatan Bengkel Khusus Peladam	3.021.266,00
148	Beban Penyusutan Peralatan Cetak	6.554.353,00
149	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	415.965,00
150	Beban Penyusutan Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	24.534.770,00
151	Beban Penyusutan Peralatan Jaringan	663.718.652,45
152	Beban Penyusutan Peralatan Komputer Lainnya	28.372.966,00
153	Beban Penyusutan Peralatan Mainframe	966.391.398,00
154	Beban Penyusutan Peralatan Microwave FPU	250.000,00
155	Beban Penyusutan Peralatan Mini Computer	37.734.409,00
156	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	18.540.500,00
157	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar MF/MW	10.324.400,00
158	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar SHF	570.000,00
159	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar VHF/FM	4.450.000,00
160	Beban Penyusutan Peralatan Permainan	52.592.935,00
161	Beban Penyusutan Peralatan Selam	14.603.034,00
162	Beban Penyusutan Peralatan Studio Audio	98.639.063,92



No.	Uraian	
163	Beban Penyusutan Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	9.430.927,00
164	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	798.257.283,16
165	Beban Penyusutan Peralatan Tukang Besi	2.850.000,00
166	Beban Penyusutan Peralatan Ukur, Gip, dan Feeting	19.764.772,00
167	Beban Penyusutan Peralatan Umum	1.469.340,00
168	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kayu	5.389.800,00
169	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Kerja	159.000,00
170	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Listrik	12.830.000,00
171	Beban Penyusutan Perkakas Bengkel Service	253.350,00
172	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	20.715.383,50
173	Beban Penyusutan Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	305.453,00
174	Beban Penyusutan Perkakas Pabrik Es	74.317.122,00
175	Beban Penyusutan Perkakas Pengangkat Bermesin	520.457,00
176	Beban Penyusutan Perkakas Standar (Standard Tools)	1.938.332,00
177	Beban Penyusutan Personal Computer	9.451.915.180,77
178	Beban Penyusutan Pompa	49.758.899,00
179	Beban Penyusutan Program Input Equipment	8.285.933,00
180	Beban Penyusutan Radiation Detector	1.794.688,00
181	Beban Penyusutan Rambu Bersuar	98.802.664,00
182	Beban Penyusutan Rambu Tidak Bersuar	197.240.125,00
183	Beban Penyusutan Recorder Display	8.748.138,00
184	Beban Penyusutan Sumber Tenaga	671.065.298,00
185	Beban Penyusutan Sumur Pemboran	1.696.126,00
186	Beban Penyusutan Switcher Antena	6.875.000,00
187	Beban Penyusutan Switcher/Menara Antena	16.191.445,00
188	Beban Penyusutan System/Power Supply	178.403.308,00
189	Beban Penyusutan Takaran Lainnya	423.500,00
190	Beban Penyusutan Tractor	2.794.500,00
191	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Lainnya	1.515.350,00
192	Beban Penyusutan Universal Tester	19.320.724,00
Jumlah		66.545.550.210,84

2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Tabel 4.187
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.608.778,00



Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021
Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	SKPD	Jumlah
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	108.345.846,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	181.336.550,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	129.072.667,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.387.554.205,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.403.846,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	109.480.157,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	387.051.823,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	1.748.579.894,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	860.165.628,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	80.125.306,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	48.994.589,00
13	Dinas Pendidikan	13.691.263.329,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	157.939.555,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.311.900.815,00
16	Dinas Perhubungan	494.990.129,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	352.191.872,00
18	Dinas Pertanian	823.256.296,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.858.434.306,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	139.680.154,00
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	152.364.528,00
22	Dinas Kesehatan	4.137.776.358,00
23	Inspektorat	88.279.497,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	74.308.427,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	151.068.810,00
26	Kecamatan Angkona	152.213.673,00
27	Kecamatan Burau	114.494.554,00
28	Kecamatan Kalaena	126.164.054,00
29	Kecamatan Malili	117.401.784,00
30	Kecamatan Mangkutana	79.464.049,00
31	Kecamatan Nuha	60.537.056,00
32	Kecamatan Tomoni	116.507.861,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	105.815.688,00
34	Kecamatan Towuti	159.268.936,00
35	Kecamatan Wasuponda	97.687.228,00
36	Kecamatan Wotu	97.919.909,00
37	RSUD I Lagaligo	1.645.411.157,00
38	Sekretariat Daerah	1.589.868.037,00
39	Sekretariat DPRD	1.021.878.936,00
Jumlah		37.155.806.287,00

Tabel 4.188
Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Beban Penyusutan Asrama	350.517.362,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Fasilitas Umum	802.345.926,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Garasi/Pool	105.082.936,00



No.	Uraian	Harga Perolehan
4	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Instalasi	174.857.356,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	7.157.874.370,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Laboratorium	283.596.407,00
7	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pabrik	221.840.209,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Perpustakaan	1.134.813.254,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.320.042.254,00
10	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat	397.361,00
11	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	207.815.123,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	482.369.339,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.092.435.708,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	8.208.571.464,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	706.342.297,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Untuk Bengkel/Hanggar	7.064.416,00
17	Beban Penyusutan Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	66.118.505,00
18	Beban Penyusutan Bangunan Gudang	907.052.656,00
19	Beban Penyusutan Bangunan Industri	14.392.848,00
20	Beban Penyusutan Bangunan Kesehatan	3.132.509.861,00
21	Beban Penyusutan Bangunan Parkir	4.937.000,00
22	Beban Penyusutan Bangunan Pengujian Kelaikan	113.516.534,00
23	Beban Penyusutan Bangunan Peninggalan	54.194.826,00
24	Beban Penyusutan Bangunan Perambuan Penerangan Pantai	14.708.454,00
25	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	20.722.568,00
26	Beban Penyusutan Flat/Rumah Susun	1.731.661.786,00
27	Beban Penyusutan Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan	186.765.020,00
28	Beban Penyusutan Pagar	3.048.183.030,00
29	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan I	552.089.742,00
30	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan II	75.823.010,00
31	Beban Penyusutan Rumah Negara Golongan III	1.398.486.946,00
32	Beban Penyusutan Taman	192.765.739,00
33	Beban Penyusutan Tugu	117.412.306,00
34	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas Administrasi	268.499.674,00
Jumlah		37.155.806.287,00

3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan



Tabel 4.189
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.813.338,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	675.799.392,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	161.380.146,00
4	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.928.766,00
5	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	1.004.123.229,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.842.634,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.465.307,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	125.054.281,00
9	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	58.517.373,00
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	139.490.321.519,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	149.979.662,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.685.999,00
13	Dinas Pendidikan	375.454.484,00
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.691.350,00
15	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	77.511.256,00
16	Dinas Perhubungan	80.535.522,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.982.161,00
18	Dinas Pertanian	114.307.828,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	29.729.475.145,00
20	Dinas Sosial Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	1.850.016,00
21	Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian	22.233.411,00
22	Dinas Kesehatan	498.149.477,00
23	Inspektorat	22.717.962,00
24	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	1.312.728,00
25	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	1.537.872,00
26	Kecamatan Angkona	1.446.266,00
27	Kecamatan Burau	450.192,00
28	Kecamatan Kalaena	455.661,00
29	Kecamatan Malili	37.587.113,00
30	Kecamatan Mangkutana	600.834,00
31	Kecamatan Nuha	6.746.737,00
32	Kecamatan Tomoni	109.089.893,00
33	Kecamatan Tomoni Timur	1.675.000,00
34	Kecamatan Towuti	408.500,00
35	Kecamatan Wasuponda	400.000,00
36	Kecamatan Wotu	411.250,00
37	RSUD I Lagaligo	498.342.315,00
38	Sekretariat Daerah	190.915.632,00
39	Sekretariat DPRD	132.515.502,00
	Jumlah	173.602.715.753,00



Tabel 4.190
Rincian Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	77.563.856,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	111.503.783,00
3	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Air Kotor	12.916.963,00
4	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Irigasi	1.242.016.748,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pasang Surut	740.697,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	1.574.704.338,00
7	Beban Penyusutan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	6.362.100,00
8	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	539.875,00
9	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Air Kotor	2.463.725,00
10	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Irigasi	1.595.613.626,00
11	Beban Penyusutan Bangunan Pembawa Pengembangan Rawa	3.600.000,00
12	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Irigasi	1.022.815.335,00
13	Beban Penyusutan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	25.128.976.513,00
14	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Air Kotor	7.051.660,00
15	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Irigasi	2.006.647.330,00
16	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pasang Surut	138.616.423,00
17	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	4.317.543.306,00
18	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Pengembangan Sumber Air	727.983.756,00
19	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	64.588.040,00
20	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	88.280.006,00
21	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Irigasi	958.905.349,00
22	Beban Penyusutan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air	12.877.344,00
23	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku	2.063.225,00
24	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pasang Surut	12.035.800,00
25	Beban Penyusutan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air	178.464.530,00
26	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	162.683.028,00
27	Beban Penyusutan Instalasi Air Buangan Domestik	163.810.001,00
28	Beban Penyusutan Instalasi Air Permukaan	487.834,00
29	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dalam	527.204,00
30	Beban Penyusutan Instalasi Air Tanah Dangkal	568.284,00
31	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Distribusi	38.326.032,00
32	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Induk	16.701.706,00
33	Beban Penyusutan Instalasi Gas Lainnya	30.727.957,00
34	Beban Penyusutan Instalasi Jaringan Pipa Gas	102.586.502,00



No.	Uraian	Harga Perolehan
35	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	30.831.695,00
36	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)	701.963,00
37	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	5.055.450,00
38	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	450.319.297,00
39	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Penangkal Petir	1.725.000,00
40	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	119.581.802,00
41	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan di Darat	5.508.192,00
42	Beban Penyusutan Instalasi Pusat Pengatur Listrik	82.802.852,00
43	Beban Penyusutan Jalan Desa	103.878.980.687,00
44	Beban Penyusutan Jalan Kabupaten	17.244.485.994,00
45	Beban Penyusutan Jalan Khusus	4.729.086.195,00
46	Beban Penyusutan Jalan Lainnya	23.489.020,00
47	Beban Penyusutan Jaringan Cabang Distribusi	662.907.785,00
48	Beban Penyusutan Jaringan Induk Distribusi	1.292.969,00
49	Beban Penyusutan Jaringan Pembawa	232.397.342,00
50	Beban Penyusutan Jaringan Sambungan ke Rumah	856.593.717,00
51	Beban Penyusutan Jaringan Transmisi	272.032.836,00
52	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Desa	4.147.179.742,00
53	Beban Penyusutan Jembatan pada Jalan Khusus	55.836.456,00
54	Beban Penyusutan Jembatan Penyeberangan	779.282.886,00
55	Beban Penyusutan Saluran Pembuang Pasang Surut	32.429.039,00
56	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM)	178.901.958,00
Jumlah		173.602.715.753,00

4. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Tabel 4.191
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	181.571.291,00
2	Dinas Pendidikan	164.731.973,00
3	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	182.120.000,00
4	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	49.171.812,00
Jumlah		577.595.076,00



Tabel 4.200
Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya berdasarkan Jenisnya
per 31 Desember 2021

No.	Uraian	Harga Perolehan
1	Beban Penyusutan Alat Musik	245.728.368,00
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	331.866.708,00
Jumlah		577.595.076,00

5. Beban Amortisasi

Beban Amortisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp519.339.133,00.
Adapun rincian Beban Amortisasi per SKPD sebagai berikut:

Tabel 4.201
Beban Amortisasi
Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Jumlah
1	Sekretariat DPRD	7.876.000,00
2	Dinas Perhubungan	7.672.500,00
3	Dinas Kesehatan	20.900.020,00
4	RSUD I Lagaligo	54.653.000,00
5	Dinas Pendidikan	220.075.413,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.800.000,00
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	17.100.000,00
8	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	39.000.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.000.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	4.950.000,00
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	33.440.000,00
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	94.872.200,00
Jumlah		519.339.133,00

6. Beban Penyusutan Aset Lain-lain

Tabel 4.202
Beban Penyusutan Aset Lain-lain
Tahun Anggaran 2021

No.	SKPD	Jumlah
1	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.153.334,00
2	Dinas Kesehatan	50.876.914,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	294.090,00
4	Dinas Pendidikan	4.312.942,00
5	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	35.204.251,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	354.611.165,00
Jumlah		447.452.696,00

4.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp43.938.317,08 dan Rp51.995.885,51.

4.4.2.1.7 Beban Lain-Lain



Beban Lain - lain Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing senilai Rp 179.628.746,19 dan Rp0,00 merupakan realisasi belanja modal yang nilai asetnya di bawah nilai kapitalisasi sehingga di reklas ke extracomptable.

4.4.2.1.8 Beban Transfer

Beban Transfer Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 198.386.274.819,00 dan Rp 212.247.177.067,00.

4.5 Penjelasan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penjelasan Laporan Arus kas berikut: Laporan Arus Kas memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Penjelasan Laporan Arus kas berikut:

4.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi tahun 2021 dan tahun 2020 masing-masing sebesar Rp329.351.354.783,64 dan Rp295.204.507.332,65 merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 1.549.649.873.412,52 dan Rp1.495.203.437.953,65 Sedangkan Arus Kas Keluar Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.220.298.518.628,88 dan Rp1.199.998.930.621,00. Rincian arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.203
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Masuk Kas:		
Pendapatan Pajak Daerah	183.113.097.975,64	192.720.735.828,60
Pendapatan Retribusi Daerah	4.246.277.325,50	4.505.935.086,09
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22.896.489.793,00	23.835.212.109,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	95.673.630.582,38	118.826.488.634,76
Dana Bagi Hasil Pajak	52.211.079.180,00	29.385.873.680,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	117.049.652.346,00	75.731.850.350,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	502.393.009.000,00	508.456.665.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	195.995.481.771,00	153.348.952.977,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	0,00	0,00
Dana Desa	117.263.644.446,00	115.448.707.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	148.393.810.952,00	158.158.821.550,20
Pendapatan Hibah	92.833.379.152,00	114.784.195.738,00



Pendapatan Lainnya	17.580.320.889,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.549.649.873.412,52	1.495.203.437.953,65
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pegawai	450.113.688.581,00	407.693.545.053,00
Pembayaran Barang dan Jasa	490.019.941.161,62	494.662.638.352,00
Pembayaran Subsidi	199.095.000,00	0,00
Pembayaran Hibah	78.663.751.067,26	69.606.738.049,00
Pembayaran Bantuan Sosial	1.464.368.000,00	14.080.300.000,00
Pembayaran Tak Terduga	1.451.400.000,00	1.708.532.100,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.272.063.361,00	16.843.320.838,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	450.566.412,00	418.781.131,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	178.663.645.046,00	194.388.707.000,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	596.368.098,00
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	1.220.298.518.628,88	1.199.998.930.621,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	329.351.354.783,64	295.204.507.332,65

4.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Luwu Timur di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas investasi dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sejumlah (Rp288.411.798.100,52) dan (Rp248.499.050.542,05).

Rincian arus kas dari aktivitas investasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4.204
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Masuk Kas:		
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	0,00	00,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	466.997.625,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan atas Aset Lainnya	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Penerimaan Hasil Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	466.997.625,00



Uraian	Tahun	
	2021	2020
Arus Keluar Kas:		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	571.282.000,00	486.845.575,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	52.160.400.224,13	48.030.983.980,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	97.920.824.771,06	60.919.461.918,58
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	131.513.051.105,33	127.319.574.693,47
Perolehan Aset Tetap Lainnya	246.240.000,00	209.182.000,00
Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.000.000.000,00	12.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	288.411.798.100,52	248.966.048.167,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(288.411.798.100,52)	(248.499.050.542,05)

4.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas dari aktivitas pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2021 senilai (Rp0,00) dan tahun 2020. Rincian arus kas dari aktivitas pendanaan sebagai berikut.

Tabel 4.205
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Masuk Kas:		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pinjaman Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00
Pinjaman Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Pinjaman Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas:		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara/Daerah	0,00	0,00



Uraian	Tahun	
	2021	2020
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00

4.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Merupakan jumlah realisasi arus kas dari aktivitas transitoris yang terdiri dari:

Tabel 4.206
Rincian Arus Kas dari Aktivitas transitoris
Tahun Anggaran 2021 dan 2020

Uraian	Tahun	
	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Masuk Kas:		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Sisa UP Tahun Lalu yg disetor Tahun Berjalan	0,00	0,00
Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu yg disetor Tahun Berjalan	0,00	0,00
Pengembalian Saldo Dana BOS 2016	0,00	0,00
Deposito BLUD	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Arus Keluar Kas:		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Sisa Kas Tahun Berjalan	0,00	0,00
Pengembalian Saldo dana BOS Tahun 2016	0,00	0,00
Deposito BLUD	0,00	0,00
Kas Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas	67.914.564.883,00	56.647.014.113,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(0,00)	(0,00)

Arus Kas Dari Aktivitas Transitoris Tahun 2021 dan 2020 merupakan aktivitas penurunan bersih kas masing-masing sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00) diuraikan sebagai berikut:

1. Arus Masuk Kas :
Penerimaan kas tahun 2021 dan 2020 masing-masing Rp67.914.564.883,00 dan Rp56.647.014.113,00;
2. Arus Kas Keluar :
Pengeluaran kas tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp67.914.564.883,00 dan Rp56.647.014.113,00;

4.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Berjalan

Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.207
Rincian Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode Berjalan

No.	Uraian	Tahun	
		2021	2020
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	40.939.556.683,12	46.705.456.790,60
2	Saldo Awal Kas	72.907.296.644,25	26.201.839.853,65



3	Koreksi SiLPA Tahun Lalu	0	0
4	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK	7.451.149,00	0
Saldo Akhir Kas		113.854.304.476,37	72.907.296.644,25

4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah Laporan yang berfungsi untuk melihat perkembangan ekuitas pemerintah Kabupaten Luwu Timur pada awal tahun sampai dengan akhir tahun dalam tahun berjalan yang sama. Laporan ini dipengaruhi dari surplus/defisit pada laporan Operasional Pemerintah kabupaten Luwu Timur dan apabila terdapat kesalahan/ perubahan kebijakan mendasar yang mempengaruhi ekuitas.

4.6.1 Ekuitas Awal

Ekuitas awal Tahun 2021 sebesar Rp3.261.137.182.996,98. Nilai ekuitas tersebut meningkat sebesar Rp122.256.279.328,93 atau 3,89% jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal Tahun 2020 sebesar Rp 3.138.880.903.668,05.

4.6.2 Surplus/defisit-LO

Surplus/defisit-LO Tahun 2021 sebesar Rp131.215.099.191,47, yang berasal dari:

1. Surplus (defisit) dari kegiatan operasional sebesar Rp140.358.882.321,17
2. Surplus (defisit) dari kegiatan non operasional sebesar (Rp7.692.383.129,70)
3. Surplus (defisit) dari pos luar biasa sebesar (Rp1.451.400.000)

Surplus/defisit-LO Tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp31.052.956.620,64 atau 31,00%, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.208
Rincian Surplus(defisit) – LO

No	Uraian	2021	2020
A	Surplus (Defisit) dari Operasi	140.358.882.321,17	102.134.024.670,83
1	Pendapatan - LO	1.657.035.303.445,78	1.521.909.072.398,20
2	Beban	1.516.676.421.124,61	1.419.775.047.727,37
B	Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional	(7.692.383.129,70)	(29.350.000,00)
1	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	230.202.132,35	0,00
a	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO	38.841.583,35	0,00
b	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	191.360.549,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	6.465.400.098,58	29.350.000,00
a	Defisit Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain- LO	170.925.915,00	0,00
b	Defisit Pelepasan Penyertaan Modal-LO	6.294.474.183,58	0,00



c	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	29.350.000,00
3	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	1.457.185.163,47	0,00
C	Surplus (Defisit) dari Pos Luar Biasa	1.451.400.000,00	1.942.532.100,00
1	Beban Tak Terduga	1.451.400.000,00	1.942.532.100,00
Surplus (Defisit) - LO		131.215.099.191,47	100.162.142.570,83

4.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar selama Tahun 2021 sebesar (Rp117.900.064.643,75) dan Tahun 2020 sebesar Rp 22.094.136.758,11. Hal tersebut berasal dari koreksi-koreksi selama Tahun 2021 sebagai berikut.

4.6.3.1 Koreksi Ekuitas-Kas

Tidak ada koreksi Ekuitas-Kas selama Tahun 2021.

4.6.3.2 Koreksi Ekuitas-Piutang

Selama Tahun 2021, terdapat koreksi kurang atas ekuitas-Piutang sebesar Rp1.769.458.250,00 sebagai pengurangan pengakuan Piutang Lain-lain PAD yang Sah kepada KPRI.

4.6.3.3 Koreksi Ekuitas-Beban Dibayar Dimuka

Tidak ada koreksi Ekuitas- beban dibayar dimuka selama Tahun 2021.

4.6.3.4 Koreksi Ekuitas Persediaan

Tidak ada koreksi Ekuitas- Persediaan selama Tahun 2021.

4.6.3.5 Koreksi Ekuitas-Investasi

Tidak ada koreksi Ekuitas- Investasi selama Tahun 2021

4.6.3.6 Koreksi Ekuitas-Aset Tetap

Koreksi tambah Ekuitas-Aset Tetap sebesar Rp716.436.363,44 dilakukan karena adanya kurang catat aset tetap di SKPD, reklasifikasi aset tetap dalam kondisi baik dari Aset Lain-lain dan adanya penambahan nilai hasil dari penilaian aset tetap, yang terjadi sebelum Tahun 2021.

4.6.3.7 Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya

Koreksi ekuitas-Aset Lainnya berupa koreksi kurang sebesar Rp115.633.331.903,87 dilakukan karena adanya penghapusan atas Aset Lain-lain..

4.6.3.8 Koreksi Ekuitas-Kewajiban

Koreksi ekuitas-Kewajiban sebesar Rp 219.161.873,56.

4.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir Tahun 2021 sebesar Rp3.274.452.217.544,70. Nilai ekuitas tersebut meningkat sebesar Rp13.315.034.547,72 atau 0,41% jika dibandingkan dengan Ekuitas akhir Tahun 2020 sebesar Rp 3.261.137.182.996,98.



4.7 Informasi Keuangan Lainnya

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 telah menerima dana Tugas Pembantuan yang dianggarkan sebesar Rp25.992.457.000,00 terealisasi sebesar Rp25.901.180.717,00 atau 99,65%. Adapun realisasi dana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.209
Penerima Dana Tugas Pembantuan

NO	NAMA OPD	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Dinas PU dan Penataan Ruang	980.000.000,00	980.000.000,00	100
2	Dinas Pertanian	5.768.720.000,00	5.714.734.217	99,06
3	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja dan Perindustrian	19.243.737.000,00	19.206.446.500	99,81
	Jumlah	25.992.457.000,00	25.901.180.717,00	99,65

2. Laporan Keuangan Badan layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD I La Galigo yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemkab Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN dengan menjajika Silpa tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp4.606.474356,00 dan Rp18.413.471.015,00.
3. Sehubungan dengan Penyertaan Modal pada BUMD, diketahui hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sebanyak empat BUMD telah menyampaikan laporan keuangan, yaitu PDAM Tirta Dharma, PT Timur Investama, PT Bumi Agro dan PT Nusa Timur Energi;
 - b. Laporan keuangan PDAM Tirta Dharma telah diaudit oleh KAP “ AGUS, INDRA, JERI & REKAN dan menyajikan rugi tahun 2021 dan 2020 masing- masing senilai Rp 5.244.645.772,00 dan Rp2.949.179.157,00. Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur mencatat penyertaan modal pada PDAM berdasarkan metode ekuitas.
 - c. Laporan keuangan PT Timur Investama yang tidak diaudit menyajikan rugi tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan perusahaan sudah tidak beroperasi secara aktif.
 - d. Laporan keuangan PT Nusa Timur Energi yang telah diaudit KAP “RUSTAN” menyajikan rugi tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 110.422.100,00 dan Rp147.000.000,00.
 - e. Laporan Keuangan PT Bumi Timur Mineral telah diaudit oleh KAP ABDUL AZIZ FEBY ARIZA dan menyajikan laba tahun 2021 dan 2020 masing- masing sebesar Rp 738.034.512,00 dan Rp576.943,830,00.
 - f. Nilai Investasi Pemerintah Daerah pada PT Bumi Agro dan PT Timur Investama masing- masing senilai Rp1,00 dan tahun 2021 belum menyerahkan Laporan Keuangan.
4. Pada Tahun 2021, Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan pendapatan Dana Desa dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa walaupun penyalurannya tidak melalui Rekening Kas Daerah. Penyajian Dana Desa dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan dokumen SP2DD dan SPBDD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020.
5. Untuk tahun 2021, analisis kinerja laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang menggunakan analisis berupa rasio keuangan sebagai berikut :



- a. Rasio Kemandirian yang mengukur untuk tingkat kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah yang membandingkan tingkat Pendapatan Asli daerah atas dana transfer pusat masih “rendah”.
- b. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam merealisasikan PAD dikategorikan sangat Efektif, melebihi dari target anggaran dan untuk belanja yang direalisasikan efektif.
- c. Rasio likuiditas menunjukkan pemerintah daerah memiliki aset lancar yang cukup untuk melunasi utang jangka pendek yang jatuh tempo.



BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, secara garis besar Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2021 disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.498.407.798.338,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp1.549.649.873.412,52 atau 103,42 % terdiri dari:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp305.929.495.676,52
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer Rp1.133.306.677.695,00
 - c. Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp110.413.700.041,00
2. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menetapkan target belanja pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.366.652.780.892,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.304.324.041.910,40 atau mencapai 95,44% terdiri dari :
 - a. Realisasi Belanja Operasi Rp1.020.460.843.809,88
 - b. Realisasi Belanja Modal Rp282.411.798.100,52
 - c. Realisasi Belanja Tidak Terduga Rp1.451.400.000,00
3. Transfer Kabupaten Luwu Timur dianggarkan sebesar Rp198.662.314.090,00 dan terealisasi Rp198.386.274.819,00 atau mencapai 99,86% terdiri dari :
 - a. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp19.722.629.773,00
 - b. Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Rp178.663.645.046,00
4. Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar Rp72.907.296.644,25 yaitu 100% dari anggaran yang ditargetkan. Penerimaan Pembiayaan Daerah diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2020, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun 2021 dianggarkan Rp6.000.000.000,00 dan terealisasi 100%. Pengeluaran Pembiayaan tersebut adalah Penyertaan Modal ke PDAM Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp 3.000.000.000,00 dan ke bank Sulselbar Sebesar Rp3.000.000.000,00.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 sebesar Rp113.846.853.327,37 yang terdiri dari :
 - a. Saldo akhir Kas BUD sebesar Rp108.749.071.589,63, terdiri dari :
 1. Sisa Dana Non Sertifikasi Guru Rp107.700.000,00;
 2. Sisa DAK Non Fisik Rp8.249.051.557,00;
 3. Sisa DAK Fisik Rp923.229.262,00;
 4. SiLPA Murni Tahun 2021 Rp99.469.090.770,63
 - b. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp108.614.350,00;
 - c. Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp0,00;
 - d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah senilai Rp2.606.474.356,00;
 - e. Kas di Bendahara FKTP/JKN senilai Rp296.236.532,74;
 - f. Kas di Bendahara BOS senilai Rp86.456.499,00;
 - g. Setara Kas (Rekening Deposito BLUD) senilai Rp2.000.000.000,00.



Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 untuk membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021.

